BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN
KABUPATEN LEBAK

LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN DOKUMEN KAJIAN TEKNOKRATIK RPJMD KABUPATEN LEBAK 2025 - 2029

SAPPK

SEKOLAH ARSITEKTUR,
PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

2024

KATA PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengatur bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional untuk jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, Kabupaten Lebak melakukan Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 sebagai salah satu tahapan dalam persiapan penyusunan RPJMD. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Laporan akhir ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian kegiatan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam rangkaian kegiatan ini.

Tim Penyusun

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR GAMBAR v
DAFTAR TABEL vii
BAB 1 PENDAHULUAN 2
1.1 Latar Belakang 2
1.2 Dasar Hukum 3
1.3 Hubungan Antar Dokumen 5
1.4 Maksud dan Tujuan 7
1.4.1 Maksud 7
1.4.2 Tujuan 7
1.5 Sistematika Penulisan 8
BAB 2 GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WILAYAH 9
2.1 Aspek Geografi dan Demografi 9
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah 9
2.1.2 Wilayah Rawan Bencana 21
2.1.3 Daya Dukung Lingkungan Hidup 24
2.1.4 Kawasan Strategis 30
2.1.5 Kondisi Kependudukan 31
2.2 ` Aspek Kesejahteraan Masyarakat 33
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi 33
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial 36
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga 41
2.3 Aspek Daya Saing Daerah 42
2.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah 42
2.3.2 Fokus Sumber Daya Manusia 50
2.3.3 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur 51
2.3.4 Fokus Iklim Berinvestasi 52
2.4 Aspek Pelayanan Umum 53
2.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib 53
2.4.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan 113
BAB 3 GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH 125
3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 126
3.1.1 Pendapatan Asli Daerah 126
3.1.2 Pendapatan Transfer 128
3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 130
3.1.4 Evaluasi terhadap Kinerja Pendapatan Asli Daerah 130
3.2 Arahan Kebijakan Belanja Daerah 135
3.2.1 Belanja Operasi 135

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

3.2.2 Belanja Modal 138
3.2.3 Belanja Tak Terduga 140
3.2.4 Belanja Transfer 140
3.3 Analisis Kebijakan Pembiayaan Daerah 143
BAB 4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH 144
4.1 Pemetaan Permasalahan Pembangunan 144
4.1.1 Klaster – Sosial Budaya 144
4.1.2 Klaster – Infrastruktur dan Lingkungan 150
4.1.3 Klaster – Pemerintahan 160
4.1.4 Klaster – Ekonomi 166
4.2 Pemetaan Isu Strategis Daerah 173
4.2.1 Klaster – Sosial Budaya 173
4.2.2 Klaster - Infrastruktur dan Lingkungan 182
4.2.3 Klaster - Pemerintahan 192
4.2.4 Klaster – Ekonomi 197
4.3 Identifikasi Isu Global, Nasional, dan Regional 205
4.3.1 Isu Global 205
4.3.2 Isu/Kebijakan Nasional 209
4.3.3 Isu/Kebijakan Regional 213
4.4 Identifikasi Isu-Isu Pembangunan Kabupaten Lebak 218
4.4.1 Isu dalam Dokumen Kebijakanan Pembangunan dan Penataan Ruang Kab. Lebak. 218
4.4.2 Identifikasi Isu Strategis Hasil Penstrukturan Permasalahan Pembangunan 221
BAB 5 REKOMENDASI 223
5.1 Tujuan dan Sasaran 223
5.1.1 Arahan dalam Visi RPJPD 223
5.1.2 Arahan dalam Misi RPJPD 224
5.1.3 Tujuan 225
5.1.4 Sasaran 226
5.1.5 Arah Kebijakan RPJPD Tahap 1 226
5.1.6 Rencana Strategis Daerah 228
5.2 Kebijakan dan Strategi Pembangunan 229
5.3 Kerangka Pendanaan 234
5.3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan 234
5.3.2 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah 243
5.3.3 Kebijakan Alokasi Anggaran 245
5.4 Kinerja Pemerintahan 246
5.4.1 Program Pembangunan Daerah 246
5.4.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, dan Target Pembangunan Daerah 283
BAB 6 PENUTUP 393

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1 Rancangan Teknokratik dalam Penyusunan RPJMD 7
Gambar 2-1 Peta Administrasi Kabupaten Lebak..... 10
Gambar 2-2 Peta Kemiringan Kabupaten Lebak..... 13
Gambar 2-3 Peta Geologi Kabupaten Lebak 15
Gambar 2-4 Peta Hidrologi Kabupaten Lebak 17
Gambar 2-5 Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Lebak 18
Gambar 2-6 Peta Curah Hujan Kabupaten Lebak..... 19
Gambar 2-7 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Lebak 21
Gambar 2-8 Peta Kerentanan Banjir Kabupaten Lebak..... 23
Gambar 2-9 Peta Kerentanan Gempa Bumi Kabupaten Lebak 23
Gambar 2-10 Peta Kerentanan Longsor Kabupaten Lebak 24
Gambar 2-11 Peta daya dukung lingkungan hidup untuk penyediaan air..... 25
Gambar 2-12 Peta Daya Lingkungan Hidup untuk Penyediaan Pangan 26
Gambar 2-13 Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup untuk Pengaturan Iklim 27
Gambar 2-14 Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup untuk Pengaturan Tata Air 28
Gambar 2-15 Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup untuk Pemurnian Air 29
Gambar 2-16 Peta daya dukung lingkungan hidup untuk perlindungan terhadap (a) longsor, (b) kebakaran hutan dan lahan 30
Gambar 2-17 Piramida Penduduk Tahun 2023..... 33
Gambar 2-18 Perkembangan Perkembangan Indikator Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Tahun 2019 – 2023 36
Gambar 2-19 Perkembangan Indikator Kesehatan dan Sosial Pada Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 – 2023 39
Gambar 2-20 Perkembangan Indikator Kesehatan Tahun 2019 – 2023..... 39
Gambar 2-21 Perkembangan Indikator Seni Budaya dan Olahraga Tahun 2019 – 2023..... 42
Gambar 2-22 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten Tahun 2019 – 2023 43
Gambar 2-23 24Nilai dan Posisi PDRB per Kapita Kabupaten Lebak Tahun 2019 – 2023..... 46
Gambar 2-25 Persentase Pengangguran Terbuka Kabupaten Lebak Tahun 2019 – 2023..... 47
Gambar 2-26 Realisasi Investasi Kabupaten Lebak Tahun 2019 – 2023..... 52
Gambar 2-27 Perkembangan Indikator Urusan Pendidikan Tahun 2019 – 2023..... 55
Gambar 2-28 Perkembangan Indikator Urusan Pendidikan Tahun 2019 – 2023..... 56
Gambar 2-29 Perkembangan Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2019 – 2023 63
Gambar 2-30 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lebak Tahun 2019 – 2023 67
Gambar 2-31 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan (Km) 2019 - 2022 68
Gambar 2-32 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan (Km) 2019 - 2023 69
Gambar 2-33 Perkembangan Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 – 2023 72
Gambar 2-34 Perkembangan Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019 – 2023 74
Gambar 2-35 Perkembangan Indikator Urusan Sosial Tahun 2019 – 2023..... 77

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Gambar 2-36 Penduduk yang Bekerja dan Pengganggguran 82
Gambar 2-37 Jenis Kegiatan Utama Warga Kabupaten Lebak Berdasarkan Jenis Kelamin 84
Gambar 2-38 Perkembangan Indikator Urusan Lingkungan Hidup 92
Gambar 2-39 Perkembangan Indikator Urusan Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 – 2023 94
Gambar 2-40 Perkembangan Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Tahun 2019 – 2023 98
Gambar 2-41 Perkembangan Indikator Urusan Perpustakaan Tahun 2019-2022 111
Gambar 2-42 Perkembangan Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019 – 2023 116
Gambar 2-43 Luas Tanam (HA) Pertanian 120
Gambar 3-1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Lebak Tahun 2016-2020 131
Gambar 3-2 Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Lebak Tahun 2016 – 2020 132
Gambar 4-1 Pohon Masalah Klaster Sosial Budaya 181
Gambar 4-2 Pohon Masalah Klaster Infrastruktur 191
Gambar 4-3 Pohon Masalah Klaster Pemerintahan 196
Gambar 4-4 Pohon Masalah Klaster Ekonomi 204
Gambar 4-5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 206
Gambar 4-6 Isu Strategis Daerah 222
Gambar 5-1 Tahapan dan Tema RPJPD Kabupaten Lebak Tahun 2025 - 2045 225
Gambar 5-2 Keterkaitan antara Arah Kebijakan dan Rekomendasi Kinerja RPJPD Tahap-1 dan Indikasi Intervensi dalam RPJMD 228
Gambar 5-3 Kerangka Analisis Proteyeksi Pendapatan Daerah 235
Gambar 5-4 Kerangka Analisis Proyeksi Belanja Daerah 238
Gambar 5-5 Kerangka Analisis Proteksi Pembiayaan Daerah 241

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kondisi Geografis Kabupatan Lebak Tahun 2023 9
Tabel 2.2 Kondisi Topografi Kabupatan Lebak Tahun 2023 11
Tabel 2.3 Kemiringan Lahan Kabupatan Lebak Tahun 2023 12
Tabel 2.4 Geologi dan Jenis Tanah di Kabupaten Lebak Tahun 2023 14
Tabel 2.5 Hidrogeologi Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan Tahun 2023 16
Tabel 2.6 Curah Hujan Kabupaten Lebak Tahun 2023 19
Tabel 2.7 Penggunaan Lahan Kabupaten Lebak Tahun 2023 20
Tabel 2.8 Rawan Bencana Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan Tahun 2023 22
Tabel 2.9 Kepadatan Penduduk Tahun 2023 32
Tabel 2.10 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Fokus Kesejahteran dan Pemerataan Ekonomi Tahun 2023 33
Tabel 2.11 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2023 37
Tabel 2.12 Temuan Permasalahan Fokus Kesejahteraan Sosial 40
Tabel 2.13 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Fokus Seni Budaya dan Olahraga Tahun 2023 41
Tabel 2.14 44
Tabel 2.15 Nilai dan Kontribusi Sektor pada PDRB ADHB Kabupaten Lebak Tahun 2019 – 2023 (dalam Juta Rupiah) 45
Tabel 2.16 Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Lebak Tahun 2019 – 2023 46
Tabel 2.17 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Tahun 2023 48
Tabel 2.18 Tingkat Ketergantugan Kabupaten Lebak 51
Tabel 2.19 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Tahun 2023 51
Tabel 2.20 Realisasi Investasi Kabupaten Lebak Tahun 2021 – 2023 (dalam Juta Rupiah) 53
Tabel 2.21 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Fokus Iklim Berinvestasi 53
Tabel 2.22 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Pendidikan Tahun 2023 .. 53
Tabel 2.23 56
Tabel 2.24 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Kesehatan Tahun 2023 .. 59
Tabel 2.25 Temuan Permasalahan Urusan Kesehatan 64
Tabel 2.26 Panjang Jalan Kabupaten di Kabupaten Lebak berdasarkan Jenis Permukaan (Km) Tahun 2019 – 2023 68
Tabel 2.27 Panjang Jalan Kabupaten di Kabupaten Lebak berdasarkan Kondisi Jalan (Km) Tahun 2019 – 2023 69
Tabel 2.28 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 70
Tabel 2.29 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023 71
Tabel 2.30 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 73
Tabel 2.31 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Sosial Tahun 2023 75

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tabel 2.32 Temuan Permasalahan Urusan Sosial 77
Tabel 2.33 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Tenaga Kerja 81
Tabel 2.34 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 82
Tabel 2.35 Temuan Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 85
Tabel 2.36 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2023 88
Tabel 2.37 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Pertanahan Tahun 2023 89
Tabel 2.38 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023 90
Tabel 2.39 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2023 93
Tabel 2.40 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 94
Tabel 2.41 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 96
Tabel 2.42 Temuan Permasalahan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 99
Tabel 2.43 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Perhubungan Tahun 2023 101
Tabel 2.44 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 103
Tabel 2.45 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2023 105
Tabel 2.46 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Statistik Tahun 2023 107
Tabel 2.47 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Persandian Tahun 2023 107
Tabel 2.48 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Kebudayaan Tahun 2023 108
Tabel 2.49 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Perpustakaan Tahun 2023 110
Tabel 2.50 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Kearsipan Tahun 2023.. 112
Tabel 2.51 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023 113
Tabel 2.52 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Perhubungan Tahun 2023 113
Tabel 2.53 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 114
Tabel 2.54 Temuan Permasalahan Urusan Kepemudaan dan Olahraga 116
Tabel 2.55 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Kealutan dan Perikanan Tahun 2023 118
Tabel 2.56 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Pertanian dan Peternakan Tahun 2023 119
Tabel 2.57 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Perdagangan Tahun 2023 121

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tabel 2.58 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Perindustrian Tahun 2023 123
Tabel 2.59 Destinasi Wisata di Kabupaten Lebak Tahun 2023 124

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi tersebut dibagi atas daerah kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintah daerah. Pemerintahan daerah yang dimaksud ialah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagaimana juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk melakukan penyusunan perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional untuk jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam suatu massa kepemimpinan kepala daerah direncanakan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU No. 25 Tahun 2004 dan Pasal 262 UU No. 23 Tahun 2014. RPJMD memuat penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Sebagai suatu bentuk rencana pembangunan daerah, RPJMD perlu disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan daerah setelah berakhirnya Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024, maka selanjutnya diperlukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 -2029. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, Kabupaten Lebak melakukan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 sebagai salah satu tahapan dalam persiapan penyusunan RPJMD. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Selain itu, seperti yang diamanatkan Permendagri No 7 Tahun 2018, proses penyusunan Rencana Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus dilakukan bersamaan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal ini bertujuan agar persiapan lebih matang terkait pembangunan berkelanjutan dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan RPJMD. Diharapkan hasil KLHS dapat menjadi masukan berharga dalam penyempurnaan RPJMD untuk lima tahun ke depan. Integrasi antara dokumen perencanaan RPJMD dan rekomendasi KLHS diharapkan akan memberikan dampak positif bagi masyarakat

Kabupaten Lebak dan mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lebak.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Kajian Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) ini adalah sebagai berikut:

1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Negara Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8) Undang – Undang Nomor 23 dan Undang – Undang Cipta Kerja diganti menjadi : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 nomor 245, tambahan lembaran Negara nomor 6573);

DRAFT, TIDAK UNTUK DICOPY

11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
13) Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018 Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6323);
16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
18) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
22) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
23) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
28) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
29) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023 -2043;
30) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2019 Nomor 10);
31) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 9 Seri E);
32) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034;
33) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 – 2043;
34) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lebak Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 19);
35) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak;
36) Peratutan Bupati Lebak Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan nasional maupun daerah menghasilkan 3 (tiga) rencana, yaitu rencana pembangunan jangka daerah, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Dalam tingkat daerah, rencana tersebut diwujudkan dalam 3 (tiga) dokumen, yaitu :

1) **RPJP Daerah** yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional.
2) **RPJM Daerah** merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional,

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

3) **RKPD** merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD dalam periode 5 tahun yang sama dengan RPJMD. Kemudian, Renstra SKPD menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja SKPD yang dilakukan setiap tahun. Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RPJMD tidak hanya berkaitan dengan RPJPD, namun berpedoman pula pada RTRW. RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. Penyelerasan antara RPJMD dengan RTRW dilakukan dengan penyelarasan antara sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah Daerah dengan tujuan, kebijakan, serta rencana struktur dan rencana pola ruang wilayah.

Sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan dilaksanakan dalam penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan dilakukan dengan penelaahan terhadap dokumen perencanaan pembangunan nasional dan pembangunan Daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah, pembangunan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota, serta pembangunan antar Daerah.

Berdasarkan Tata Perencanaan Pembangunan Daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, disebutkan perencanaan pembangunan daerah disusun dengan berorientasi pada proses. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah disusun dengan 4 macam pendekatan yaitu:

- Teknokratik: menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- Partisipatif: penyusunan dengan pelaksanaan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
- Politis: dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah yang terpilij ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas Bersama dengan DPRD;

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

- Atas-Bawah/Bawah-Atas: merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Provinsi, hingga Nasional.

Dalam pelaksanaan pekerjaan kali ini penyusunan RPJMD dilakukan dengan pendekatan teknokratik yang memfokuskan pada penggunaan metode ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah.

Tahapan penyusunan Rancangan Teknokratik ini merupakan bagian dari **Tahap Persiapan Penyusunan RPJMD** dalam Tata Cara Penyusunan RPJMD. Tedapat 6 tahapan dalam tata cara penyusunan RPJMD: (1) Persiapan Penyusunan RPJMD; (2) Penyusunan Rancangan Awal RPJMD; (3) Penyusunan Rancangan RPJMD, (4) Pelaksanaan Musrenbang RPJMD, (5) Perumusan Rancangan Akhir RPJMD, dan (6) Penetapan RPJMD. Dalam penyusunan rancangan Teknokratik RPJMD terdapat 5 keluaran:

1. Analisis gambaran umum kondisi Daerah
2. Perumusan gambaran keuangan Daerah
3. Perumusan permasalahan pembangunan Daerah
4. Penelaahan dokumen perencanaan lainnya
5. Perumusan isu strategis Daerah.

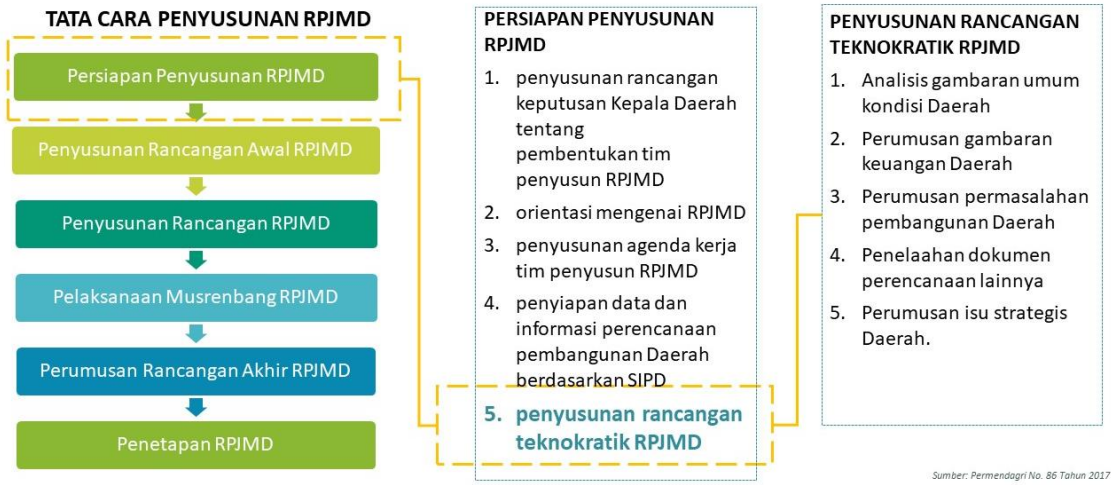

Gambar 1-1 Rancangan Teknokratik dalam Penyusunan RPJMD
Sumber: Permendagri nomor 86 Tahun 2017

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maksud dari penyusunan Kajian Dokumen Teknokratik RPJMD ini yaitu menyediakan kajian awal secara teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah yang baru sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan awal maupun akhir RPJMD Kab Lebak 2025-2029.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan kajian teknokratik RPJMD Kabupaten Lebak 2025-2029 yaitu:

DRAFT UNTUK DISCOPY

1. Menjadi pedoman serta kajian awal arah pembangunan yang akan dicapai daerah oleh Kepala Daerah yang akan dipilih, beserta aparatur pemerintah daerah maupun DPRD.
2. Menyediakan pedoman dan kajian awal untuk tolak ukur (Indikator) dan melakukan evaluasi kinerja oleh setiap perangkat daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Antara Penyusunan Kajian Teknokratik RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 ini terdiri dari 4 (empat) bab sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Berisi penjabaran mengenai latar belakang pekerjaan, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, dan maksud tujuan pekerjaan.

Bab 2 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Berisi penjelasan gambaran umum kondisi Kabupaten Lebak yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daera

Bab 3 Gambaran Umum Keuangan Daerah

Berisi penjelasan gambaran umum keuangan Kabupaten Lebak yang meliputi kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, dan kerangka pendanaan.

Bab 4 Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Berisi tentang pemetaan permasalahan- permasalahan yang dihadapi di Kab. Lebak serta pemetaan terkait isu strategis daerah.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

BAB 2
GAMBARAN UMUM DAN KONDISI WILAYAH

Pada subbab ini akan membahasa terkait aspek fisik lingkungan, aspek sosial budaya, aspek ekonomi wilayah dan aspek tata kelola pemerintah.

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Lebak secara geografis terletak di antara 105^{0}25' – 106^{0}30'Bujur Timur dan 6^{0}18' – 7^{0}00' Lintang Selatan. Dengan bentang alam yang cukup luas tersebut Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah mencapai 330.507,2 hektar atau sekitar 3.305,07 km^2. Luas wilayah Kabupaten Lebak ini mencapai kurang lebih 34,20% dari luas Provinsi Banten. Kabupaten Lebak terletak di bagian Selatan Provinsi Banten, yang bersebelahan dengan Kabupaten Pandeglang sebagai batas bagian Baratnya. Bentuk wilayah yang membujur dari Utara ke Selatan, menghubungkan Kabupaten Lebak dengan Kabupaten Serang dan sebagian dengan Kabupaten Tangerang di batas bagian Utaranya. Di bagian Timurnya berbatasan dengan dua kabupaten paling barat Provinsi Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Sementara pada bagian Selatannya, Kabupaten Lebak terkoneksi langsung dengan Samudera Indonesia sehingga memiliki wilayah laut sekitar 73,3 km^2 dengan panjang pantai mencapai 91,42 km^2.

Secara administratif dibagi dalam 28 kecamatan, terdiri dari 340 desa dan 5 kelurahan. Kelima kelurahan yang ada hanya terdapat di Kecamatan Rangkasbitung yang merupakan Ibukota Kabupaten Lebak. Di samping itu, terdapat pula sekira 5.995 Rukun Tetangga (RT) dan 1.680 Rukun Warga (RW) yang merupakan perangkat masyarakat yang membantu memfasilitasi sebagian fungsi pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat RT maupun RW sehingga mampu mereduksi problem aksesibilitas secara geografis. Kecamatan Cibeber merupakan kecamatan dengan wilayah terluas yaitu sekitar 40.096,41 Ha atau sekitar 12,13% dari luas wilayah Kabupaten Lebak. Cibeber juga merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak, yaitu 22 desa. Sementara kecamatan dengan luas wilayah paling terkecil adalah Kecamatan Kalanganyar yang hanya sekitar 0,87% dari luas wilayah Kabupaten Lebak, atau sekitar 2.859,34 Ha. Kalanganyar juga termasuk kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan paling sedikit (7 desa), setelah Kecamatan Lebakgedong. Tabel 2.1 memberikan gambaran tentang rincian jumlah desa/kelurahan dan luas wilayah serta persentase luas wilayah masing-masing kecamatan dimaksud di atas.

Tabel 2.1 Kondisi Geografis Kabupatan Lebak Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Cibeber	22	207	49	40.096,41	12,13
2	Cimarga	17	196	49	18.752,65	5,67
3	Panggarangan	11	208	67	17.715,51	5,36
4	Banjarsari	20	139	49	15.955,50	4,83
5	Cileles	12	255	88	15.388,76	4,64

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW	Luas (Ha)	Persentase (%)
6	Cigemblong	9	166	85	15.304,93	4,63
7	Bayah	11	291	134	14.377,21	4,35
8	Leuwidamar	12	119	32	14.305,09	4,33
9	Gunungkencana	12	108	30	13.801,50	4,18
10	Cihara	9	301	75	12.469,86	3,77
11	Cirinten	10	214	60	12.254,92	3,71
12	Cijaku	10	155	51	11.468,42	3,47
13	Wanasalam	13	141	38	11.419,02	3,45
14	Sobang	10	170	53	11.149,34	3,37
15	Sajira	15	300	73	10.466,64	3,17
16	Malingping	14	163	40	10.201,47	3,09
17	Cilograng	10	205	39	9.601,71	2,91
18	Bojongmanik	9	270	54	9.591,83	2,90
19	Curugbitung	10	84	17	9.317,33	2,82
20	Lebakgedong	6	243	64	9.159,98	2,77
21	Muncang	12	306	93	8.695,38	2,63
22	Maja	14	207	49	7.817,14	2,37
23	Rangkasbitung	16	246	58	7.309,70	2,21
24	Cipanas	14	275	67	6.525,30	1,97
25	Cikulur	13	539	136	6.182,97	1,87
26	Warunggunung	12	129	39	4.736,53	1,43
27	Cibadak	15	225	54	3.632,71	1,10
28	Kalanganyar	7	133	37	2.859,34	0,87
	Kabupaten Lebak	345		5.995	330.507,2	100,00

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 - 2043

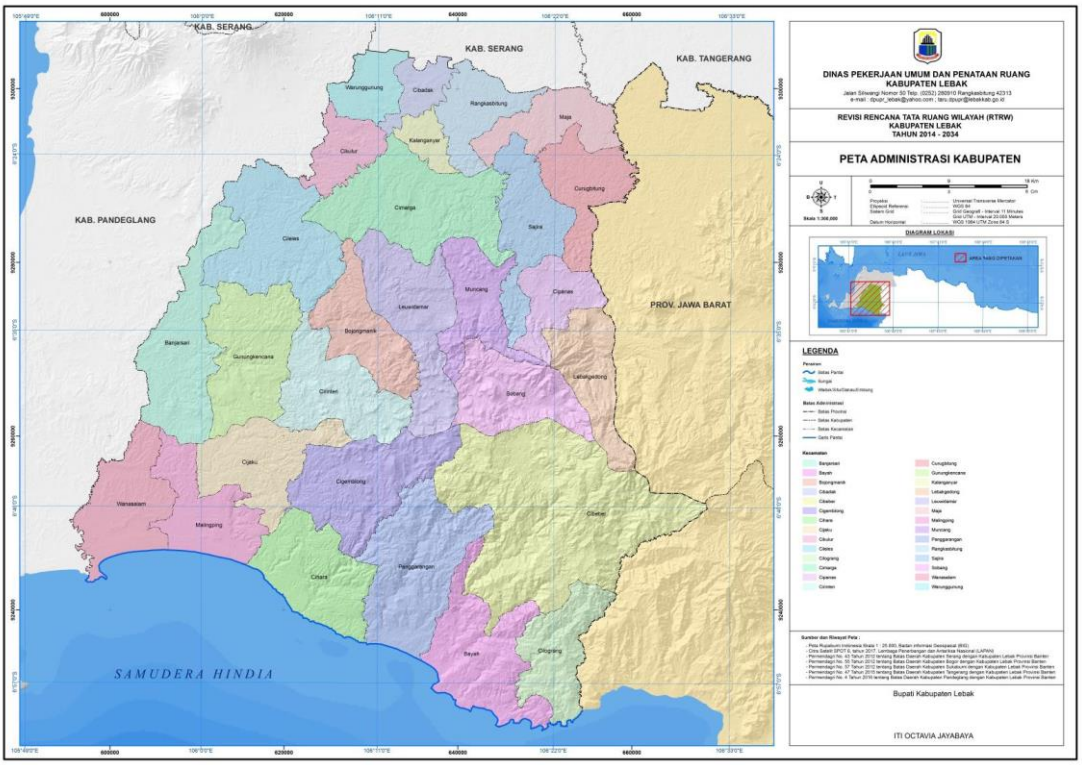

Gambar 2-1 Peta Administrasi Kabupaten Lebak

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 - 2043

DRAFT UNTUK FOTOCOPY

2.1.1.2 Kondisi Topografi

Secara topografi cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi hingga dataran yang relatif rendah di bagian utara dan selatan, dengan ketinggian berkisar antara 100 meter hingga di atas 1.000 meter dari permukaan laut. Daerah dengan ketinggian antara 100 meter sampai 500 meter diatas permukaan laut meliputi sekitar 80%, kawasan yang berada pada ketinggian 500 meter sampai 1.000 meter meliputi 16 dan kawasan yang berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter sekitar 4% dari luas keseluruhan. Ketinggian wilayah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelas ketinggian, yaitu:

- Ketinggian antara 100-500 meter diatas permukaan air laut, tersebar di Kecamatan Banjarsari, Bayah, Bojongmanik, Cibadak, Cibeber, Cigemblong, Cihara, Cijaku, Cikulur, Cileles, Cilograng, Cimarga, Cipanas, Cirinten, Curugbitung, Gunungkencana, Kalanganyar, Lebakgedong, Malingping, Muncang, Panggarangan, Rangkasbitung, Maja, Wanasalam, Warunggunung, dan Kalanganyar.
- Ketinggian antara 500-1.000 meter diatas permukaan air laut, tersebar di sebagian Kecamatan Bayah, Bojongmanik, Cibeber, Cigemblong, Cijaku, Cileles, Cilograng, Cipanas, Cirinten, Gunungkencana, Lebakgedong, Leuwidamar, Panggarangan, Muncang, Sajira dan Sobang.
- Ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan air laut, tersebar di sebagian kecil Kecamatan Cibeber, Cipanas, Lebakgedong, Muncang dan Sobang. Keadaan topografi berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel 2.2 Kondisi Topografi Kabupaten Lebak Tahun 2023

No	Kecamatan	Topografi (Ketinggian Wilayah) (mdpl)					Luas (Ha)
		0-100	100-200	200-500	500-1000	>1000	
1	Cibeber	16,30	249,71	4.926,78	26.021,80	8.881,82	40,096,41
2	Cimarga	15.794,41	2,786,21	172,03			18,752,65
3	Panggarangan	2.934,25	1.780,78	9.833,92	3.166,57		17.715,51
4	Banjarsari	13.803,26	2.152,24				15.955,50
5	Cileles	10.701,09	4.531,52	105,83	0,32		15.388,76
6	Cigemblong		87,54	9.973,54	5.243,85		15.304,93
7	Bayah	5.117,26	3.505,48	5.415,04	339,43		14.377,21
8	Leuwidamar	2.199,13	6.384,99	4.165,87	1.555,10		14.305,09
9	Gunungkencana	1.810,40	4.980	7.008,88	1,85		13.801,50
10	Cihara	4.319,76	3.941,22	4.208,88			12.469,86
11	Cirinten		403,06	10.512,94	1.338,96		12.254,96
12	Cijaku	406,48	2.776,55	8.178,88	106,50		11.468,42
13	Wanasalam	11.408,40	10,62				11.419,02
14	Sobang			3.730,04	6,731,65	687,65	11.149,34
15	Sajira	5.379,68	4.049,49	1.020,92	16,55		10.466,64
16	Malingping	8.447,82	1.636,43	117,22			10.201,47
17	Cilograng	701,11	1.498,86	5.156,48	2.245,27		9.601,72
18	Bojongmanik	552,81	5.194,13	3.720,09	124,81		9.591,83
19	Curugbitung	7.141,83	2.167,20	8,30			9.317,33
20	Lebakgedong		126,46	2.761,35	3.579,16	2.693,02	9.159,98
21	Muncang	384,54	3.664,69	4.078,26	509,87	58,02	8.695,38
22	Maja	7.817,14					7.817,14
23	Rangkasbitung	7.309,67	0,004				7.309,71
24	Cipanas	41,18	3.827,86	1.691,63	909,00	55,64	6.525,30

DRAFT TIDAK UNTUK DICOPY

No	Kecamatan	Topografi (Ketinggian Wilayah) (mdpl)					Luas (Ha)
		0-100	100-200	200-500	500-1000	>1000	
25	Cikulur	5.575,09	607,88				6.182,97
26	Warunggunung	3.048,09	1.688,44				4.736,53
27	Cibadak	3.632,71					3.632,71
28	Kalanganyar	2.859,34					2.859,34
	Kabupaten Lebak	121.401,73	58.051,76	86.786,85	51.890,69	12.376,14	330.507,2

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 - 2043

Tingkat kemiringan lereng yang ada di Kabupaten Lebak cukup beragam sebagaimana disajikan dalam tabel 2.3 mulai dari kemiringan lereng 0% hingga di atas 40%. Kabupaten Lebak berdasarkan lerengnya terbagi menjadi beberapa kelas, yaitu :

1) 0 – 2%, tersebar di bagian selatan, barat dan utara;
2) 2 – 5%, tersebar di bagian selatan, barat dan utara;
3) 5 – 15%, terletak di bagian tengah dan selatan kearah timur;
4) 15 – 25%, terletak di bagian tengah dan selatan kearah timur;
5) 25 – 40%, terletak di bagian timur;
6) >40%, terletak di bagian timur.

Jika dilihat dari persentase luasannya, kawasan dengan kemiringan 2-15% mendominasi dengan luas sebesar 174.839,84 Ha atau sekitar 52,90% dari luas wilayah Kabupaten Lebak. Sementara itu, luas wilayah paling kecil memiliki kemiringan di atas 40% (3,68%). Kondisi ini menunjukkan bahwa wilayah di Kabupaten Lebak didominasi oleh wilayah dengan kondisi kemiringan lereng kurang dari 25%.

Tabel 2.3 Kemiringan Lahan Kabupatan Lebak Tahun 2023

No.	Kecamatan	Lereng (Kemiringan Lahan)					Total
		0-2%	2-15%	15-25%	25-40%	>40%	
1	Malingping	3.501,62	6.699,84				10.201,47
2	Wanasalam	7.933,32	3.485,70				11.419,02
3	Panggarangan	604,33	7.677,02	8.320,45	1.075,05	38,67	17.715,51
4	Bayah	996,36	5.453,14	6.415,99	1.511,72		14.377,21
5	Cilograng	177,61	2.693,58	6.034,87	695,66		9.601,72
6	Cibeber		2,672,42	6.235,67	23.887,95	7.300,37	40,096,41
7	Cijaku		10.382,92	1.085,49			11.468,42
8	Banjarsari	5.625,57	10.329,93				15.955,50
9	Cileles	1.168,34	14.170,41				15.338,76
10	Gunungkencana	144,93	13.656,57				13.801,50
11	Bojongmanik		7.464,43	2.127,41			9.591,83
12	Leuwidamar		9.989,00	3.378,52	921,99	15,59	14.305,09
13	Muncang		3.709,38	2.795,32	1.453,04	737,64	8.695,38
14	Sobang			1.852,88	7.452,98	1.843,48	11.149,34
15	Cipanas		4.703,95	1.065,33	509,94	246,08	6.525,30
16	Sajira	637,24	9.229,80	599,60			10.466,64
17	Cimarga	1.686,40	16.663,10	403,15			18,752,65
18	Cikulur	2.351,74	3.831,23				6.182,97
19	Warunggunung	2.994,66	1.741,87				4.736,53
20	Cibadak	3.134,19	498,53				3.632,71
21	Rangkasbitung	4.573,24	2.736,47				7.309,71
22	Maja	5.199,86	2.617,28				7.817,14
23	Curugbitung	1.892,77	7.424,56				9.317,33
24	Cihara	689,76	9.256,39	2.523,71			12.469,86
25	Cigemblong		7.416,31	5.511,57	2.377,06		15.304,93

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

No.	Kecamatan	Lereng (Kemiringan Lahan)					Total
		0-2%	2-15%	15-25%	25-40%	>40%	
26	Cirinten		9.237,10	2.907,03	110,83		12.254,96
27	Lebakgedong		56,69	3.510,67	3.614,18	1.978,43	9.159,98
28	Kalanganyar	1.817,11	1.042,23				2.859,34
	Jumlah	45.129,04	174.839,83	54.767,64	43.610,41	12.160,25	330.507,2

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 - 2043

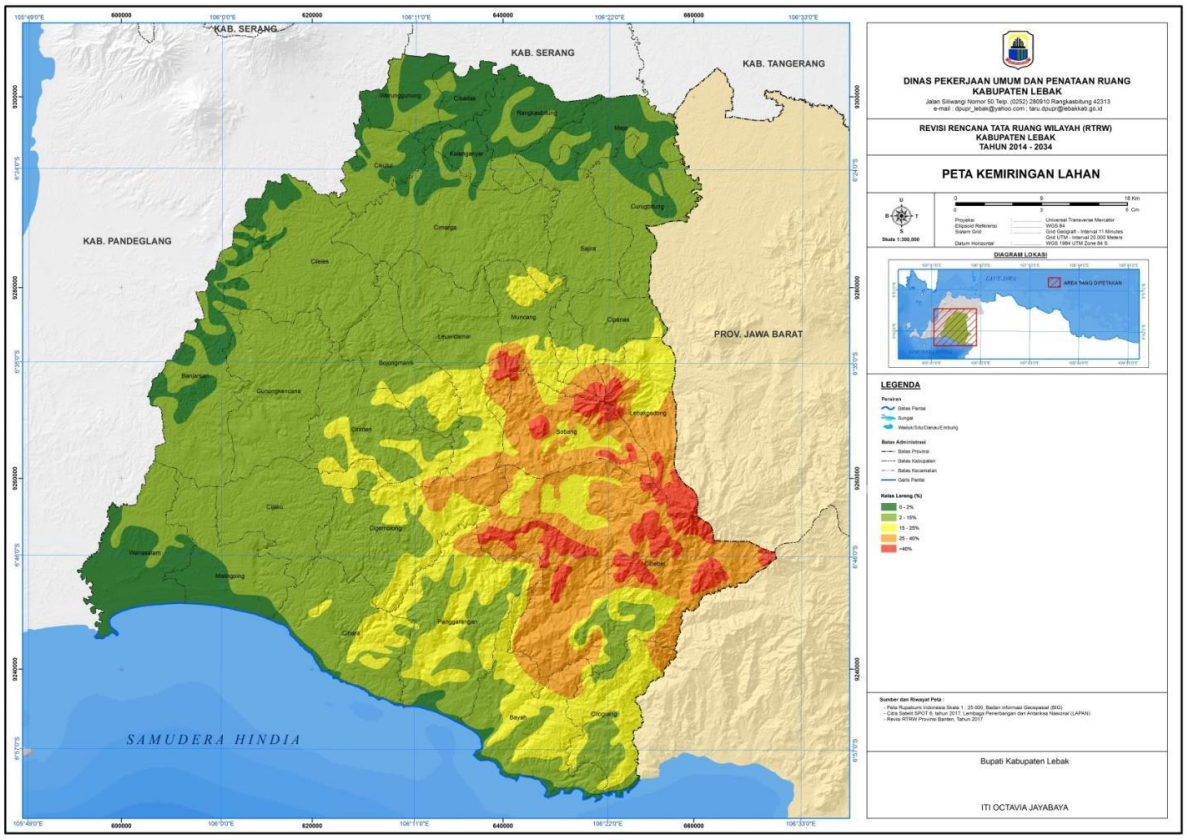

Gambar 2-2 Peta Kemiringan Kabupaten Lebak

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 - 2043

2.1.1.3 Kondisi Geologi

Berdasarkan pengaruh 5 (lima) faktor pembentuk tanah yaitu batuan induk, topografi, umur, iklim, dan vegetasi, maka Kabupaten Lebak secara umum tersusun oleh jenis tanah berikut:

1. Jenis tanah Latosol, jenis tanah ini umumnya tersebar di daerah beriklim basah, curah hujan lebih dari 300 mm/tahun, dan ketinggian tempat berkisar 300 –1.000 meter. Tanah ini terbentuk dari batuan gunung api kemudian mengalami proses pelapukan lanjut, serta agak peka terhadap erosi. Jenis tanah latosol ini terdapat di hamper seluruh kecamatan di Kabupaten Lebak kecuali Kecamatan Curugbitung, Gunungkencana, dan Maja.
2. Jenis tanah Podsolik, berasal dari batuan pasir kuarsa, tersebar di daerah beriklim basah tanpa bulan kering, curah hujan lebih 2.500 mm/tahun. Tekstur lempung hingga berpasir, kesuburan rendah hingga sedang, warna merah, dan kering. Serta mempunyai tingkat kepekaan terhadap erosi yang peka dengan sebaran meliputi hampiur kecamatan kecuali Bayah, Cibeber, Cigemblong, Cilograng, Lebakgedong, Panggarangan dan Sobang.

DRAFT - TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

3. Jenis tanah Alluvial, Andosol, Regosol dna Rensina, tersebar di sebagian kecil di beberapa kecamatan.

Tabel 2.4 Geologi dan Jenis Tanah di Kabupaten Lebak Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jenis Tanah (Ha)						
		Alluvial	Andosol	Latosol	Podsolik	Regosol	Rensina	Luas Ha
1	Banjarsari	637,29		632,85	14.685,36			15.955,50
2	Bayah	527,62		11.712,70			2.136,89	12.240,32
3	Bojongmanik			1.795,22	5.750,32		2.046,30	7.545,53
4	Cibadak	592,85		515,57	2.524,29			3.632,71
5	Cibeber		339,93	39.756,48				40.096,41
6	Cigemblong			15.304,93				15.304,93
7	Cihara			9.467,49	2.994,26	8,11		12.469,86
8	Cijaku			8.342,95	3.125,47			11.468,42
9	Cikulur	92,95		2.289,41	3.800,61			6.182,97
10	Cileles	263,00		1.440,37	13.018,08		617,31	14.721,45
11	Cilograng			8.266,74			1.334,98	8.266,74
12	Cimarga	2.093,94		533,90	16.124,81			18.752,65
13	Cipanas	1,07		2.164,34	2.751,87		1.608,03	4.917,28
14	Cirinten			8.448,76	3.109,80		696,39	11.558,56
15	Curugbitung	715,69			8.601,64			9.317,33
16	Gunung Kencana				13.801,50			13.801,50
17	Kalanganyar	593,05		527,90	1.738,39			2.859,34
18	Lebak Gedong		370,30	8.789,68				9.159,98
19	Leuwidamar			3.921,88	8.966,76		1.416,45	12.888,64
20	Maja	751,56			7.065,28	0,29		7.817,14
21	Malingping	2.034,52		2.979,11	3.934,97	1.252,8		10.201,47
22	Muncang			3.651,95	2.868,49		2.174,94	6.520,44
23	Panggarangan			17.715,51				17.715,51
24	Rangkasbitung	1.497,44		132,67	5.679,59			7.309,70
25	Sajira	1.543,86		435,59	7.537,91		949,28	9.517,35
26	Sobang			11.149,34				11.149,34
27	Wanasalam	3.972,51		2.496,88	4.096,14	689,84	163,65	11.255,36
28	Warunggunung			4.258,26	478,28			4.736,53
Total		**15.317**	**710**	**166.730**	**132.654**	**1.951**	**13.144**	**317.363,00**

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 - 2043

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

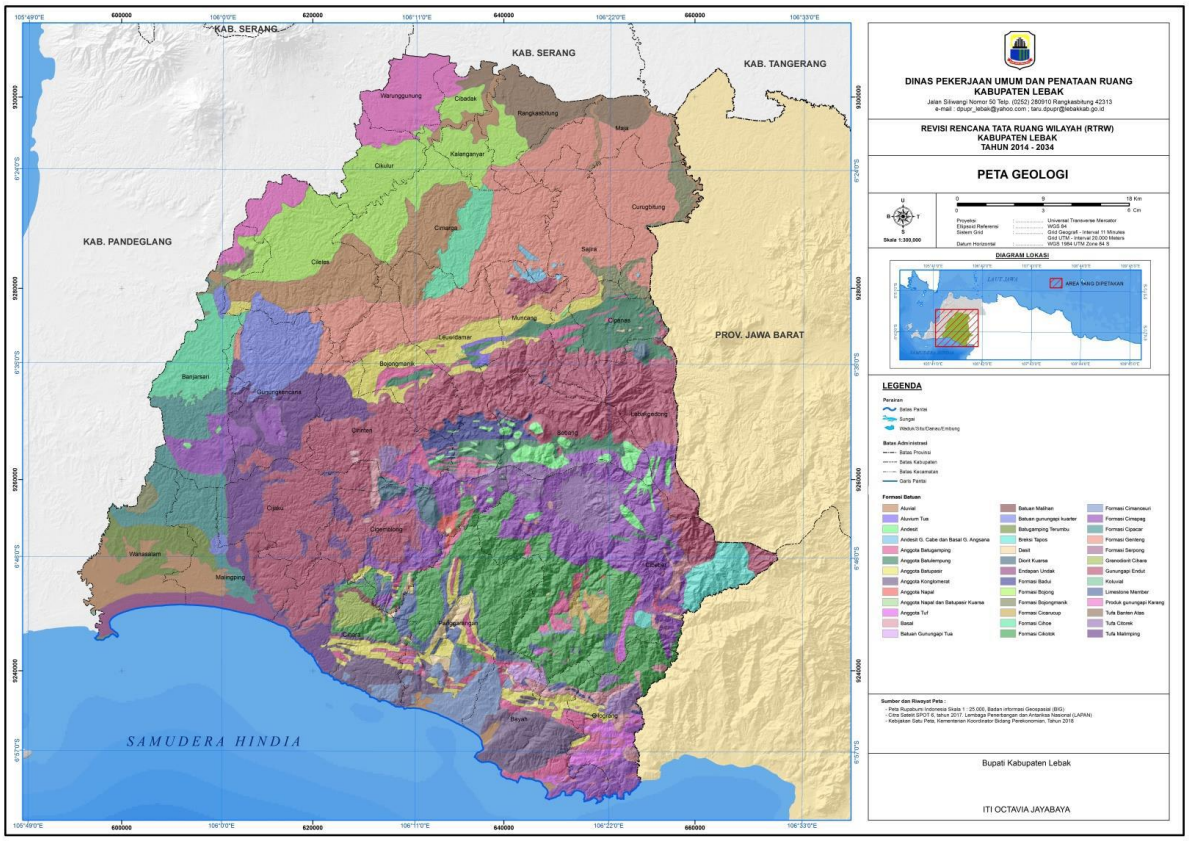

Gambar 2-3 Peta Geologi Kabupaten Lebak

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 - 2043

2.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Kabupaten Lebak memiliki 3 Daerah Aliran Sungai (DAS), meliputi Daerah Aliran Sungai Ciujung, Ciliman, dan Cimandur. Dari ketiga sungai tersebut, terdapat 11 sungai yang bermuara baik di Laut Jawa maupun Samudera Indonesia. sungai-sungai yang bermuara di Laut Jawa diantaranya adalah Sungai Ciujung, Sungai Cilaki, Sungai Ciberang, dan Sungai Cisimeut. Sementara itu, sungai yang bermuara di Samudera Indonesia diantaranya adalah Sungai Ciliman dan anak sungainya, Sungai Cimandur, Sungai Cibareno, Sungai Cisiih, Sungai Cihara, Sungai Cipogar, dan Sungai Cibaliung.

Sungai Ciujung merupakan sungai terbesar di Provinsi Banten, yang melewati 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang. Mata air Sungai Ciujung sangat dilindungi oleh Masyarakat Adat Kanekes karena berada di kawasan hutan Sasaka Buana atau Pada Ageung di bagian selatan kampung Cikeusik dan hutan sakral Sasaka Domas di kawasan hulu Sungai Ciparahiang anak Sungai Ciujung, bagian selatan Kampung Cibeo, Baduy dalam. Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Ciujung mencapai kurang lebih 1850 km^2 dan panjang mencapai 142 km hingga bermuara di Teluk Pontang Kabupaten Serang, Pantai Utara Laut Jawa. DAS Ciujung terdiri dari tiga anak sungai utama yaitu Sungai Cisimeut dengan luas Sub DAS mencapai 458 km^2, Sungai Ciberang dengan luas Sub DAS 304 km^2, Sungai Ciujung Hulu dengan luas Sub DAS 594 km^2 dan anak sungai lainnya yang lebih kecil berada di sebelah hilir kota Rangkasbitung yaitu Sungai Cikambuy, Sungai Cisangu, Sungai Ciasem, Sungai Cibongor, dan Sungai Ciyapah.

DRAFT - TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

Secara Hidrogeologi Kabupaten Lebak terbagi dibagi ke dalam beberapa karakteristik, di antaranya (1) Air tanah dangkal yang berada di bagian barat daya dan timur Kabupaten Lebak; (2) Air tanah terletak di seluruh wilayah kabupaten Lebak (mendominasi); (3) Air tanah yang memancar yang terletak di bagian timur Kabupaten Lebak; dan (4) Wilayah air Bendungan Karian yang terletak di utara Kabupaten Lebak (Kecamatan Cimarga, Maja, Rangkasbitung dan Sajira).
Tabel 2.5 menyajikan data geohidrologi Kabupaten Lebak. Kondisi hidrogeologi yang mendominasi di Kabupaten Lebak adalah air tanah, baik berupa air tanah dangkal maupun air tanah dengan kedalaman sedang. Daerah dengan air tanah sedang cenderung lebih mendominasi jika dibandingkan dengan air tanah dangkal. Luas daerah dengan air tanah sedang mencapai 303.598,63 Ha, lebih luas jika dibandingkan dengan air tanah dangkal (23.385,70 Ha). Karakteristik geohidrologi lain yang terdapat di Kabupaten Lebak adalah rencana DAM Karian dengan luas 2.519,48 Ha dan sumber mata air yang memancar seluas 1.003,35 Ha. Total luas daerah dengan keempat karakteristik hidrogeologi yang terdapat di Kabupaten Lebak adalah sebesar 330,507.16 Ha.

Tabel 2.5 Hidrogeologi Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (dalam Ha)				
		Daerah Air Tanah Yang Dangkal	Daerah Air Tanah Yang Sedang	Rencana DAM Karian	Sumber Mata Air Yang Memancar	Total
1	Banjarsari		15,175.77		779.73	15,955.50
2	Bayah		14,377.21			14,377.21
3	Bojongmanik		9,591.83			9,591.83
4	Cibadak		3,632.71			3,632.71
5	Cibeber	1,069.83	39,026.58			40,096.41
6	Cigemblong		15,304.93			15,304.93
7	Cihara	1,495.63	10,974.23			12,469.86
8	Cijaku	710.96	10,757.46			11,468.42
9	Cikulur		6,182.97			6,182.97
10	Cileles		15,115.13		223.63	15,338.76
11	Cilograng		9,601.72			9,601.72
12	Cimarga		16,958.55	1,794.10		18,752.65
13	Cipanas		6,525.30			6,525.30
14	Cirinten		12,254.96			12,254.96
15	Curugbitung		9,317.33			9,317.33
16	Gunungkencana		13,801.50			13,801.50
17	Kalanganyar		2,859.34			2,859.34
18	Lebakgedong	1,575.29	7,584.69			9,159.98
19	Leuwidamar		14,305.09			14,305.09
20	Maja		7,806.53	10,61		7,817.14
21	Malingping	7,949.77	2,251.70			10,201.47
22	Muncang		8,695.38			8,695.38
23	Panggarangan		17,715.51			17,715.51
24	Rangkasbitung		6,994.54	315.16		7,309.71
25	Sajira		10,067.03	399.61		10,466.64
26	Sobang	684.52	10,464.82			11,149.34
27	Wanasalam	9,899.71	1,519.31			11,419.02

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

No	Kecamatan	Luas (dalam Ha)				
		Daerah Air Tanah Yang Dangkal	Daerah Air Tanah Yang Sedang	Rencana DAM Karian	Sumber Mata Air Yang Memancar	Total
28	Warunggunung		4,736.53			4,736.53
Kabupaten Lebak		**23,385.70**	**303,598.3**	**2,519.48**	**1,003.35**	**330,507.10**

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 – 2043

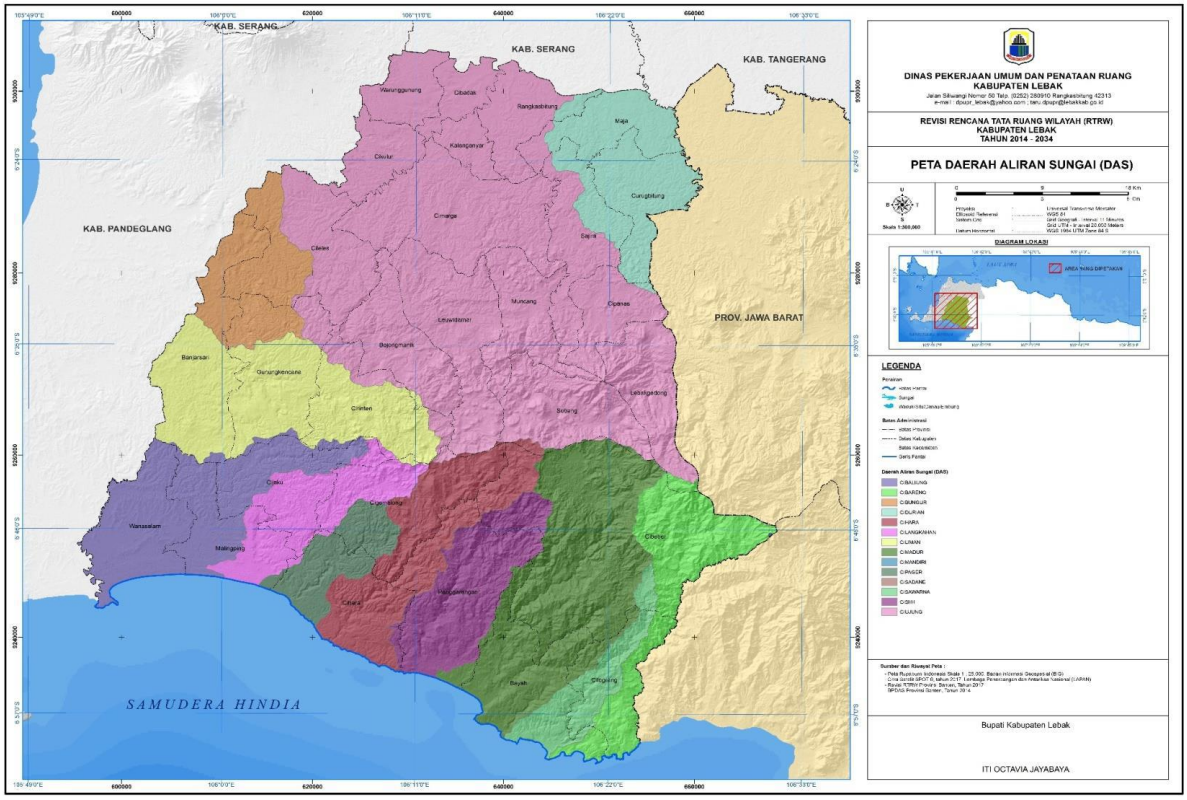

Gambar 2-4 Peta Hidrologi Kabupaten Lebak

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 - 2043

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

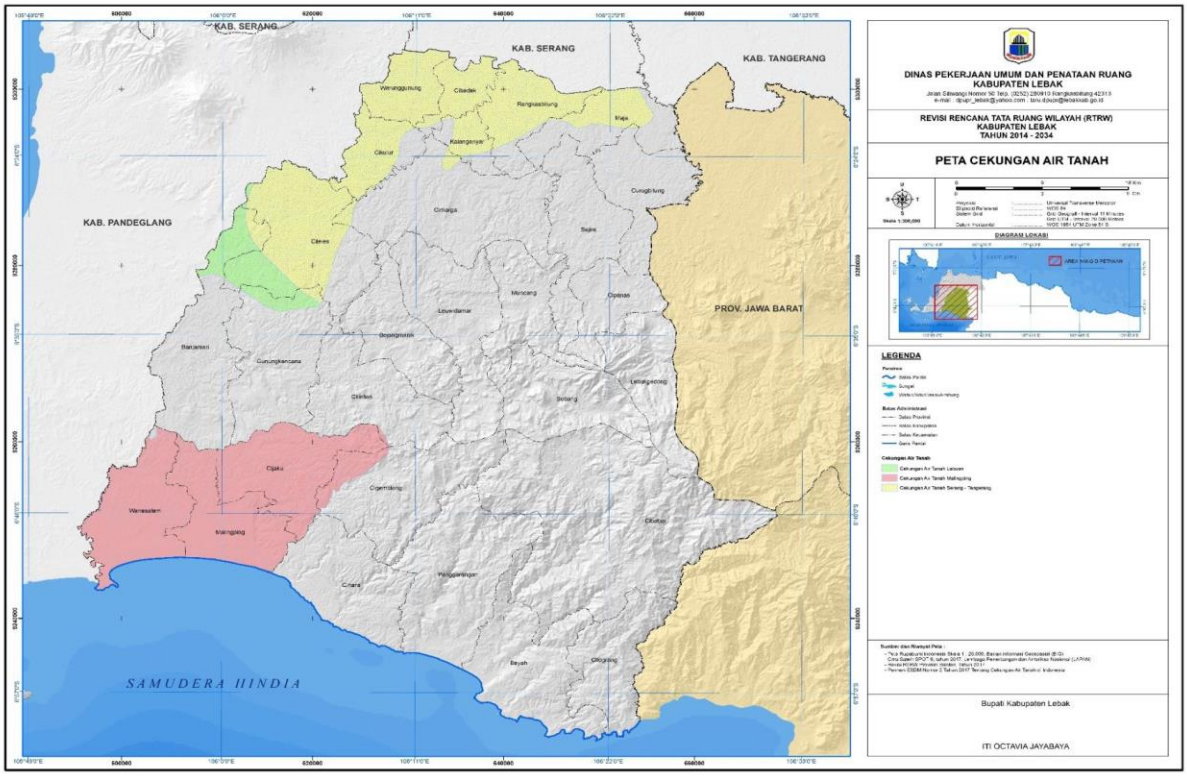

Gambar 2-5 Peta Cekungan Air Tanah Kabupaten Lebak

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 - 2043

2.1.1.5 Kondisi Klimatologi

Kabupaten Lebak terletak di sebelah selatan garis katulistiwa sehingga termasuk dalam wilayah beriklim tropis. Wilayah tropis hanya memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan kemarau. Bulan September – April merupakan musim penghujan, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Mei – Agustus. Hal tersebut terjadi karena wilayah tropis mendapatkan paparan sinar matahari sepanjang tahun sehingga memiliki suhu dan kelembaban udara yang relatif tinggi. Kabupaten Lebak termasuk memiliki curah hujan yang tinggi berkisar antara 100 mm/tahun sampai dengan 300 mm/tahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan desember dan januari yang mencapai hingga lebih dari 350 mm.

Berdasarkan Tabel 3.6 curah hujan Kabupaten Lebak menurut stasiun hujan dapat diamati bahwa tidak terjadi perubahan nilai curah hujan yang ekstrem, artinya tidak terjadi perubahan cuaca dan iklim secara ekstrim dan tiba-tiba yang berubah dari hujan menuju panas atau sebaliknya. Hal ini menandakan masih terkendalinya cuaca dan suhu di Kabupaten Lebak yang disebabkan oleh masih terkendalinya ruang terbuka hijau yang dapat menjaga suhu udara maupun menjaga cuaca wilayah. Terjaganya kawasan hutan wilayah di Kabupaten Lebak juga dapat menjadi penyebab terkendalinya suhu dan cuaca. Dengan curah hujan rata-rata tersebut, Kabupaten Lebak memiliki potensi pengembangan pertanian lahan basah maupun kering, serta pengembangan sektor perkebunan rakyat.

DRAFT - TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

Tabel 2.6 Curah Hujan Kabupaten Lebak Tahun 2023

No	Nama dan Lokasi Stasiun Pengamatan	Curah Hujan (mm) / Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Banjar Irigasi-Cipanas	261	292	370	301	533	186	57	103	101	187	377	435
2	Bojong Leles	273	286	41	261	0	79	32	9	75	65	184	354
3	BPP Sajira	387	341	164	277	210	92	71	62	30	121	273	306
4	Cilaki_Ciminyaki	502	319	158	401	212	62	30	46	12	139	187	494
5	Cisalak Baru	264	250	84	150	0	26	0	0	38	18	138	279
6	Kec. Cimarga	325	307	111	244	224	126	0	48	79	238	271	423
7	Lebak Parahiang	496	281	197	363	290	77	12	68	4	128	254	389
8	Malingping	487	246	415	379	68	60	32	0	0	2	84	331
9	Panyaungan Panggarangan	356	233	327	508	156	98	12	0	0	0	0	0
10	Paris Ona Rangkasbitung	336	332	128	286	97	38	8	19	48	36	185	307

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kabupaten Lebak, 2019

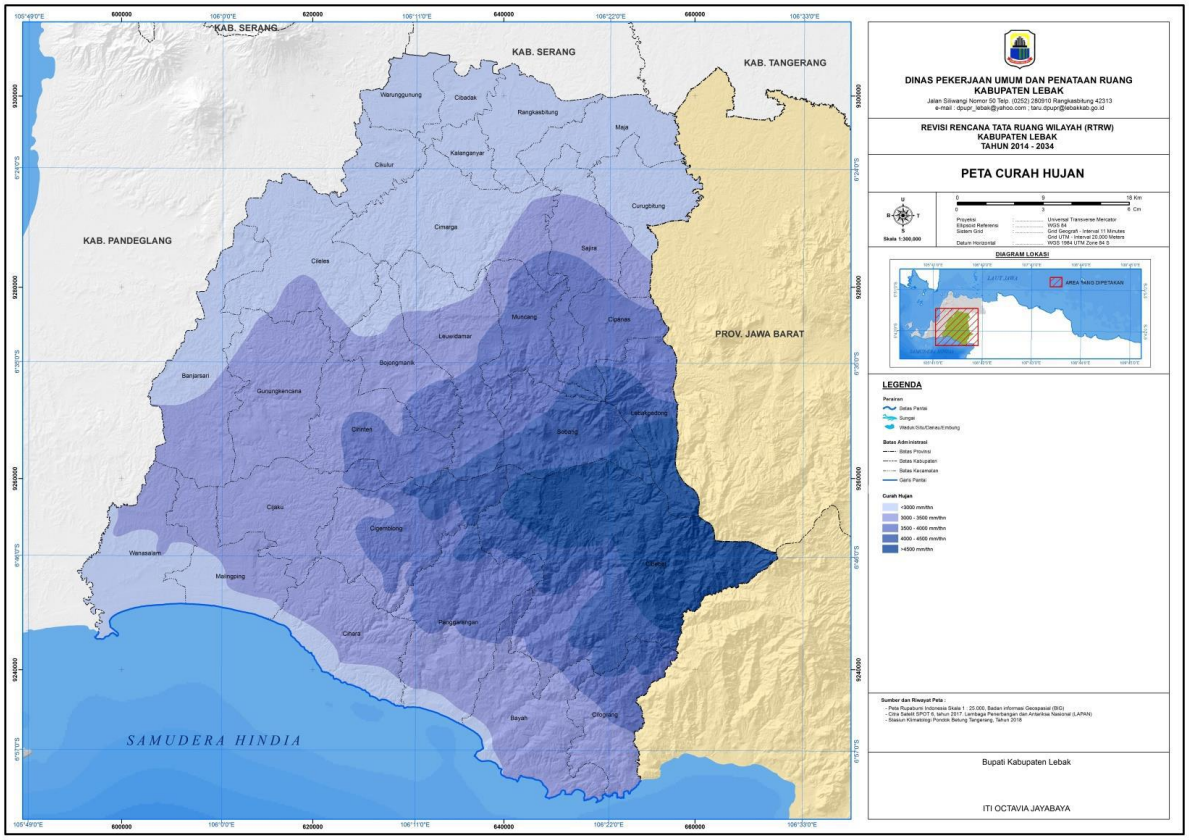

Gambar 2-6 Peta Curah Hujan Kabupaten Lebak

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 - 2043

2.1.1.6 Kondisi Penggunaan Lahan

Lahan merupakan suatu wilayah tertentu di atas permukaan bumi, meliputi semua benda penyusun biosfer yang dapat dianggap bersifat menetap atau berpindah berada di atas wilayah meliputi atmosfer, dan di bawah wilayah tersebut mencakup batuan (bahan induk) topografi, air, tumbuhan-tumbuhan dan binatang, dan berbagai aktivitas kegiatan manusia pada masa lalu maupun sekarang, yang semuanya memiliki pengaruh nyata terhadap penggunaan lahan oleh manusia, pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Sedangkan penggunaan lahan merupakan segala campur tangan manusia, baik secara permanen maupun secara siklus

terhadap suatu kelompok sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang secara keseluruhan disebut lahan, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhannya baik secara kebendaan maupun spiritual ataupun kedua-duanya. Penggunaan lahan juga merupakan interaksi manusia dan lingkungannya, di mana fokus lingkungan adalah lahan sedangkan sikap dan tanggapan kebijakan manusia terhadap lahan akan menentukan langkah-langkah aktivitasnya, sehingga akan meninggalkan bekas di atas lahan sebagai bentuk penggunaan lahan. Penggunaan lahan sangat penting dalam pengelolaan sumber daya maupun lingkungan karena kegiatan manusia akan langsung berhubungan dengan lahan. Kabupaten Lebak memiliki berbagai jenis macam penggunaan lahan yang tersebar pada berbagai wilayah kecamatan.

Penggunaan lahan di Kabupaten Lebak di secara umum dominasi oleh kebun campuran, perkebunan (rakyat dan swasta), persawahan (irigasi dan tadah hujan). Berdasarkan Tabel 2.7 diketahui bahwa penggunaan lahan di Kabupaten Lebak didominasi oleh Kebun Campuran ± 132.507,76 hektar atau 40,09%, diikuti oleh penggunaan lahan sawah irigasi sebesar 50.601,48 hektar atau 15,31 %, hutan belukar 46.093,44 hektar atau 13, 95% dan perkebunan rakyat sebesar 41.292,63 hektar atau 12,49%. Sedangkan, penggunaan lahan paling kecil yaitu terminal, kesehatan, pergudangan, dan lain sebagainya.

Tabel 2.7 Penggunaan Lahan Kabupaten Lebak Tahun 2023

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Belukar	46.093,44	13,95
2	Hutan Lebat	25.255,61	7,64
3	Industri	93,54	0,03
4	KAI	7,86	0,002
5	Kebun Campuran	132.507,76	40,09
6	Kesehatan	4,72	0,001
7	Lahan Kosong	6,94	0,002
8	Lap. Olah Raga	7,11	0,002
9	Padang Rumput	312,75	0,09
10	Pendidikan	269,44	0,08
11	Perdagangan dan Jasa	203,13	0,06
12	Pergudangan	2,91	0,001
13	Perkantoran	38,42	0,01
14	Perkebunan Besar	9.603,99	2,91
15	Perkebunan Rakyat	41.292,63	12,49
16	Permukiman	15.341,58	4,64
17	Pertambangan	167,81	0,05
18	Peternakan	196,64	0,06
19	Rawa	120,74	0,04
20	RTH	16,97	0,01
21	Sawah Irigasi	50.601,48	15,31
22	Sawah Tadah Hujan	51,52	0,02
23	Semak	1.939,91	0,59
24	Sungai Danau	1.806,08	0,55
25	Tanah Rusak	234,17	0,07
26	Tegalan	4.317,13	1,31

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Persentase (%)
27	Terminal	3,78	0,001
28	TPA	9,16	0,003
Total		330.507	100

Sumber : Citra Satelit Tahun 2023

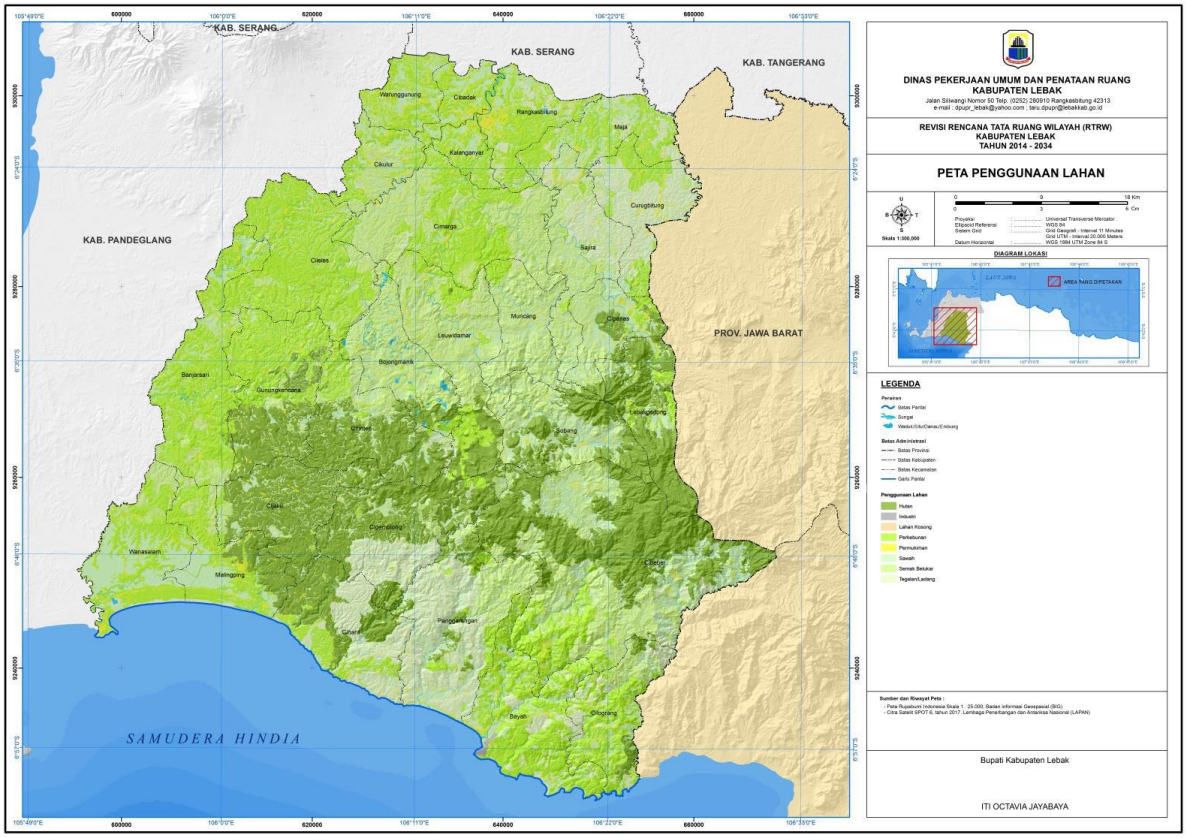

Gambar 2-7 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Lebak

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 - 2043

2.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang meliputi bencana gunung meletus, banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami yang berakibat timbulnya korban jiwa, harta, benda, kerusakan sarana dan prasarana lingkungan hidup, serta fasilitas umum. (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana). Kabupaten Lebak terletak pada daerah pesisir yang memiliki wilayah rawan bencana tsunami dan gempa tektonik akibat tumbukan lempeng. Selain itu, morfologi wilayah bergunung dan dataran tinggi membuat Kabupaten Lebak memiliki wilayah rawan bencana longsor dan banjir. Bencana tanah longsor sering terjadi di Kabupaten Lebak terutama jika musim hujan tiba. Terdapat dua faktor yang menyebabkan sebagian besar kawasan di Kabupaten Lebak masuk kategori rawan bencana tingkat sedang dan tinggi. Pertama adalah faktor alam yang terdiri dari aspek geologi dan tanah, aspek hidrologi dan klimatologi, aspek topografi, dan aspek penutup lahan (vegetasi). Kedua, adalah faktor manusia yang memanfaatkan alam secara tidak bertanggungjawab dan berkelanjutan.

DRAFT - TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

Tabel 2.8 Rawan Bencana Kabupaten Lebak Menurut Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Aman Bencana	Rawan Bencana			Luas Ha
			Longsor	Tergenang	Tsunami	
1	Banjarsari	3.126,51	12.023,09	805,90		15.955,50
2	Bayah		13.004,72		1.372,49	14.377,21
3	Bojongmanik	6.874,68	2.717,16			9.591,83
4	Cibadak	958,00		2.674,72		3.632,71
5	Cibeber	1.444,67	38.651,74			40.096,41
6	Cigemblong	5.806,94	9.497,99			15.304,93
7	Cihara	3.861,49	6.102,64		2.505,72	12.469,86
8	Cijaku	6.044,74	5.257,37	166,31		11.468,42
9	Cikulur	5.852,11		330,87		6.182,97
10	Cileles	14.197,27	1.141,49			15.338,76
11	Cilograng		9.570,30		31,41	9.601,72
12	Cimarga	5.208,41	13.183,32	360,92		18.752,65
13	Cipanas	3.609,16	2.916,14			6.525,30
14	Cirinten	5.235,19	7.019,77			12.254,96
15	Curugbitung	3.317,93	5.999,40			9.317,33
16	Gunung Kencana	11.189,12	2.612,38			13.801,50
17	Kalanganyar	907,47	504,10	1.447,78		2.859,34
18	Lebak Gedong	122,86	9.037,11			9.159,98
19	Leuwidamar	7.301,23	7.003,86			14.305,09
20	Maja	5.951,07	1.862,60	3,46		7.817,13
21	Malingping	42,41	4.521,89	3.089,22	2.547,95	10.201,47
22	Muncang	2.711,83	5.983,54			8.695,38
23	Panggarangan		16.663,91		1.051,61	17.715,51
24	Rangkasbitung	2.573,16	1.497,29	3.239,25		7.309,71
25	Sajira	4.228,34	6.238,29			10.466,64
26	Sobang	1.533,06	9.616,28			11.149,34
27	Wanasalam		156,93	6.590,98	4.671,10	11.419,02
28	Warunggunung	4.667,18		69,35		4.736,53
Total		**106.765**	**192.783**	**18.779**	**12.180**	**330.507**

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 - 2043

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

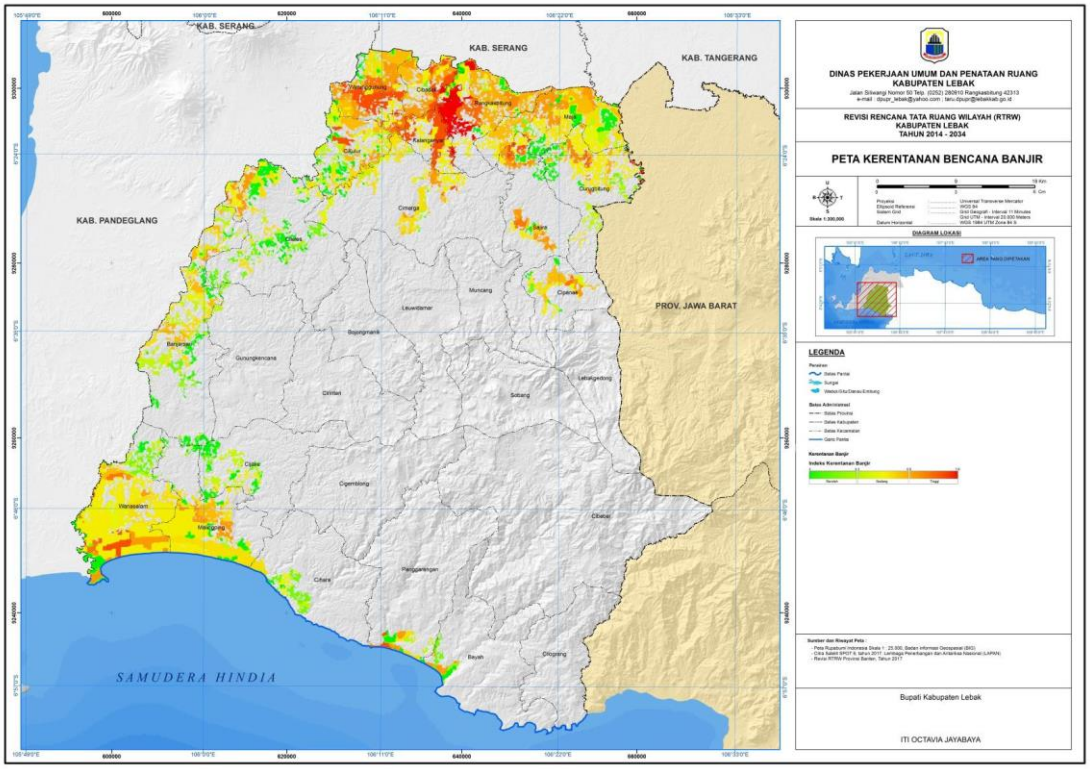

Gambar 2-8 Peta Kerentanan Banjir Kabupaten Lebak

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 - 2043

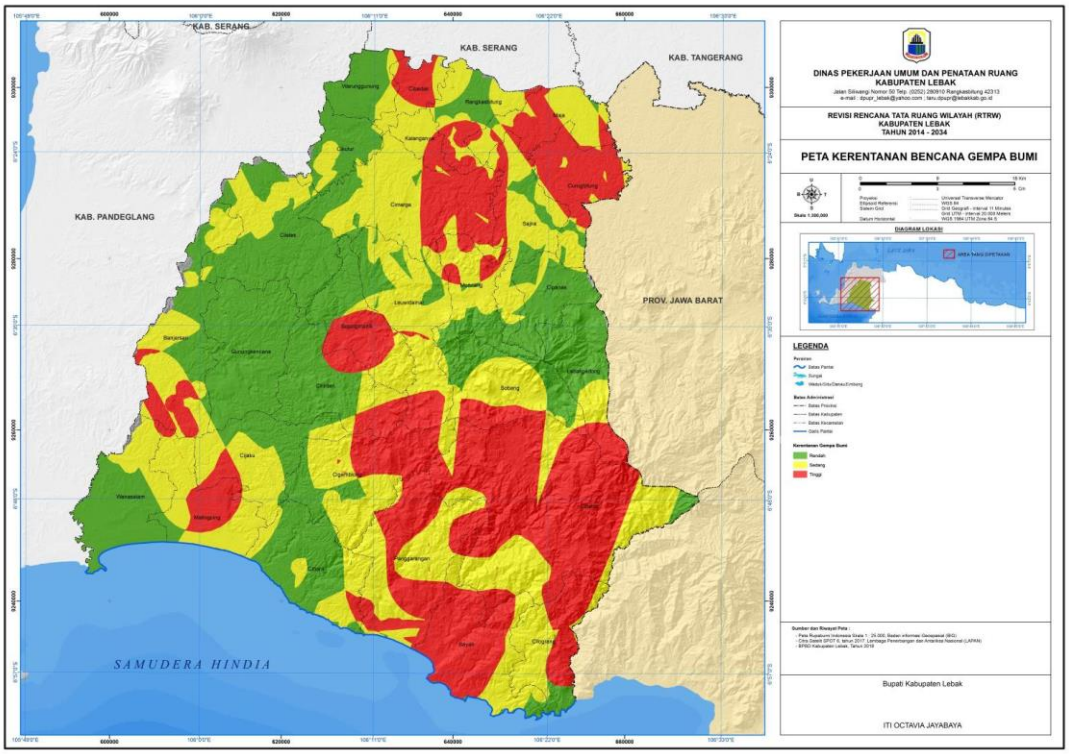

Gambar 2-9 Peta Kerentanan Gempa Bumi Kabupaten Lebak

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 - 2043

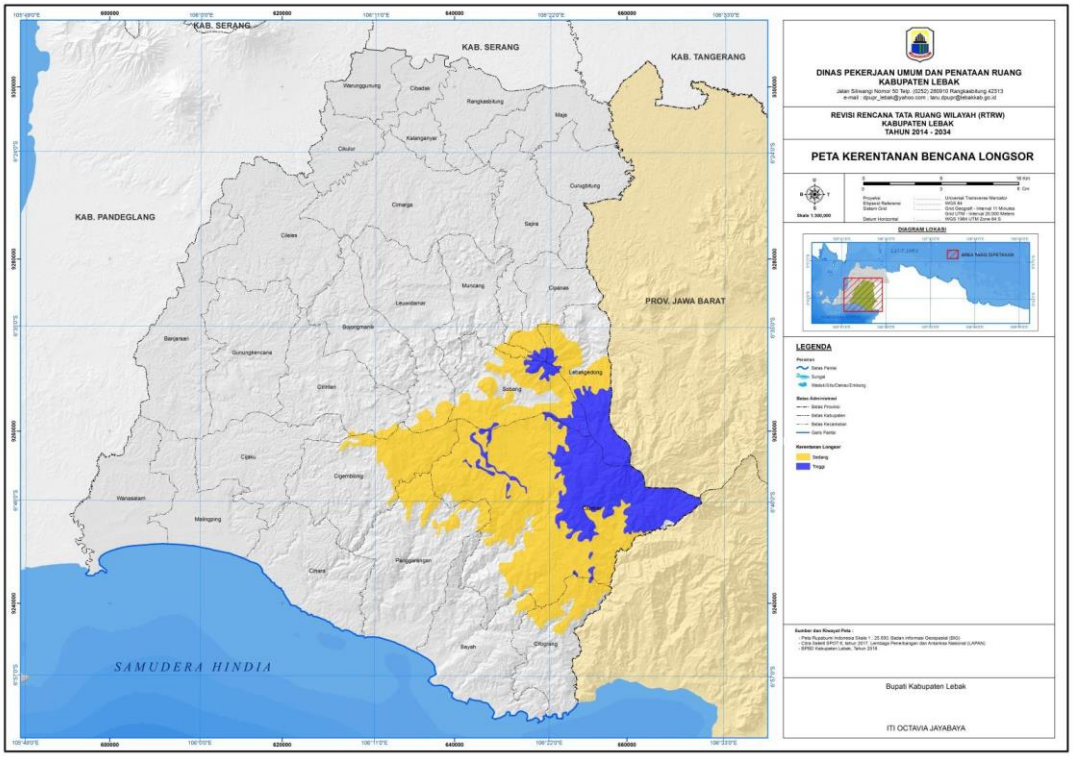

Gambar 2-10 Peta Kerentanan Longsor Kabupaten Lebak

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023 - 2043

2.1.3 Daya Dukung Lingkungan Hidup

Menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup merujuk pada kapasitas lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, serta menjaga keseimbangan antara keduanya. Informasi mengenai daya dukung lingkungan sangat penting dalam perencanaan pembangunan untuk mencegah bencana atau penurunan kualitas lingkungan. Salah satu metode penilaian adalah melalui evaluasi jasa ekosistem yang dapat diberikan oleh lingkungan kepada manusia. Metode ini dikembangkan oleh Millenium Ecosystem Assessment (MEA), sebuah program internasional yang bertujuan memberikan informasi ilmiah mengenai dampak perubahan ekosistem terhadap kesejahteraan manusia dan opsi respons yang tersedia. MA diluncurkan oleh Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan pada Juni 2001 dan selesai pada Maret 2005, membagi jasa ekosistem menjadi empat kategori: penyediaan, pengaturan, budaya, dan pendukung.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengadaptasi metode ini dengan modifikasi untuk sesuai dengan kondisi di Indonesia. Penilaian dilakukan menggunakan metode pembobotan dan pengharkatan yang hasilnya ditentukan melalui kesepakatan para ahli. Parameter yang dinilai meliputi bentuklahan, ekosistem, dan penutupan/penggunaan lahan yang ada. Data untuk penilaian daya dukung lingkungan Kabupaten Lebak diambil dari Peta Ekoregion Provinsi Banten skala 1:250.000 dan Peta Rupabumi Indonesia skala 1:25.000 yang diunduh dari website Badan Informasi Geospasial (BIG).

Mengacu pada metode KLHK, beberapa peta daya dukung lingkungan hidup dapat disusun, mencakup peta untuk penyediaan air, penyediaan pangan, pengaturan iklim, pengaturan tata air,

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

pemurnian air, perlindungan terhadap longsor, dan perlindungan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Peta-peta ini memberikan informasi penting tentang berbagai aspek daya dukung lingkungan.

2.1.3.1 Daya Dukung Air

Daya dukung penyediaan air menggambarkan ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan di suatu wilayah. Berdasarkan Gambar 2.11, untuk Kabupaten Lebak, daya dukung penyediaan air didominasi oleh kelas sedang yang mencakup 57,86% dari total wilayah, diikuti oleh kelas tinggi sebesar 30,24%, dan kelas rendah yang hanya 2,90%. Ini menunjukkan bahwa secara umum, daya dukung penyediaan air di Kabupaten Lebak masih dalam kondisi baik.

Meskipun demikian, penggunaan air yang berlebihan di area dengan klasifikasi sedang dapat mengakibatkan penurunan kualitas daya dukung menjadi kelas rendah. Hal ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya air yang bijaksana untuk mempertahankan kualitas dan ketersediaan air yang ada.

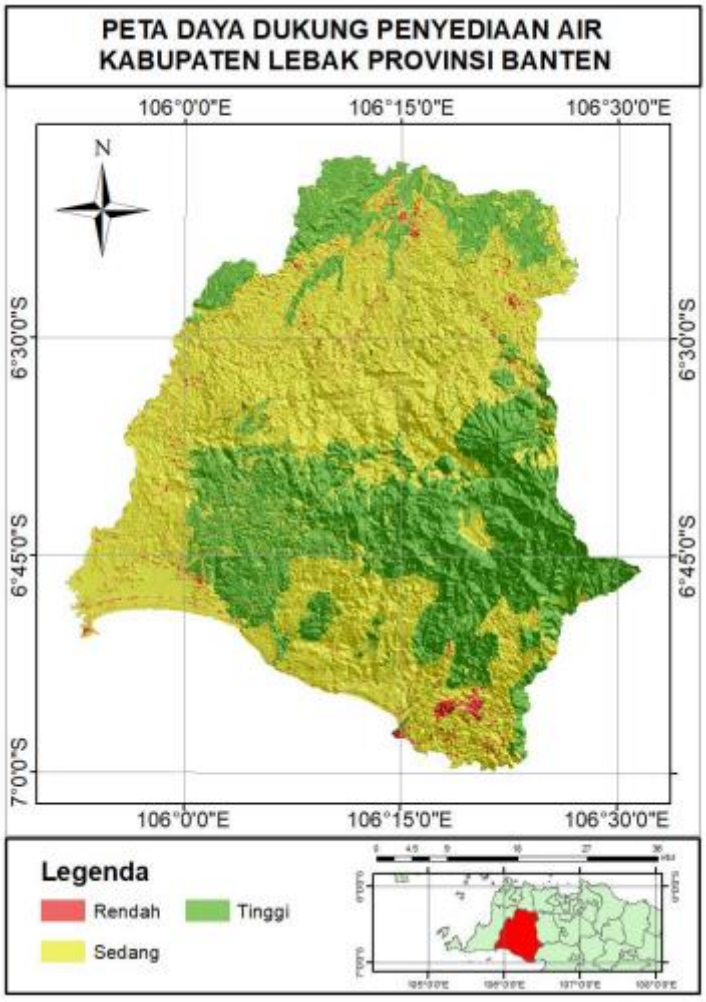

Gambar 2-11 Peta daya dukung lingkungan hidup untuk penyediaan air

DRAFT
DICOPY

2.1.3.2 Daya Dukung Pangan

Daya dukung penyediaan pangan, yang mencerminkan ketersediaan tanaman dan hewan yang dapat dikonsumsi untuk kehidupan masyarakat, menunjukkan bahwa di Kabupaten Lebak, kelas yang paling dominan adalah kelas sedang, dengan proporsi mencapai 79,57%. Kelas ini tersebar merata di seluruh wilayah, termasuk di dataran berombak-bergelombang, perbukitan, dan pegunungan (Gambar 2.12).

Sebagian besar wilayah lainnya termasuk dalam kelas tinggi, dengan luas 19,56%, dan terutama terletak di daerah dataran dan pelembahan. Sementara itu, kelas rendah merupakan yang paling minor, dengan luasan yang sangat kecil, yaitu 0,87% (Tabel 2.5). Ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar wilayah memiliki daya dukung pangan yang cukup baik, terdapat area dengan daya dukung yang lebih tinggi dan sangat terbatas pada kelas rendah.

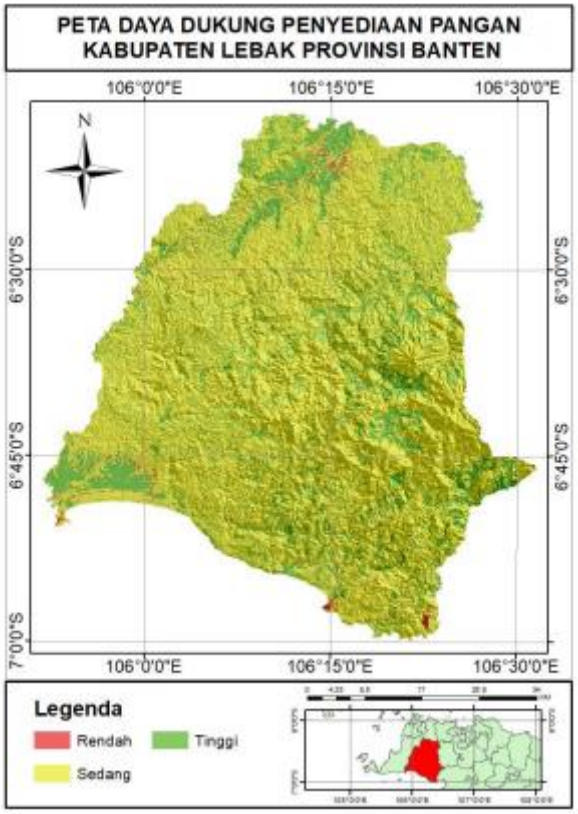

Gambar 2-12 Peta Daya Lingkungan Hidup untuk Penyediaan Pangan

2.1.3.3 Daya Dukung Lainnya

Daya dukung pengaturan iklim, yang mencerminkan pengaruh ekosistem terhadap iklim lokal dan global melalui tutupan lahan dan proses biologis, menunjukkan bahwa di Kabupaten Lebak, kelas sedang merupakan kategori yang paling dominan dengan 52,76%. Kelas ini diikuti oleh kelas tinggi sebesar 30,54%, dan kelas rendah yang mencakup 16,70% (Tabel 2.6). Tutupan lahan hutan memainkan peran penting dalam meningkatkan daya dukung pengaturan iklim, terutama di daerah perbukitan dan pegunungan, sementara penggunaan lahan seperti permukiman, lahan

DRAFT - TIDAK DICOPY

terbuka, tegalan, dan sawah memiliki daya dukung yang lebih rendah. Persebaran spasial daya dukung ini dapat dilihat pada Gambar 2.13.

Sementara itu, daya dukung pengaturan air (tata air), yang mencerminkan peran bentang alam dan tutupan lahan dalam infiltrasi dan pelepasan air, menunjukkan bahwa Kabupaten Lebak memiliki daya dukung yang cukup tinggi secara dominan, mencapai 64,69%. Sisanya terbagi menjadi daya dukung sedang sebesar 34,10% dan rendah sebesar 1,21%. Ini menunjukkan bahwa kondisi bentang alam dan tutupan lahan di Kabupaten Lebak masih baik untuk pengaturan air, dengan kemampuan yang baik dalam menyimpan dan melepaskan air secara berkala. Persebaran spasial dari kelas tinggi hampir merata di seluruh wilayah Kabupaten Lebak, terutama di daerah perbukitan dan pegunungan, seperti yang digambarkan pada Gambar 2.16.

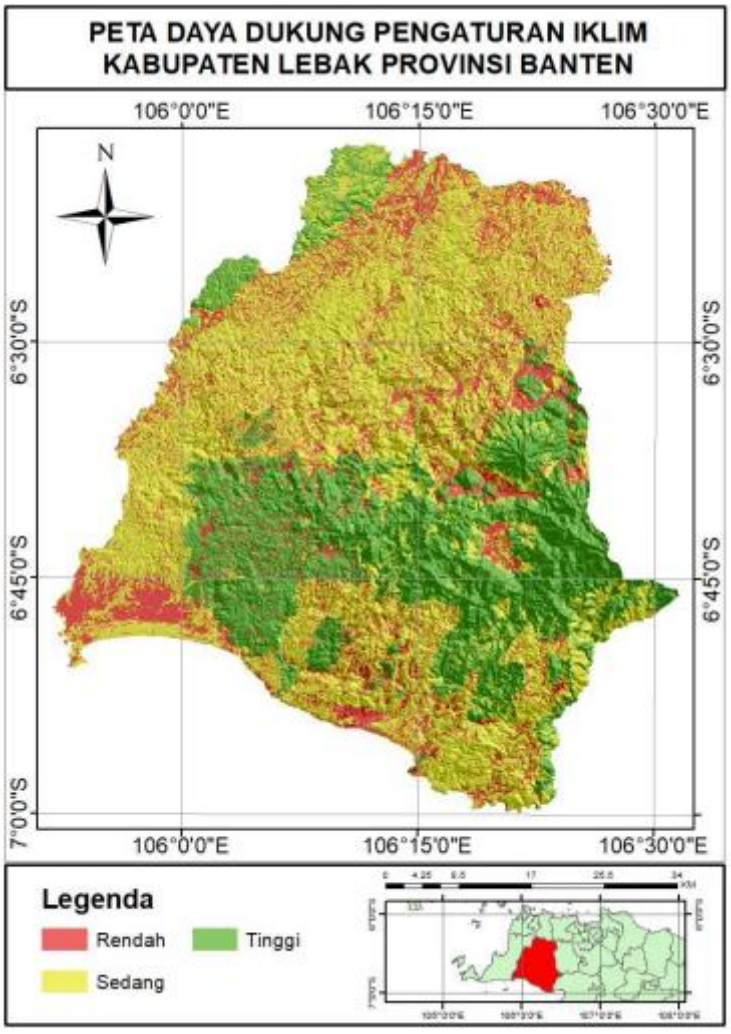

Gambar 2-13 Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup untuk Pengaturan Iklim

DRAFT
JICOPY

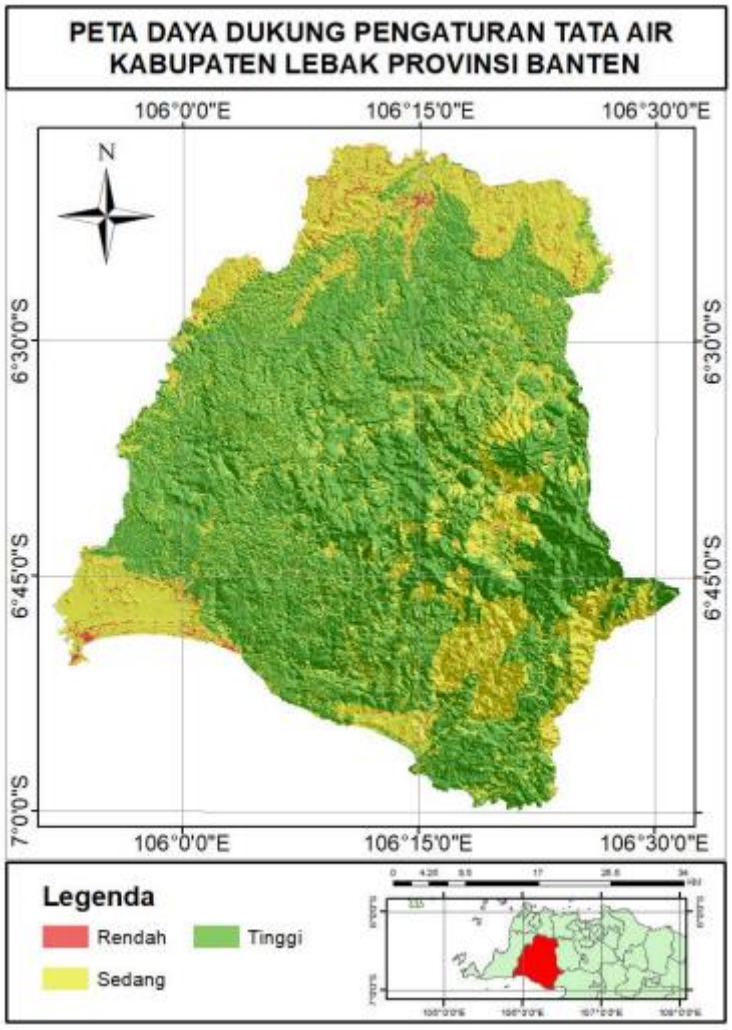

Gambar 2-14 Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup untuk Pengaturan Tata Air

Daya dukung pemurnian air dan pengolahan limbah menggambarkan peran biota dan faktor abiotik dalam proses pembersihan atau penguraian materi organik, senyawa, dan nutrisi di sungai, danau, serta wilayah pesisir. Di Kabupaten Lebak, daya dukung pemurnian air didominasi oleh kelas sedang, yang mencakup 47,37% dari wilayah tersebut, diikuti oleh kelas tinggi dengan 33,85%, dan kelas rendah yang mencapai 18,78% (Tabel 2.8). Tutupan lahan hutan terbukti sebagai tutupan lahan yang paling efektif untuk pemurnian air dan pengolahan limbah, sehingga area hutan di kabupaten ini mendapatkan kelas tertinggi.

Persebaran spasial dari ketiga kelas daya dukung tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.15. Ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar wilayah memiliki daya dukung sedang, tutupan lahan hutan berkontribusi signifikan terhadap kualitas pemurnian air dan pengolahan limbah, yang mendukung pentingnya menjaga dan melindungi area hutan untuk menjaga fungsi ekologis ini.

DRAFT - TIDAK UNTUK DIFOTOKOPI

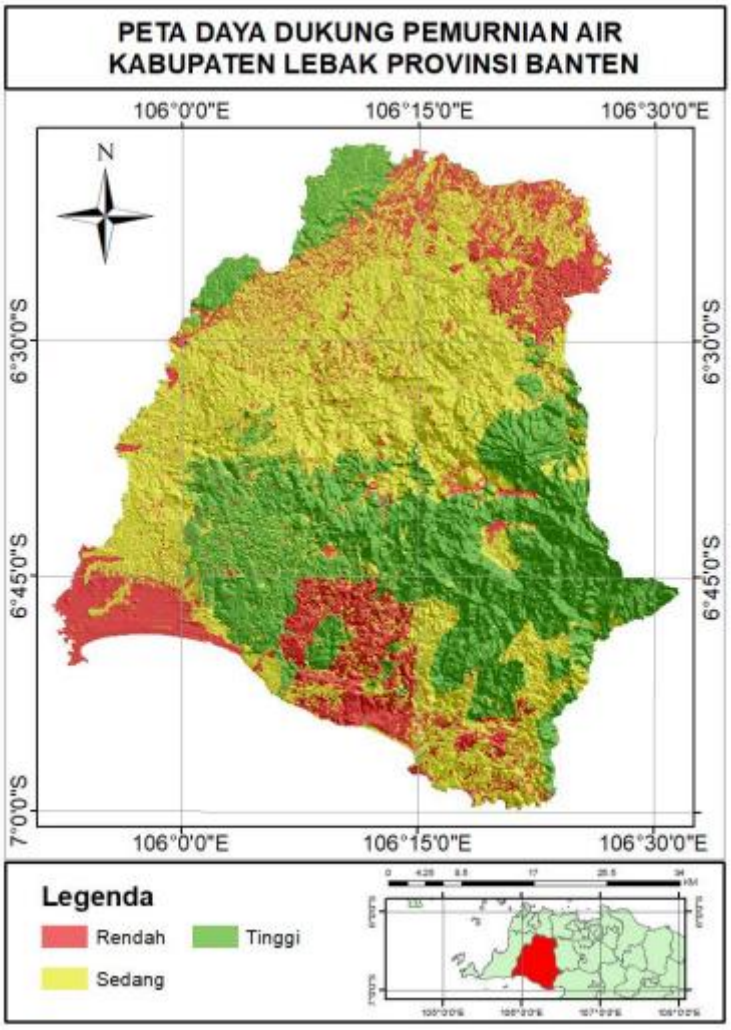

Gambar 2-15 Peta Daya Dukung Lingkungan Hidup untuk Pemurnian Air

Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Lebak meliputi banjir dan longsor. Secara geomorfologis, longsor lebih sering terjadi di lereng yang curam, sehingga daerah berbukit, bergunung, dan tebing-tebing rentan terhadap kejadian ini. Daya dukung untuk pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam seperti kebakaran hutan, abrasi, longsor, badai, gempa bumi, banjir, dan tsunami dinilai dalam kajian ini, dengan fokus pada longsor dan kebakaran hutan. Mengingat kondisi geomorfologi Kabupaten Lebak yang didominasi oleh relief dataran berombak-bergelombang, berbukit, dan bergunung, serta tutupan hutan dan vegetasi yang relatif rapat, daya dukung terhadap bencana longsor masih tergolong tinggi. Kelas tinggi mencakup 43,50%, kelas sedang 38,63%, dan kelas rendah 17,87% (Tabel 29). Penggunaan lahan seperti semak belukar dan kebun campuran memiliki daya dukung sedang, sedangkan sawah, lahan terbuka, tegalan, dan permukiman menunjukkan daya dukung rendah. Persebaran spasial daya dukung untuk perlindungan longsor dapat dilihat pada Gambar 2.18 (a).

Untuk daya dukung perlindungan kebakaran hutan, Kabupaten Lebak menunjukkan bahwa kelas sedang adalah yang paling dominan, mencakup 45,24% dari wilayah. Kelas rendah mencakup 35,98%, sementara kelas tinggi hanya 21,64% (Tabel 2.10). Kondisi ini mengindikasikan bahwa

DRAFT - TIDAK UNTUK DIFOTOKOPI

ancaman kebakaran hutan memerlukan perhatian lebih, mengingat luasnya area hutan dan lahan bervegetasi di kabupaten ini. Kategori kelas sedang menunjukkan kebutuhan untuk pengelolaan yang lebih baik untuk mengurangi risiko kebakaran hutan.

Persebaran spasial dari daya dukung untuk perlindungan kebakaran hutan dan longsor disajikan dalam Gambar 2.16. Gambar ini menggambarkan bagaimana distribusi daya dukung bervariasi di seluruh wilayah Kabupaten Lebak, dengan informasi yang berguna untuk merancang strategi mitigasi dan perlindungan bencana yang efektif. Analisis ini menunjukkan pentingnya penanganan yang tepat untuk menjaga kestabilan dan kesehatan lingkungan di daerah yang rentan terhadap bencana.

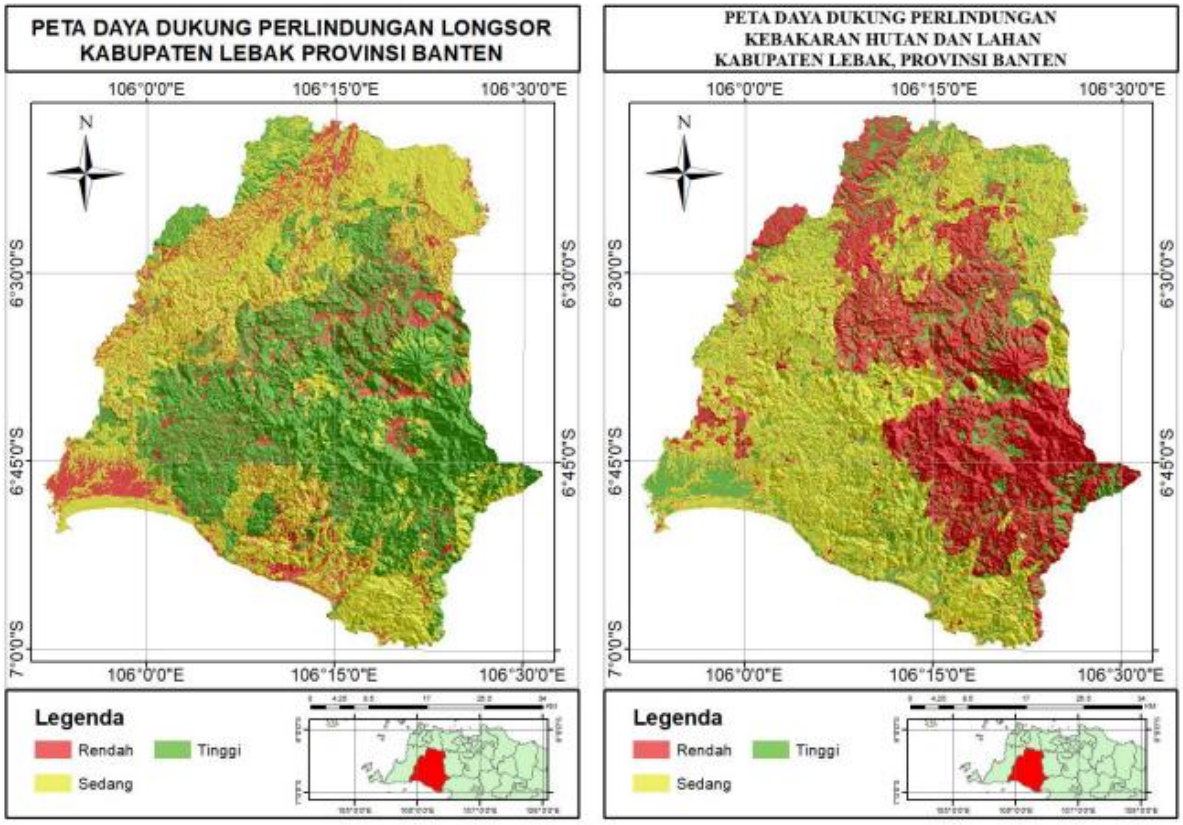

Gambar 2-16 Peta daya dukung lingkungan hidup untuk perlindungan terhadap (a) longsor, (b) kebakaran hutan dan lahan

2.1.4 Kawasan Strategis

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 ditetapkan 9 (sembilan) kawasan strategis yang berada di wilayah Kabupaten Lebak yang ditinjau dari 4 sudut kepentingan, yaitu pertahanan keamanan, pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta pendayagunaan sumberdaya alam dan atau teknologi tinggi.

Kawasan strategis provinsi di wilayah Kabupaten Lebak meliputi :

1. Pertahanan dan keamanan, meliputi Kawasan TNI AD Komando Pendidikan latihan Tempur di Kecamatan Sajira.
2. Pertumbuhan ekonomi, meliputi :

a. Kawasan Bayah dan sekitarnya;
b. Kawasan Malingping dan sekitarnya;
c. Kawasan Kota Kekerabatan Maja.

3. Sosial budaya, meliputi kawasan Masyarakat Adat Baduy di Kecamatan Leuwidamar.
4. Pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi.
   a. Bendungan Karian;
   b. Bendungan Pasir Kopo;
   c. Bendungan Cilawang;
   d. Bendungan Tanjung;
   e. Bendung Ciliman.

2.1.5 Kondisi Kependudukan

Penduduk Kabupaten Lebak pada tahun 2022 sejumlah 1,4 juta jiwa (BPS, 2023) dengan pertumbuhan penduduk pada tahun terakhir (2021-2022) sebesar 1,8%. Data ini memberikan gambaran umum mengenai keadaan demografi di Kabupaten Lebak, serta menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk masih terus berlanjut. Hal ini dapat berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di wilayah tersebut, serta memerlukan perencanaan yang matang untuk mengelola pertumbuhan penduduk agar tetap berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat. Dengan memahami pertumbuhan penduduk, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya yang tepat dan merencanakan pembangunan wilayah secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Jumlah penduduk Kabupaten Lebak secara keseluruhan mengalami tren peningkatan setiap tahunnya. Dalam sepuluh tahun terakhir diketahui terdapat peningkatan jumlah penduduk sebesar 185.872 jiwa.

Tren peningkatan jumlah penduduk secara keseluruhan di Kabupaten Lebak tidak disebabkan oleh pertumbuhan jumlah penduduk di semua kecamatan. Pada Gambar 3-4, dapat diketahui dalam 10 tahun terakhir terdapat beberapa kecamatan yang mengalami penurunan jumlah penduduk sementara yang lainnya meningkat. Berdasarkan Pertumbuhan jumlah penduduk ekstrim terjadi di tahun 2020 setelah pada 2019 mengalami penurunan serentak. Pada tahun 2020, Kecamatan Cikulur dan Lebakgedong mengalami perubahan paling signifikan, paling timpang dibandingkan angka perubahan keseluruhan Kabupaten Lebak, 6,07%. Kecamatan Cikulur mengalami pertumbuhan jumlah penduduk dengan angka positif sebesar 13,71%, sementara Kecamatan Lebakgedong mengalami pertumbuhan jumlah penduduk dengan angka negatif sebesar (7,46%).

Kepadatan penduduk relatif tinggi berada pada kecamatan yang terdapat di bagian utara (Kecamatan Cibadak, Kecamatan Rangkasbitung) dan kecamatan sekitarnya. Kepadatan penduduk tertinggi terletak di sebelah utara, pada Kecamatan Rangkasbitung dan Kecamatan Cibadak. Kecamatan Malingping di kawasan barat daya juga terdapat kepadatan yang relatif tinggi dibanding sekitarnya. Hal ini sejalan dengan Kecamatan Malingping sebagai PKL. PKL lainnya adalah Kecamatan Bayah, namun tidak terdapat peningkatan kepadatan penduduk pada kawasan di tenggara kabupaten ini. Pada tahun 2022, ditinjau lebih detail per kecamatan distribusi penduduk paling besar terdapat di Kecamatan Rangkasbitung, dengan angka 9,74%. Diikuti oleh tiga kecamatan dengan angka distribusi penduduk yang berdekatan yaitu Kecamatan Cimarga, Cibadak, dan Malingping, dengan masing-masing adalah 5,17%, 5,16%, dan 5,13%.

DRAFT – TIDAK UNTUK DICOPY

Tabel 2.9 Kepadatan Penduduk Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (km^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (jiwa/km^2)
1	Rangkasbitung	49,51	139.618	2820
2	Cibadak	41,34	74.040	1791
3	Kalanganyar	25,91	40.549	1565
4	Warunggunung	49,53	64.439	1301
5	Maja	59,87	62.025	1036
6	Cikulur	66,06	61.238	927
7	Malingping	92,17	73.552	798
8	Cipanas	75,38	52.540	697
9	Curugbitung	72,55	38.161	526
10	Sajira	110,98	58.265	525
11	Banjarsari	145,31	67.569	465
12	Muncung	84,98	38.751	456
13	Cileles	124,98	56.366	451
14	Wanasalam	134,29	59.893	446
15	Bojongmanik	58,21	25.438	437
16	Cijaku	74,36	31.529	424
17	Cimarga	183,43	74.106	404
18	Leuwidamar	146,91	55.532	378
19	Lebakgendong	62,55	22.080	353
20	Cilongrang	107,20	36.126	337
21	Cirinten	91,12	30.2520	332
22	Bayah	153,73	46.373	304
23	Sobang	107,20	32.053	299
24	Cigembong	75,29	22.135	294
25	Gunungkencana	145,77	39.795	273
26	Panggarangan	163,36	39.370	241
27	Cihara	159,57	34.48	214
28	Cibeber	383,15	57.473	150
	Kabupaten Lebak	3044,72	1.433.778	471

Sumber : Kabupaten Lebak dalam angka, 2023

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

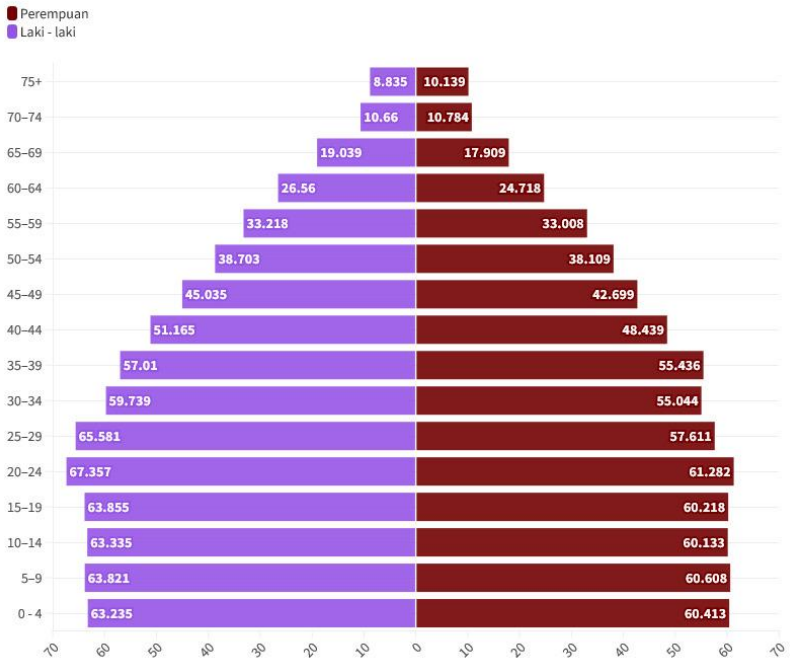

Gambar 2-17 Piramida Penduduk Tahun 2023

Sumber : Kabupaten Lebak dalam Angka, 2023

2.2 ` Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus utama dalam upaya kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah untuk memastikan bahwa setiap individu dan keluarga di masyarakat kita merasakan dampak positif dari pembangunan. Pada RPJMD dengan fokus kesejahteraan pemerataan ekonomi memiliki beberapa indikator kinerja seperti pendiidkan, kesehtan, pekerjaan umum dan penataan ruang, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian pendudukan dan keluarga berencana, koperasi usaha, kecil dan menengah, pariwisata dan administras pemerintah. Pada tabel 2.10 akan ditampilkan indikator beserta target dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi.

Tabel 2.10 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Fokus Kesejahteran dan Pemerataan Ekonomi Tahun 2023

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
PENDIDIKAN					
Indeks Pendidikan		Point	0,57	0,556	98,41
KESEHATAN					
Indeks Kesehatan	nilai seluruh unit yang disurvei/ unit yang disurvei di RS x 100	Persen	0,78	0,7405	95,18
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
Indeks infrastruktur dasar	(Persentase akses air minum + Persentase akses sanitasi + persentase masyarakat yang	Persen	76,21	72,85	95,59

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
	menghuni rumah layak huni) dibagi 3				
Persentase cakupan air minum		Persen	65,90	74,30	112,75
Persentase akses sanitasi (air limbah)		Persen	73,82	73,45	99,50
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		Persen	7183	71,83	100
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		Persen	72,17	74,30	102,95
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		Persen	73,33	73,45	100,16
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota		Persen	94	94	100
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota		Persen	70	72,32	103,31
Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		Persen	0.00	0	100.00
TENAGA KERJA					
Tingkat Pengangguran Terbuka		Persen	8,75	7,57	115,59
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
Indeks Pembangunan Gender		Point	79,11	80,75	102,07
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
Laju Pertumbuhan Penduduk		Persen	1,88	1,81	96,28
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
Daya Beli		Rupiah	9.017.000	9.130.000	101,25
PARIWISATA					
Kontribusi Sektor Pariwisata pada PDRB		Persen	5,50	4,6	83,64
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN					

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
PDRB Perkapita (Satuan: Juta (Rupiah))		Rupiah	25.450.000	24.810.000	97,49
Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)		Persen	<0,4	0,4	100
Pertumbuhan PDRB		Persen	4	4	100
Laju Inflasi		Persen			
Indeks Gini		Persen	<0,34	0,271	125,46
Persentase penduduk diatas garis kemiskinan		Persen	90,80	91,32	100,57
Rasio kesenjangan kemiskinan		Persen	0,002	0,001	200
Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari		Persen	9,20	9	100

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

Berdasarkan data dan paparan yang disajikan, tantangan utama yang dihadapi oleh perekonomian Kabupaten Lebak adalah integrasi antara sektor pertanian, yang menjadi mata pencaharian utama sebagian besar penduduk dan kontributor dominan terhadap PDRB, dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif agar kedua sektor ini dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Untuk mencapai hal ini, integrasi dapat dilakukan melalui pengembangan agrowisata unggulan serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), industri rumah tangga, dan industri kecil menengah dalam pengolahan komoditas pertanian. Dengan pendekatan ini, diharapkan sektor pertanian dapat memenuhi kebutuhan sektor pariwisata, seperti penyediaan makanan dan minuman, cinderamata, dan berbagai kebutuhan wisatawan lainnya. Tantangan yang sama juga terjadi dalam mengintegrasikan sektor pertanian dengan industri, terutama dalam industri pengolahan yang mampu mengambil dan mengolah komoditas pertanian menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap produktivitas perekonomian daerah secara signifikan.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

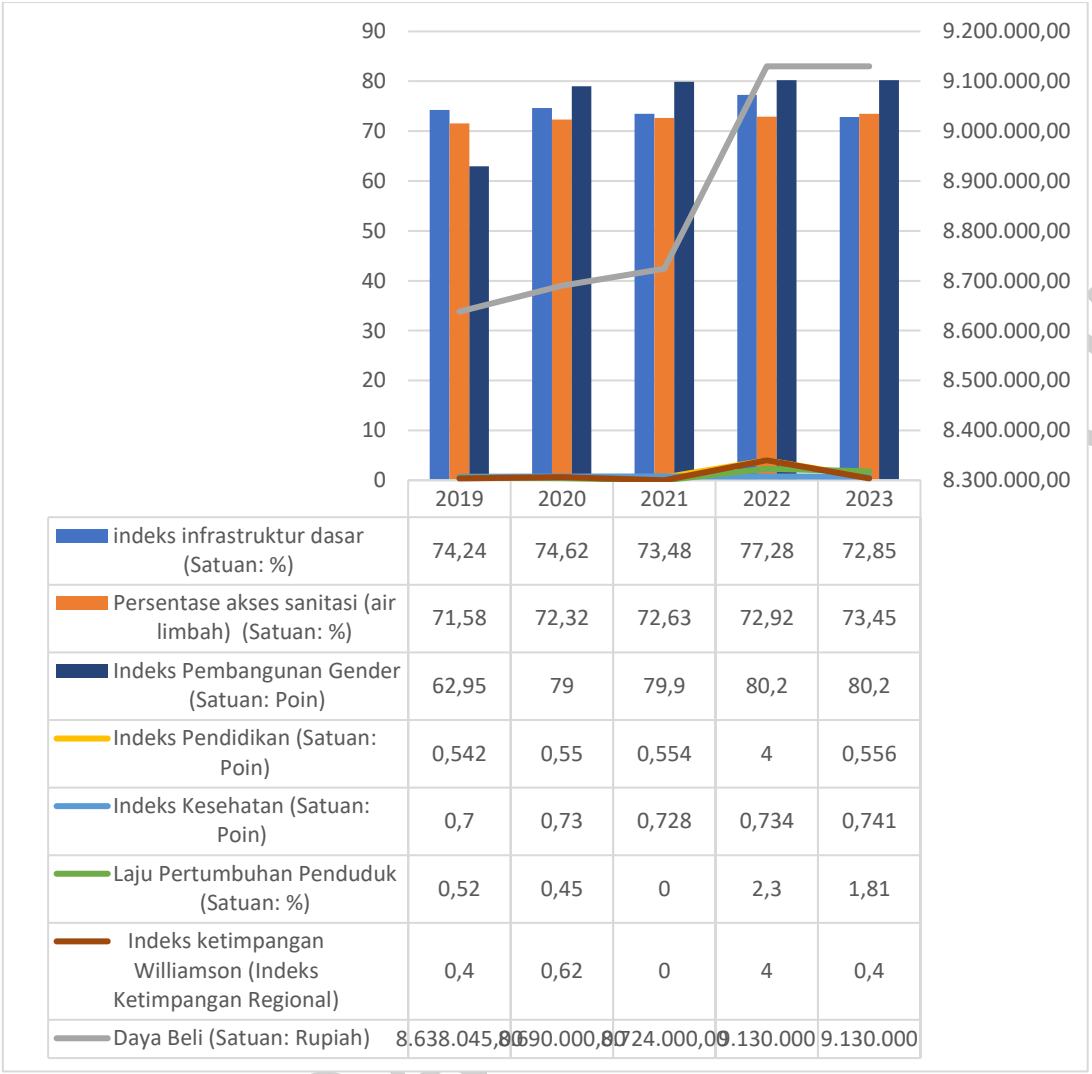

	2019	2020	2021	2022	2023
indeks infrastruktur dasar (Satuan: %)	74,24	74,62	73,48	77,28	72,85
Persentase akses sanitasi (air limbah) (Satuan: %)	71,58	72,32	72,63	72,92	73,45
Indeks Pembangunan Gender (Satuan: Poin)	62,95	79	79,9	80,2	80,2
Indeks Pendidikan (Satuan: Poin)	0,542	0,55	0,554	4	0,556
Indeks Kesehatan (Satuan: Poin)	0,7	0,73	0,728	0,734	0,741
Laju Pertumbuhan Penduduk (Satuan: %)	0,52	0,45	0	2,3	1,81
Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)	0,4	0,62	0	4	0,4
Daya Beli (Satuan: Rupiah)	8.638.045,80	8.690.000,80	8.724.000,00	9.130.000	9.130.000

Gambar 2-18 Perkembangan Perkembangan Indikator Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi Tahun 2019 – 2023

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang RPD Kabupaten Lebak 2025 – 2026, diolah kembali, 2024

Visualisasi data dalam grafik tersebut menggambarkan beberapa gejala permasalahan yang signifikan. Salah satunya adalah meningkatnya ketimpangan antarwilayah, yang tercermin dari peningkatan indeks Williamson. Selain itu, terlihat juga adanya peningkatan angka pengangguran terbuka seiring dengan penurunan PDRB per kapita. Meskipun beberapa indikator lain mengalami peningkatan, namun peningkatannya tidak cukup progresif untuk mengatasi permasalahan yang ada. Contohnya adalah akses sanitasi sebesar 73,45%, indeks infrastruktur dasar sebesar 72,85%, indeks pembangunan gender sebesar 80,2%, indeks pendidikan sebesar 0,55, dan indeks kesehatan sebesar 0,73.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus kesejahteraan sosial diwakili oleh 3 (tiga) dimensi utama, yaitu pendidikan, kesehatan, dan sosial. Pada dimensi pendidikan digunakan beberapa indikator, antara lain seperti: angka putus sekolah, angka melek huruf, dan angka melanjutkan sekolah ke SMP. Pada dimensi kesehatan digunakan beberapa indikator seperti: indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan RSUD, persentase desa ODF, dan persentase keluarga sehat. Pada dimensi sosial

DRAFT - TIDAK UNTUK DIFOTOKOPY

digunakan indikator tingkat kemiskinan, dan skor pola pangan harapan. Sebagai tambahan, dimensi ketahanan pangan juga termasuk dalam fokus kesejahteraan sosial berdasarkan Dokumen Evaluasi RPJMD Tahun 2023. Tingkat ketercapaian pada fokus kesejahteraan sosial ditunjukkan di tahun 2023 pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2023

Indikator Kinerja Daerah	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
PENDIDIKAN					
Angka Putus sekolah SD		Persen	0,10	0,05	200
Angka Melek Huruf (AMH)		Persen	97,85	96,21	98,32
Angka Putus sekolah SMP		Persen	0,99	0,92	107,61
Angka Melanjutkan SD ke SMP		Persen	97,10	99,56	102,53
Angka Kelulusan SMP		Persen	98,30	98,87	100,58
KESEHATAN					
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan RSUD	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil Pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Masyarakat dalam memperoleh Pelayanan. Total dari Nilai Persepsi Per Unsur/ Total unsur yang terisi x 25 (Nilai Penimbang)	Persen	88	82,46	93,70
Persentase Desa ODF	Jumlah Desa ODF dibagi Jumlah Desa x 100	Persen	70,43	33,04	46,91
Persentase keluarga sehat	Jumlah keluarga sehat / jumlah keluarga yang dipantau X 100%	Persen	49,00	48,9	99,80
Jumlah pelaksanaan sosialisasi jamsos (Satuan: kecamatan)	Jumlah sosialisasi jamsos yang dilaksaanakan	Kecamatan	-		
Usia Harapan Hidup (UHH) (Satuan Tahun)	Jumlah Umur orang meninggal / Jumlah orang meninggal	Tahun	67,78	68,13	100,52
Prevalensi Stunting	Jumlah Anak Stunting / Jumlah Anak dibawah 5 tahun x 100	Persen	8	3,69	216,80
SOSIAL					
Tingkat Kemiskinan		Persen	9,00	8,68	103.69
Persentase Penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)		Persen	100	100	100

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja Daerah	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
KETAHANAN PANGAN					
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH	Σ (% AKE x Bobot Kelompok Pangan)	Persen	84,50	93,3	110,41
Penguatan cadangan pangan (jumlah lokasi/jumlah cadangan pangan) (Kg)	Jumlah pengadaan cadangan beras pemerintah kabupaten	Kg	20.000	9.998	49,99
Penanganan daerah rawan pangan/Persentase Desa Rawan Pangan Yang Tertangani (Satuan:%)	(Jumlah Desa Rawan Pangan tahun n-1 - Jumlah Desa Rawan Pangan tahun n-1 yang masih menjadi prioritas di tahun n) / Jumlah Desa Rawan Pangan Tahun n-1) * 100%	Persen	30,30	53,66	177,09

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD 2019 – 2024 sebagian besar tingkat ketercapaian indikator kinerja daerah dalam fokus ini menunjukkan tingkat capaian yang positif. Khusus pada dimensi pendidikan, indikator angka melek huruf (AMH) masih sekitar 98,32% dari target. Perlu menjadi catatan pada dimensi kesehatan, bahwa persentase desa ODF masih sekitar 46,91% dari target yang ditentukan. Hal tersebut menunjukkan tingkat ketercapaian yang rendah. Namun jika dilihat dari Gambar 2.13 tren ketercapaian Desa ODF mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Indeks kepuasan masyarakat terhadap RSUD menunjukkan tingkat ketercapaian sekitar 93,70%. Selanjutnya tingkat ketercapaian persentase keluarga sehat sudah mendekati 100%. Pada dimensi sosial, dua indikator kinerja menunjukkan tingkat ketercapaian yang telah memenuhi target yang ditentukan. Pada dimensi ketahanan pangan, tingkat capaian indikator penguatan cadangan pangan (jumlah lokasi/jumlah cadangan pangan) menunjukkan capaian rendah yakni sebesar 49,99% dari target yang ditentukan.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

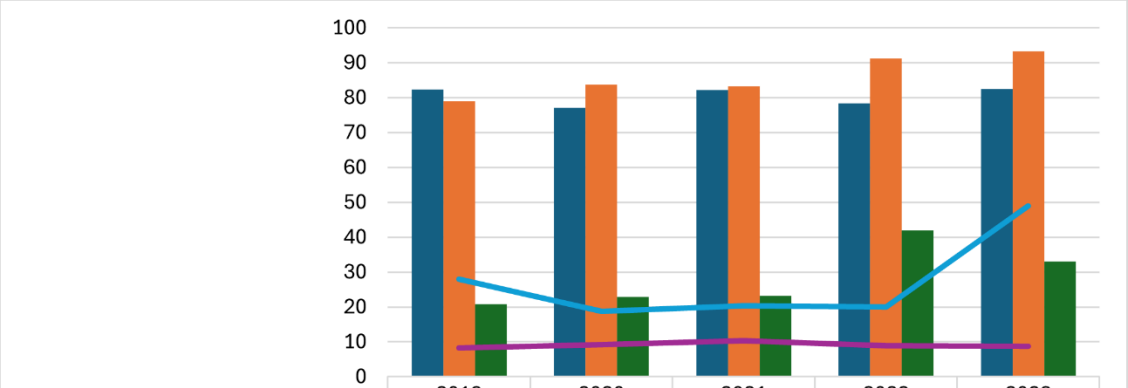

	2019	2020	2021	2022	2023
IKM RSUD (%)	82,3	77,11	82,23	78,32	82,46
Skor Pola Pangan Harapan (%)	79	83,8	83,3	91,3	93,3
Desa ODF (%)	20,87	22,9	23,16	42	33,04
Keluarga Sehat (%)	28	18,7	20,4	20,06	48,9
Tingkat Kemiskinan (%)	8,3	9,24	10,29	8,91	8,68

Gambar 2-19 Perkembangan Indikator Kesehatan dan Sosial Pada Fokus Kesejahteraan Sosial Tahun 2019 – 2023

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang RPD Kabupaten Lebak 2025 – 2026, diolah kembali, 2024

Selain indikator-indikator di atas, secara makro digunakan pula indikator Usia Harapan Hidup (UHH) guna merepresentasi derajat kesehatan masyarakat yang digunakan secara internasional. Secara umum, derajat kesehatan masyarakat mengalami peningkatan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.13, ditinjau berdasarkan peningkatan UHH setiap tahunnya. Demikian pula dengan kemampuan untuk menurunkan angka kematian ibu (AKI) yang sangat signifikan pada kurun waktu lima tahun terakhir. Meski demikian pekerjaan rumahnya adalah upaya untuk mengejar ketertinggalan dalam pencapaian UHH yang masih jauh di bawah UHH Provinsi Banten yang telah mencapai 70,77 tahun serta UHH Nasional sebesar 73,93 tahun pada tahun 2023.

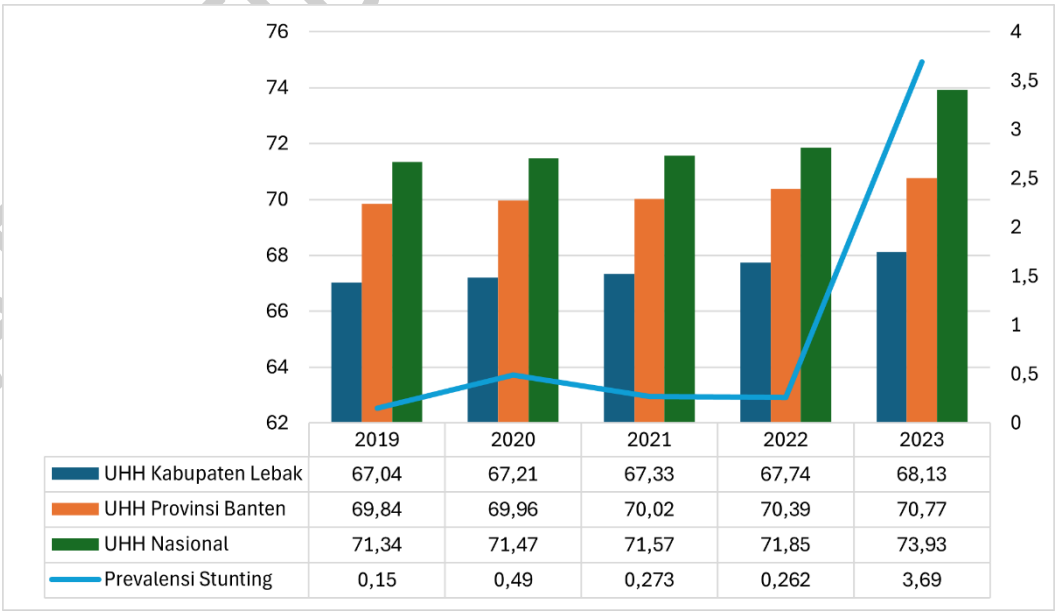

	2019	2020	2021	2022	2023
UHH Kabupaten Lebak	67,04	67,21	67,33	67,74	68,13
UHH Provinsi Banten	69,84	69,96	70,02	70,39	70,77
UHH Nasional	71,34	71,47	71,57	71,85	73,93
Prevalensi Stunting	0,15	0,49	0,273	0,262	3,69

Gambar 2-20 Perkembangan Indikator Kesehatan Tahun 2019 – 2023

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang RPD Kabupaten Lebak 2025 – 2026, diolah kembali, 2024

DRAFT TIDAK UNTUK DICOPY

Pada tabel di bawah ini, menunjukkan temuan permasalahan pada fokus kesejahteraan yang teridentifikasi dari hasil pelaksanaan *focus group discussion* (FGD) dan penyebaran kuesioner kepada OPD di lingkungan Kabupaten Lebak.

Tabel 2.12 Temuan Permasalahan Fokus Kesejahteraan Sosial

Indikator Kinerja Daerah	Tingkat Capaian	Intepretasi	Notulensi FGD	Kuesioner FGD	Kuesioner Instansi
PENDIDIKAN					
Angka Putus sekolah SD	200	melampaui (>)	Terdapat beberapa siswa yang putus sekolah karena kondisi perekonomian keluarga		
Angka Melek Huruf (AMH)	98,32	belum tercapai (<)			
Angka Putus sekolah SMP	107,61	melampaui (>)	Terdapat beberapa siswa yang putus sekolah karena kondisi perekonomian keluarga		
Angka Melanjutkan SD ke SMP	102,53	melampaui (>)	Untuk data lulusan SD yang melanjutkan ke SMP tercatat rendah, karena di Lebak ini banyak siswa yang melanjutkan ke sekolah agama (madrasah) sehingga perhitungannya berbeda dan dianggap tidak memenuhi target		
Angka Kelulusan SMP	100,58	melampaui (>)			
KESEHATAN					
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan RSUD	93,70	belum tercapai (<)			
Persentase Desa ODF	46,91	belum tercapai (<)			
Persentase keluarga sehat	99,80	belum tercapai (<)			
Jumlah pelaksanaan sosialisasi jamsos (Satuan: kecamatan)		belum tercapai (<)			
Usia Harapan Hidup (UHH) (Satuan Tahun)	100,52	melampaui (>)			
Prevalensi Stunting	216,80	melampaui (>)	- Terdapat perbedaan indikator perhitungan angka stunting (EPPGBM -> disusun oleh Dinas dan SSGI -> survei kemenkes) - Dinas merasa SSGI tidak akurat karena sampel yang		

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja Daerah	Tingkat Capaian	Intepretasi	Notulensi FGD	Kuesioner FGD	Kuesioner Instansi
			digunakan purposive sehingga tidak dapat menggambarkan kondisi eksisting		
SOSIAL					
Tingkat Kemiskinan	104,65	melampaui (>)			
Persentase Penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	100	sesuai (=)			
KETAHANAN PANGAN					
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH	110,41	melampaui (>)			
Penguatan cadangan pangan (jumlah lokasi/jumlah cadangan pangan) (Kg)	49,99	belum tercapai (<)			
Penanganan daerah rawan pangan/Persentase Desa Rawan Pangan Yang Tertangani (Satuan:%)	177,09	melampaui (>)			

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2024

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pada fokus seni budaya dan olahraga diwakili oleh dimensi kepemudaaan dan olahraga. Adapun indikator kinerja yang dinilai yakni persentase wirausaha muda baru yang memperoleh modal. Seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini, upaya yang telah dilakukan menunjukkan tingkat ketercapaian yang telah sesuai target atau dengan kata lain 100% tercapai.

Tabel 2.13 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Fokus Seni Budaya dan Olahraga Tahun 2023

Indikator Kinerja Daerah	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA					
Persentase wirausaha muda baru yang memperoleh akses modal		Persen	10	10	100

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD Tahun 2023

Salah satu tantangan dalam urusan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Lebak adalah memasyarakatkan olahraga sebagai bagian integral dari upaya pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), sebagaimana tertuang dalam PERDA PERUBAHAN RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019 - 2024 Bab II – 47. Fokus pembinaan keolahragaan harus difokuskan pada berbagai jenis olahraga yang dapat memelihara dan meningkatkan kebugaran fisik serta psikis

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

masyarakat. Upaya ini termasuk penyediaan sarana dan prasarana olahraga massal yang terjangkau, seperti lintasan jogging di taman-taman publik, lapangan untuk senam massal, dan berbagai fasilitas untuk olahraga permainan. Selain itu, penyelenggaraan event-event pemerintahan dan kemasyarakatan seperti car free day, ulang tahun Kabupaten Lebak, serta peringatan hari besar nasional dapat dimanfaatkan untuk memasyarakatkan olahraga sebagai sarana promosi kesehatan masyarakat. Pentingnya sinkronisasi program dengan dinas terkait menjadi krusial agar tujuan pemasyarakatan olahraga ini dapat tercapai secara optimal.

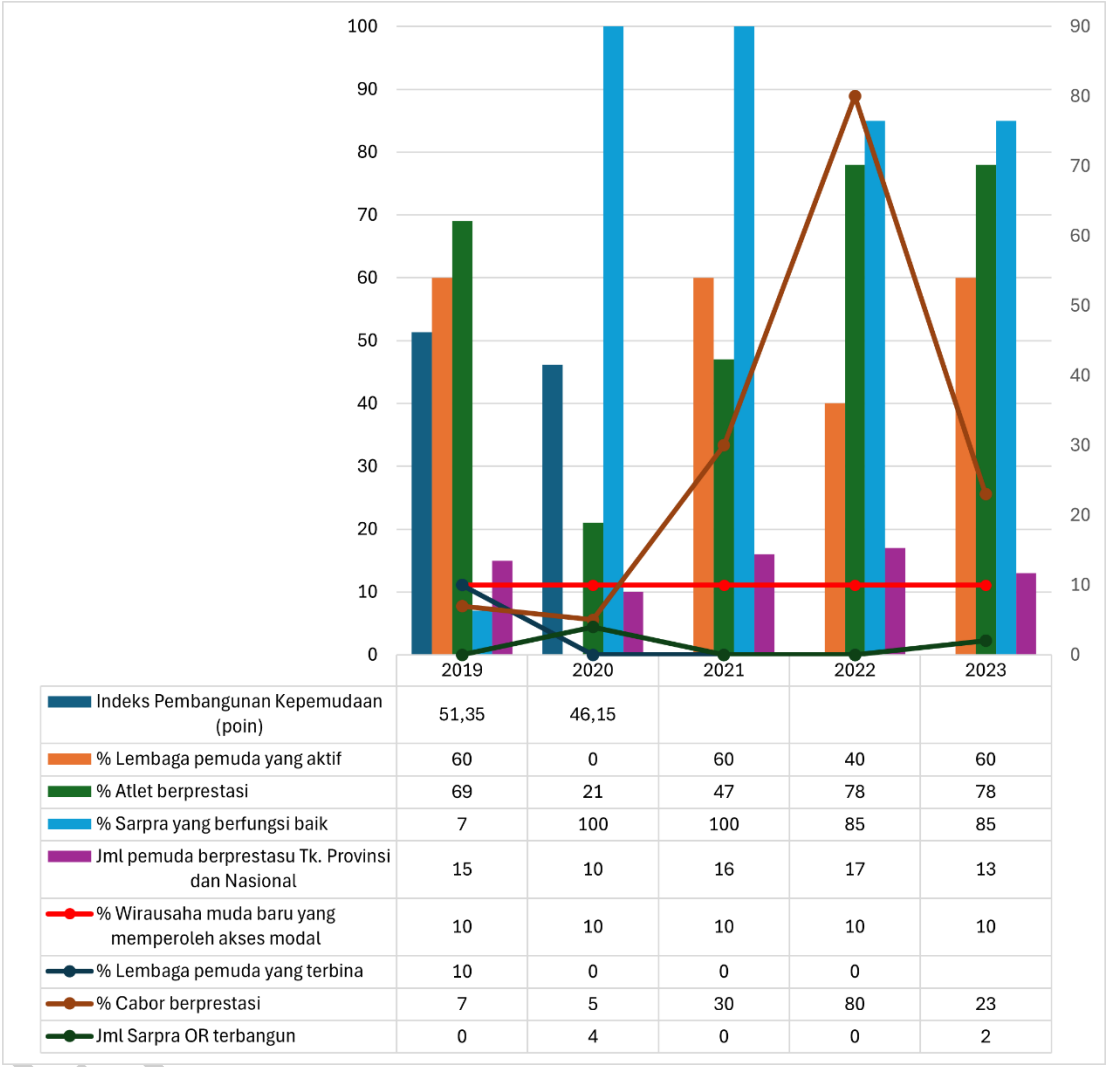

	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Kepemudaan (poin)	51,35	46,15			
% Lembaga pemuda yang aktif	60	0	60	40	60
% Atlet berprestasi	69	21	47	78	78
% Sarpra yang berfungsi baik	7	100	100	85	85
Jml pemuda berprestasu Tk. Provinsi dan Nasional	15	10	16	17	13
% Wirausaha muda baru yang memperoleh akses modal	10	10	10	10	10
% Lembaga pemuda yang terbina	10	0	0	0	
% Cabor berprestasi	7	5	30	80	23
Jml Sarpra OR terbangun	0	4	0	0	2

Gambar 2-21 Perkembangan Indikator Seni Budaya dan Olahraga Tahun 2019 – 2023

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang RPD Kabupaten Lebak 2025 – 2026, diolah kembali, 2024

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Aspek ekonomi suatu wilayah dapat ditinjau dari beberapa indikator diantaranya seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Gini Ratio. Pada bagian ini, PDRB Kabupaten Lebak diuraikan berdasarkan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Penyusunan PDRB ADHB Kabupaten Lebak dilakukan berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan

dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Di sisi lain, Penyusunan PDRB ADHK Kabupaten Lebak dilakukan berdasarkan harga tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi wilayah, dalam hal ini Kabupaten Lebak.

2.3.1.1 PDRB ADHB Kabupaten Lebak

Berdasarkan informasi PDRB ADHB, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, lapangan usaha dengan kontribusi terbesar yakni lapangan usaha dengan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Dalam lima tahun terakhir rata-rata kontribusi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yakni sebesar 27% terhadap PDRB. Pada posisi kedua, lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda motor memiliki kontribusi rata-rata sebesar 12,3% terhadap PDRB. Adapun PDRB ADHB Kabupaten Lebak dalam lima tahun terakhir secara rinci ditampilkan pada Tabel 2.15 Nilai dan Kontribusi Sektor pada PDRB ADHB Kabupaten Lebak Tahun 2019 – 2023 (dalam Juta Rupiah)di bawah. Adapun PDRB ADHB Kabupaten Lebak dalam lima tahun terakhir secara rinci ditampilkan pada Tabel 2.15 Nilai dan Kontribusi Sektor pada PDRB ADHB Kabupaten Lebak Tahun 2019 – 2023 (dalam Juta Rupiah)nilai dan Kontribusi Sektor pada PDRB ADHB Kabupaten Lebak Tahun 2019 – 2023 (dalam Juta Rupiah) di bawah,

2.3.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lebak

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, PDRB ADHK digunakan sebagai ukuran pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Dalam hal ini PDRB ADHK sering dianggap sebagai Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang dapat menunjukan daya saring daerah. Seperti terlihat pada Gambar 3.3, LPE Kabupaten Lebak serta Provinsi Banten masing – masing tercatat di angka 5,44% dan 5,26% pada tahun 2019. Namun, pada tahun 2020 turun cukup signifikan masing – masing tercatat di angka -0,91% dan -3,39%. Hal tersebut ditengarai oleh kejadian pandemi COVID-19 di tahun 2020. Pasca kejadian pandemi COVID-19, LPE Kabupaten Lebak secara bertahap kembali naik dan tercatat di angka 2,8% pada tahun 2023.

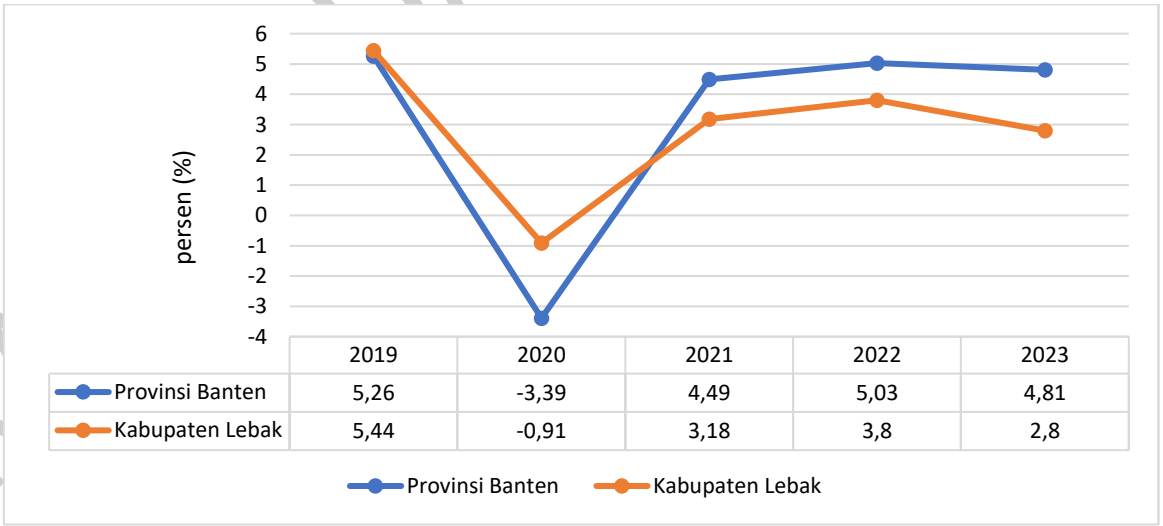

	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi Banten	5,26	-3,39	4,49	5,03	4,81
Kabupaten Lebak	5,44	-0,91	3,18	3,8	2,8

Gambar 2-22 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lebak dan Provinsi Banten Tahun 2019 – 2023

Sumber : diolah dari Kabupaten Lebak dalam Angka 2023 (BPS), 2023 – Provinsi Banten dalam Angka 2023 (BPS), 2023

DRAFT TIDAK UNTUK DICOPY

Tabel dibawah menunjukkan LPE Kabupaten Lebak berdasarkan lapangan usaha. Secara umum, laju pertumbuhan pada masing-masing sektor mengalami pertumbuhan yang fluktuatif dampak dari pandemi COVID-19 pada tahun 2020 namun dari beberapa sektor juga terdapat penurunan. Dari tabel indikator laju pertumbuhan menurut lapangan usaha tersebut diketahui bahwa sektor yang telah kembali meningkat pasca pandemi COVID-19 di Kabupaten Lebak yakni Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum serta Jasa Lainnya. Adapun informasi detail mengenai laju pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Lebak tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Lebak Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,89	4,14	1,47	4,78	-0,15
Pertambangan dan Penggalian	0,32	-8,53	2,53	-7,97	-21,77
Industri Pengolahan	5,93	0,59	4,03	7,36	6,88
Pengadaan Listrik dan Gas	3,09	7,01	7,53	14,75	3,9
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,04	3,87	-0,01	-0,18	5,15
Konstruksi	11,79	-2,53	13,89	7,24	3,83
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,82	-5,14	2,41	3,73	4,28
Transportasi dan Pergudangan	7,98	-4,89	5,67	5,59	5,87
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,41	-5,64	3,58	6,76	9,81
Informasi dan Komunikasi	8,51	8,22	6,79	5,62	7,82
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,42	2,82	3,41	2,31	-0,22
Real Estate	7,5	1,03	2,36	3,06	5,7
Jasa Perusahaan	7,45	-4,52	-0,49	2,07	7,98
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,83	-1,54	-0,8	0,91	3,45
Jasa Pendidikan	8,44	0,56	-1,49	-1,17	5,77
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,96	5,11	6,89	3	7,67
Jasa lainnya	6,83	-6,98	0,89	2,78	10,27

Sumber: Kab Lebak dalam Angka 2023 (BPS), 2023, diolah kembali, 2024

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tabel 2.15 Nilai dan Kontribusi Sektor pada PDRB ADHB Kabupaten Lebak Tahun 2019 – 2023 (dalam Juta Rupiah)

Kategori	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7.451.661,8	25,9	7.902.230,1	27,2	8.313.850,0	27,1	9.194.470,0	27,5	9.733.110,0	27,4
Pertambangan dan Penggalian	1.758.144,6	6,1	1.734.943,8	6,0	1.918.210,0	6,3	1.987.120,0	5,9	1.598.520,0	4,5
Industri Pengolahan	2.507.148,1	8,7	2.568.154,1	8,8	2.701.750,0	8,8	3.034.430,0	9,1	3.317.460,0	9,3
Pengadaan Listrik dan Gas	29.504,1	0,1	31.461,8	0,1	33.890,0	0,1	39.590,0	0,1	42.190,0	0,1
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15.200,1	0,1	15.845,2	0,1	15.970,0	0,1	16.120,0	0,0	17.150,0	0,0
Konstruksi	2.435.889,1	8,5	2.384.945,2	8,2	2.764.340,0	9,0	3.242.470,0	9,7	3.446.130,0	9,7
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.708.683,4	12,9	3.582.056,3	12,3	3.693.360,0	12,0	4.013.630,0	12,0	4.329.390,0	12,2
Transportasi dan Pergudangan	1.799.239,2	6,3	1.754.964,0	6,0	1.890.050,0	6,2	2.139.200,0	6,4	2.438.650,0	6,9
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.432.549,4	5,0	1.360.189,7	4,7	1.422.890,0	4,6	1.538.250,0	4,6	1.706.020,0	4,8
Informasi dan Komunikasi	154.609,0	0,5	165.577,8	0,6	176.750,0	0,6	188.720,0	0,6	204.510,0	0,6
Jasa Keuangan dan Asuransi	497.491,1	1,7	513.245,2	1,8	539.830,0	1,8	603.000,0	1,8	617.680,0	1,7
Real Estate	1.967.872,3	6,9	2.009.016,9	6,9	2.078.020,0	6,8	2.199.040,0	6,6	2.363.290,0	6,6
Jasa Perusahaan	93.021,8	0,3	89.989,6	0,3	91.750,0	0,3	94.690,0	0,3	105.380,0	0,3
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.685.407,2	5,9	1.729.480,8	6,0	1.762.760,0	5,7	1.831.680,0	5,5	1.954.420,0	5,5
Jasa Pendidikan	2.035.639,5	7,1	2.068.533,0	7,1	2.064.990,0	6,7	2.079.050,0	6,2	2.255.300,0	6,3
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	365.542,1	1,3	390.138,3	1,3	424.820,0	1,4	445.160,0	1,3	493.100,0	1,4
Jasa lainnya	787.678,4	2,7	754.239,8	2,6	771.530,0	2,5	822.590,0	2,5	948.700,0	2,7
PDRB Total	**28.725.281,2**		**29.055.011,6**		**30.664.760,0**		**33.469.210,0**		**35.571.000,0**	

Sumber : Kabupaten Lebak dalam Angka 2023 (BPS), 2023, diolah kembali, 2024

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

2.3.1.3 PDRB per Kapita Kabupaten Lebak

PDRB per kapita merupakan pendekatan perhitungan untuk menunjukan ukuran pendapatan per kapita atau dengan kata lain, PDRB per kapita diasumsikan sebagai pendapatan per kapita. Kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi produk barang/jasa sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita. PDRB per kapita Kabupaten Lebak tahun 2019 – 2023 serta perbandingan dengan nilai PDRB per kapita dengan kabupaten dan kota lain di wilayah Provinsi Banten ditunjukkan pada Gambar 3.4. Adapun dari informasi tersebut, PDRB per kapita Kabupaten Lebak turun pada tahun 2020 dan secara bertahap naik hingga pada angka 24,811 juta rupiah pada tahun 2023.

Di sisi lain, jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di wilayah Provinsi Banten, diketahui bahwa PDRB per kapita Kabupaten Lebak berada pada posisi paling bawah dari 8 kabupaten/kota. Informasi tersebut diketahui dengan menyandingkan nilai PDRB per kapita tahun 2023 kabupaten dan kota di Provinsi Banten. Adapun nilai PDRB per kapita Kabupaten Lebak dan posisinya terhadap nilai PDRB per kapita kabupaten dan kota lain di wilayah Provinsi Banten, dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2-23 24Nilai dan Posisi PDRB per Kapita Kabupaten Lebak Tahun 2019 – 2023

Sumber : Kab Lebak dalam Angka 2023 (BPS), 2023 – Provinsi Banten dalam Angka 2023 (BPS), 2023, diolah kembali, 2024

2.3.1.4 Tingkat Pengganggguran Terbuka

Kategori pengangguran terbuka mencakup penduduk yang aktif mencari pekerjaan, mencakup pula kelompok penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, dan kelompok penduduk yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan serta kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Tabel dibawah menunjukkan jumlah pengangguran terbuka pada angkatan kerja Kabupaten Lebak pada tahun 2019 – 2023.

Tabel 2.16 Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Lebak Tahun 2019 – 2023

Kategori	2019	2020	2021	2022	2023
Bekerja	553.290	596.379	585.592	581.080	668.109
Pengangguran terbuka	47.857	63.527	49.970	54.310	54.745
Total	**601.147**	**659.906**	**635.562**	**635.390**	**722.854**

Sumber: Kab Lebak dalam Angka 2023 (BPS), 2023 – Provinsi Banten dalam Angka 2023 (BPS), 2023, diolah kembali, 2024

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Gambar 2-25 menunjukkan tren persentase tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Lebak tahun 2019 – 2023. Adapun berdasarkan grafik tersebut, dapat diketahui bahwa persentase pengangguran terbuka tertinggi dari lima tahun terakhir yakni terjadi pada tahun 2020 dengan nilai persentase 9,63%. Nilai persentase pengangguran terbuka Kabupaten Lebak menurun pada tahun 2023 menjadi 7,57%.

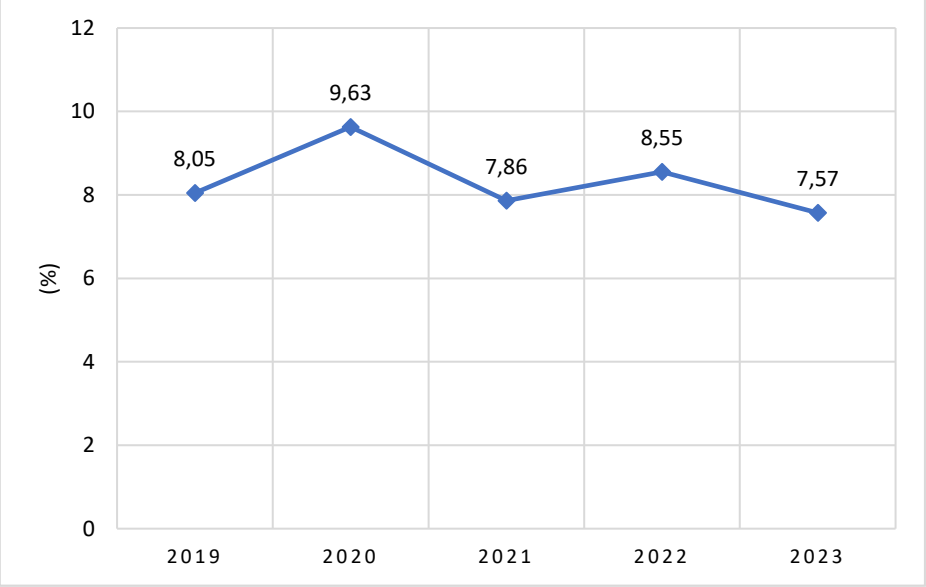

Gambar 2-25 Persentase Pengangguran Terbuka Kabupaten Lebak Tahun 2019 – 2023

Sumber: Kab Lebak dalam Angka 2023 (BPS), 2023 – Provinsi Banten dalam Angka 2023 (BPS), 2023, diolah kembali, 2024

2.3.1.5 Indikator Kinerja RPJMD – Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Indikator kinerja pada fokus kemampuan ekonomi daerah memiliki beberapa indikator seperti sosial, kelautan dan perikanan, pariwisata dan pertanian. Fokus pada kemampuan ekonomi daerah mencakup berbagai aspek strategis yang bertujuan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan investasi dalam infrastruktur yang mendukung, seperti jaringan transportasi dan energi, untuk memfasilitasi aksesibilitas dan mobilitas yang lebih baik bagi industri dan masyarakat umum. Selain itu, pemerintah daerah juga berupaya meningkatkan daya saing ekonomi lokal dengan memperbaiki iklim investasi, mengurangi birokrasi, dan memberikan insentif bagi sektor-sektor strategis. Strategi lainnya termasuk pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, serta mendukung sektor UMKM dengan memfasilitasi akses permodalan dan akses pasar yang lebih luas. Seluruh upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi bagi Kabupaten Lebak di masa depan.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tabel 2.17 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah Tahun 2023

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Capaian	Tingkat Capaian
SOSIAL					
LPE		Persen	5	2,80	56
KELAUTAN DAN PERIKANAN					
Produksi Ikan Budidaya (Satuan: ton)	Jumlah produksi perikanan budidaya yang tersedia	Ton	3.896,76	3.900,29	100,09
Persentase Peningkatan Produksi Ikan Budidaya (%)	Kenaikan atau penurunan jumlah produksi ikan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dikali seratus persen	Persen	1	1,02	102
Produksi Ikan Tangkap (Satuan: ton)	Jumlah produksi perikanan tangkap yang tersedia	Ton	6.570,02	6.670,53	101,53
persentase peningkatan produksi ikan tangkap (%)	Kenaikan atau penurunan jumlah produksi ikan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dikali seratus persen	Persen	0,30	2,25	750
Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Jumlah unit usaha perikanan berizin mematuhi perturan yang berlaku dibagi jumlah seluruh unit usaha perikanan yang memiliki SIUP dikali seratus persen	Persen	100	100	100
PARIWISATA					
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Satuan: Orang)	Laporan Sidaku Tahun 2023	Orang	300	868	289,33
Cakupan peningkatan sarana prasarana objek wisata dalam kondisi baik	Jumlah Sarpras yang dibangun tahun n --- x 100% Jumlah Destinasi Prioritas	Persen	75	83,33	111,11
Persentase kelembagaan di 23 ODTW	Jumlah kelembagaan yang ada di Destinasi Prioritas --- x 100%- 23 ODTW	Persen	100	78,26	78,26
Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (Satuan: Orang)	Laporan Sidaku Tahun 2023	Orang	500.000	1.012.230	202,45
Jumlah Desa Wisata yang dikembangkan (Satuan: Desa)	Jumlah Desa wisata yang dibina tahun 2023	Desa	10	19	190
Persentase sektor ekonomi kreatif yang berkembang	Sub sektor Ekraf yang berkembang --- x 100% Jumlah Sub Sektor Ekraf	Persen	75	76,47	101,96

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Capaian	Tingkat Capaian
Persentase pertumbuhan jasa usaha pariwisata	Jumlah TDUP Tahun n --- x 100% Total TDUP s.d Tahun n-1	Persen	10	627,65	6.276,50
Perentase sumber daya manusia pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi	Jumlah SDM Pariwisata yang tersertifikasi --- x 100% Jumlah SDM Pariwisata yang telah dibina	Persen	20	20	100
Rata-rata lama tinggal Wisatawan (Satuan: Hari)	Rekapitulasi rata-rata lama tinggal wisatawan di hotel --- x 100% Jumlah Hotel tempat wisatawan menginap	Hari	1,7	1,7	100
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Museum	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2023	Persen	90	83,05	92,28
Tingkat hunian akomodasi(Satuan: %)	Jumlah Kamar yang terjual --- x 100% Jumlah Kamar yang tersedia	Persen	11,35	32,58	287,05
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Jumlah konstribusi sektor pariwisata --- x 100% Jumlah PDRB	Persen	5,50	4,6	83,64
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah kunjungan Wisnus s.d tahun n- Jumlah kunjungan wisnus s.d tahun n-1 --- x 100% Jumlah Wisnus s.d tahun n-1	Persen	71,43	85,69	119,96
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Jumlah kunjungan Wisnus s.d tahun n- Jumlah kunjungan wisnus s.d tahun n-1 --- x 100% Jumlah Wisnus s.d tahun n-1	Persen	37,47	35,73	95,36
Kontribusi sector pariwisata terhadap PAD	Jumlah Retribusi Sektor Pariwisata --- x 100% Total PAD Kabupaten Lebak	Persen	0,01	0,13	100
PERTANIAN					
Pertumbuhan Nilai Produksi yang terjual			2	2	100

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Capaian	Tingkat Capaian
Jumlah Produksi :Padi (Satuan: ton)	Jumlah produksi komoditas padi (padi sawah dan padi gogo) Tahun 2023	Ton	644.571,98	611.305	94,84
Jumlah Produksi Daging (Satuan: ton)	Jumlah Ternak yang dipotong diwilayah kabupaten lebak selama 1 tahun	Ton	11.765	15.281,89	129,89
Pertumbuhan Nilai Produksi		Persen	1		
Palawija (Satuan: ton)	Jumlah produksi komoditas palawija Tahun 2023	Ton	38.192,22	24.148,50	63,23
Hortikultura (Satuan: ton)	Jumlah produksi 12 komoditas hortikultura unggulan dan potensial kabupaten lebak Tahun 2023	Ton	199.231,38	261.852,01	131,43
Perkebunan (Satuan: ton)	Jumlah produksi komoditas perkebunan Tahun 2023	Ton	5.184,98	66.118,88	100
Jumlah Produksi Pertanian (Satuan: ton)	Jumlah produksi pertanian (padi, palawija, hortikultura dan perkebunan) Tahun 2023	Ton	916.075,75	963.424,39	105,17
Persentase meningkatnya jumlah bibit ber sklb sesuai SNI		Persen	2	2	100
Persentase Usaha Pertanian yang Berizin	Jumlah usaha pertanian yang memiliki ijin tahun 2019-2023 dibagi jumlah total usaha pertanian yang ada tahun 2019-2023 yang ada di Kabupaten Lebak	Persen	16	38,67	241,69
Nilai tukar petani			97,96	98	100
Persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita		Persen	40,63	41	100
Produktivitas total daerah Satuan: Ribu Rupiah)		Rupiah	46.769	46.769	100
Rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR			130.00	130	100
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.) Satuan: Rupiah)		Rupiah	23.965.773,18	23.965.773	100

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

2.3.2 Fokus Sumber Daya Manusia

Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0 – 14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15 – 64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai indikator yang secara aksar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya presentasi dependency rasio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktig dan tidak produktif lagi. Sebaliknya, persentase dependency rasio yang

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktig dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan Kabupaten Lebak adalah sebanyak 45,58%. Artinya setiap 100 orang yang berusia kerja, mempunyai anggungan sebanyak 45 orang yang belum dan sudah tidak produktif.

Tabel 2.18 Tingkat Ketergantugan Kabupaten Lebak

	Tahun 2023
Jumlah Penduduk Usia <15 tahun	371.545
Jumlah Penduduk Usia >64 tahun	77.366
Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif	448.911
Jumlah Penduduk Usia 15 – 64 Tahun	984.787
Rasio Ketergantungan	45.58

Sumber : Kabupaten Lebak Dalam Angka, 2024

2.3.3 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus pada fasilitas wilayah atau infrastruktur di Kabupaten Lebak mencakup upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang ada serta memperluas jangkauan infrastruktur baru guna mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini melibatkan pengembangan jaringan jalan dan transportasi untuk memfasilitasi mobilitas barang dan orang, serta memperbaiki aksesibilitas ke wilayah pedesaan yang terpencil. Selain itu, pemerintah juga berfokus pada peningkatan infrastruktur telekomunikasi dan teknologi informasi untuk mendukung konektivitas digital, yang menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan ekonomi berbasis teknologi di era digital ini. Seluruh upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan di Kabupaten Lebak.

Tabel 2.19 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Tahun 2023

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Capaian	Tingkat Capaian
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
indeks infrastruktur publik		Persen	70,92	72,09	101,65
Persentase jalan terbangun		Persen	100	100	100
persentase panjang Jalan perdesaan yang terbangun		Persen	100	100	100
Persentase layanan informasi jasa konstruksi		Persen	100	100	100
Persentase tenaga kerja bersertifikat		Persen	100	100	100
Persentase jembatan pedesaan yang terbangun		Persen	100	0	0
persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik		Persen	58,85	59	100
persentase jalan dalam kota kabupaten yang memiliki trotoar dan drainase/saluran		Persen	25,34	25	100
Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik		Persen	80,72	81	100

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Capaian	Tingkat Capaian
persentase saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik		Persen	68,66	68,66	100
Persentase ketersediaan air untuk irigasi	Σ Ketersediaan air irigasi (lt/det) pada setiap musim tanam / Σ Kebutuhan air irigasi (lt/det) berdasarkan rencana tata tanam x 100%	Persen	71,83	71,86	100,04
persentase penataan bangunan dan lingkungan		Persen	3,30	3,30	100
persentase jalan dalam kondisi mantap		Persen	70	72,32	103,31
PERDAGANGAN					
Produktivitas Sektor Perdagangan (Satuan: Juta Rupiah)	PDRB ADHB Sektor Perdagangan dibagi Tenaga Kerja di Sektor Perdagangan	Juta Rupiah	29,15	29,15	100
Persentase sarana perdagangan yang refresentatif		Persen	40	40	100
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)		Persen	2,14	2,14	100
Jumlah alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Satuan: unit)		Unit	4.000	4.000	100

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

2.3.4 Fokus Iklim Berinvestasi

Data statistik penanaman modal yang disetujui pemerintah terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Gambar 3.6 menunjukkan realisasi investasi di Kabupaten Lebak dalam kurun waktu lima tahun terakhir hanya terdata pada 2019 – 2023 dalam juta rupiah.

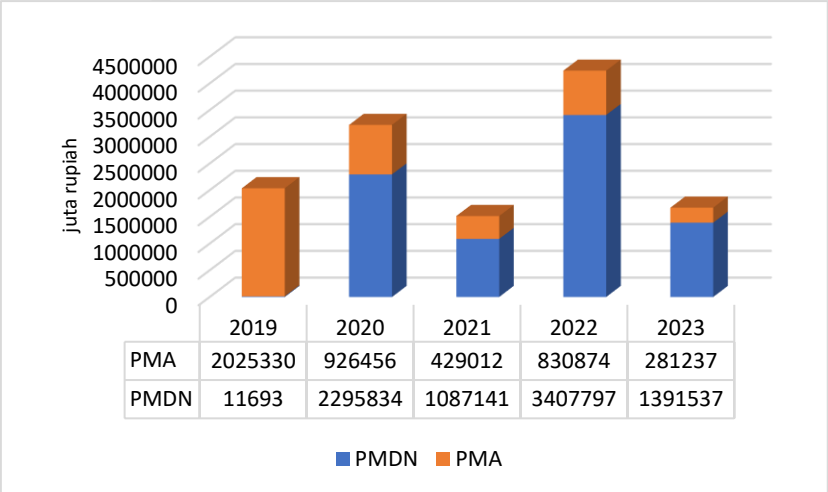

Gambar 2-26 Realisasi Investasi Kabupaten Lebak Tahun 2019 – 2023

Sumber: Kementerian Investasi/ BKPM

DRAFT TIDAK UNTUK DIC PY

Dari grafik tersebut diketahui bahwa realisasi investasi Kabupaten Lebak dalam lima tahun terakhir didominasi oleh investasi PMDN. Adapun data realisasi investasi per triwulan dalam tiga tahun terakhir di Kabupaten Lebak disajikan seperti pada tabel dibawah,

Tabel 2.20 Realisasi Investasi Kabupaten Lebak Tahun 2021 – 2023 (dalam Juta Rupiah)

Triwulan	2021		2022		2023	
	PMDN	PMA	PMDN	PMA	PMDN	PMA
Triwulan I	569.532,2	28.174,1	685.563,7	673.024,1	888.149,9	165.066,8
Triwulan II	307.684,5	1.348,4	420.217,8	75.917,8	36.929,5	21.038,2
Triwulan III	200.184,5	22.164,0	1.933.317,5	68.717,7	146.862,5	10.589,3
Triwulan IV	9.739,4	377.325,2	368.698,2	13.214,0	319.594,7	84.542,9
Total	**1.087.141**	**429.012**	**3.407.797**	**830.874**	**1.391.537**	**281.237**

Sumber: Kementerian Investasi/ BKPM

Tabel 2.21 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Fokus Iklim Berinvestasi

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Capaian	Tingkat Capaian
PENANAMAN MODAL					
Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) (Satuan: Trilyun Rupiah)		Triliun	1,31	1,66	126,72
Jumlah Investor PMA dan PMDN berskala nasional (Satuan: investor)		Investor	48	61	127,08
Jumlah Rencana Investasi PMA/PMDN (Satuan: Trilyun Rupiah)		Triliun	1,50	3,19	212,67
Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan Penanaman Modal		Point	86	83,75	97,38
Persentase Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal		Persen	100	100	100
Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota		Persen	7	7,18	102,57

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.4.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Lebak. Layanan urusan pendidikan difokuskan pada upaya untuk memenuhi sejumlah indikator kinerja utamanya, yaitu: persentase guru bersertifikasi, persentase SD terakreditasi A, APK PAUD, APK SMP, APM SMP, Angka Kelulusan SD, dan APM SD. Tabel 2.14 menunjukkan tingkat ketercapaian pelayanan pada urusan pendidikan. Adapun Gambar 2.14 menunjukkan perkembangan dari indikator kinerja pada urusan pendidikan tahun 2019 – 2023.

Tabel 2.22 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Pendidikan Tahun 2023

Indikator Kinerja Daerah	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		Persen	36,40	50,35	138,32

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja Daerah	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Persentase guru bersertifikat pendidik		Persen	78,30	63,74	81,40
Persentase sekolah SD berakreditasi A		Persen	8,14	7,85	96,44
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	(Jumlah murid SMP atau sederajat/Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun) × 100%	Persen	99,17	91,19	91,95
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP		Persen	86,20	77,38	89,77
Angka Kelulusan SD		Persen	98,90	99,95	101,06
Persentase sekolah SMP berakreditasi A		Persen	10,10	12,11	119,90
Angka Partisipasi Murni (APM) SD		Persen	99,18	99,43	100,25
Rata-rata Lama Sekolah		Tahun	6,55	6,60	100,76
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD		Persen	57,60	50,53	87,73
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	(Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun yang masih bersekolah/ Jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun) × 100%	Persen	98,30	99,57	101,29
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	(Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun yang masih bersekolah/ Jumlah penduduk usia 13 – 15 tahun) × 100%	Persen	87,90	96,92	110,26

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

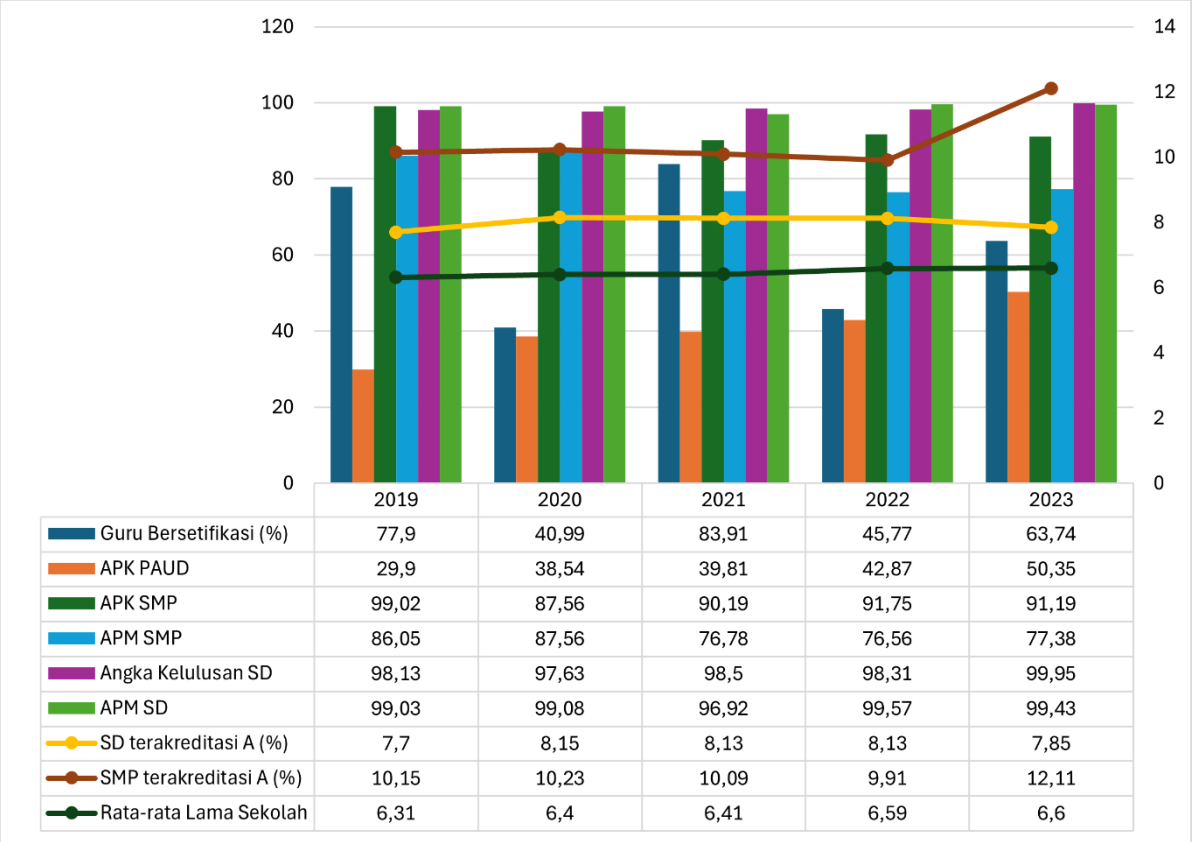

	2019	2020	2021	2022	2023
Guru Bersetifikasi (%)	77,9	40,99	83,91	45,77	63,74
APK PAUD	29,9	38,54	39,81	42,87	50,35
APK SMP	99,02	87,56	90,19	91,75	91,19
APM SMP	86,05	87,56	76,78	76,56	77,38
Angka Kelulusan SD	98,13	97,63	98,5	98,31	99,95
APM SD	99,03	99,08	96,92	99,57	99,43
SD terakreditasi A (%)	7,7	8,15	8,13	8,13	7,85
SMP terakreditasi A (%)	10,15	10,23	10,09	9,91	12,11
Rata-rata Lama Sekolah	6,31	6,4	6,41	6,59	6,6

Gambar 2-27 Perkembangan Indikator Urusan Pendidikan Tahun 2019 – 2023

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang RPD Kabupaten Lebak 2025 – 2026, diolah kembali, 2024

Dari diatas menunjukkan bahwa indikator rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2022 sebesar 6,59 tahun yang berarti bahwa sebagian besar penduduk hanya tamat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Berdasarkan tren RLS di atas, ini menunjukkan peningkatan yang cukup memuaskan dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya 6,31 tahun. Yang menggembirakan adalah meningkatnya angka partisipasi, terutama partisipasi murni (APM) pada jenjang pendidikan SD/sederajat yang pada tahun 2022 mencapai 99,57%, namun hal ini tidak berbanding lurus dengan APM SMP/sederajat yang semakin menurun pasca pandemi covid-19, hingga pada tahun 2022 hanya sebesar 76,56 persen. Berdasarkan laporan Perbup Nomor 1 Tahun 2024, pandemi covid-19 menjadikan kesadaran orang tua yang memiliki anak usia sekolah menunda anaknya untuk di sekolahkan.

Selain itu, indikator Gambar 2.15 indikator kinerja pada urusan pendidikan tahun 2019 - 2023. Yang perlu menjadi perhatian yakni indikator rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Lebak. Jika dibandingkan dengan RLS Provinsi Banten dan Nasional, RLS Kabupaten Lebak masih jauh di bawah. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang RPD Kabupaten Lebak 2025 – 2026, tantangan terbesar pada bidang pendidikan adalah mencapai rata-rata lama sekolah 9 tahun, atau menuntaskan wajib belajar 9 tahun melalui optimalisasi APM pada jenjang SD dan SMP, serta optimalisasi pendidikan kesetaraan pada jenjang SD dan SMP guna meningkatkan APS dan APK. Dengan optimalnya dua skenario ini maka tersedia input yang memadai bagi Pemerintah Provinsi untuk “memprosesnya” ke jenjang SMA/sederajat yang menjadi

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

kewenangan provinsi, sehingga rata-rata lama sekolah masyarakat Kabupaten Lebak dapat ditingkatkan hingga 12 tahun.

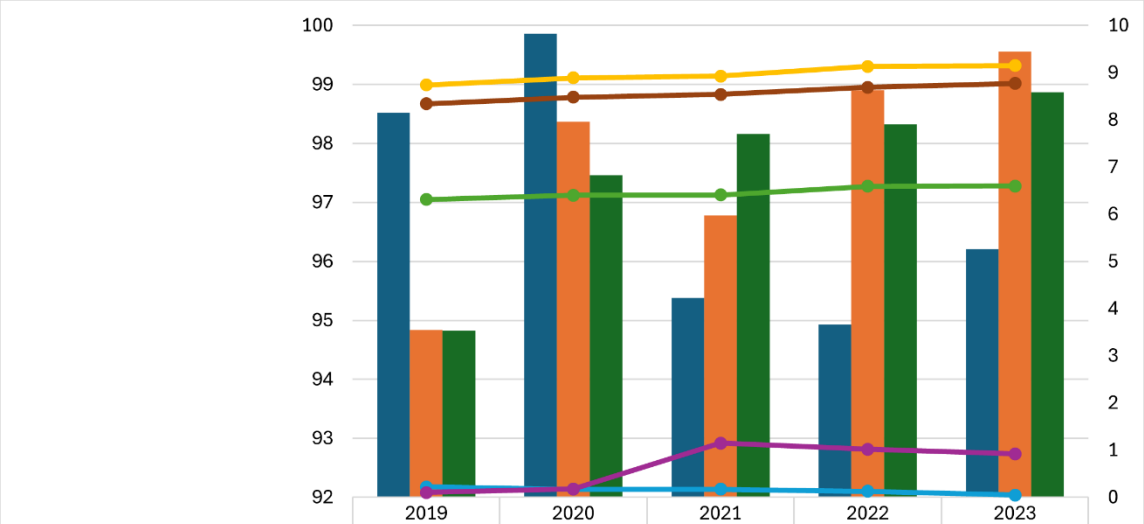

	2019	2020	2021	2022	2023
AMH	98,52	99,86	95,38	94,93	96,21
Angka Melanjutkan SD ke SMP	94,84	98,37	96,78	98,9	99,56
Angka Kelulusan SMP	94,83	97,46	98,16	98,32	98,87
APS SD	0,22	0,17	0,17	0,13	0,05
APS SMP	0,1	0,18	1,15	1,02	0,92
RLS Kabupaten Lebak	6,31	6,4	6,41	6,59	6,6
RLS Provinsi Banten	8,74	8,89	8,93	9,13	9,15
RLS Nasional	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77

Gambar 2-28 Perkembangan Indikator Urusan Pendidikan Tahun 2019 – 2023

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang RPD Kabupaten Lebak 2025 – 2026, diolah kembali, 2024

Dari hasil pelaksanaan FGD dan kuesioner OPD di lingkungan Kabupaten Lebak, ditemukan beberapa permasalahan pada urusan pendidikan yang ditunjukkan seperti pada Tabel 2.15. Khusus pada indikator RLS Kabupaten Lebak, ditemukan beberapa faktor penyebab RLS Kabupaten Lebak belum mencapai ketentuan wajib belajar 9 tahun dan masih jauh di bawah RLS Provinsi Banten dan Nasional. Beberapa faktor penyebab yang dimaksud tersebut seperti kemiskinan, kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan, kurangnya minat belajar siswa, akses ke sekolah (jarak tempuh menuju sekolah), kualitas pendidikan belum merata, kurangnya fasilitas sekolah, tingginya angka pernikahan di bawah umur, dan kurangnya lapangan pekerjaan bagi lulusan sekolah.

Tabel 2.23 Temuan Permasalahan Urusan Pendidikan

Indikator Kinerja Daerah	Tingkat Capaian	Intepretasi	Notulensi FGD	Kuesioner FGD	Kuesioner Instansi
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	138,32	melampaui (>)			
Persentase guru bersertifikat pendidik	81,40	belum tercapai (<)	Terkait dengan sertifikasi guru perlu diperhatikan		

DRAFT - TIDAK UNTUK DIFOTOKOPY

Indikator Kinerja Daerah	Tingkat Capaian	Intepretasi	Notulensi FGD	Kuesioner FGD	Kuesioner Instansi
Persentase sekolah SD berakreditasi A	96,44	belum tercapai (<)			
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	91,95	belum tercapai (<)			
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	89,77	belum tercapai (<)	Untuk data lulusan SD yang melanjutkan ke SMP tercatat rendah, karena di Lebak ini banyak siswa yang melanjutkan ke sekolah agama (madrasah) sehingga perhitungannya berbeda dan dianggap tidak memenuhi target		
Angka Kelulusan SD	101,06	melampaui (>)	Angka kelulusan SD seharusnya tinggi		
Persentase sekolah SMP berakreditasi A	119,90	melampaui (>)			
Angka Partisipasi Murni (APM) SD	100,25	melampaui (>)			
Rata-rata Lama Sekolah	100,76	melampaui (>)			- Rata-rata Lama Sekolah (Dinas Pendidikan) menentukan Indeks Pembangunan Manusia - Beberapa faktor yang menjadi permasalahan dalam ketercapaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lebak, antara lain : 1. Kemiskinan 2. Kuranganya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan 3. Kurangnya minat belajar siswa

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja Daerah	Tingkat Capaian	Intepretasi	Notulensi FGD	Kuesioner FGD	Kuesioner Instansi
					4. Akses ke sekolah (Jarak Tempuh menuju Sekolah) 5. Kualitas Pendidikan belum merata 6. Kurangnya Fasilitas Sekolah 7. Tingginya angka pernikahan di bawah umur 8. Kurangnya Lapangan Pekerjaan bagi Lulusan sekolah
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	87,73	belum tercapai (<)			
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	101,29	melampaui (>)			
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	110,26	melampaui (>)			

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2024

2.4.1.2 Kesehatan

Selain urusan pendidikan, kesehatan merupakan salah satu urusan yang terkait pelayanan dasar, yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan bidang kesehatan antara lain bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Melalui upaya tersebut diharapkan akan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

tercapai kondisi kesehatan masyarakat yang lebih baik. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang RPD Kabupaten Lebak 2025 – 2026, secara umum kondisi urusan kesehatan di Kabupaten Lebak masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan SDM sebagaimana tercermin dari rasio tenaga medis dan paramedis terhadap penduduk, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kondisi perilaku hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat yang masih belum sesuai harapan. Meski demikian, upaya yang optimum dan intensif terus dilakukan guna meningkatkan kinerja layanan urusan kesehatan sebagaimana tercermin dari peningkatan indikator kesehatan masyarakat secara makro, maupun kinerja pelayanan kesehatan sebagaimana tercermin pada Tabel 2.16.

Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan dan SDM ini teridentifikasi menjadi temuan permasalahan melalui pelaksanaan FGD dan hasil kuesioner OPD di lingkungan Kabupaten Lebak seperti ditunjukkan pada Tabel 2.25 . Selain itu, tren perkembangan indikator pada urusan kesehatan di Kabupaten Lebak tahun 2019 – 2023.

Tabel 2.24 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Kesehatan Tahun 2023

Indikator Kinerja Daerah	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
Cakupan pembinaan PHBS di tatanan kesehatan	Jumlah Pembinaan PHBS di tatanan kesehatan dibagi dengan Jumlah Total Tatanan Kesehatan yang ada di kali 100	Persen	90,	94,17	104,63
Ketersediaan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar minimal ketenagaan di setiap puskesmas	Jumlah SDMK sesuai standar / Jumlah SDMK di puskesmas x 100	Persen	100	100	100
Persentase legalitas tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah tenaga kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan / Jumlah tenaga kesehatan x 100	Persen	100	100	100
Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang terpenuhi / Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang seharusnya terpenuhi x 100	Persen			
Persentase Puskesmas yang melaksanakan manajemen sesuai standar	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan manajemen sesuai standar / Jumlah Puskesmas di daerah x 100	Persen	100	100	100
Persentase pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai standar	Capaian rata-rata jenis pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai standar	Persen	80	81,4	101,75
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular	Jumlah penemuan penderita penyakit menular / Jumlah penanganan penderita penyakit menular x 100	Persen	100	78,5	78,50

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja Daerah	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Persentase Puskesmas Terpenuhi Kebutuhan Obat Secara Tepat dan Rasional	Puskesmas yang terpenuhi Obat Secara Tepat dan Rasional / Kebutuhan Obat Secara di Puskesmas x 100	Persen	-		
Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun tahun n / Jumlah destinasi prioritas x 100	Persen	-		
Persentase tingkat capaian SPM	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan / Target yang ditetapkan x 100%	Persen	100	91,23	91,23
Persentase pelayanan kesehatan keluarga	Jumlah pelayanan kesehatan keluarga/ Jumlah keluarga di daerah x 100	Persen	-		
Persentase pelayanan kesehatan keluarga sesuai standar	Jumlah pelayanan kesehatan keluarga/ Jumlah keluarga di daerah x 101	Persen	-		
Indeks keluarga sehat	Jumlah keluarga sehat dibagi jumlah seluruh keluarga di daerah x 100	Point	0,23	0,232	100,87
Persentase industri rumah tangga dan farmasi sesuai standar	Jumlah industri rumah tangga dan farmasi sesuai standar / Jumlah industri rumah tangga pangan dan farmsi yang ada x 100	Persen	100	100	100
Persentase pelayanan kesehatan keluarga	Jumlah pelayanan kesehatan keluarga/ Jumlah keluarga di daerah x 100	Persen	-		
Persentase pelayanan kesehatan keluarga sesuai standar	Jumlah pelayanan kesehatan keluarga/ Jumlah keluarga di daerah x 100	Persen	100	89,51	89,51
Persentase Puskesmas dengan sarana dan prasarana sesuai standar	Jumlah Puskesmas dengan sarana dan prasarana sesuai standar dibagi dengan jumlah total seluruh puskesmas di kali 100	Persen	71	64,46	90,79
Persentase puskesmas terakreditasi minimal madya	Jumlah puskesmas dengan terakreditasi minimal madya dibagi jumlah puskesmas dikali 100	Persen	71,42	41	57,41
Persentase balita kurang Gizi mendapat perawatan	Jumlah balita kurang Gizi mendapat perawatan dibagi dengan jumlah balita kurang Gizi dikali 100	Persen	100	100	100
Persentase Puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	Jumlah Puskesmas dengan tenaga kesehatan yang sesuai standar kememkes RI dibagi dengan jumlah totan Puskesmas dikali 100	Persen	80	60	75
Cakupan pembinaan PHBS di tatanan kesehatan	Jumlah Pembinaan PHBS di tatanan kesehatan dibagi dengan Jumlah Total Tatanan Kesehatan yang ada di kali 100	Persen	90,00	94,17	104,63
Rasio Rujukan kasus Non Spesialitik (RRNS) dari Puskesmas ke Rumah Sakit	Jumlah kasus rujukan non spesialistik / jumlah seluruh kasus rujukan Puskesmas ke RS	Persen	4,71	0,95	20,17
Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai Formularium Nasional (Fornas)	Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai Formularium Nasional (Fornas) / Jumlah total item obat dan BMHP sesuai Fornas yang ada x 100%	Persen	96,00	94	97,92

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja Daerah	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Persentase puskesmas yang melaksanakan SIKDA	Jumlah puskesmas yang melaksanakan SIKDA dibagi dengan jumlah seluruh puskesmas dikali 100	Persen	100	100	100
Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung RS/ Jumlah penduduk di daerah x 100 %	Persen	0,91	0,91	100
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan Tk. Kab. yang terakreditasi/ Jumlah RS Rujukan di Kab. x 100	Persen	100	100	100
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kottersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama X 100	Persen	99,69	89,7	89,98
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran ibu bersalin diwilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100	Persen	98,90	89,5	90,50
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kotatersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama di Kali 100	Persen	94,78	95,02	100,25
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1 + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + Balita usia 36-59 bulan mendapakan pelayanan sesuai standar 3 dibagi dengan Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama di Kali 100	Persen	92,28	102,1	110,64
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran dibagi dengan Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama. di kali 100	Persen	80,77	98,11	121,47

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja Daerah	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan Jumlah orang usia 15–59 tahun di kab/kota yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun di kali 100	Persen	65,61	68	103,64
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100	Persen	60,80	91,35	150,25
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah penderita hipertensi usia≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun di kali 100	Persen	51,98	62	119,28
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun di dalam wilayah kerjanya yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia ≥15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjannya berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama di kali 100	Persen	83,74	91	108,67
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja Kab/Kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja Kab/Kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama di kali 100	Persen	42,89	80	186,52
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (Satuan:%)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100	Persen	66,80	93,92	140,60
Persentase orang dengan resiko terinfeksi	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai	Persen	85,79	94	109,57

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja Daerah	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV dikab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali 100				
Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung RS Rujukan/ Jumlah penduduk di daerah x 100 %	Persen	0,88	0,88	100

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

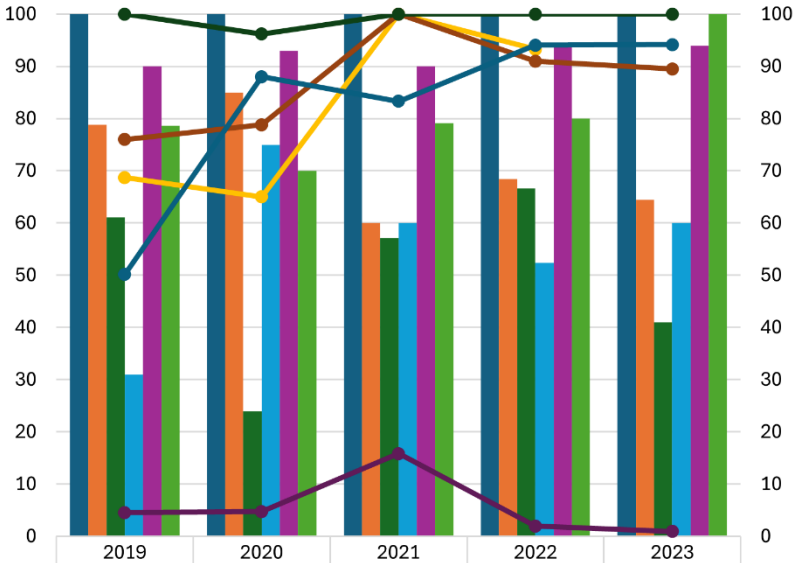

	2019	2020	2021	2022	2023
% Puskesmas dg Manajemen sesuai Std	100	100	100	100	100
% Puskesmas dg Sarpra sesuai Std	78,77	85	60	68,39	64,46
% Puskesmas terakreditasi ≥ madya	61,1	24	57,14	66,67	41
% Puskesmas dg Nakes sesuai Std	31	75	60	52,38	60
% Ketersediaan obat dan BMHP sesuai Fornas	90	93	90	94	94
% Puskesmas melaksanakan SIKDA	78,57	70	79,07	80	100
% Pely. pencegahan & pengendalian penyakit sesuai Std	68,7	65	100	93,27	
% Yankes Keluarga sesuai Std	76	78,8	100	90,99	89,51
% Balita kurang Gizi mendapat perawatan	100	96,2	100	100	100
Cakupan pembinaan PHBS di tatanan kesehatan	50,17	88	83,3	94,05	94,17
Rasio Rujukan kasus Non Spesialitik (RRNS) dari Puskesmas ke RS (%)	4,5	4,72	15,86	1,96	0,95

Gambar 2-29 Perkembangan Indikator Urusan Kesehatan Tahun 2019 – 2023

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang RPD Kabupaten Lebak 2025 – 2026, diolah kembali, 2024

Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan dan SDM ini teridentifikasi menjadi temuan permasalahan melalui pelaksanaan FGD dan hasil kuesioner OPD di lingkungan Kabupaten Lebak seperti ditunjukkan pada Tabel 2.25 . Berdasarkan hasil laporan Buku IKM Lebak Tahun 2022, permasalahan utama yang teridentifikasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat Puskesmas secara umum terletak pada 3 (tiga) unsurnya, yaitu unsur waktu pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta unsur sarana prasarana penunjang pelayanan yang

belum sesuai ekspekstasi publik. Ketiga unsur tersebut bahkan tercatat masih memiliki indeks di bawah indeks agregat kabupaten sebesar 79,11. Pada sisi RSUD, unsur waktu pelayanan, perilaku petugas pelayanan, dan pengelolaan pengaduan masih perlu menjadi fokus perhatian.

Merujuk pada hasil laporan Buku IKM Kabupaten Lebak Tahun 2022, terdapat sebanyak 17 (tujuh belas) puskesmas atau sekira 40% puskesmas yang disurvei memiliki capaian IKM di bawah indeks agregat kabupaten sebesar 79,11, yaitu: Sobang, Sarageni, Parungsari, Pajagan, Kalanganyar, Curugbitung, Citorek, Cisimeut, Cirinteun, Cimarga, Cikulur, Cihara, Cigemblong, Cibeber, Bojongmanik, dan Baros. Di sisi lain, 26 puskesmas lainnya dan RSUD telah mencapai indeks di atas IKM kabupaten. Di antara ke-17 puskesmas dimaksud, terdapat 6 (enam) puskesmas yang kualifikasi mutu pelayanannya masih berlevel C, yaitu: Sarageni, Kalanganyar, Curugbitung, Citorek, Cirinteun, dan Cigemblong.

Tabel 2.25 Temuan Permasalahan Urusan Kesehatan

Indikator Kinerja Daerah	Tingkat Capaian	Intepretasi	Notulensi FGD	Kuesioner FGD	Kuesioner Instansi
Cakupan pembinaan PHBS di tatanan kesehatan	104,63	melampaui (>)			
Ketersediaan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar minimal ketenagaan di setiap puskesmas	100,00	sesuai (=)		Masih belum terpenuhinya ketersediaan sumber daya kesehatan sesuai standar -> Dinas Kesehatan 2024	
Persentase legalitas tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	sesuai (=)			
Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit		belum tercapai (<)		Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit -> Kuesioner FGD, 2024 (RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak) Masih terbatasnya sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan -> Dinas Kesehatan 2024	
Persentase Puskesmas yang melaksanakan manajemen sesuai standar	100,00	sesuai (=)			
Persentase pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai standar	101,75	melampaui (>)			

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja Daerah	Tingkat Capaian	Intepretasi	Notulensi FGD	Kuesioner FGD	Kuesioner Instansi
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular	78,50	belum tercapai (<)			
Persentase Puskesmas Terpenuhi Kebutuhan Obat Secara Tepat dan Rasional		belum tercapai (<)			
Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik		belum tercapai (<)		Rendahnya cakupan sarana dan prasarana (alat kesehatan) dalam kondisi baik -> Kuesioner FGD, 2024 (RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak)	
Persentase tingkat capaian SPM	91,23	belum tercapai (<)			
Persentase pelayanan kesehatan keluarga		belum tercapai (<)			
Persentase pelayanan kesehatan keluarga sesuai standar		belum tercapai (<)			
Indeks keluarga sehat	100,87	melampaui (>)			
Persentase industri rumah tangga dan farmasi sesuai standar	100,00	sesuai (=)			
Persentase pelayanan kesehatan keluarga		belum tercapai (<)			
Persentase pelayanan kesehatan keluarga sesuai standar	89,51	belum tercapai (<)			
Persentase Puskesmas dengan sarana dan prasarana sesuai standar	90,79	belum tercapai (<)			
Persentase puskesmas terakreditasi minimal madya	57,41	belum tercapai (<)			
Persentase balita kurang Gizi mendapat perawatan	100,00	sesuai (=)			
Persentase Puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar	75,00	belum tercapai (<)			
Cakupan pembinaan PHBS di tatanan kesehatan	104,63	melampaui (>)			
Rasio Rujukan kasus Non Spesialitik (RRNS)	20,17	belum tercapai (<)			

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja Daerah	Tingkat Capaian	Intepretasi	Notulensi FGD	Kuesioner FGD	Kuesioner Instansi
dari Puskesmas ke Rumah Sakit					
Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai Formularium Nasional (Fornas)	97,92	belum tercapai (<)			
Persentase puskesmas yang melaksanakan SIKDA	100,00	sesuai (=)			
Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	100,00	sesuai (=)			
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100,00	sesuai (=)			
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	89,98	belum tercapai (<)			
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	90,50	belum tercapai (<)			
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,25	melampaui (>)			
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	110,64	melampaui (>)			
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	121,47	melampaui (>)			
Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	103,64	melampaui (>)			
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	150,25	melampaui (>)			
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	119,28	melampaui (>)			
Persentase penderita DM yang mendapatkan	108,67	melampaui (>)			

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja Daerah	Tingkat Capaian	Intepretasi	Notulensi FGD	Kuesioner FGD	Kuesioner Instansi
pelayanan kesehatan sesuai standar					
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	186,52	melampaui (>)			
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (Satuan:%)	140,60	melampaui (>)			
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	109,57	melampaui (>)			
Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	100,00	sesuai (=)			

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2024

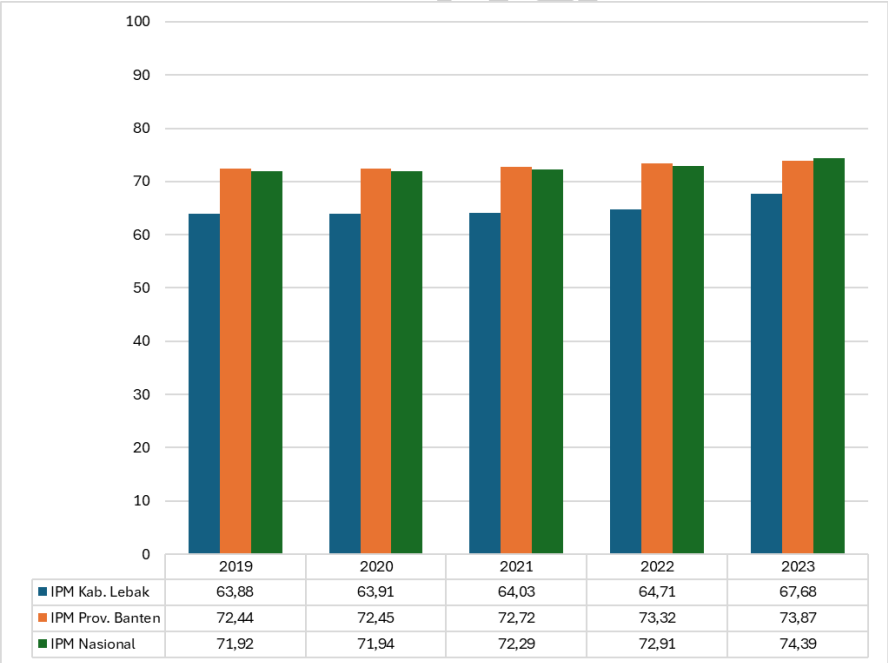

Gambar 2-30 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lebak Tahun 2019 – 2023

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2024

Gambar di atas menunjukkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lebak. IPM merupakan salah satu tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya daerah membangun kualitas hidup masyarakat. IPM Kabupaten Lebak selama periode tahun 2019 – 2023 terus mengalami peningkatan, dari yang sebelumnya 63,88 pada tahun 2019 menjadi 67,68 pada tahun 2023. Hal ini menunjukan bahwa terjadi

DRAFT UNTUK DICOPY

perbaikan dalam pembangunan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lebak. Namun demikian, nilai IPM Kabupaten Lebak masih berada di bawah nilai IPM Provinsi Banten dan Nasional.

2.4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Jaringan Jalan

Jaringan jalan yang berada di Kabupaten Lebak terdiri atas jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, serta jalan desa. Jalan tersebut berfungsi untuk sebagai penghubung Kabupaten Lebak dengan kab/kota lainnya maupun antar desa/kecamatan di dalam Kabupaten Lebak Sendiri. Berdasarkan Kabupaten Lebak dalam Angka 2023 (BPS) maka jalan kabupaten yang ada di Kabupaten Lebak ada sepanjang 773.93 km pada tahun 2022. Sejak tahun 2019 – 2022 maka tidak terlihat adanya pertumbuhan panjang jalan kabupaten di Kabupaten Lebak. Apabila dilihat dari jenis permukaan maka Jalan Aspal memiliki proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan jenis permukaan lain seperti kerikil, tanah, dan lainnya. Kondisi jalan dengan jenis perkerasan aspal 76%, kerikil 1,3% dan lainnya 22%. Panjang jalan kabupaten berdasarkan jenis permukaan dapat dilihat lebih jelas pada tabel dan grafik berikut.

Tabel 2.26 Panjang Jalan Kabupaten di Kabupaten Lebak berdasarkan Jenis Permukaan (Km) Tahun 2019 – 2023

Jenis Perkerasan	2019	2020	2021	2022	2023
Aspal	579,9	506,206	471,662	589,733	53,22
Kerikil	78,7	150,093	171,546	10,3	25,65
Tanah	-	-	-	-	-
Lainnya	115,26	117,632	130,722	173,897	120,85
Total	**773,93**	**773,93**	**773,93**	**773,93**	**199,71**

Sumber : diolah dari Kab Lebak dalam Angka 2023 (BPS), 2023

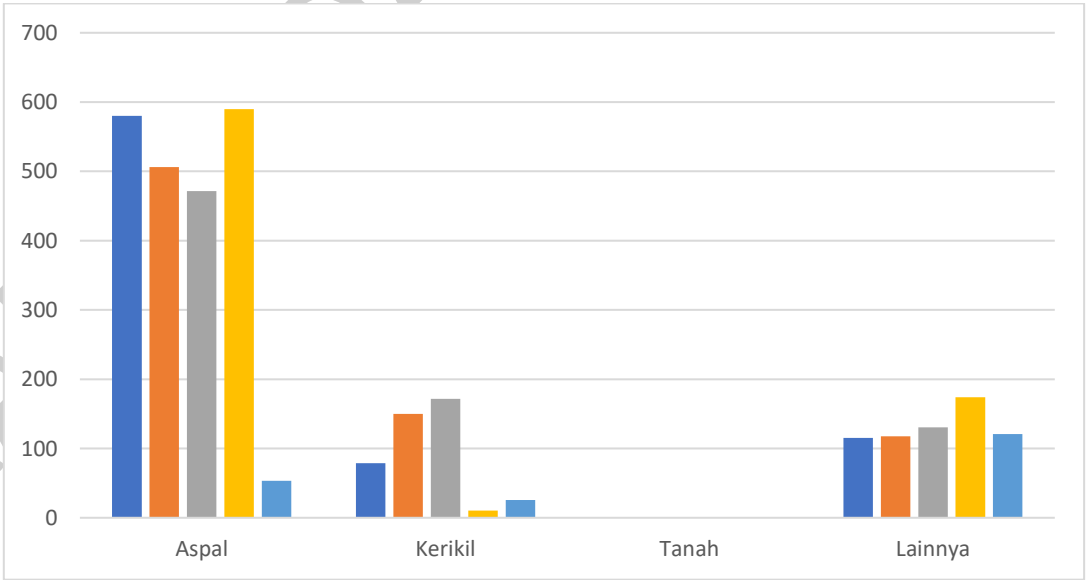

Gambar 2-31 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan Jalan (Km) 2019 - 2022

Sumber : diolah dari Kab Lebak dalam Angka 2023 (BPS), 2023

Apabila dilihat dari kondisi jalan maka jaringan jalan yang berada di Kabupaten Lebak masih berada dalam kondisi baik atau sedang. Namun, terdapat penurunan kondisi jalan pada kondisi baik dimana pada tahun

DRAFT TIDAK UNTUK DICOPY

2019, panjang jalan yang berada pada kondisi baik berkisar 374.82 Km menurun menjadi 268,71 Km pada tahun 2022. Berikut merupakan tabel dan grafik yang menunjukkan kondisi jalan kabupaten di Kabupaten Lebak.

Tabel 2.27 Panjang Jalan Kabupaten di Kabupaten Lebak berdasarkan Kondisi Jalan (Km) Tahun 2019 – 2023

Kondisi Jalan	Panjang Jalan Kabupaten per Tahun (dalam Km)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Baik	374.82	413.55	287.51	268.716	147,57
Sedang	145.65	113.183	239.765	261.571	12,96
Rusak	188.07	146.115	113.762	113.887	4,26
Rusak Berat	65.39	101.082	132.896	129.756	34,92
Total	**773.93**	**773.93**	**773.93**	**773.93**	**199,71**

Sumber : diolah dari Kabupaten Lebak dalam Angka 2023 (BPS), 2023

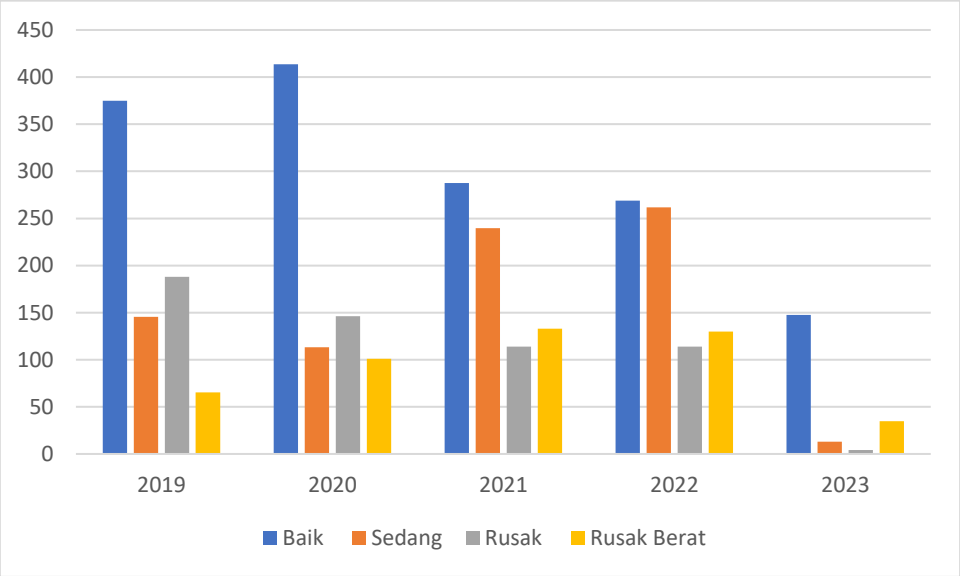

Gambar 2-32 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan (Km) 2019 - 2023

Sumber : diolah dari Kab Lebak dalam Angka 2023 (BPS), 2023

Jalan Kabupaten sendiri berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor 620/Kep.82- PUPR/2023 Tentang penetapan status jalan ruas jalan kabupaten maka terdapat dua kelompok yaitu jalan dalam kota dan jalan luar kota. Jalan dalam kota di Kab. Lebak merupakan jalan kabupaten yang melintasi kawasan perkotaan dimana terdiri atas 59 ruas jalan. Fungsi jalan dalam kota sendiri mayoritas terdiri atas jalan lokal primer (JLP) dan JSK. Kelas Jalan mayoritas di Jalan dalam kota adalah III B yaitu jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan muatan yang memiliki ukuran lebar tidak lebih dari 2.500 milimeter, ukuran panjangnya tidak lebih dari 12.000 milimeter serta dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan adalah 8 ton. Sedangkan jalan luar kota berdasarkan keputusan bupati tersebut terdiri atas 48 ruas dengan mayoritas fungsi jalan adalah jalan lingkungan primer dengan mayoritas kelas jalan adalah IIIC. Kelas jalan IIIC merupakan jalan yang dapat dilalui oleh kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermuatan, yang memiliki ukuran lebar tidak lebih dari 2.100 milimeter, dengan ukuran panjang tidak lebih dari 9.000 milimeter, serta dengan muatan sumbu terberat yang diizinkan adalah 8 ton.

DRAFT - TIDAK DICOPY

Tabel 2.28 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
Persentase dokumen rencana tata ruang di susun		Persen	100	100	100
Persentase alat berat dalam kondisi baik		Persen	83,72	82,5	98,54
Persentase pembangunan penampung air (embung)		Persen	100	100	100
Persentase ketersediaan fasilitas umum di kecamatan		Persen	100	100	100
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang		Persen	75	75	100
Persentase jalan kabupaten terpelihara / ditingkatkan		Persen	32,99	32,83	99,52
Persentase irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik		Persen	71,83	71,83	100
persentase berkurangnya kawasan yang terkena dampak banjir		Persen	85,70	85,70	100
Persentase layanan informasi jasa kontruksi		Persen	100	100	100
persentase kesesuaian tata ruang		Persen	100	100	100
persentase jumlah desa binaan P2WKSS tertata		Persen	100	0	0
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi		Persen	71,83	71,83	100
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota		Persen	72,17	74,3	102,95
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		Persen	73,33	73,45	100,16
Rasio kepatuhan IMB kab/ kota		Persen	94	94	100
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota		Persen	70	75,04	107,20
Persentase saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik		Persen	68,66	68,66	100

Sumber: Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

Isu pengendalian pemanfaaatan ruang di Kabupaten Lebak menunjukkan bahwa persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang sudah 100% dan persentase dokumen rencana tata ruang di susun yaitu 100%. Hal tersebut menujukkan bahwa selama ini sudah terdapat pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dengan baik.

2.4.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan urusan yang terkait langsung dengan pertumbuhan penduduk dan wilayah. Adapun sasaran utama Pemerintah Kabupaten Lebak dalam urusan ini adalah rumah layak huni bagi masyarakat, pemenuhan prasarana dan sarana umum yang layak bagi sejumlah kawasan perumahan/permukiman penduduk, serta pengendalian dan penataan kawasan kumuh di perkotaan. Selama kurun waktu 2017-2020 telah

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

dilakukan peningkatan kualitas rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 4.114 unit rumah, sehingga jumlah rumah layak huni pada tahun 2020 sebanyak 296.316 unit (86,74%). Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD 2019-2024, hasil capaian urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.29 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Indikator Kinerja Daerah	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Persentase Rumah Tidak Layak Huni	(Jumlah rumah tidak layak huni/ Jumlah rumah di Kab. Lebak) x 100%	Persen	12,42	12,85	96,65
Persentase Peningkatan Penanganan Perumahan dengan PSU Layak	(Jumlah penanganan PSU Perumahan s/d tahun n/ Jumlah Perumahan dengan PSU tidak memenuhi syarat) x 100%	Persen	62,50	37,5	60,00
Persentase Peningkatan Penanganan Kawasan Kumuh di Perkotaan	(Jumlah rumah tidak layak huni/ Jumlah rumah di Kab. Lebak) x 100%	Persen	100	44,04	44,04
persentase kawasan kumuh di perkotaan	(Jumlah luas kawasan kumuh di perkotaan/ Jumlah luas kawasan perkotaan) x 100%	Persen	0,49	1,14	232,65
Persentase rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program Kabupaten	(Jumlah target rumah korban bencana yang dibangun/ Jumlah rumah korban bencana yang dibangun) x 100%	Persen	100	87,5	87,50
persentase perumahan dengan PSU memenuhi syarat	(Jumlah Perumahan dengan PSU memenuhi syarat/ Jumlah Perumahan di Kab. Lebak) x 100%	Persen	87,80	93	100
persentase masyarakat yang menghuni rumah layak huni	(Jumlah masyarakat yang menghuni rumah layak huni/ Jumlah penduduk kab. Lebak) x 100%	Persen	85,73	85,73	100
Presentasi kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten yang ditangani	(Jumlah luas penanganan kawasan kumuh di perkotaan s/d tahun n/ Jumlah luasan kawasan kumuh di perkotaan) x 100%	Persen	100	44,04	44,04
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	(Jumlah target rumah korban bencana yang dibangun/ Jumlah rumah korban bencana yang dibangun) x 100%	Persen	100	87,5	87,50

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja Daerah	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	(Jumlah rumah tidak layak huni/ Jumlah rumah di Kab. Lebak) x 100%	Persen	12,42	12,85	103,46

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD 2019-2024 sebagian besar indikator kinerja daerah dalam sektor ini menunjukkan tingkat capaian yang positif. Target pengurangan kawasan kumuh dan penanganan kawasan tidak layak huni melebihi target (lebih dari 100% tingkat capaian), diikuti oleh indikator lainnya seperti jumlah masyarakat yang memiliki rumah layak huni, peningkatan jumlah penanganan rumah korban bencana dan peningkatan penanganan PSU. Sedangkan indikator kinerja yang masih rendah tingkat capaiannya (<50%) adalah jumlah perumahan tidak layak huni dan luas kawasan kumuh yang dapat ditangani oleh Pemerintah Daerah.

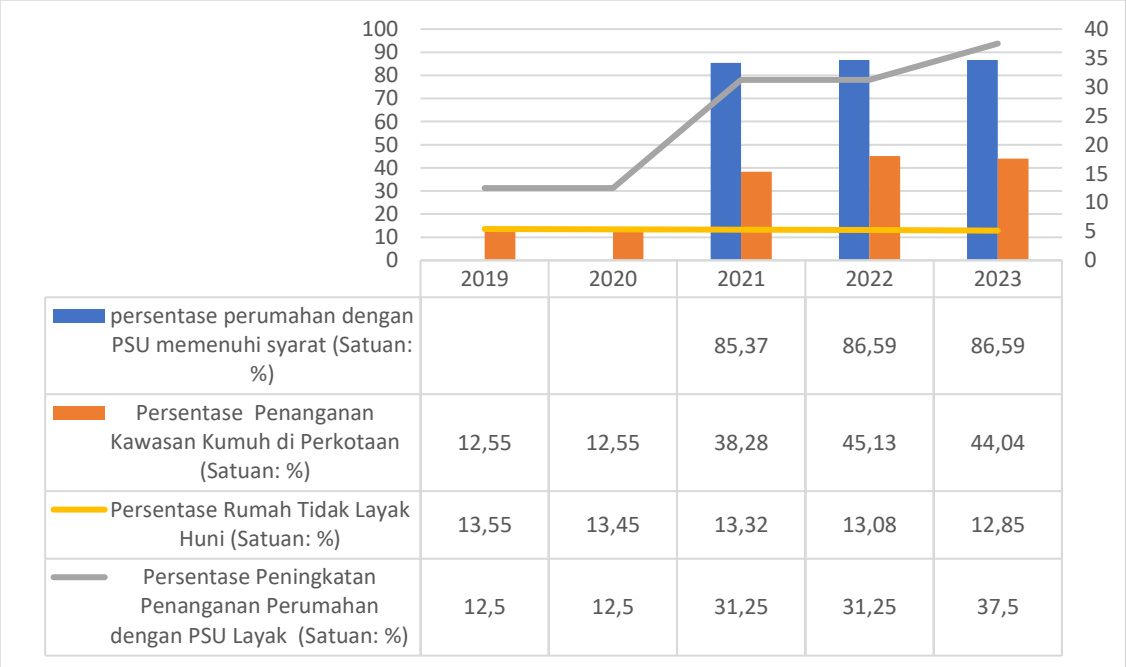

	2019	2020	2021	2022	2023
persentase perumahan dengan PSU memenuhi syarat (Satuan: %)			85,37	86,59	86,59
Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di Perkotaan (Satuan: %)	12,55	12,55	38,28	45,13	44,04
Persentase Rumah Tidak Layak Huni (Satuan: %)	13,55	13,45	13,32	13,08	12,85
Persentase Peningkatan Penanganan Perumahan dengan PSU Layak (Satuan: %)	12,5	12,5	31,25	31,25	37,5

Gambar 2-33 Perkembangan Indikator Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 – 2023

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang RPD Kabupaten Lebak 2025 – 2026

Persentase perumahan dengan PSU layak terus menunjukkan kenaikan dari 85,37% pada tahun 2021 menjadi 86,59% pada tahun 2023. Hal ini berbanding lurus pula dengan persentase penanganan kawasan kumuh yang pada tahun 2019 sebesar 12.55% menjadi 45.13% pada tahun 2022. Secara umum, seluruh indikator menunjukkan kemajuan setiap tahunnya, termasuk penurunan persentase rumah tidak layak huni yang pada tahun 2019 sebesar 13,55% menjadi 12,85% pada tahun 2023.

DRAFT - DICOPY

2.4.1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat

Kinerja pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat diukur melalui: Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten; Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Tabel 2.30 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Persentase Parpol yang terbina (Satuan: %)	Persen	100	75	75
Tingkat Waktu Tanggap (Response time) pengaduan kebakaran (<15 Menit Setelah Pengaduan) (Satuan: %)	Persen	100	91,14	91,14
Cakupan pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran (Satuan: %)	Persen	100	89,06	89,06
Persentase Penegakan Perda (Satuan: %)	Persen	92	108,16	117,57
Persentase Terlaksananya Peningkatan toleransi dan pembinaan keagamaan (Satuan: %)	Persen	100	70	70
Cakupan Pembinaan terhadap Ormas/LSM (Satuan: %)	Persen	52	28	53,85
Cakupan Ormas/LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya berkinerja baik (Satuan: %)	Persen	100	27	27
Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan P4GN, PAKEM, dan FKUB (Satuan: %)	Persen	100	61	61
Cakupan penyelenggaraan Sosialisasi dan Edukasi Penguatan Ideologi Pancasila (Satuan: %)	Persen	100	64	64
Persentase terpenuhinya kebutuhan Koordinasi Jaringan Deteksi Dini, FKDM dan Forum Kominda (Satuan: %)	Persen	100	70	70
Cakupan Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kab. Lebak dan mampu mengelola Bantuan Keuangan sesuai Peraturan (Satuan: %)	Persen	100	100	100
Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (Satuan: %)	Persen	100	100	100
Persentase penanganan pra bencana (Satuan: %)	Persen	100	100	100
Persentase penanganan tanggap darurat bencana (Satuan: %)	Persen	100	100	100
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	100	100	100
Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100	100
Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100	100

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat pencapaian terbesar dalam pelaksanaan pembangunan daerah urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalan penanganan terkait kesiapsiagaan dan mitigasi bencana yang mencapai 100% dari target capaian, tata kelola hukum yange melebihi target capaian, dan koordinasi antar stakeholder baik di jajaran Forum Kominda

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

maupun DPRD Kabupaten Lebak. Di sisi lain, pendataan Ormas secara legal masih belum optimal, diikuti jumlah penyelenggaraan pembinaan P4GN, PAKEM, dan FKUB yang terlaksana / jumlah kebutuhan penyelenggaraan pembinaan P4GN, PAKEM, dan FKUB.

Grafik berikut menunjukkan dinamika beberapa indikator terkait urusan ini yang tidak konstan selama 5 tahun terakhir. Dinamika signifikan ditunjukkan dalam cakupan pembinaan Ormas dan LSM yang sangat menurun pada tahun 2021 dan meningkat kembali pada tahun 2022.

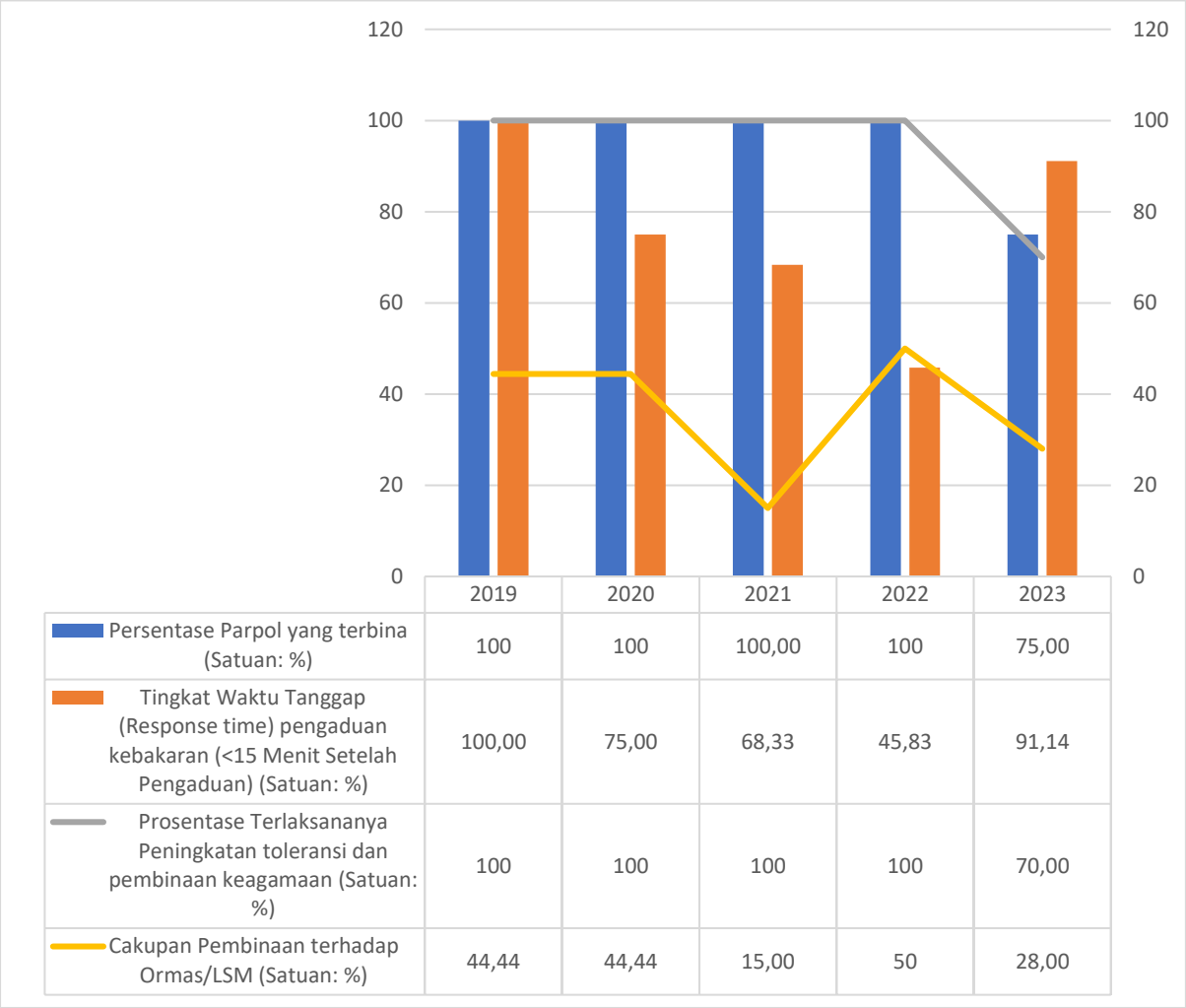

	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Parpol yang terbina (Satuan: %)	100	100	100,00	100	75,00
Tingkat Waktu Tanggap (Response time) pengaduan kebakaran (<15 Menit Setelah Pengaduan) (Satuan: %)	100,00	75,00	68,33	45,83	91,14
Prosentase Terlaksananya Peningkatan toleransi dan pembinaan keagamaan (Satuan: %)	100	100	100	100	70,00
Cakupan Pembinaan terhadap Ormas/LSM (Satuan: %)	44,44	44,44	15,00	50	28,00

Gambar 2-34 Perkembangan Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2019 – 2023

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang RPD Kabupaten Lebak 2025 – 2026, diolah kembali, 2024

2.4.1.6 Sosial

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang RPD Kabupaten Lebak 2025 – 2026, permasalahan sosial di Kabupaten Lebak bertambah seiring dampak pandemi yang masih dirasakan hingga kini dan menstimuli bertambahnya jumlah dan beragam jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Belum termasuk tantangan penanganan korban bencana baik pada masa tanggap darurat maupun pasca yang potensial terjadi setiap saat di Kabupaten Lebak. Demikian pula dengan beragam masalah sosial yang muncul karena faktor ekonomi, terutama masalah-masalah yang terkait dengan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan

sejenisnya, serta PMKS yang muncul disebabkan oleh faktor geografis, seperti masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana alam dan komunitas Adat terpencil (KAT). Tabel di bawah menunjukkan tingkat ketercapaian pada indikator kinerja daerah urusan sosial di Kabupaten Lebak. Adapun tren perkembangan realisasi indikator kinerja daerah pada urusan sosial dari tahun 2019 – 2023 ditunjukkan oleh gambar dibawah.

Belum optimalnya cakupan layanan pada urusan sosial, merupakan realitas yang dihadapi saat ini. Disparitas kapasitas layanan dibandingkan dengan peningkatan dan kompleksitas permasalahan sosial yang berkembang merupakan kondisi obyektif yang patut mendapat perhatian di masa depan. Di samping itu efektivasi koordinasi dan sinergi antarsektor, antarinstitusi, dan antarpemangku kepentingan juga menjadi pekerjaan rumah tersendiri dalam pengentasan beragam permasalahan sosial yang ada. Sejalan dengan itu, pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) mutlak dilakukan di tengah keterbatasan kapasitas maupun sarana dan prasarana sosial yang dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah, sehingga pengentasan beragam masalah sosial tersebut dapat lebih efektif. Demikian pula dengan pemberdayaan elemen *civil society* dan sektor privat melalui program *corporate social responsibility*-nya guna mengentaskan beragam permasalahan sosial di Kabupaten Lebak. Evaluasi dan peningkatan efektivitas berbagai skema dan program bantuan sosial mutlak dilakukan guna menjamin validitas dan reliabilitas data dan penerima manfaat, sekaligus menjamin efektivitas pencapaian tujuan dari program-program tersebut di samping juga mampu meningkatkan efisiensi sumber daya negara dan daerah. Berdasarkan temuan permasalahan yang diidentifikasi melalui pelaksanaan FGD dan hasil kuesioner pada tiap OPD di lingkungan Kabupaten Lebak, menunjukkan bahwa permasalahan pada urusan sosial terkait PMKS yakni belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Terpadu (SPM) bidang sosial yang dilengkapi dengan strategi implementasi pelayanan dasar bagi PMKS dan penanganan bencana. Temuan permasalahan pada urusan sosial secara rinci dijabarkan pada Tabel 2.23.

Tabel 2.31 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Sosial Tahun 2023

Indikator Kinerja Daerah	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
Terpeliharanya Areal Pemakaman (Satuan: Lokasi)		Lokasi			
Jumlah Taman Makam terpelihara (Satuan: unit)		Unit			
Persentase pengelolaan taman makam pahlawan kabupaten		Persen	100	100	100
Cakupan PMKS memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persen	100	100	100
Cakupan PMKS memperoleh Penanganan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial		Persen	100	100	
Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang tertangani (Satuan: Orang)		Orang	20	20	

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja Daerah	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang terlantar (OT) tertangani (Satuan: Orang)		Orang	20	20	
Persentase Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat		Persen	-	-	
Cakupan PMKS memperoleh Penanganan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial		Persen	100	100	100
Terpenuhinya sarana prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PRSE, KAT (Satuan: Klp)		Kelompok	-		
Jumlah anak terlantar memperoleh pendidikan formal/non formal (Satuan: Orang)		Orang	5	2	40
Terpenuhinya sarana prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PRSE, KAT (Satuan: Orang)		Orang	-		
Jumlah Jenazah yang diurus (Satuan: orang Non PNS)		Orang Non PNS	9	2	22,22
Terpenuhinya sarana prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PRSE, KAT (Satuan: Desa)		Desa	-	-	
Persentase penanganan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah		Persen	100	100	100
Persentase pelayanan dan penanganan warga negara migran yang menjadi korban kekerasan		Persen	100	100	100
Persentase Pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS		Persen	100	100	100
persentase terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS		Persen	100	100	100
Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar bagi pengungsi/penyitas korban bencana		Persen	100	100	100
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten/Kota		Persen	100	100	100
Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)		Persen	82,41	92,89	112,72

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

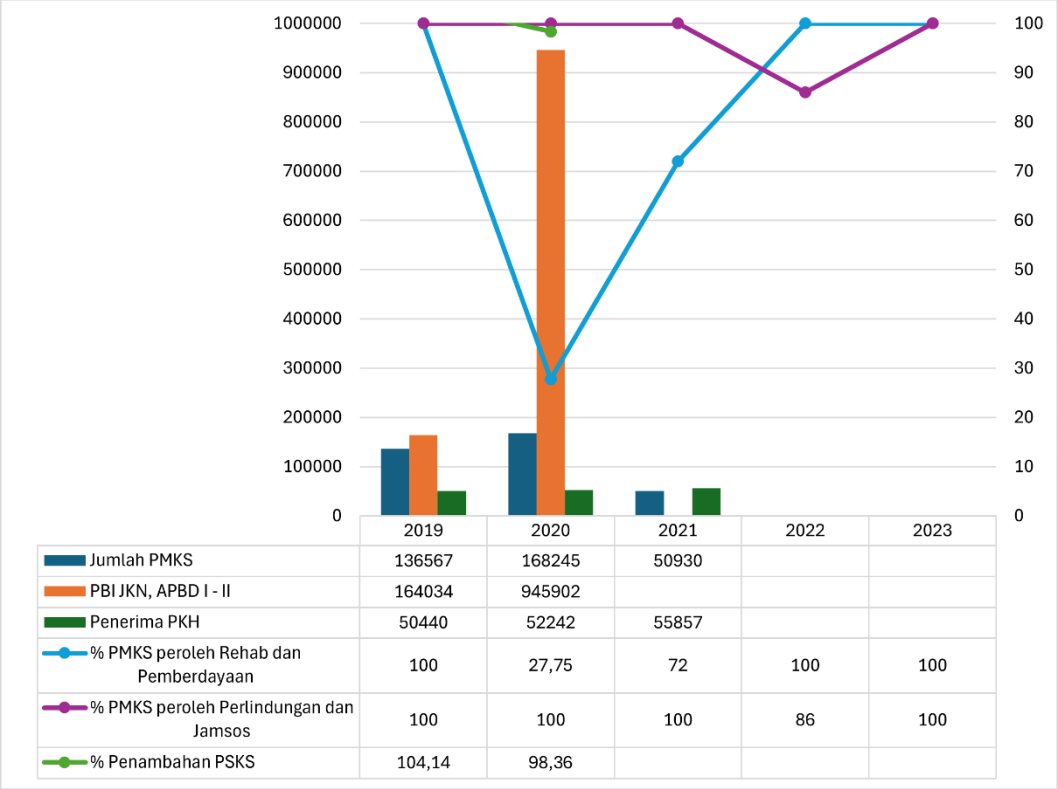

	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah PMKS	136567	168245	50930		
PBI JKN, APBD I - II	164034	945902			
Penerima PKH	50440	52242	55857		
% PMKS peroleh Rehab dan Pemberdayaan	100	27,75	72	100	100
% PMKS peroleh Perlindungan dan Jamsos	100	100	100	86	100
% Penambahan PSKS	104,14	98,36			

Gambar 2-35 Perkembangan Indikator Urusan Sosial Tahun 2019 – 2023

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang RPD Kabupaten Lebak 2025 – 2026, diolah kembali, 2024

Tabel 2.32 Temuan Permasalahan Urusan Sosial

Indikator Kinerja Daerah	Tingkat Capaian	Intepretasi	Notulensi FGD	Kuesioner FGD	Kuesioner Instansi
Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
Terpeliharanya Areal Pemakaman (Satuan: Lokasi)		belum tercapai (<)			
Jumlah Taman Makam terpelihara (Satuan: unit)		belum tercapai (<)			
Persentase pengelolaan taman makam pahlawan kabupaten	100	sesuai (=)			
Cakupan PMKS memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	100	sesuai (=)			
Cakupan PMKS memperoleh		belum tercapai (<)	Jenis dan jumlah kejadian PMKS di		

DRAFT - TIDAK UNTUK DIFOTOKOPY

Indikator Kinerja Daerah	Tingkat Capaian	Intepretasi	Notulensi FGD	Kuesioner FGD	Kuesioner Instansi
Penanganan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial			Kabupaten Lebak tergolong tinggi, penanganan selama ini sudah cukup baik, namun, karena jumlahnya sangat tinggi maka ketercapaiannya dianggap rendah		
Jumlah penyandang disabilitas dan eks trauma yang tertangani (Satuan: Orang)		belum tercapai (<)			
Jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan orang terlantar (OT) tertangani (Satuan: Orang)		belum tercapai (<)			
Persentase Pelaku-Pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial Masyarakat		belum tercapai (<)			
Cakupan PMKS memperoleh Penanganan Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial	100	sesuai (=)		Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Terpadu (SPM) Bidang Sosial yang dilengkapi dengan strategi implementasi pelayanan dasar bagi PMKS dan penanganan bencana -> capaian paling rendah se-Provinsi Banten, sehingga penambahan isu terkait pencapaian SPM tersebut adalah Persentase pencapaian SPM Bidang Sosial -> Dinas Sosial, 2024	
Terpenuhinya sarana prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE),		belum tercapai (<)			

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja Daerah	Tingkat Capaian	Intepretasi	Notulensi FGD	Kuesioner FGD	Kuesioner Instansi
PRSE, KAT (Satuan: Klp)					
Jumlah anak terlantar memperoleh pendidikan formal/non formal (Satuan: Orang)	40	belum tercapai (<)			
Terpenuhinya sarana prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PRSE, KAT (Satuan: Orang)		belum tercapai (<)			
Jumlah Jenazah yang diurus (Satuan: orang Non PNS)	22,22	belum tercapai (<)			
Terpenuhinya sarana prasarana usaha bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBE), PRSE, KAT (Satuan: Desa)		belum tercapai (<)			
Persentase penanganan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah	100	sesuai (=)			
Persentase pelayanan dan penanganan warga negara migran yang menjadi korban kekerasan	100	sesuai (=)			
Persentase Pelayanan rehabilitasi sosial bagi PPKS	100	sesuai (=)			
persentase terpenuhinya perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS	100	sesuai (=)			
Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar bagi pengungsi/penyitas korban bencana	100	sesuai (=)			

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja Daerah	Tingkat Capaian	Intepretasi	Notulensi FGD	Kuesioner FGD	Kuesioner Instansi
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten/Kota	100	sesuai (=)			
Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	112,72	melampaui (>)			

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2024

Sebagai kekayaan warisan budaya adat istiadat Kabupaten Lebak, perlindungan masyarakat adat telah diregulasi secara sah dalam payung hukum melalui Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2015 tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan. Adapun perda tersebut disusun dengan tujuan memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah adat dan hak Masyarakat Kasepuhan, melindungi hak dan memperkuat akses Masyarakat Hukum Adat, meningkatkan peran serta incu putu dalam pengambilan keputusan di Lembaga Adat, mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis kepada pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan dan hukum adatnya, mewujudkan pengelolaan wilayah adat secara lestari berdasarkan hukum adat, meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan, mewujudkan kebijakan pembangunan di daerah yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan, dan melindungi sistem nilai yang menentukan pranata sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum adat Kasepuhan. Terdapat 522 masyarakat adat kasepuhan yang ada di Kabupaten Lebak, yang tersebar pada 6 (enam) kasepuhan induk atau wewengkon adat, yaitu: Kasepuhan Citorek; Kasepuhan Guradog, Kasepuhan Bayah, Kasepuhan Sajira, Kasepuhan Cicarucub, dan Kasepuhan Cisungsang.

2.4.1.7 Tenaga Kerja

Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Pada tahun 2020, jumlah angkatan kerja mencapai 659.902 jiwa, mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan signifikan dari 540.410 jiwa pada tahun sebelumnya menjadi 596.375 jiwa. Di sisi lain, jumlah pengangguran juga meningkat menjadi 63.527 jiwa pada tahun 2020. Peningkatan ini mengakibatkan penyempitan gap antara angkatan kerja yang

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

bekerja dengan angkatan kerja yang menganggur, menunjukkan dinamika perubahan dalam pasar tenaga kerja di Kabupaten Lebak.

Tabel 2.33 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Capaian	Tingkat Capaian
Persentase Penyelesaian hubungan industrial	Jumlah Kasus Terselesaikan ---------- x 100% Jumlah Kasus Terdaftar	Persen	100	100	100
Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB Harga Konstan ---------- x 100% Jumlah Tenaga Kerja	Rupiah	42.123.305,99	23.908.636,69	56,76
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Satuan; %)		Persen			
Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Tenaga Kerja yang ditempatkan ---------- x 100% Tenaga Kerja Terdaftar	Persen	9	11,21	124,56
Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.		Persen	100	0	0
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ---------- x 100% Jumlah Tenaga Kerja Keseluruhan	Persen	41,74	51,55	123,49
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB Harga Konstan ---------- x 100% Jumlah Tenaga Kerja	Rupiah	42.123.305,99	23.908.636,69	56.76
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak ---------- x 100% Jumlah Perusahaan	Persen	91,86	68,36	74,42
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Tenaga Kerja yang ditempatkan ---------- x 100% Tenaga Kerja Terdaftar	Persen	29,80	11,21	37,62

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

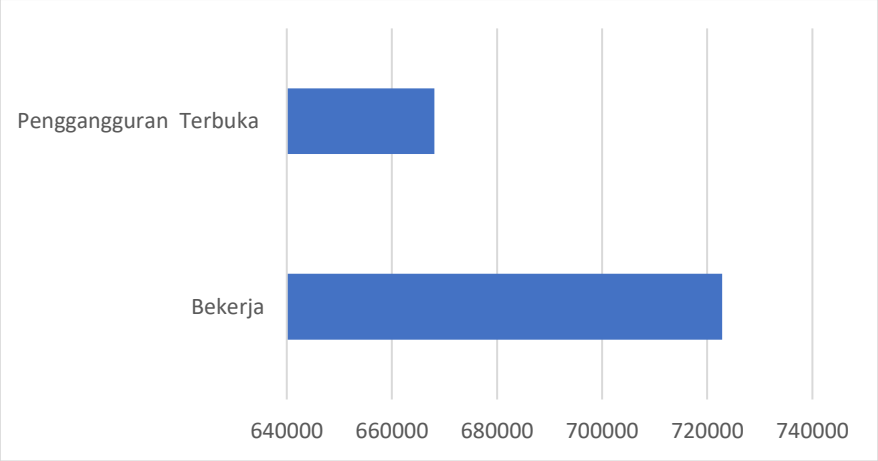

Gambar 2-36 Penduduk yang Bekerja dan Pengganggguran
Sumber: Kabupaten Lebak dalam Angka 2024, diolah kembali, 2024

Pada tahun 2023, angkatan kerja di Kabupaten Lebak sebanyak 722.854 orang. Berdasarkan data taersebut TPAK Kabupaten Lebak pada tahun 2023 sebesar 67,90%. Jika ditinjau berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki lebih tinggi dibanding TPAK perempuan. Tahun 2023, TPAK laki-laki sebesar 84,73%, sedangkan TPAK perempuan sebesar 50,06%.

2.4.1.8 Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Pada tabel dibawah menunjukkan tingkat ketercapaian indikator kinerja daerah urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lebak. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang RPD Kabupaten Lebak 2025 – 2026, ketimpangan gender terjadi dalam berbagai bidang, seperti pada bidang ketenagakerjaan. Seperti ditunjukkan pada gambar jenis kegiatan Kab. Lebak berdasarkan jenis kelamin hanya sekitar 36,25% atau sekitar 242.226 jiwa, partisipasi perempuan pada angkatan kerja yang bekerja. Masih jauh dibandingkan rasio partisipasi laki-laki pada angkatan kerja yang bekerja sebesar 63,75% atau sekitar 425.883 jiwa. Seiring dengan penyempitan gap antara angkatan kerja yang bekerja dan angkatan kerja yang menganggur, terjadi peningkatan signifikan pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Lebak. Meskipun secara faktual TPT cenderung mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir, pada tahun 2020 tercatat kenaikan yang signifikan mencapai 9,63%, meningkat sekitar 1,58% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini secara langsung terkait dengan dampak fenomena pandemi yang mempengaruhi perekonomian baik di tingkat daerah maupun nasional secara keseluruhan.

Tabel 2.34 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023

Indikator Kinerja Daerah	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
Cakupan Stakeholder yang mampu menyusun perencanaan	Jumlah Stakeholder yang menyusun PPRG dibagi Jumlah	Persen	100	100	100

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja Daerah	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
& penganggaran yang responsif gender	seluruh Stakeholder yang ada di Kabupaten Lebak dikali 100%				
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Jumlah kasus yang terjadi pada perempuan dan anak yang melapor dibagi Jumlah kasus yang terjadi pada perempuan dan anak yang tertangani dikali 100%	Persen	100	100	100
Persentase tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate)	TFR = 5 ∑ASFRi (jumlah kelahiran dari usia ibu (19 – 49) x 5 dibagi 1000 kelahiran x 100%)	Persen	2,65	3	100
Persentase penanganan kasus kekerasan anak	Jumlah kasus yang terjadi pada anak yang melapor dibagi Jumlah kasus yang terjadi pada anak yang tertangani dikali 100%	Persen	100	100	100
Persentase lembaga masyarakat yang aktip dalam lembaga perlidungan dan pemenuhan hak anak	Jumlah Lembaga yang aktif dibagi Jumlah Seluruh Lembaga yang sudah terbentuk dikali 100%	Persen	100	100	100
Proporsi perempuan dalam bidang pembangunan	Jumlah Perempuan dalam Bidang Pembangunan dibagi Total Perempuan dan Laki-laki dalam Bidang Pembangunan dikali 100%	Persen	79,11	79	100
Persentase terbinanya kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Jumlah kelompok ketahanan kesejahteraan keluarga yang terbina dibagi Jumlah seluruh kelompok ketahanan kesejahteraan keluarga yang ada dikali 100%	Persen	100	100	100
MCPR (Modern contraceptive prevalancy rate)	Jumlah Peserta KB Aktif dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur dikali 100%	Persen	73	67,9	93,01
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah Anggaran Responsif Gender dibagi Total APBD Lebak dikali 100%	Persen	46	46	100
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Kasus TPPO pada Perempuan dibagi Jumlah Penduduk Perempuan dikali 100%	Persen	6,11	0,004	0,07

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

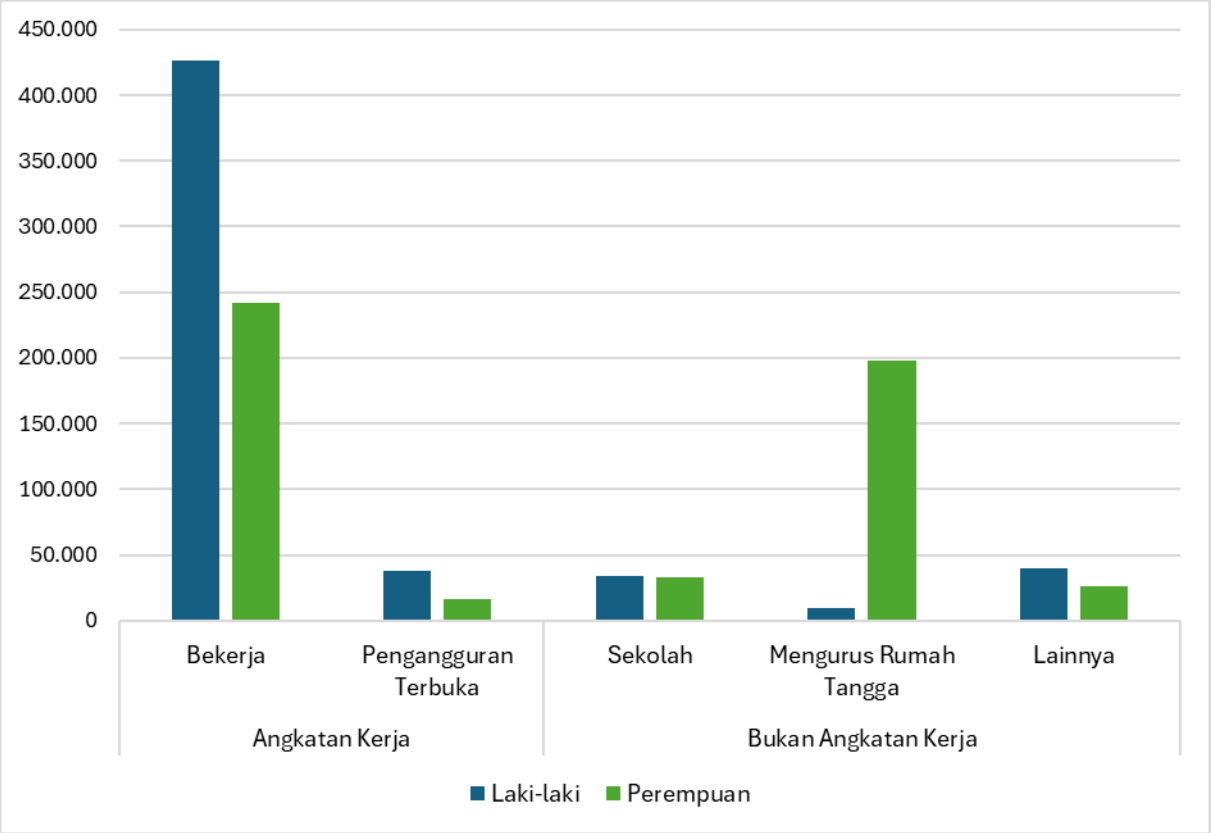

Gambar 2-37 Jenis Kegiatan Utama Warga Kabupaten Lebak Berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber: Kabupaten Lebak dalam Angka 2024, diolah kembali, 2024

Tabel di atas menunjukkan temuan permasalahan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang teridentifikasi melalui pelaksanaan FGD dan hasil kuesioner OPD di lingkungan Kabupaten Lebak. Perlu menjadi catatan pada urusan pemberdayaan dan perlindungan anak, bahwa dinas terkait menemukan masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang RPD Kabupaten Lebak 2025 – 2026, masih ditemukan kekerasan terhadap anak dan perempuan tercatat cukup tinggi evidensinya, sebagian besar berupa kekerasan fisik, psikis, dan seksual baik terhadap anak maupun terhadap kaum perempuan. Secara umum kekerasan terhadap kaum perempuan bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kasus-kasus kekerasan terhadap laki-laki.

Terkait dengan dukungan sarana dan prasarana, teridentifikasi bahwa belum terpenuhi sarana dan prasarana pemenuhan hak anak terutama dalam hal penunjang kabupaten layak anak (KLA). Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana serta SDM pelayanan penanganan kasus kekerasan, pelecehan, penelantaran, penipuan dan TPPO di UPTD PPA yang belum memiliki Gedung UPTD PPA mandiri, Rumah Perlindungan mandiri, SDM yang masih minim secara kuantitas dan kualitas. Terkait dengan rasio angggaran responsif gender terhadap APBD Kabupaten Lebak masih teridentifikasi belum memenuhi target (tingkat ketercapaian=90,67%). Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender serta masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik yang berpihak pada perempuan dan anak. Hal ini berkaitan dengan *stakeholder* yang mampu menyusun perencanaan & penganggaran yang responsif gender. Namun, hasil

DRAFT - TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

kuesioner menemukan bahwa terjadi permasalahan seperti masih kurangnya koordinasi antara *driver* PUG (pengarusutamaan gender) dengan OPD lain, kurangnya pelaksanaan kegiatan Rapat Pokja PUG sehingga belum optimalnya penguatan Pokja PUG Kab. Lebak, dan walaupun sudah ada Perda PUG, namun belum terimplementasikan secara menyeluruh.

Agenda pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di masa pandemi tampaknya perlu mendapat perhatian dan prioritas mengingat sinyalemen meningkatnya potensi kerawanan terhadap anak-anak dan kaum perempuan dari berbagai bentuk tindak kekerasan yang potensial terjadi sebagai dampak sosial dari pandemi. Perundungan misalnya, potensial terjadi pada anak-anak yang intensitas kesehariannya berpindah dari sekolah ke lingkungan rumah dan sekitarnya. Demikian pula dengan dampak berbagai kebijakan pemerintah yang berdampak langsung maupun tak langsung terhadap meningkatnya permasalahan keluarga yang memicu berbagai efek psikologis yang dapat menyebabkan terjadinya berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

Tabel 2.35 Temuan Permasalahan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja Daerah	Tingkat Capaian	Intepretasi	Notulensi FGD	Kuesioner FGD	Kuesioner Instansi
Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
Cakupan Stakeholder yang mampu menyusun perencanaan & penganggaran yang responsif gender	100,00	sesuai (=)			- Masih kurangnya koordinasi antara driver PUG dengan OPD lain - Kurangnya pelaksanaan kegiatan Rapat Pokja PUG sehingga belum optimalnya penguatan Pokja PUG Kab. Lebak - Sudah adanya Perda PUG, namun belum terimplementasikan secara menyeluruh
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100,00	sesuai (=)		Belum terpenuhi sarpras pemenuhan hak anak terutama dalam hal penunjang kabupaten layak anak (KLA) -> DP3AP2KB, 2024	
Persentase tingkat	82,26	belum tercapai (<)			

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja Daerah	Tingkat Capaian	Intepretasi	Notulensi FGD	Kuesioner FGD	Kuesioner Instansi
penurunan TFR (Total Fertility Rate)					
Persentase penanganan kasus kekerasan anak	100,00	sesuai (=)			
Persentase lembaga masyarakat yang aktip dalam lembaga perlidungan dan pemenuhan hak anak	100,00	sesuai (=)			
Proporsi perempuan dalam bidang pembangunan	102,07	melampaui (>)			
Persentase terbinanya kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100,00	sesuai (=)			
MCPR (*Modern contraceptive prevalancy rate*)	93,01	belum tercapai (<)			- Terbatasnya jumlah PKB/PLKB dibanding jumlah desa petugas lapangan dalam melaksanakan pembinaan program KB dibandingkan dengan cakupan pembinaan kelestarian ber KB; - Masih rendahnya rata-rata usia kawin pertama perempuan; - Masih tingginya angka drop out peserta KB; - Rendahnya partisipasi pria dalam ber KB; - Masih rendahnya pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja; - Kurangnya pembinaan peningkatan kemampuan Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD, Sub. PPKBD) dalam pelaksanaan Program KKBPK (kependudukan keluarga berencana dan pembangunan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja Daerah	Tingkat Capaian	Intepretasi	Notulensi FGD	Kuesioner FGD	Kuesioner Instansi
					keluarga), PP dan PA ditingkat lini lapangan; - Masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, BLK dan UPPKS, PATBM) dalam pelaksanaan 8 fungsi keluarga
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	90,67	belum tercapai (<)		Kurangnya sarpras dan SDM pelayanan penanganan kasus kekerasan, pelecehan, penelantaran, penipuan dan TPPO di UPTD PPA yang belum memiliki Gedung UPTD PPA mandiri, Rumah Perlindungan mandiri, SDM yang masih minim secara kuantitas dan kualitas -> -> DP3AP2KB, 2024	- Belum optimalnya penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. - Masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik yang berpihak pada perempuan dan anak
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,07	belum tercapai (<)	Masih banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Kurangnya sarpras dan SDM pelayanan penanganan kasus kekerasan, pelecehan, penelantaran, penipuan dan TPPO di UPTD PPA yang belum memiliki Gedung UPTD PPA mandiri, Rumah Perlindungan mandiri, SDM yang masih minim secara kuantitas dan kualitas -> DP3AP2KB, 2024	

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

2.4.1.9 Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

DRAFT - TIDAK UNTUK DIFOPY

Tabel 2.36 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Capaian	Tingkat Capaian
Porsentase Pangan Aman	(Jumlah Pangan Aman / Jumlah Total Pangan Yang Diuji) * 100%	Persen	89	98,6	110,79
Persentase penurunan jumlah desa rawan pangan	(Jumlah Desa Rawan Pangan tahun n-1-Jumlah Desa Rawan Pangan tahun n-1 yang masih menjadi prioritas di tahun n) / Jumlah Desa Rawan Pangan Tahun n-1) * 100%	Persen	50	53,66	107,32
Angka Kecukupan Gizi	Kebutuhan Dasar Zat Gizi x Faktor Keamanan x Variabilitas Individu x Bioavailabilitas Zat Gizi	%	86	90	100
Persentase Angka Kecukupan Gizi	(Konsumsi Zat Gizi / AKG) * 100%	Persen	90	154,9	172,11

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

Tantangan utama dalam urusan ketahanan pangan di Kabupaten Lebak di masa depan adalah meningkatkan indeks ketahanan pangan dengan memperkuat ketahanan pangan di tingkat masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengkampanyekan kemandirian pangan keluarga melalui produksi bahan pangan sendiri dengan memanfaatkan lahan pekarangan secara produktif, diversifikasi konsumsi bahan pangan untuk keluarga, edukasi tentang bahan pangan dan pengolahan pangan yang sehat dan aman, serta langkah-langkah lainnya.

Secara lebih luas, pengentasan status rawan pangan di seluruh desa juga harus menjadi prioritas melalui program-program yang substansial untuk mengubah perilaku masyarakat di desa-desa dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan mereka. Selain itu, perlu juga tetap menjaga pasokan, ketersediaan, distribusi, dan pengendalian harga pangan di pasaran secara makro, sehingga seluruh aspek ketahanan pangan dari tingkat masyarakat hingga tingkat desa dapat terjamin dengan baik.

2.4.1.10 Pertanahan

Pertanahan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan urusan pertanahan diarahkan dalam upaya meningkatkan tertib administrasi pertanahan, penyelesaian sengketa atau konflik pertanahan serta penyediaan tanah yang luasanya di bawah 5 (lima) hektar bagi pembangunan. Program yang dilaksanakan pada urusan wajib pertanahan adalah program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dengan indikator jumlah pengadaan tanah bagi kepentingan umum serta jumlah konflik sengketa tanah yang diselesaikan. Selain melakukan pengadaan tanah, fokus lainnya yang tak kalah penting ialah memfasilitasi konflik pertanahan yang ada di Kabupaten Lebak. Fasilitasi konflik pertanahan ini dilakukan bersama Kantor ATR/BPN Kabupaten Lebak.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tabel 2.37 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Pertanahan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Capaian	Tingkat Capaian
Persentase Penyelesaian Konflik Sengketa Pertanahan	(Jumlah target mediasi penyelesaian konflik sengketa pertanahan/ Jumlah mediasi penyelesaian konflik sengketa pertanahan) x 100%	Persen	100	100	100
persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	(Jumlah target koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penatagunaan tanah/ Jumlah terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penatagunaan tanah) x 100%	Persen	100	100	100
persentase penyelesaian tanah Garapan		Persen	100	100	100
persentase penyelesaian distribusi tanah serta ganti kerugian prpgram tanah kelebihan dan tanah absente	(Jumlah terget inventarisasi redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan dan tanah absente/ Jumlah terlaksananya inventarisasi redistribusi tanah serta ganti kerugian program kelebihan tanah absentee) x 100%	Persen	100	100	100
Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu		Persen	51,52	52	100
Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi		Persen	85,00	85	100

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

Fokus utama urusan pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak adalah memfasilitasi penyelesaian konflik pertanahan yang terjadi di daerah tersebut. Pada tahun 2018 dan 2019, Pemerintah berhasil menyelesaikan masing-masing 4 kasus sengketa pertanahan. Namun, pada tahun 2020, jumlah kasus yang difasilitasi mengalami penurunan menjadi 2 kasus. Langkah ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lebak dalam menjaga ketertiban dan kedamaian dalam masalah pertanahan di wilayahnya. Selain memfasilitasi penyelesaian konflik pertanahan, fokus utama dalam urusan pertanahan di Kabupaten Lebak adalah pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Sejak tahun 2018, kegiatan pengadaan tanah ini terus dilaksanakan untuk pembangunan sarana dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Pada tahun 2018 dan 2019, dilakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum masing-masing sebanyak 3 bidang dan 4 bidang tanah. Sedangkan pada tahun 2020, dilakukan pengadaan tanah sebanyak 2 bidang untuk pembangunan SMPN 7 Satu Atap di Kecamatan Maja dan SMPN 9 di Kecamatan Banjarsari. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Lebak dalam memastikan tersedianya lahan yang cukup untuk proyek-proyek penting demi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan infrastruktur di daerah tersebut.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

2.4.1.11 Lingkungan Hidup

Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang dapat memberikan kesimpulan dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Pengukuran kualitas lingkungan secara umum dilakukan parsial berdasarkan media yaitu: air, udara dan tutupan lahan. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks. Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebak dari 2019 sebesar 66.50 dengan realisasi 77.61, tahun 2020 target 66.83 realisasi 72.26, tahun 2021 target 51,86 realisasi 62.87 sedangkan pada tahun 2022 target 52,42 Realisasi 62.52 dan termasuk dalam kategori "sedang". Nilai Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2022 adalah sebesar 57,00 artinya berpredikat sedang.

Beberapa tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk perbaikan kualitas air di Kabupaten Lebak adalah perlunya meningkatkan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan, pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana IPAL domestik, serta peningkatan peran dunia usaha untuk pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan.

Salah satu tantangan didalam isu mengenai lingkungan hidup adalah masalah persampahan. Produksi sampah yang dihasilkan semakin meningkat seiring berkembangnya jumlah populasi penduduk. Hal ini menjadi perhatian dan membutuhkan penanganan yang mendesak guna mengatasi masalah sampah dengan inovasi teknologi di bidang pengelolaan sampah yang lebih maju sehingga mendukung terhadap kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup. Dalam hal ini timbulan sampah berasal dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga yaitu sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Arah kebijakan dan strategi pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yaitu pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Tabel 2.38 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Capaian	Tingkat Capaian
Persentase dokumen informasi Lingkungan Hidup		Persen	100	100	100
Persentase Pengurangan Sampah		Persen	40	25,4	63,50
Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan		Persen	20	20	100
Persentase lahan kritis yang tertangani		Persen	10,29	12,5	121,48

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Capaian	Tingkat Capaian
persentase ruang terbuka hijau terkelola		Persen	3,30	3,72	112,73
Persentase Penanganan Sampah		Persen	19	17,28	90,95
Persentase pengaduan lingkungan yang tertangani		Persen	100	273,33	273,33
Persentase PPLH pada MHA yang Hutan adatnya diakui		Persen	40	40	100
Persentase kesesuaian tata ruang		Persen	100	100	100
Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup		Persen	100	100	100
Persentase Pendidikan,Pelatihan dan penyuluhan untuk masyarakat		Persen	100	100	100
Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang menjadi acuan perencanaan Daerah		Persen	100	133,33	133,33
Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Izin Limbah B3		Persen	15	10,67	71,13
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota		Persen	20	20	100
Persentase jumlah sampah yang terkelola		Persen	43,82	42,68	97,40
persentase jumlah perusahaan aktif yang diawasi ketaatannya terhadap persetujuan lingkungan		Persen	30	21,74	72,47
Persentase terkelolanya Keanekaragaman hayati dalam RTH (satuan:%)		Persen	9,5	9,5	100
Persentase Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan Hidup (satuan:%)		Persen	50	80,59	161,18

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

Berikut grafik mengenai perkembangan Indikator Urusan Lingkungan hidup.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

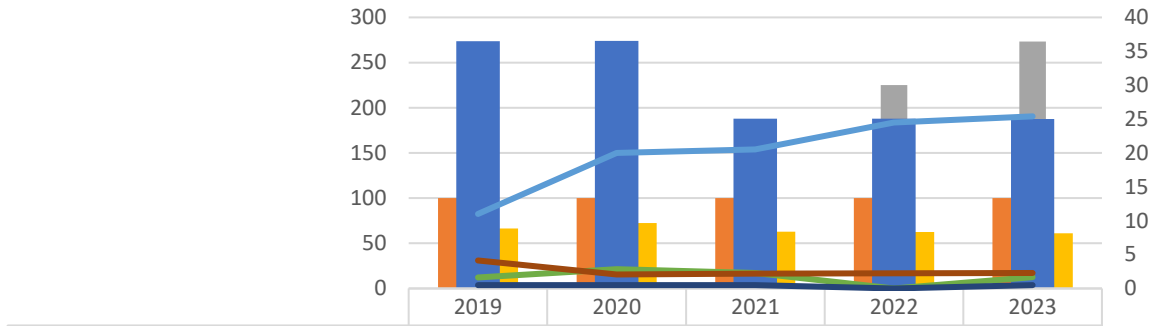

	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase dokumen informasi Lingkungan Hidup (Satuan: %)	100	100	100	100	100
Persentase pengaduan lingkungan yang tertangani (Satuan: %)	100	100	166,67	225	273,33
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Satuan: Indeks)	66,5	72,26	62,85	62,52	61,03
Persentase ketaatan terhadap izin lingkungan (Satuan: %)	36,5	36,55	25,07	25,07	25
Persentase lahan kritis yang tertangani (Satuan: %)	12,21	21,39	17,03	0	12,5
persentase ruang terbuka hijau terkelola (Satuan: %)	3,72	3,72	3,72	0	3,72
Persentase Penanganan Sampah (Satuan: %)	31	15,5	16,3	16,7	17,28
Persentase Pengurangan Sampah (Satuan: %)	11	20	20,5	24,49	25,4

Gambar 2-38 Perkembangan Indikator Urusan Lingkungan Hidup
Sumber: Kabupaten Lebak dalam Angka 2024, diolah kembali, 2024

Berdasarkan grafik di atas, upaya penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebak telah terbukti efektif. Pengelolaan persampahan, yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2019, tingkat pengurangan sampah adalah 11%, meningkat menjadi 25,4% pada tahun 2024. Selain itu, upaya pengendalian pencemaran lingkungan juga berhasil terlihat dari penanganan lahan kritis dan peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup setiap tahunnya. Data ini mengindikasikan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Lebak.

2.4.1.12 Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Lebak akan menghadapi tantangan yang kompleks di masa depan, terutama dalam meningkatkan efektivitas layanan berbagai jenis dokumen kependudukan yang semakin kompleks. Karakteristik indikator-indikator seperti ketaatan izin lingkungan, dokumen informasi lingkungan hidup, pengaduan lingkungan hidup yang tertangani, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (LH) menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun.

Kompleksitas ini juga mencakup aspek-aspek sosial budaya masyarakat yang menjadi tantangan yang perlu diatasi dengan kebijakan dan program yang tepat. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan pemenuhan hak sipil warga negara serta pencegahan potensi

DRAFT - TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

permasalahan hukum yang terkait dengan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di masa depan. Dengan demikian, formulasi kebijakan yang relevan akan menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini secara efektif.

Tabel 2.39 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2023

Indikator KInerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dibagi jumlah penduduk kabupaten lebak dikali 100%	Persen	96,00	98,77	102,89
Persentase kepemilikan akta-akta catatan sipil	Jumlah penduudk yang memiliki akta catatan sipil dibagi jumlah penduudk kabupaten lebak dikali 100%	Persen	83,00	99,33	119,67
Persentase Kesesuaian database dokumen kependudukan	Jumlah database kependudukan dibagi jumlah penduduk dikali 100%	Persen	93,00	100	107,53
Persentase Penduduk yang mendapatkan layanan Akte Perkawinan dan Akte Perceraian sesuai SOP	Jumlah penduudk yang mendapatkan layanan akte perkawinan dan akte perceraian dibagi jumlah penduudk yang mengajukan layanan dikali 100%	Persen	81,00	100	123,46
Persentase Penduduk yang mendapatkan Pelayanan Akte Kelahiran sesuai SOP	Jumlah penduduk yang mendpatkan layanan akte kelahiran dibagi jumlah penduduk yang mengajukan layanan dikali 100%	Persen	81,00	100	123,46
Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dibagi jumlah penduduk kabupaten lebak dikali 100%	Persen	95,00	98,77	103,97
Cakupan Instansi yang memanfaatkan Data dan Dokumen Kependudukan	Jumlah instansi yang memanfaatkan data dan dokumen kependudukan dibagi jumlah OPD dikali 100%	Persen	100,00	112,5	112,50

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

Berdasarkan evaluasi RPJMD 2019-2024, urusan catatan sipil dan kependudukan menunjukkan prestasi yang sangat baik dengan seluruh indikator kinerja melebihi target yang telah ditetapkan. Demikian juga jika dilihat dari perkembangan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan secara umum tata kelola catatan sipil dan kependudukan di Kabupaten Lebak sudah sangat baik. Namun berdasarkan hasil FGD dan kuesioner masih terdapat permasalahan di lapangan seperti pencatatan pernikahan dan perseceraian yang tidak sesuai SOP dan juga pemanfaatan KTP elektronik yang masih belum optimal.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

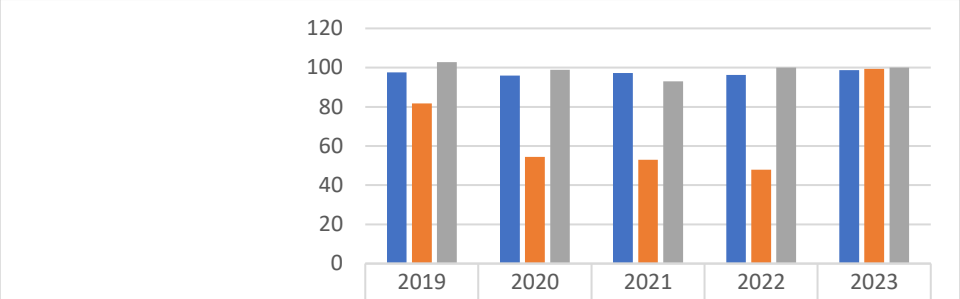

	2019	2020	2021	2022	2023
Prosentase Kepemilikan dokumen kependudukan (Satuan: %)	97,5	96,00	97,16	96,27	98,77
Prosentase kepemilikan akta-akta catatan sipil (Satuan: %)	81,66	54,51	52,94	47,98	99,33
Prosentase Kesesuaian database dokumen kependudukan (Satuan: %)	102,8	98,88	93,00	100	100,00

Gambar 2-39 Perkembangan Indikator Urusan Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 – 2023

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang RPD Kabupaten Lebak 2025 – 2026

2.4.1.13 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Salah satu strategi untuk membangun masyarakat dan desa adalah melalui pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemberdayaan ini dilakukan dengan mengembangkan kemampuan masyarakat, mengubah perilaku masyarakat, dan mengorganisasi masyarakat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan bertujuan untuk memfasilitasi pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi keluarga Pra Sejahtera, melalui beberapa pendekatan, seperti peningkatan ketahanan keluarga, pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan, penguatan peran serta lembaga kemasyarakatan, serta pemerintahan desa. Dengan melakukan pemberdayaan ini, diharapkan masyarakat dan desa dapat lebih mandiri dalam mengatasi berbagai tantangan dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan.

Tabel 2.40 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023

Indikator KInerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Persentase Desa dengan pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa, dan Administrasi Keuangan yang baik dan Pengelolaan Asetnya Tertib	Jumlah desa yang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang baik dibagi jumlah desa yang ada	Persen	100	100	100
Persentase Terbentuk BUMDes yang Aktif	Jumlah BumDes yang aktif dibagi jumlah bumdes yang ada dikali 100%	Persen	25	25	100
persentase pembangunan sapras perdesaan yang	Jumlah desa yang pembangunan sarpras perdesaan yang melibatkan masyarakat	Persen	70	70	100

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator KInerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
melibatkan masayarakat	dikali jumlah desa yang ada dikali 100%				
Persentase LKD yang produktif	Jumlah LKD yang produktif dibagi jumlah LKD yang ada dikali 100%	Persen	20	20	100
Persentase sarana usaha masyarakat yang berkembang	Jumlah Bumdes yang berkembang dibagi jumlah bumdes yang aktif dikali 100%	Persen	25	25	100
Persentase Keswadyaan Masyarakat dalam Kegiatan pembangunan Desa	Jumlah Keswadayaan masyarakat yang ada dibagi jumlah desa yang ada dikali 100%	Persen	70	70	100
Persentase Lembaga Perempuan yang Aktif dan Produktif	Jumlah lembaga perempuan yang aktif dan produktif dibagi jumlah lembaga perempuan yang ada dikali 100%	Persen	-	-	
Jumlah Perempuan yang mendapatkan pembinaan (Satuan: TP PKK)	Jumlah perempuan yang mendapatkan pembinaan dibagi jumlah perempuan yang ada dikali 100%	Persen	-	-	
Persentase pemerintahan desa yang telah melakukan kerjasama antar desa	Jumlah Desa yang terbina dibagi jumlah desa yang ada dikali 100%	Persen	24	24	100
Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Kepala Desa baru yang mengikuti pelatihan dasar Manajemen Pemerintah Desa dibagi kepala desa yang baru dikali 100%	Persen	-	-	
Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkinerja baik	Jumlah pemerintah desa yang berkinerja baik dibagi jumlah pemerintahan desa yang ada dikali 100%	Persen	24	24	100
Persentase Kelembagaan tingkat Desa yang aktif	Jumlah kelembagaan tingkat desa yang aktif dibagi jumlah kelembagaan desa yang ada dikali 100%	Persen	-	-	
Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif	Jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang aktif dibagi jumlah lembaga kemasyarakat, lembaga adat dan	Persen	10	10	100

DRAFT TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator KInerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
	masyarakat hukum adat yang ada dikali 100%				
Cakupan Sarana dan Prasarana Transportasi antar wilayah dalam kondisi baik	Cakupan sarana dan prasarana transportasi antar wilayah dalam kondisi baik dibagi jumlah sarana dan prasarana transportasi antar wilayah yang ada dikali 100%	Persen	-	-	
Persentase Pemerintahan Desa yang penataan Desanya terkelola dengan baik	Jumlah pemerintahan desa yang penataan desanya terkelola dengan baik dibagi jumlah desa yang ada dikali 100%	Persen	24	24	100
Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa berkembang dibagi jumlah desa teringgal n-1 dikali 100%	Persen	45	45	100
Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa mandiri dibagi jumlah desa maju n-1 dikali 100%	Persen	4,31	0	0

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

2.4.1.14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pada tabel di bawah menunjukkan tingkat ketercapaian indikator kinerja daerah urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Lebak. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang RPD Kabupaten Lebak 2025 – 2026, tantangan dan permasalahan dalam upaya pengendalian penduduk di masa depan masih akan dihadapkan pada permasalahan yang cukup kompleks, mengingat struktur dan komposisi kependudukan Kabupaten Lebak yang berusia muda; rata-rata lama sekolah yang relatif rendah yaitu baru mencapai 6,59 tahun; kemiskinan yang masih dialami oleh 9,24 % dari total penduduk sebesar 1,386,793 jiwa; keluarga pra sejahtera dan sejahtera I yang masih mencapai masing-masing 45,76% dan 30,61%; serta kesadaran yang relatif rendah yang berkaitan dengan karakteristik sosial budaya masyarakat yang belum cukup suportif terhadap program-program yang terkait dengan pengendalian penduduk dan KB. Pandemi yang berkepanjangan turut menjadi ancaman meningkatnya pernikahan usia dini yang harus diantisipasi oleh pemerintah dari berbagai perspektif, terutama urusan pelayanan kesehatan karena terkait dengan potensi munculnya kasus-kasus kehamilan dengan risiko tinggi yang berpotensi meningkatkan kasus kematian ibu dan neonatus.

Tabel 2.41 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023

Indikator Kinerja Daerah	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib yang					

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja Daerah	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (Satuan: %)	Jumlah PKB/PLKB yang terbina dibagi Jumlah seluruh PKB/PLKB dikali 100%	Persen	100	100	100
Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (Satuan: %)	Jumlah Peserta MKJP dibagi Jumlah Pasangan Usia Subut dikali 100%	Persen	67,47	78,16	115,84
Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKR) (Satuan: Kelompok)		Kelompok	209	124	59,33
Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (Satuan: %)	Jumlah Peserta MKJP dibagi Jumlah Pasangan Usia Subut dikali 100%	Persen	67,47	78,16	115,84
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa (Satuan: %)	Jumlah remaja yang terbina dibagi Jumlah seluruh Remaja dalam PIK-R dikali 100%	Persen	1,80	1,80	100
Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKL) (Satuan: Kelompok)		Kelompok	259	142	54,83
Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun (Satuan: %)	Jumlah Peserta KB Aktif dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur dikali 100%	Persen	80,10	78,16	97,58
Cakupan Anggota Bina Keluarga berKB (Satuan: Orang)		Orang	51.250	12.436	24,27
Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKB, BKR, BKL) (Satuan: Kelompok)		Kelompok	876	506	57,76

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

Gambar 2.24 di bawah menunjukkan tren perkembangan indikator kinerja urusan pengendalian penduduk dna keluarga berencana pada tahun 2019 – 2022 di Kabupaten Lebak. Perlu menjadi

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

tantangan bahwa indikator jumlah pusat pelayanan KKBPK yang terbina aktif baik kelompok BKB,BKR dan BKL mengalami penurunan tiap tahunnya. Pada tahun 2023, tingkat ketercapaian indikator tersebut belum mencapai target yang ditentukan seperti ditunjukkan pada tabel diatas. Pelaksanaan FGD dan kuesioner OPD di lingkungan Kabupaten Lebak membantu untuk mengidentifikasi temuan permasalahan tersebut seperti masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, BLK dan UPPKS, PATBM) dalam pelaksanaan 8 fungsi keluarga.

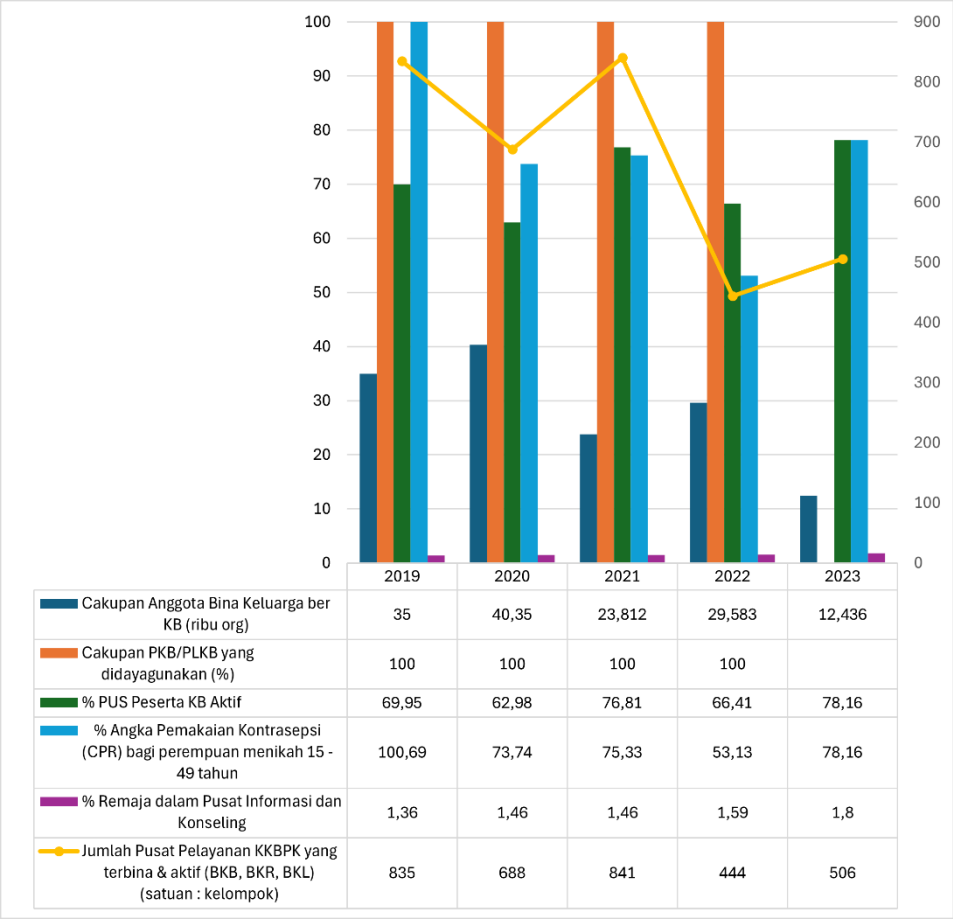

	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Anggota Bina Keluarga ber KB (ribu org)	35	40,35	23,812	29,583	12,436
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan (%)	100	100	100	100	
% PUS Peserta KB Aktif	69,95	62,98	76,81	66,41	78,16
% Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah 15 - 49 tahun	100,69	73,74	75,33	53,13	78,16
% Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling	1,36	1,46	1,46	1,59	1,8
Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKB, BKR, BKL) (satuan : kelompok)	835	688	841	444	506

Gambar 2-40 Perkembangan Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Tahun 2019 – 2023

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang RPD Kabupaten Lebak 2025 – 2026, diolah kembali, 2024

Berdasarkan hasil temuan yang disajikan pada tabel di bawah indikator cakupan anggota bina Keluarga berKB (Satuan: Orang) diidentifikasi belum mencapai target yang ditentukan. Tren perkembangan dari indikator tersebut diidentifikasi mempunyai tren yang fluktuatif dari tahun 2019 – 2022. permasalahan lainnya yakni terbatasnya jumlah PKB/PLKB dibanding jumlah desa petugas lapangan dalam melaksanakan pembinaan program KB dibandingkan dengan cakupan pembinaan kelestarian ber KB, masih rendahnya rata-rata usia kawin pertama perempuan, masih tingginya angka drop out peserta KB, rendahnya partisipasi pria dalam ber KB, masih rendahnya pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja, dan kurangnya pembinaan peningkatan kemampuan Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD, Sub. PPKBD) dalam pelaksanaan Program KKBPK (kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga), PP dan PA ditingkat lini lapangan.

DRAFT - NOT FOR COPY

Karenanya peran kelembagaan masyarakat perlu ditingkatkan keberdayaannya dalam rangka mendukung program-program pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pendekatan kolaboratif dengan berbagai elemen masyarakat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah mutlak dilakukan guna meningkatkan mutu dan intensitas partisipasi publik, sedemikian rupa sehingga tujuan program-program pemerintah menjadi lebih mampu mencapai sasaran yang esensial. Pengendalian Penduduk merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya upaya pengendalian penduduk harus menjadi kebijakan yang bersifat strategis, salah satunya melalui fokus efektivasi program Keluarga Berencana sebagai instrumen pengendalian laju pertumbuhan alamiah sekaligus meningkatkan derajat kesehatan reproduksi masyarakat.

Tabel 2.42 Temuan Permasalahan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Indikator Kinerja Daerah	Tingkat Capaian	Intepretasi	Notulensi FGD	Kuesioner FGD	Kuesioner Instansi
Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib yang tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar					
Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk (Satuan: %)	100	sesuai (=)			Terbatasnya jumlah PKB/PLKB dibanding jumlah desa petugas lapangan dalam melaksanakan pembinaan program KB dibandingkan dengan cakupan pembinaan kelestarian ber KB
Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (Satuan: %)	115,84	melampaui (>)			
Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKR) (Satuan: Kelompok)	59,33	belum tercapai (<)			Masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, BLK dan UPPKS, PATBM) dalam pelaksanaan 8 fungsi keluarga
Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (Satuan: %)	115,84	melampaui (>)			
Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling	100,00	sesuai (=)			

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja Daerah	Tingkat Capaian	Intepretasi	Notulensi FGD	Kuesioner FGD	Kuesioner Instansi
Remaja/Mahasiswa (Satuan: %)					
Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKL) (Satuan: Kelompok)	54,83	belum tercapai (<)			Masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, BLK dan UPPKS, PATBM) dalam pelaksanaan 8 fungsi keluarga
Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun (Satuan: %)	97,58	belum tercapai (<)			- Terbatasnya jumlah PKB/PLKB dibanding jumlah desa petugas lapangan dalam melaksanakan pembinaan program KB dibandingkan dengan cakupan pembinaan kelestarian ber KB; - Masih rendahnya rata-rata usia kawin pertama perempuan; - Masih tingginya angka drop out peserta KB; - Rendahnya partisipasi pria dalam ber KB; - Masih rendahnya pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja; - Kurangnya pembinaan peningkatan kemampuan Institusi Masyarakat Pedesaan (PPKBD, Sub. PPKBD) dalam pelaksanaan Program KKBPK (kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga), PP dan PA ditingkat lini lapangan; - Masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, BLK dan UPPKS, PATBM)

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja Daerah	Tingkat Capaian	Intepretasi	Notulensi FGD	Kuesioner FGD	Kuesioner Instansi
					dalam pelaksanaan 8 fungsi keluarga
Cakupan Anggota Bina Keluarga berKB (Satuan: Orang)	24,27	belum tercapai (<)			
Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKB, BKR, BKL) (Satuan: Kelompok)	57,76	belum tercapai (<)			Masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan anggota kelompok kegiatan (BKB, BKR, BKL, BLK dan UPPKS, PATBM) dalam pelaksanaan 8 fungsi keluarga

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

2.4.1.15 Perhubungan

Urusan perhubungan tidak terlepas dari sarana dan prasarana transportasi. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mendukung perkembangan alat transportasi secara pesat, sehingga menyebabkan laju pertumbuhan kendaraan pun semakin meningkat pula di Kabupaten Lebak. Data BPS Provinsi Banten Tahun 2022 menunjukan bahwa perkembangan jumlah kendaraan di Kabupaten Lebak dengan jenis kendaraan berupa mobil penumpang, bus, truk dan sepeda motor setiap tahunnya selalu meningkat, dimana pada tahun 2018 jumlah kendaraan berupa jenis kendaraan tersebut sekira 257.942 menjadi 282.579 pada tahun 2021.

Adanya pelayanan akses transportasi tersebut diharapkan dapat menjadi alat mobilisasi guna memperlancar aktivitas sehari-hari. Selain itu juga dengan adanya pelayanan akses transportasi tersebut diharapkan dapat mendatangkan wisatawan dengan adanya dukungan meliputi kapasitas transportasi antar Kabupaten menuju destinasi pariwisata dan kapasitas transportasi lokal pada destinasi pariwisata. Belum tersedia sepenuhnya trayek transportasi umum menuju dan dari tempat wisata, masyarakat saat ini masih sangat tergantung pada kendaraan pribadi untuk dapat berkunjung ke tempat wisata yang ada di Kabupaten Lebak.

Adanya pelayanan akses transportasi tersebut diharapkan dapat menjadi alat mobilisasi guna memperlancar aktivitas sehari-hari. Selain itu juga dengan adanya pelayanan akses transportasi tersebut diharapkan dapat mendatangkan wisatawan dengan adanya dukungan meliputi kapasitas transportasi antar Kabupaten menuju destinasi pariwisata dan kapasitas transportasi lokal pada destinasi pariwisata. Belum tersedia sepenuhnya trayek transportasi umum menuju dan dari tempat wisata, masyarakat saat ini masih sangat tergantung pada kendaraan pribadi untuk dapat berkunjung ke tempat wisata yang ada di Kabupaten Lebak.

Tabel 2.43 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Perhubungan Tahun 2023

Indikator KInerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Persentase prasarana perhubungan dalam kondisi baik	Jumlah prasarana dalam kondisi baik (/) dibagi jumlah prasarana perhubungan (x) dikali 100%	Persen	100	100	100
persentase pembangunan prasarana perhubungan	Jumlah prasarana Perhubungan Terbangun (/) dibagi jumlah Kebutuhan prasarana (x) dikali 100%	Persen	100	100	100
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	Jumlah angkutan umum yang memiliki KIR (/) Dibagi Jumlah Angkutan Umum (x) Dikali 100%	Persen	46,52	45,53	97,87
Persentase pelayanan terminal	Jumlah Terminal Tipe-C yang dikelola (/) DIbagi Jumlah Terminal Tipe-C (x) Dikali 100%	Persen	100	100	100
Persentase Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Lalin yang telah dilaksanakan (/) Dibagi Jumlah Pengendalian dan Pengawasan Lalin yang harus dilaksanakan (x) Dikali 100%	Persen	100	100	100

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

Prasarana transportasi di Kabupaten Lebak terdiri dari jalan sepanjang 1096.91 km, meliputi Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kabupaten, yang telah menjangkau seluruh wilayah terutama pusat-pusat pertumbuhan kecamatan meskipun kondisinya belum sepenuhnya optimal. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendukung perkembangan pesat alat transportasi, yang mengakibatkan peningkatan signifikan dalam jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Lebak.

Perkembangan kendaraan ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya sebagai sarana mobilitas untuk meningkatkan kelancaran aktivitas sehari-hari. Untuk meningkatkan aksesibilitas ke wilayah perdesaan, Kabupaten Lebak saat ini memiliki jalur trayek angkutan desa dengan dukungan sekitar 161 kendaraan angkutan desa dan 142 kendaraan angkutan perkotaan. Terdapat 44 lintas trayek untuk angkutan desa dan 11 lintas trayek untuk angkutan kota. Selain itu, terdapat akses melalui KRL (Kereta Rel Listrik) Commuter Line di beberapa stasiun di Kabupaten Lebak, seperti Stasiun Rangkasbitung, Stasiun Citeras, dan Stasiun Maja, yang melayani penumpang menuju Jabotabek. Selain itu, terdapat juga Kereta Api Lokal yang melayani rute dari Rangkasbitung ke Merak. Keberadaan fasilitas transportasi ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten Lebak dengan memanfaatkan pola pergerakan yang terjadi serta mendukung perkembangan potensial yang dapat timbul akibat pembangunan dan kebijakan nasional dan provinsi.

Untuk menjalani uji kendaraan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Uji kendaraan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan memenuhi syarat teknis dan layak untuk beroperasi di jalan raya. Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, terjadi peningkatan jumlah uji KIR (Kendaraan Bermotor Inspeksi Teknis) dari 1.211 kali pada tahun 2018 menjadi 1.369 kali pada tahun 2019, namun mengalami penurunan menjadi 1.089 kali pada tahun 2020. Meskipun demikian, hanya sekitar 40% kendaraan angkutan umum yang telah memiliki sertifikat uji KIR.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Selain itu, persentase pelayanan terminal dan kondisi sarana serta prasarana perhubungan yang berada dalam kondisi baik mencapai kisaran 80%. Saat ini, terdapat delapan terminal dan sub-terminal yang berfungsi sebagai penghubung antarwilayah di Kabupaten Lebak, mendukung mobilitas dan konektivitas antara daerah-daerah di dalamnya.

2.4.1.16 Komunikasi Dan Informatika

Secara umum, Kabupaten Lebak masih menghadapi kendala dalam ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informatika yang belum memadai. Hal ini berdampak pada tingkat penggunaan dan kemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang belum optimal, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Tantangan utama yang dihadapi dalam urusan ini adalah upaya untuk mengoptimalkan layanan e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), baik untuk kepentingan internal pemerintahan daerah maupun untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Tabel 2.44 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2023

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Persentase terlayaninya informasi publik		Persen	-		
Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah		Persen	-		
Persentase pengelolaan aplikasi informatika pemerintah daerah		Persen	-		
Persentase tersebarluaskannya informasi penyelenggaraan pemerintah daerah		Persen	-		
Cakupan informasi tentang kegiatan SKPD dan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Lebak (Satuan: Kali)		Kali	-		
Persentase Pengelolaan sistem Aplikasi berbasis Teknologi Informatika		Persen	-		
Persentase pemanfaatan Teknologi		Persen	-		

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Informatika untuk layanan publik					
Persentase pengelolaan aplikasi informatika pemerintah daerah	(Jumlah Pengelolaan aplikasi informatika/ Jumlah aplikasi) X 100 %	Persen	100	100	100
Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	(Jumlah pengelolaan informasi dan komunikasi / Jumlah media Infomasi Komunikasi Publik) X 100 %	Persen	100	100	100
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	(Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi /Jumlah layanan publik) 100 %	100	100	100	100
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	(Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/ Jumlah Perangkat Daerah) X 100 %	Persen	100	100	100
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	(Jumlah Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo/Jumlah Perangkat Daerah) x 100 %	Persen	100	0	0
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	(Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi/Jumlah Layanan Publik) X 100 %	Persen	100	100	100
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/ Jumlah Penduduk) X 100 %	Persen	100	64,81	64,81

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

Meskipun penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Lebak telah mendapat predikat sangat baik dengan skor 3,52 menurut evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui situs portal pemeringkatan SPBE (spbe.go.id), namun tantangan untuk melakukan transformasi digital masih besar, seperti tercermin dari beberapa kondisi faktual. Hanya sekitar 49,01% penduduk usia 5 tahun ke atas di Kabupaten Lebak yang memiliki telepon seluler, dan hanya 5,27% yang menggunakan komputer, dari sekitar 5,29% rumah tangga yang memiliki fasilitas komputer atau laptop di rumahnya. Selain itu, hanya sekitar 28,72% penduduk yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir, dengan sebagian besar rumah tangga tidak terkoneksi dengan jaringan telepon PSTN (Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Banten, 2019).

Tantangan ini diperparah oleh infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang belum memadai, di mana hampir seluruh kecamatan masih memiliki desa-desa yang tidak terjangkau sinyal seluler. Dalam konteks lain, optimalisasi peran komunikasi dan informatika dalam pengelolaan informasi dan komunikasi publik juga perlu ditingkatkan untuk membangun citra positif pemerintah melalui penyebarluasan informasi publik secara intensif dan konsisten. Oleh karena itu, perkuatan layanan SPBE yang terkait dengan fungsi pengelolaan informasi dan komunikasi publik perlu mendapat perhatian serius, karena hal ini mencerminkan keterbukaan informasi publik dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.4.1.17 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pada tahun 2021 pertumbuhan jumlah koperasi di Kabupaten Lebak menunjukkan penurunan yaitu sebesar -2,18%, sehingga berdampak pula pada rata-rata pertumbuhan tiga tahun terakhirnya yaitu sebesar 0,37%. Hal ini juga berpengaruh pada pertumbuhan koperasi aktif yang menurun yaitu 2,56% pada tahun 2020 menjadi -4,99% pada tahun 2021 dan rata-rata pertumbuhannya dari tahun 2019 – 2021 sebesar 0,72%. Namun capaian jumlah koperasi aktif telah mencapai target bahkan melampaui target, hal ini dapat terlihat pada tahun 2021 targetnya sebesar 259 koperasi dan capaiannya sebesar 533 koperasi.

Selain kriteria Koperasi Aktif bahwa Koperasi juga dapat diklasifikasikan dalam Kategori Koperasi Sehat, dengan target pada tahun 2021 sebanyak 26 koperasi namun hanya tercapai 84,61sebanyak 22 koperasi, namun mengalami pertumbuhan sebesar 10% dibandingkan dengan tahun lalu yang tidak mengalami pertumbuhan sama sekali. Dan tahun 2019-2021 ratarata pertumbuhannya lebih besar dari pertumbuhan tahun 2021 yaitu sebesar 17,62%.

Tabel 2.45 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2023

Indikator KInerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Persentase Koperasi Aktif	Jumlah Koperasi yang melaksanakan RAT di Tahun (n) dibagi dengan jumlah Koperasi di Tahun (n-1) x 100	Persen	37,54	9,5	55,86

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator KInerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Persentase UMK yang berdaya saing	Jumlah UMKM yang terakses kelayanan keuangan dibagi dengan jumlah koperasi UMKM x 100	Persen	20,81	5,09	24,46
Persentase koperasi berkinerja baik	Jumalah Koeprasi yang melaksanakan RAT di Tahun (n) dibagi dengan jumlah koperasi di tahun (n-1) x 100	Persen	14	9,95	71,07
Rasio Kewirausahaan	Jumalh Usaha Mikro yang Menetap Tahun (n) dibagi dengan jumlah Penduduk		0,04	0,0496	112,73
Persentase pengurus dan pengawas koperasi yang kompeten	Jumalh Pengurus dan Pengawas yang memiliki sertifikasi keahlian perkoperasian di bagi dengan jumlah pengurus dan pengawas koperasi x 100	Persen	7,90	5,89	74,56
Persentase Koperasi Sehat	Jumalh Koperasi Sehat di Tahun (n) di bagi dengan jumlah koperasi di Tahun (n-1) x 100	Persen	3,21	3,32	103,43
Persentase Usaha Mikro ke Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil Tahun (n) di bagi dengan Jumlah Usaha Mikro Tahun (n) x 100	Persen	0,01	0,014	107,69

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

Pada tahun 2023, di Kabupaten Lebak terdapat 629 unit koperasi, yang terdiri dari 34 unit KUD, 62 unit KPRI, 27 unit KOPKAR, dan 785 unit koperasi lainnya. Sedangkan jika ditinjau berdasarkan kecamatan, koperasi paling banyak berada di Kecamatan Rangkasbitung sebanyak 181 unit, kemudian di Kecamatan Cibadak sebanyak 48 unit dan di Kecamatan Warunggunung sebanyak 42 unit. Dalam empat tahun terakhir, jumlah koperasi yang berada di Kabupaten Lebak terus bertambah. Pada tahun 2020 berjumlah sebanyak 561 unit yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Lebak, pada tahun 2021 sebanyak 573 unit, tahun 2022 sebanyak 593 unit dan pada tahun 2023 berjumlah sebanyak 629 unit koperasi.

Fasilitasi kebijakan yang mendukung kemudahan akses permodalan UMKM ke perbankan dan lembaga keuangan non-bank menjadi krusial dalam meningkatkan kapasitas UMKM. Hal ini tidak hanya terkait dengan peningkatan akses permodalan, tetapi juga dengan mendukung UMKM dalam beradaptasi dengan revolusi industri 4.0. Transformasi digital menjadi penting karena UMKM perlu meningkatkan kapasitas manajemen dan pemasaran produk mereka agar dapat tetap bersaing di era pandemi dan era disrupsi saat ini, di mana inovasi dan perubahan besar-besaran mengubah lanskap bisnis secara fundamental.

2.4.1.18 Statistik

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan, selain data-data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) diperlukan juga data-data sektoral yang berasal dari masing-masing organisasi perangkat daerah yang dijadikan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu dalam rangka mendukung pembangunan daerah perlunya sinergi dan kerja sama antara BPS sebagai penyedia data dasar dan organisasi perangkat daerah sebagai penyedia statistik sektoral terus ditingkatkan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tabel 2.46 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Statistik Tahun 2023

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Cakupan ketersediaan data dan informasi kinerja pembangunan daerah		Persen	80	76	95
Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang lengkap		Persen	100	100	100
Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah		Persen	100	100	100
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	(Jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah/Jumlah Perangkat Daerah)x 100 %	Persen	100	100	100

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

Berdasarkan Sistem Statistik Nasional, penyediaan statistik dasar dilakukan oleh Badan Pusat Statistik di tingkat daerah, yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pemerintah daerah setempat. Di sisi lain, statistik sektoral diselenggarakan oleh masing-masing perangkat daerah pemerintahan, yang bertugas menyediakan data statistik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka masing-masing.

2.4.1.19 Persandian

Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab persandian melalui berbagai metode dan teknik yang dibutuhkan untuk menjaga kemanan agar terhindar dari kejahatan dunia maya.

Tabel 2.47 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Persandian Tahun 2023

Indikator KInerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Persentase pengamanan informasi pemerintah daerah		Persen	100		0
Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	(Jumlah layanan keamanan informasi untuk perangkat daerah/Jumlah perangkat daerah) X 100 %	Persen	100	100	100
Tingkat keamanan informasi pemerintah		Persen	100		0

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

Penyelenggaraan pengamanan persandian merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan, sehingga layanan urusan persandian bertujuan untuk memberikan perlindungan informasi dari potensi ancaman. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik menghasilkan data yang otentik, utuh, bebas dari kebocoran dan kerusakan informasi, serta memiliki kepastian hukum yang tinggi.

DRAFT - TIDAK UNTUK COPY

2.4.1.20 Kebudayaan

Urusan kebudayaan merupakan tanggung jawab yang penting bagi Pemerintah Kabupaten Lebak, mencakup pengelolaan, pelestarian, dan pembinaan kebudayaan, tradisi, serta lembaga adat. Hal ini juga meliputi pembinaan kesenian daerah, pembinaan sejarah lokal, penetapan dan pengelolaan cagar budaya tingkat kabupaten, serta penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kota dalam satu provinsi.

Di masa depan, penyelenggaraan urusan kebudayaan dihadapkan pada tantangan besar, khususnya dalam upaya pelestarian kebudayaan dan kesenian daerah yang membutuhkan anggaran yang signifikan. Selain itu, tantangan lainnya termasuk kebutuhan untuk melakukan penelitian guna menggali dan meneliti temuan-temuan baru terkait kebudayaan daerah.

Pentingnya upaya komodifikasi kebudayaan daerah juga menjadi fokus, dengan tujuan memberikan nilai ekonomi yang tinggi sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata. Hal ini sejalan dengan visi kepariwisataan Kabupaten Lebak dalam RPJMD Tahun 2019 – 2024. Selain nilai ekonomi, komodifikasi kebudayaan daerah juga penting untuk memiliki nilai ilmiah yang bermanfaat sebagai objek studi dan pendidikan bagi generasi muda, sehingga nilai-nilai kearifan lokal dapat tetap terjaga dan diteruskan kepada generasi mendatang.

Tabel 2.48 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Kebudayaan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Persentase cagar budaya yang dilestarikan	Jumlah Cagar Budaya yang dipelihara --- x 100% Total Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	Persen	15,87	41,94	264,27
persentase pelestarian adat budaya daerah	Jumlah Komunitas adat yang difasilitasi --- x 100% Jumlah Komunitas Adat yang ada	Persen	11,76	76,92	654,08
Persentase terpenuhinya kebutuhan event seni dan budaya daerah	Jumlah Event seni dan budaya yang difasilitasi --- x 100% Jumlah Kebutuhan Event seni dan budaya Daerah	Persen	100	100	100
Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang diakui secara nasional (satuan unit)	Jumlah warisan budaya tak benda yang didaftarkan ke Kemendikbud	Unit	1	4	400
Persentase budaya/tradisi lokal yang mendapat	Budaya/tradisi lokal yang diakui nasional --- x 100%	Persen	30	28,95	96,50

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
pengakuan nasional atau internasional	Jumlah Budaya/tradisi Lokal daerah				
Persentase kesenian tradisional yang mendapat pengakuan nasional (satuan %)	Jumlah Kesenian tradisional yang diakui nasional --- --- x 100% Jumlah Kesenian Lokal daerah	Persen	30	31,58	105,27
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Museum	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat tahun 2023	Point	90	83,05	92,28
Peresentase sejarah yang dipublikasikan	Jumlah sejarah lokal yang dipublikasi --- --- x 100% Total Sejarah Lokal daerah	Persen	15	40	266,67
Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang memiliki Jupel --- --- x 100% Total cagar budaya	Persen	4,64	41,94	903,88

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

Berdasarkan dokumen masterplan Geoparak Bayah Dome tahun 2023, Kabupaten Lebak dianugerahi dengan bermacam-macam jenis situs warisan budaya yang merupakan cerminan harmonis kehidupan manusia dengan alam. Mulai dari Masyarakat Hukum Adat Baduy, Kasepuhan Banten Kidul, berbagai Situs dan Makam Keramat, Tinggalan masa pra-sejarah hingga Tinggalan masa penjajahan.

2.4.1.21 Perpustakaan

Berdasarkan data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPK) Kabupaten Lebak, angka minat baca masyarakat Kabupaten Lebak mencapai angka 40% pada tahun 2019, namun kemudian terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi 22(dua puluh dua persen) dari jumlah penduduk 1,3 (satu koma tiga) juta jiwa penduduk Kabupaten Lebak. 22% (Perbup No 1 Tahun 2022). Dengan capaian tersebut, tingkat minat baca masyarakat Kabupaten Lebak dikategorikan rendah. Hal ini tentu menjadi perhatian berbagai pihak. Pemerintah daerah pun melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan angka minat baca masyarakat Kabupaten Lebak. Salah satu upaya pemerintah daerah adalah dengan mewajibkan setiap ruangan publik dapat menyediakan ruangan sudut membaca. Pemerintah daerah juga berupaya untuk membangun sarana prasarana penunjang peningkatan minat baca masyarakat. Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Lebak telah memiliki satu unit perpustakaan daerah, yaitu Perpustakaan Saidjah Adinda, dengan lokasi yang strategis dan tempat yang nyaman, diharapkan dapat meningkatkan minat dan daya baca masyarakat di Kabupaten Lebak.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tabel 2.49 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Perpustakaan Tahun 2023

Indikator Capaian	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Jumlah pengunjung perpustakaan		Orang	116.502	52.628	45,17
Jumlah Perpustakaan yang dibina		Unit	297,00	0	0,00
Persentase Minat Baca Masyarakat (PMBM)		Persen	52	53	101,92
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat		Persen	45,75	62,85	137,38
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		Persen	3,48	50,26	100

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

Dalam pengelolaan perpustakaan daerah, beberapa indikator utama seperti Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat melebihi target capaian. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah pengunjung perpustakaan dan jumlah perpustakaan yang dibina yang berada di bawah 50%. Hal ini disebabkan oleh sarana prasarana yang prasarana perpustakaan masih belum dapat menjangkau seluruh wilayah terutama pada tingkat desa.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

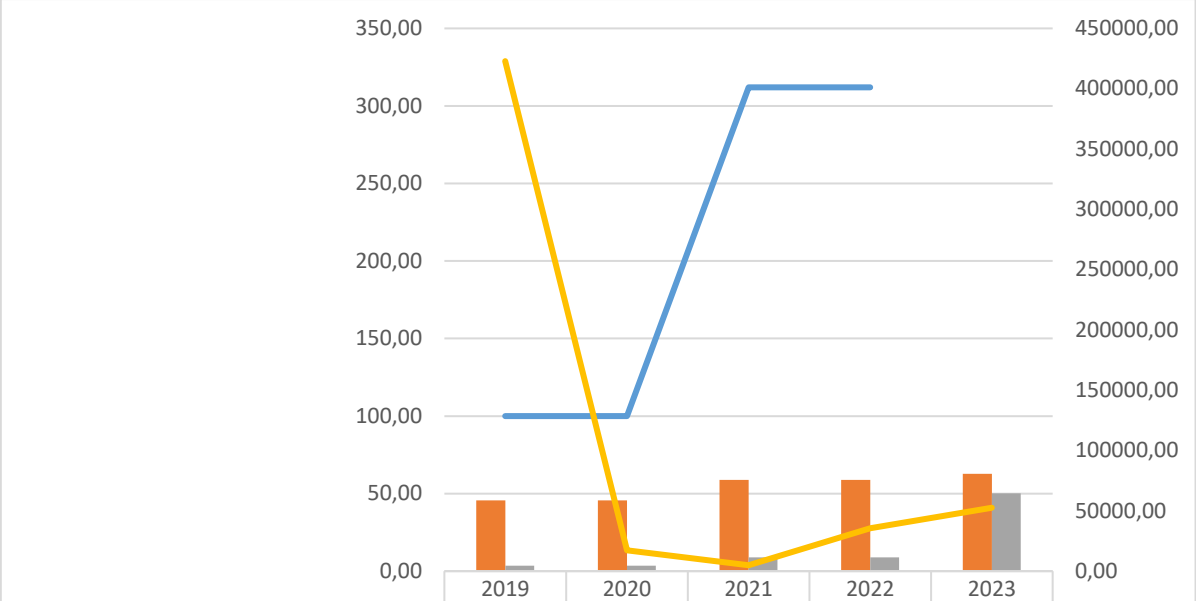

	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Satuan: %)	45,71	45,71	58,77	58,77	62,85
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Satuan: %)	3,46	3,46	8,90	8,90	50,26
Jumlah pengunjung perpustakaan (Satuan: Orang) Jumlah Perpustakaan yang dibina (Satuan: Unit) Persentase Minat Baca Masyarakat (PMBM) Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Satuan: %) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Satuan: %)	47,00	47,00	20,00	52	53,00
Jumlah Perpustakaan yang dibina (Satuan: Unit)	100	100	312,0	312,00	
Jumlah pengunjung perpustakaan (Satuan: Orang)	422.856	17.213	4.928	35.679	52.628

Gambar 2-41 Perkembangan Indikator Urusan Perpustakaan Tahun 2019-2022

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang RPD Kabupaten Lebak 2025 – 2026

Grafik di atas menunjukkan perkembangan indikator urusan perpustakaan selama 5 tahun terakhir yang menunjukkan kecenderungan menurun. Jumlah pengunjung tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan menurun di tahun-tahun berikutnya, selama masa COVID-19. Tingkat gemar membaca masyarakat juga menurun di perpustakaan seiring berubahnya platform informasi di masa pandemi dari luring menjadi daring yang juga mencakup migrasi data dari media *offline* ke media *online*.

2.4.1.22 Kearsipan

Kewenangan pemerintah daerah pada urusan kearsipan terbilang cukup kompleks, yang mencakup antara lain: pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis yang diciptakan pemerintah daerah, BUMD; perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat yang berdomisili di wilayahnya; pengelolaan simpul jaringan dalam system informasi kearsipan Nasional (SIKN) melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional

(JIKN) pada tingkat kabupaten; pemusnahan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun; pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten; penyelamatan arsip Perangkat Daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran Kecamatan dan Desa/kelurahan; melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan pemerintah kabupaten; daftar pencarian arsip; serta penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan pemerintah kabupaten. Upaya pengelolaan arsip secara tertib dan terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi melalui penerapan e-goverment. Tata kelola kearsipan berbasis elektronik menjadi salah satu indikator penilaian keberhasilan pelaksanaan program SAKIP dan reformasi birokrasi.

Pengelolaan secara baku arsip di Kabupaten Lebak diatur oleh Perda Nomor 6 Tahun 2016, dan dijabarkan secara khusus untuk pengelolaan Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah melalui Perbup Nomor 23 Tahun 2016. Berdasarkan hal tersebut pada tahun 2017 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lebak selaku Lembaga Kearsipan Daerah melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan arsip dengan indikator target capaian Persentase Ketertiban Pengelolaan Kearsipan (PKPK) sebesar 98% pada tahun 2023. Adapun capaian eksisting baru mencapai 90,16% dari total 61 unit pengelola kearsipan yang dibina. Arsip yang menjadi sasaran pengelolaan secara baku adalah Arsip Dinamis di Unit Kearsipan Tingkat II (OPD/Kecamatan/Desa/Kel), dan Arsip Statis yang berada di Unit Kearsipan Tingkat I (Depo Arsip Diskerpus).

Tabel 2.50 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Kearsipan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Persentase OPD yang mengelola arsip sesuai Perbup		Persen	59	100	169,49
Jumlah Dokumen Keuangan Setda yang terpelihara		Dokumen	11	10	90,91
Persentase Sarana dan Prasaranan Kearsipan dalam kondisi baik		Persen	100	100	100
Persentase Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam sistem layanan kearsipan		Persen	80	80	100
Tertibnya Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Daerah		Persen	100	85	85
Persentase Ketertiban Pengelolaan Kearsipan (PKPK)		Persen	98	98	100
Jumlah Arsip Yang terdata, tertata dan terpelihara di DEPO unit Kerasipan I		Arsip	650	650	100
Cakupan Arsip Yang terdata, tertata dan terpelihara di DEPO unit Kerasipan I		Persen	100	100	100

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Pencapaian urusan kearsipan menunjukkan prestasi yang sangat baik dengan lebih dari 85% indikator kinerja mencapai target capaian. Lebih jauh, dalam periode 2019-2024, jumlah OPD yang mampu melakukan pengarsipan sesuai dengan Perbup melebihi target capaian.

2.4.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.4.2.1 Lingkungan Hidup

Fokus layanan urusan pilihan pada lingkungan hidup terdapat beberapa indikator yaitu indeks kulitas lingkungan hidup, peningkatan indeks kualitas udara, peningkatan indeks kualitas tutupan lahan dan peningkatan indeks kualitas air.

Tabel 2.51 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2023

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)		Indeks	52,97	61,03	115,22
Peningkatan Indeks Kualitas Udara		Point	57,84	75,48	130,50
Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan		Point	44,26	39,83	89,99
Peningkatan Indeks Kualitas Air		Point	52,80	53,33	101

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

Berdasarkan indikator kulitas lingkungan hidup (IKLH) ditunjukkan bahwa indeks kualitas udara, tutupan lahan dan air sudah melebihi target capaian. Indeks kualitas lingkungan hidup adalah 115,22, indeks kualitas udara yaitu 130,50 point, indeks kualitas tutupan lahan yaitu 89,99 point dan indeks kualitas air adalah 101 point. Kondisi tersebut menujukkan bahwa Kabupaten Lebak dapat menjaga kualitas lingkungan dengan cukup baik.

2.4.2.2 Perhubungan

Fokus layanan urusan pilihan pada perhubungan terdapat beberapa indikator kinerja seperti penurunan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas. Kondisi tersebut penting untuk diperhatikan karena berkaiatan dengan keselamatan masyarakat dalam berkendara.

Tabel 2.52 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Perhubungan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	Jumlah Kecelakaan Lalin Tahun Sebelumnya (n-1) Dikurangi Jumlah Kecelakaan Lalin Tahun 2023 (n) Dibagi jumlah Kecelakaan Lalin Tahun Sebelumnya (n-1) (x) Dikali 100%	Persen	4,80	4,35	90,63
Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	Jumlah Pelanggaran Lalin Tahun Sebelumnya (n-1) Dikurangi Jumlah Pelanggaran Lalin Tahun 2023 (n) Dibagi Jumlah Pelanggaran Lalin Tahun Sebelumnya (n-1) (x) Dikali 100%	Persen	0,02	0,02	100

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Persentase penurunan kecelakaan sebesar 90% mengindikasikan perbaikan signifikan dalam keamanan lalu lintas di Kabupaten Lebak. Ini menunjukkan bahwa berbagai upaya preventif dan penegakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah daerah telah berhasil mengurangi insiden kecelakaan secara drastis. Penurunan ini mencerminkan komitmen untuk meningkatkan infrastruktur jalan serta kampanye kesadaran publik yang efektif terkait dengan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Selain itu, ini juga mencerminkan investasi dalam teknologi dan peningkatan dalam pelayanan pemeliharaan jalan, yang keduanya berperan penting dalam menciptakan lingkungan transportasi yang lebih aman dan lebih baik untuk masyarakat.

2.4.2.3 Kepemudaan dan Olahraga

Untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, terdapat berbagai wahana baik yang dikembangkan oleh pemerintah, maupun atas inisiasi masyarakat seperti melalui berbagai organisasi kepemudaan. Sementara itu untuk mendukung aktivitas olahraga masyarakat, Pemerintah Daerah telah menyediakan berbagai sarana olahraga, diantaranya kawasan Sport Center, kawasan alun-alun Rangkasbitung dan GOR Karta Natanegara.

Tabel 2.53 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023

Indikator Kinerja Daerah	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Persentase Atlet yang berprestasi (Satuan: %)		Persen	78	78	100
Persentase Sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik (Satuan: %)		Persen	100	85	85
Persentase lembaga pemuda yang terbina (Satuan: %)		Persen	-		
Persentase lembaga pemuda yang aktif (Satuan: %)		Persen	60	60	100
Jumlah pemuda yang berprestasi di Tk. Provinsi dan nasional (Satuan: Orang)		Orang	-		
Jumlah pemuda yang berprestasi di Tk. Provinsi dan nasional (Satuan: Orang)		Persen	15	13	86,67
Persentase Cabor yang berprestasi (Satuan: %)		Persen	64	23	35.94
Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga yang terbangun (Satuan: Unit)		Unit	2	2	100
Persentase wirausaha muda baru yang memperoleh akses modal (Satuan: %)		Persen	10	10	100
Persentase Prestasi Keolahragaan Kabupaten Lebak (Satuan: %)		Persen	10	10	100
Persentase Kemandirian, partisipasi dan Prestasi Pemuda (Satuan: %)		Persen	10	10	100
Persentase pembina dan pelatih yang bersertifikat (Satuan: %)		Persen	100	100	100
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (Satuan: %)		Persen	18	18	100

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja Daerah	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (Satuan: %)		Persen	0,29	0,3	100
Peningkatan prestasi olahraga (Satuan: Medali)		Media	12	18	150

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

Gambar 2.26 menunjukkan perkembangan indikator urusan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Lebak tahun 2019 - 2023. Ajang olahraga merupakan salah satu sektor yang dapat mengharumkan nama daerah pada tingkat nasional maupun internasional. Banyaknya atlet yang berprestasi akan turut mengangkat nama daerahnya. Pasca pandemi Covid-19, persentase atlet berprestasi terus mengalami peningkatan, linier dengan persentase cabang olahraga berprestasi mengalami kenaikan yang terlihat sangat signifikan. Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) tahun 2021 setelah tertunda satu tahun akibat pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktornya. Hal ini juga terlihat dari banyaknya pemuda berprestasi tingkat provinsi maupun nasional, meskipun belum berbanding lurus dengan banyaknya sarana prasarana olahraga yang terbangun pasca pandemi Covid-19 akibat *refocusing* anggaran. Pada periode selanjutnya, perlu keseriusan dari pemerintah daerah dalam keolahragaan melalui pembangunan dan perbaikan sarana prasarana penunjang olahraga guna menunjang kesuksesan para atlet yang dapat mengharumkan nama daerah di masa mendatang.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

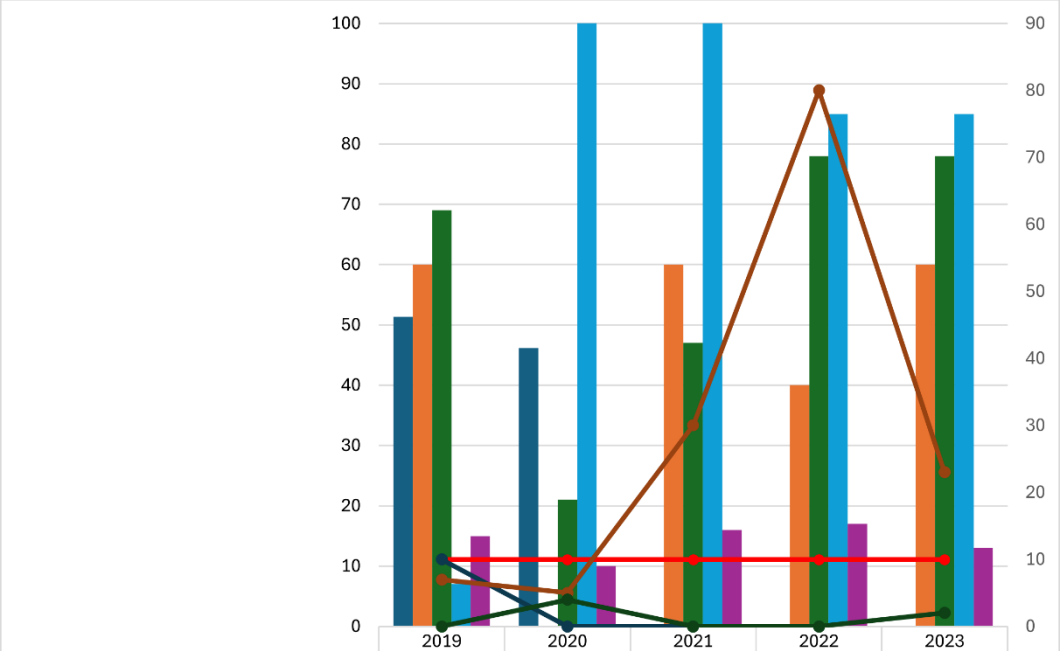

	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Kepemudaan (poin)	51,35	46,15			
% Lembaga pemuda yang aktif	60	0	60	40	60
% Atlet berprestasi	69	21	47	78	78
% Sarpra yang berfungsi baik	7	100	100	85	85
Jml pemuda berprestasu Tk. Provinsi dan Nasional	15	10	16	17	13
% Wirausaha muda baru yang memperoleh akses modal	10	10	10	10	10
% Lembaga pemuda yang terbina	10	0	0	0	
% Cabor berprestasi	7	5	30	80	23
Jml Sarpra OR terbangun	0	4	0	0	2

Gambar 2-42 Perkembangan Indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019 – 2023

Sumber: Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang RPD Kabupaten Lebak 2025 – 2026, diolah kembali, 2024

Tabel 2.54 Temuan Permasalahan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Indikator Kinerja Daerah	Tingkat Capaian	Formulasi	Notulensi FGD	Kuesioner FGD	Kuesioner Instansi
Persentase Atlet yang berprestasi (Satuan: %)	100,00	sesuai (=)			
Persentase Sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik (Satuan: %)	85,00	belum tercapai (<)			ada beberapa sarana olahraga yang belum tersedia untuk menunjang pengembangan dan pembinaan atlit. Disamping itu Dispora belum memiliki gedung kantor yang memenuhi standar pelayanan yang baik

DRAFT - TIDAK UNTUK DIFOTOKOPY

Indikator Kinerja Daerah	Tingkat Capaian	Formulasi	Notulensi FGD	Kuesioner FGD	Kuesioner Instansi
Persentase lembaga pemuda yang terbina (Satuan: %)		belum tercapai (<)			
Persentase lembaga pemuda yang aktif (Satuan: %)	100,00	sesuai (=)			
Jumlah pemuda yang berprestasi di Tk. Provinsi dan nasional (Satuan: Orang)		belum tercapai (<)			
Jumlah pemuda yang berprestasi di Tk. Provinsi dan nasional (Satuan: Orang)	86,67	belum tercapai (<)			
Persentase Cabor yang berprestasi (Satuan: %)	93,33	belum tercapai (<)			
Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga yang terbangun (Satuan: Unit)	0,00	belum tercapai (<)			ada beberapa sarana olahraga yang belum tersedia untuk menunjang pengembangan dan pembinaan atlit. Disamping itu Dispora belum memiliki gedung kantor yang memenuhi standar pelayanan yang baik
Persentase wirausaha muda baru yang memperoleh akses modal (Satuan: %)	100,00	sesuai (=)			
Persentase Prestasi Keolahragaan Kabupaten Lebak (Satuan: %)	100,00	sesuai (=)			
Persentase Kemandirian, partisipasi dan Prestasi Pemuda (Satuan: %)	100,00	sesuai (=)			
Persentase pembina dan pelatih yang bersertifikat (Satuan: %)	100,00	sesuai (=)			

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja Daerah	Tingkat Capaian	Formulasi	Notulensi FGD	Kuesioner FGD	Kuesioner Instansi
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (Satuan: %)	94,44	belum tercapai (<)			
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (Satuan: %)	103,45	melampaui (>)			
Peningkatan prestasi olahraga (Satuan: Medali)	180,00	melampaui (>)			

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2024

2.4.2.4 Kelautan dan Perikanan

Produksi ikan di Kabupaten Lebak pada tahun 2022 tercatat sebanyak 10.384.460 kg. Jumlah ini meningkat setiap tahunnya kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan. Adapun jumlah konsumsi ikan pada tahun 2022 mencapai 39,85 kg/perkapita/tahun. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.55 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Kealutan dan Perikanan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Produktivitas Sub Sektor Perikanan	Nilai Produksi perikanan dibagi jumlah tenaga kerja sub sektor perikanan	Rupiah	24.931.500	25.187.696	101,03
Persentase peningkatan kelas kelompok perikanan	Jumlah kelompok perikanan yang mengalami peningkatan kelas dibagi jumlah kelompok perikanan dikali seratus persen	Persen	5,15	5,15	100
persentase ketaatan usaha perikanan	Jumlah unit usaha perikanan berizin mematuhi peraturan yang berlaku dibagi jumlah seluruh unit usaha perikanan yang memiliki SIUP dikali seratus persen	Persen	100	100	100
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) (ton) kabupaten/kota	Jumlah Total Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	Ton	10.466,78	10.570,82	100,99

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Pengembangan perluasan areal lahan usaha budidaya air payau masih terbuka terutama di pesisir Pantai Selatan Lebak, dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem jalur hijau hutan mangrove mengingat karakteristik lahannya yang khas. Secara umum, prospek pengembangan ke depan masih terbuka luas, mengingat sampai saat ini, pemanfaatan secara keseluruhan di provinsi Banten baru mencapai sekitar 66,80%.

Sektor budidaya perikanan memiliki peluang besar di tingkatkan di Kabupaten Lebak karena potensi lahan yang besar dan sistem jaminan mutu pada produksi budidaya di Provinsi Banten telah tersedia mulai dari pembenihan hingga pembesaran. antara lain standar, sertifikasi, registrasi, monitoring residu dan penyakit ikan. Selain itu, komoditas unggulan perikanan budidaya di Kabupaten Lebak memiliki daya saing dan mampu berperan sebagai penopang ketahanan pangan. Kabupaten Lebak juga memiliki kawasan kampung patin tepatnya di kecamatan Cileles berpotensi menyerap banyak tenaga kerja dan memunculkan wirausahawan baru karena memiliki karakteristik kerakyatan, mudah diaplikasikan, dan cepat dipanen.

2.4.2.5 Pertanian dan Peternakan

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa secara pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Lebak, Sektor Pertanian menjadi sektor dominan dengan pemanfaatan lebih dari 50%. Selain dari pemanfaatan ruang, sektor pertanian pun memberikan kontribusi yang dominan juga pada struktur perekonomian Kabupaten Lebak, data menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian pada struktur ekonomi dari tahun ketahun menunjukkan kontribusi paling besar dibandingkan sektor lainnya.

Tabel 2.56 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Pertanian dan Peternakan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan	Jumlah peningkatan angka pelayanan kesehatan hewan yang ditargetkan naik sebesar 1 (2%) persen per tahun yang dihitung berdasarkan hasil dari rata2 jumlah pelayanan keswan (satuan ekor), Pangan asuh (100%) dan Penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis (100%)	Persen	1	1	100
Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok : Pemula	Jumlah kelompok tani kelas Pemula pada tahun 2023	Kelompok	1.534	1.277	83,25
Lanjut	Jumlah kelompok tani kelas Lanjut pada tahun 2023	Kelompok	932	1.225	131,44
Madya	Jumlah kelompok tani kelas Madya pada tahun 2023	Kelompok	44	33	75
Utama	Jumlah kelompok tani kelas Utama pada tahun 2023	Kelompok	1	1	100
Persentase Penurunan Luas Lahan Terdampak bencana alam dan Non-alam	Jumlah luas lahan yang tertangani (APBN, APBD Provinsi, APBD Kab, Swadaya Masyarakat) di bagi jumlah total lahan yang mengalami bencana alam dan non alam	Persen	8	53,76	672

DRAFT TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah peningkatan angka pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang ditargetkan naik sebesar 1 (2%) persen pertahun yang dihitung berdasarkan hasil dari rata2 jumlah pelayanan keswan (satuan ekor), Pangan asuh (100%) dan Penanganan Penyakit Hewan Menular Strategis (100%)	Persen	1	1	100
Persentase prasarana pertanian dan perkebunan dalam kondisi baik	Jumlah prasarana pertanian tahun 2019-2023 dalam kondisi baik di bagi jumlah total prasarana pertanian tahun 2019-2023 yang di bangun/Rehab	Persen	77	87,3	113,38
Jumlah peningkatan kelas kelompok	Jumlah kelompok tani yang naik kelas kelompok pada tahun 2023	Kelompok Tani	40	68	170
Persentase Kelompok Ternak yang dibina	Jumlah target Kelompok ternak dan usaha peternakan yang dibina selama satu tahun	Persen	100	100	100
Persentase Usaha Peternakan yang dibina	Jumlah target usaha peternakan yang dibina selama satu tahun	Persen	100	100	100

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

Gambar 2-43 Luas Tanam (HA) Pertanian

Sumber: Roadmap SIDa Kabupaten Lebak, 2022

Isu strategis pengembangan bawang merah ini didasarkan belum berproses secara optimal. Berproses tersebut berkaitan dengan kegiatan inovasi, kolaborasi antar stakeholders dan pengembangan produk unggulan daerah yang menunjang pembangunan selama ini masih berjalan belum simultan dan terfragmentasi. Oleh karenanya komoditi ini perlu memerlukan pembenahan dalam hal-hal yang mendasar, berjangka panjang, mendesak, melembaga dan

DRAFT UNTUK DICOPY

harus merumuskan dan menentukan rencana startegis yang dapat menguatkan SIDa Kabupaten Lebak dimasa yang akan datang.

Jika dilihat dari bidang peternakan, menunjukkan bahwa pengembangan produksi ternak di Kabupaten Lebak merupakan kesempatan dan peluang yang sangat menguntungkan, karena daya dukung ekosistem. Hingga saat ini peternakan kerbau di Kabupaten Lebak masih dikelola secara perorangan mengikuti cara tradisional. Kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun adalah ternak kerbau diperlihara secara peorangan dalam jumlah terbatas, sebagian memiliki kandang, sebagian lagi dibiarkan dalam di lahan lahan milik pribadi. Ternak kerbau yang dipelihara di kandang biasanya juga difungsikan sebagai tenaga dalam kegiatan mengolah tanah untuk persawahan. Hasil ternak tersebut, apabila sudah mencapai berat optimal, baru dipasarkan ke pasar pasar terdekat. Kebanyakan ternak kerbau merupakan "tabungan hidup" yang baru akan dijual pada hari raya, terutama pada Idul Fitri dan Idul Adha yang dijual ke lapak lapak hewan Qurban terdekat. Namun hanya sebagian kecil saja kerbau yang dipasarkan pada hari raya tersebut berasal dari petani lokal, karena sebagian besar harus didatangkan dari luar. Demikian pula untuk memenuhi kebutuhan daging merah sehari hari, sebagian berasal dari ternak import. Bahkan dalam kondisi kelangkaan dan meningkatkan harga daging, pemerintah harus mendatangkan daging import yang dijual ke masyarakat dengan harga standard.

Peternakan kerbau masih menghadapi kendala, dalam hal ini merupakan faktor kelemahan (weakness), yaitu: (a) Mata rantai distribusi kurang efisien (b) Pemberian pakan masih konvensional, (c) Sumber pengadaan bibit unggul belum mandiri, (d) Mortalitas anakan sampai pasca sapih relatif tinggi (e) Penguasaan iptek dan keterampilan teknis masih terbatas (f) Kemampuan nanajerial yang masih rendah (g) Pembinaan kelembagaan kelompok tani belum efektif (h) Skala usaha rata-rata per peternak masih kecil. Dari seluruh faktor kelemahan tersebut dapat dikelompokan menjadi tiga faktor utama, yaitu: produksi dan produktivitas, alih teknologi, kelembagaan usaha peternakan, dan SDM peternakan ruminansia.

2.4.2.6 Perdagangan

Selain pasar yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdapat beberapa sarana perdagangan yang ada di Kabupaten Lebak, seperti kios – kios minimarket yang dari tahun ke tahun mengalami pertumbuhan jumlah dan transaksinya serta ada satu pasar swalayan yang terletak di Rangkasbitung.

Tabel 2.57 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Perdagangan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Persentase Jumlah Penanganan Terhadap Pelanggaran Perdagangan		Persen	95	100	97
Persentase alat UTTP yang bertanda tera sah ulang		Persen	-	-	-
Indeks Tertib Ukur	Indeks Tertib Ukur ditentukan dengan bobot 68,4% UTTP + 31,6% BDKT, dimana komponennya dihitung dari dua	Point	68	100	72

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
	hal berikut : a. Persentase jumlah Alat-alat Ukur Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera yang sah; b. Persentase jumlah Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) yang memenuhi ketentuan.				
Persentase proporsi produk dalam negeri yang diperdagangkan di pasar domestic		Persen	90	100	90
Persentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	(PDRB ADHB Sektor Perdagangan n-1) – (PDRB ADHB Sektor Perdagangan n) dibagi PDRB ADHB Sektor Perdagangan n-1 x 100	Persen	6	100	5.75
Persentase kesadaran pelaku usaha dan konsumen dalam mengkonsumsi barang dan jasa		Persen	90	100	90
Persentase terjaganya Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok	***Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok :*** Standar Deviasi Barang Kebutuhan Pokok dibagi Rata-rata Komoditi per bulan per tahun. *Dihitung dengan memperbandingkan target stabilitas harga barang kebutuhan pokok dengan koefisien variasi harga kebutuhan pokok.*	Persen	92	92	93
Persentase perusahaan berizin		Persen	94	100	96

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

Saat ini kelompok UMKM dengan skala usaha dan jenis olahan produk yang beragam telah banyak berkembang di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh kelompok UMKM Kabupaten Lebak dalam pengembangan usahanya. Permasalahan yang paling mendasar dihadapi oleh pelaku UMKM ini meliputi, sumber daya manusia yang kurang memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usahanya, memiliki permasalahan dalam permodalan, kurangnya sarana dan prasarana, serta kurangnya akses pemasaran produk. Permasalahan pada sektor perdagangan didukung dengan indikator yang menunnjukkan bahwa pertumbuhan sektor perdagangan masih belum memenuhi target yaitu dengan tingkat capaian 5,75%.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

2.4.2.7 Perindustrian

Secara administrasi, Kabupaten Lebak memiliki 28 kecamatan dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Rangkasbitung. Berdasarkan data informasi pelaku ekonomi kreatif, Kabupaten Lebak memiliki 12 subsektor ekonomi kreatif yang terdiri dari subsektor ekonomi kreatif kuliner, musik, kriya, *photografi,* seni pertunjukkan, *fashion*, aplikasi dan *game developer,* seni rupa, desain, film animasi, desain komunikasi visual, serta televise & radio. Subsektor ekonomi kreatif di Kabupaten Lebak tersebar di 24 kecamatan, namun beberapa subsektor ekonomi kreatif tersebut belum teridentifikasi wilayahnya. Kabupaten lebak memiliki 295 pelaku ekonomi kreatif dengan subsektor ekonomi kreatif kuliner yang terbanyak yaitu 94 pelaku ekonomi kreatif.

Kecamatan Rangkasbitung yang memiliki total pelaku ekonomi kreatif terbanyak yaitu sebanyak 148 orang, dimana jumlah tersebut terdiri dari 49 pelaku ekonomi kreatif subsektor kuliner, 28 musik, 14 kriya, 13 *photography*, 8 seni pertunjukan, 7 *fashion*, 9 aplikasi dan game developer, 5 seni rupa, 6 desain, 3 film animasi, 3 desain komunikasi visual, serta 3 televisi & radio. Kemudian pelaku ekonomi kreatif yang belum teridentifikasi asal wilayahnya sebanyak 12 pelaku ekonomi kreatif. Jumlah sub sektor ekonomi kreatif paling banyak berada di Kota Rangkas Bitung yaitu 148 subsektor, hal ini karena Rangkas Bitung merupakan Ibukota Kabupaten Lebak selanjutnya diikti oleh Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Karang Anyar. Perkembangan ekonomi kreatif sangat pendukung sektor pariwisata. Kabupaten Lebak memiliki Kawasan dan jenis pariwisata yang beragam mulai dari wisata budaya, wisata bahari, wisata alam, wisata geologi dan geopark. Banyak potensi wisata yang belum dikembangkan secara komersial sehingga belum terjama oleh wisatawan dari luar. Hal ini merupakan peluang untuk pengembangan pariwisata di Kabupaten Lebak mengingat akses yang mudah melalui tol dan kereta api dan daerah penyangga Ibukota Jakarta.

Tabel 2.58 Indikator, Target, Realisasi dan Tingkat Capaian Urusan Perindustrian Tahun 2023

Indikator Kinerja	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
Produktivitas Sektor Industri	(PDRB Sektor Industri Pengolahan dibagi Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan) x 100	Juta Rupiah	59,60	60	100
Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Memiliki Standar Mutu		Persen	75	75	100
Persentase Evaluasi Rencana Pengembangan Industri	(Jumlah industri sesuai rencana pembangunan : Jumlah industri dalam kabupaten) x 100	Persen	90	90	100
Persentase Perusahaan Berijin	(Jumlah Industri memenuhi persyaratan perizinan : Jumlah Industri dalam kabupaten) x 100	Persen	99	99	100
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait		Persen	100	100	100

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Pertumbuhan Industri			3	3	100

Sumber: Laporan Evaluasi RPJMD 2019-2024, 2023

2.4.2.8 Pariwisata

Destinasi pariwisata buatan yang terdapat di dokumen Masterplan Geopark Bayah Dome. Tempat- tempat tersebut meliputi 1) Wisata Buatan Kawasan Rangkasbitung, dan 2) Wisata Buatan Maja. Berdasarkan potensi wisata yang telah teridentifikasi pada arah pembangunan Kabupaten Lebak, daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, budaya, religi dan buatan.

Tabel 2.59 Destinasi Wisata di Kabupaten Lebak Tahun 2023

Jenis DTW		Jumlah	
Wisata Alam			**167**
	Wisata Alam Curug	73	
	Wisata Alam Pantai	40	
	Wisata Alam Goa	32	
	Wisata Alam Air Panas	7	
	Wisata Panorama Alam	15	
Wisata Budaya			**25**
Wisata Religi			**17**
Wisata Buatan			**37**
Total			**246**

Sumber : Rencana Induk Geopark Bayah Dome, 2023

Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lebak pada tahun 2022 mencapai total 908.892 orang. Rinciannya terdiri dari 908.341 wisatawan domestik dan 551 wisatawan internasional. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya pasca pandemi COVID-19, angka ini menunjukkan tren positif yang mendukung pemulihan ekonomi. Rata-rata pengeluaran wisatawan tercatat sebesar Rp 220.000 per kunjungan dengan durasi tinggal rata-rata 1,64 hari. Melihat data ini, seharusnya strategi pemasaran destinasi wisata di Kabupaten Lebak difokuskan pada wisatawan domestik. Namun, terdapat peluang untuk menarik wisatawan internasional dengan strategi khusus. Untuk mendorong pertumbuhan positif dalam sektor pariwisata pasca pandemi, disarankan untuk mengembangkan paket-paket wisata yang dapat meningkatkan pengeluaran rata-rata dan durasi tinggal wisatawan, serta mematuhi prinsip pariwisata berkelanjutan yang sesuai dengan tren wisata saat ini.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

BAB 3
GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya harus didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai, tetapi juga harus didukung oleh tata kelola keuangan daerah yang baik, politik anggaran yang relevan dengan permasalahan daerah, aparatur pengelola keuangan daerah yang profesional dan berintegritas, serta sistem pengawasan yang efektif. Kelima elemen ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi, karena tanpa salah satu dari elemen tersebut, penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak hanya akan berjalan biasa saja, tetapi juga berpotensi terdistorsi dari tujuannya. Oleh karena itu, hakikat otonomi daerah adalah memberikan ruang dan kesempatan yang luas kepada daerah untuk mengelola seluruh potensi dan sumber daya yang dimilikinya, agar dapat dioptimalkan sebagai sumber pendanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Kapasitas, kreativitas, dan inovasi pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah menjadi kata kunci yang menentukan ketercapaian esensi dan filosofi otonomi daerah ini, yang dalam konteks keuangan daerah direpresentasikan oleh tingkat kemandirian daerah. Dengan tata kelola keuangan yang baik, serta didukung oleh aparatur yang profesional dan berintegritas serta pengawasan yang efektif, deviasi dapat dicegah sejak dini sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat dioptimalkan. Tercapainya opini wajar tanpa pengecualian, tingginya hasil, dampak, dan manfaat dari dana yang dianggarkan, serta maksimalnya eliminasi korupsi, merupakan indikator praktis yang berkorelasi dengan tata kelola keuangan daerah yang baik.

Di sisi lain, politik anggaran yang relevan dengan permasalahan daerah berkontribusi besar terhadap terciptanya iklim kondusif, tidak hanya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, tetapi juga dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel, pemenuhan kebutuhan anggaran yang memadai, serta efektivitas kebijakan anggaran. Politik anggaran bahkan menjadi faktor kunci yang mempengaruhi kualitas dan relevansi kebijakan pendapatan daerah, serta keseluruhan proses tata kelola keuangan daerah mulai dari perencanaan hingga efektivitas implementasi dan evaluasinya.

Bab ini akan mengelaborasi sejumlah aspek pengelolaan keuangan daerah, dengan tujuan memberikan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, yang mencakup kebijakan pendapatan daerah, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah; pendapatan transfer; serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selain itu, evaluasi terhadap kinerja pendapatan daerah pada beberapa tahun terakhir akan dilakukan untuk mengukur efektivitas capaian, derajat desentralisasi fiskal, pertumbuhan PAD, kontribusi PAD, dan elastisitas PAD. Bab ini juga akan memuat penjelasan mengenai arah kebijakan belanja daerah, baik yang terkait dengan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, maupun belanja transfer. Pada bagian akhir, akan dipaparkan arah kebijakan pembiayaan daerah, yaitu kebijakan yang akan diambil untuk menutup potensi defisit anggaran atau memanfaatkan peluang surplus anggaran yang mungkin terjadi pada tahun anggaran yang direncanakan.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

3.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah beberapa kali terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pendapatan daerah mencakup semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan daerah ini memainkan peran krusial sebagai agenda penting dan alternatif utama bagi pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kapasitas fiskal. Dengan pendapatan yang memadai, pemerintah daerah dapat mendukung berbagai program dan kegiatan pembangunan, yang bertujuan memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan demi kepentingan pelayanan publik, tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjelaskan bahwa sumber pendapatan daerah kabupaten terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen utama PAD, yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan dari warganya sendiri. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan biasanya berasal dari BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) dan investasi daerah lainnya, yang dikelola secara profesional untuk memberikan kontribusi maksimal terhadap PAD. Pendapatan Transfer mencakup dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ke daerah, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, dan berbagai transfer lainnya. Dana ini merupakan instrumen penting dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang mungkin memiliki keterbatasan dalam menggali PAD. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi berbagai sumber pendapatan lain yang diakui secara hukum dan sah, yang tidak termasuk dalam kategori PAD atau Pendapatan Transfer. Sumber pendapatan ini bisa berasal dari hibah, sumbangan pihak ketiga, dan sumber pendapatan lain yang diatur oleh undang-undang.

Secara keseluruhan, pemanfaatan optimal dari berbagai sumber pendapatan daerah ini diharapkan dapat mendukung tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan merata. Dengan demikian, tata kelola keuangan daerah yang baik menjadi kunci utama dalam mencapai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.

3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting sebagai berikut:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
    - Kebijakan penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak dan retribusi daerah serta mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun sebelumnya, implementasi regulasi pajak dan retribusi daerah, serta perkiraan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

asumsi makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan rasio pertumbuhan pajak dan retribusi daerah pada tahun sebelumnya yang dapat mempengaruhi pendapatan pajak dan retribusi daerah. Selain itu, target PAD sedapat mungkin tidak menambah beban ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.

- Untuk mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Kabupaten Lebak melakukan optimalisasi kegiatan penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak atau retribusi daerah terutang, hingga pengumpulan atau penagihan pajak atau retribusi daerah kepada wajib pajak dan wajib retribusi, serta pengawasan penyetorannya dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.
- Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan izin tersebut, serta kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal sesuai dengan peraturan daerah.
- Pendapatan retribusi daerah dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan diterima oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau unit kerja pada OPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, dan rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- Pemanfaatan penerimaan masing-masing jenis retribusi daerah diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Kebijakan penganggaran dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
   - Kebijakan ini harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
   - Keuntungan dalam jangka waktu tertentu berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah.
   - Peningkatan jasa dan keuntungan bagi hasil investasi dalam jangka waktu tertentu.
   - Peningkatan penerimaan daerah sebagai akibat langsung dari investasi tersebut dalam jangka waktu tertentu.
   - Peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi tersebut.
   - Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah, sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

3. Kebijakan penganggaran dari Lain-lain PAD yang Sah
   - Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

- Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan.
- Hasil kerja sama daerah.
- Jasa giro.
- Hasil pengelolaan dana bergulir.
- Pendapatan bunga.
- Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah.
- Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa, termasuk penerimaan lain dari penyimpanan uang di bank, penerimaan dari pemanfaatan barang daerah atau kegiatan lainnya.
- Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
- Pendapatan denda pajak daerah.
- Pendapatan denda retribusi daerah.
- Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
- Pendapatan dari pengembalian.
- Pendapatan dari BLUD.
- Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan PAD, Pemerintah Kabupaten Lebak mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP), dan Kerjasama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

3.1.2 Pendapatan Transfer

Kebijakan penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat
    a. Dana Perimbangan, yang terdiri dari:
        - Dana Transfer Umum
            - Kebijakan pendapatan transfer dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak termasuk DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, serta DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang mencakup DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21. Pendapatan ini dianggarkan paling tinggi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak tahun berkenaan, dengan memperhatikan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH tiga tahun terakhir berdasarkan realisasi pendapatan DBH-Pajak tiga tahun terakhir.
            - Pendapatan Dana Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang mencakup DBH-Kehutanan, DBH Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH Pengusahaan Panas Bumi, dan DBH-Perikanan. Pendapatan ini dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun berkenaan atau Peraturan Menteri

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA tahun berkenaan dengan memperhatikan realisasi penerimaan negara yang dinamis, termasuk dengan mempertimbangkan penerimaan DBH tiga tahun terakhir berdasarkan realisasi pendapatan DBH Pajak tiga tahun terakhir. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA pada tahun berkenaan, seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan tahun sebelumnya, akan dituangkan dalam peraturan daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bila tidak melakukan Perubahan APBD.

- Pendapatan dari Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun berkenaan. Dalam hal Peraturan Presiden belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU tahun sebelumnya.

- Dana Transfer Khusus.
  Dana ini dialokasikan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mencakup DAK Fisik dan DAK Non Fisik. Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN tahun berkenaan atau informasi resmi mengenai alokasi DAK yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Jika Raperda APBD disetujui DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi DAK dipublikasikan, DAK tidak akan dianggarkan dalam Raperda APBD, namun langsung dituangkan dalam Perda tentang APBD setelah proses evaluasi provinsi atau dengan melakukan perubahan Perbup Penjabaran APBD bila Perda APBD telah diundangkan.

b. Dana Insentif Daerah.
   Dana ini dialokasikan berdasarkan kriteria tertentu untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun berkenaan atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Jika peraturan terkait belum dipublikasikan, penganggaran DID didasarkan pada alokasi tahun sebelumnya. Penggunaan pendapatan dari Dana Insentif Daerah harus berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

c. Dana Desa.
   Dana ini dialokasikan untuk desa dan ditransfer langsung ke rekening kas desa untuk membiayai pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana Desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Jika Peraturan Presiden atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa didasarkan pada alokasi tahun sebelumnya.

DRAFT TIDAK UNTUK DICOPY

2. Transfer Antar Daerah
   a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak
      - Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Banten didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Provinsi Banten tahun berkenaan. Jika penetapan APBD Kabupaten mendahului penetapan APBD Provinsi Banten, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah tahun sebelumnya dengan memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya.
      - Kebijakan pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dari Pajak Kendaraan Bermotor minimal 10% dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
      - Kebijakan pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dari Pajak Rokok minimal 50% dialokasikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum.
      - Untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok digunakan untuk pendanaan program JKN.
   b. Pendapatan Bantuan Keuangan
      Pendapatan ini merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan kemampuan keuangan, atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun khusus dan dianggarkan dalam APBD setelah tercantum dalam APBD provinsi atau pemerintah kabupaten/kota pemberi bantuan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah
   Pendapatan hibah adalah bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat. Bantuan ini diberikan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga atau sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi, serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
2. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
   Pendapatan hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota harus mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

3.1.4 Evaluasi terhadap Kinerja Pendapatan Asli Daerah

Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat bergantung pada kemampuan manajerial pemerintah daerah, yang didukung oleh kapasitas sumber daya aparatur, sistem kelembagaan, serta kemampuan keuangan daerah. Dalam konteks negara kita, kemandirian daerah yang diamanatkan oleh otonomi daerah sering kali diidentikkan dengan kemampuan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pembangunan. Mengingat pentingnya peran keuangan daerah dalam era otonomi daerah, pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan yang mendasarinya menjadi faktor strategis dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan. Untuk mendapatkan gambaran menyeluruh mengenai pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan kajian terhadap kinerja keuangan daerah dari masa lalu hingga saat ini, termasuk kebijakan-kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang mendasarinya. Evaluasi terhadap kebijakan dan kinerja ini akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang akan mendasari penetapan kerangka pendanaan pembangunan daerah.

<deskripsi data>

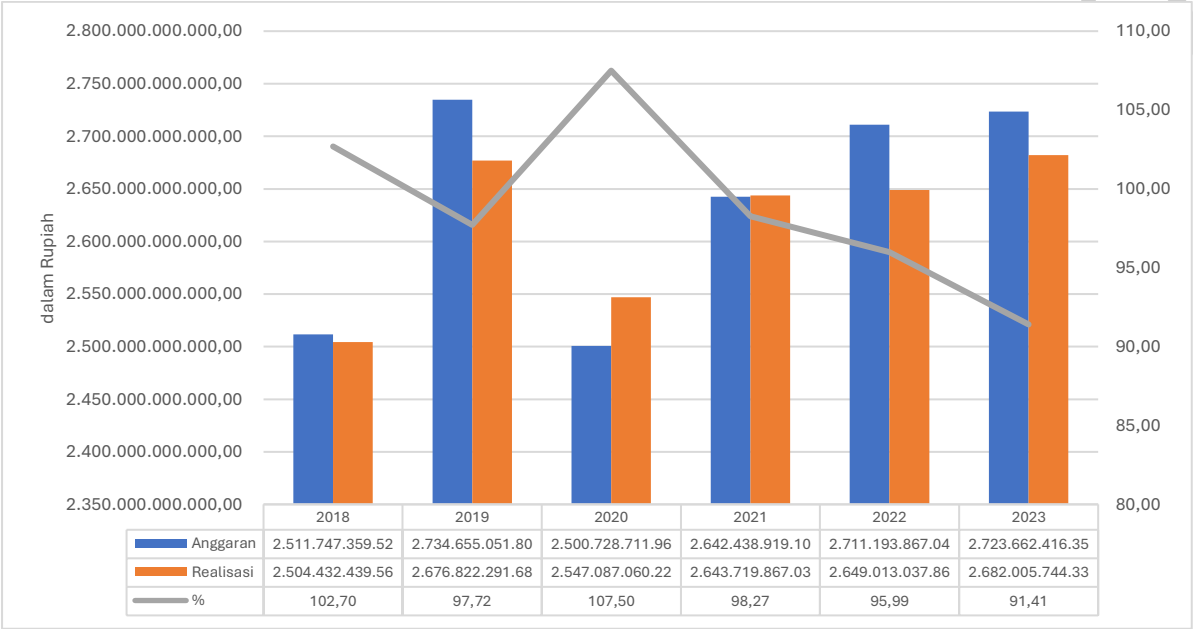

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anggaran	2.511.747.359.52	2.734.655.051.80	2.500.728.711.96	2.642.438.919.10	2.711.193.867.04	2.723.662.416.35
Realisasi	2.504.432.439.56	2.676.822.291.68	2.547.087.060.22	2.643.719.867.03	2.649.013.037.86	2.682.005.744.33
%	102,70	97,72	107,50	98,27	95,99	91,41

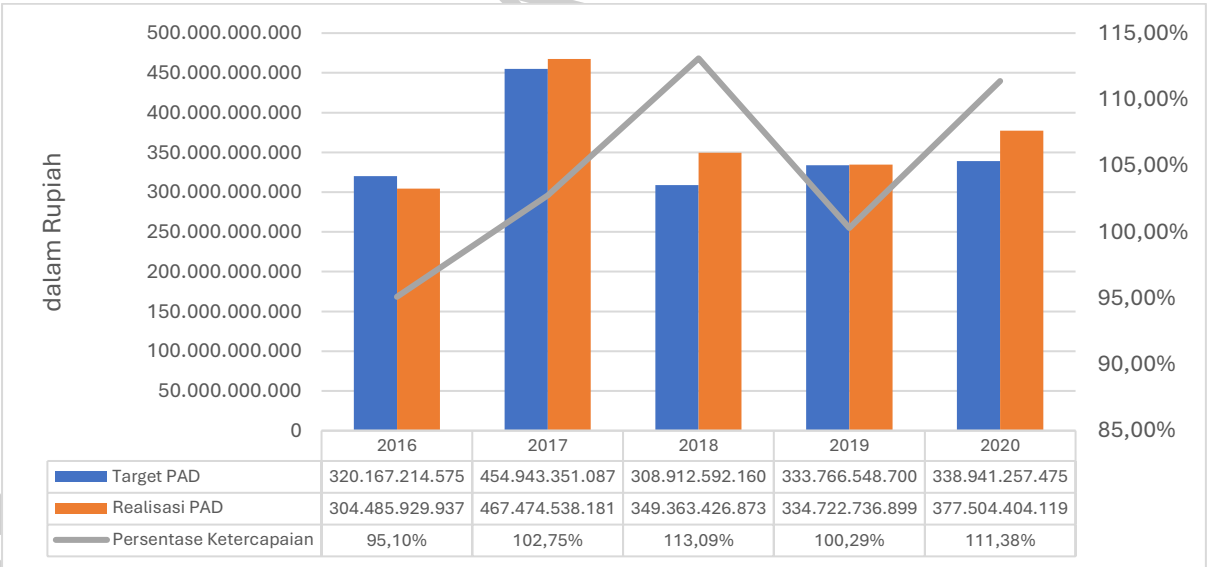

	2016	2017	2018	2019	2020
Target PAD	320.167.214.575	454.943.351.087	308.912.592.160	333.766.548.700	338.941.257.475
Realisasi PAD	304.485.929.937	467.474.538.181	349.363.426.873	334.722.736.899	377.504.404.119
Persentase Ketercapaian	95,10%	102,75%	113,09%	100,29%	111,38%

Gambar 3-1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kab. Lebak Tahun 2016-2020

Sumber : Pengolahan Data LRA 2018-2023, 2024

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 1 Tahun 2022, diolah kembali, 2024

Selain mengevaluasi kinerja pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), penilaian juga dilakukan untuk memahami derajat desentralisasi fiskal, yakni kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan daerah. Hal ini diukur dari rasio PAD

DRAFT COPY

terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD, semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Sebaliknya, semakin rendah kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, semakin rendah pula kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Lebak pada periode 2016-2020 masih terkategori rendah. Kategori ini diproyeksikan akan tetap bertahan hingga tahun 2024, mengingat rasio PAD terhadap total pendapatan daerah masih kurang dari 20%, meskipun trennya diperkirakan terus meningkat. Ini menunjukkan bahwa meski ada perbaikan, kemampuan fiskal daerah dalam mendukung otonomi masih membutuhkan penguatan lebih lanjut.

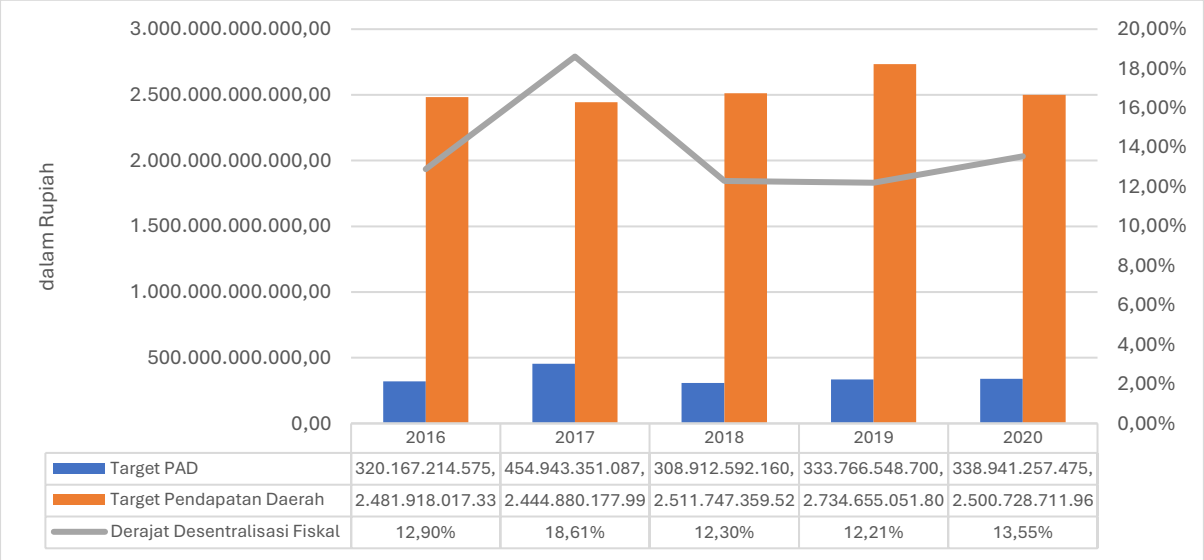

	2016	2017	2018	2019	2020
Target PAD	320.167.214.575,	454.943.351.087,	308.912.592.160,	333.766.548.700,	338.941.257.475,
Target Pendapatan Daerah	2.481.918.017.33	2.444.880.177.99	2.511.747.359.52	2.734.655.051.80	2.500.728.711.96
Derajat Desentralisasi Fiskal	12,90%	18,61%	12,30%	12,21%	13,55%

Gambar 3-2 Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Lebak Tahun 2016 – 2020

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Lebak No. 1 Tahun 2022, diolah kembali, 2024

DRAFT - TIDAK UNTUK DIKOPY

Tabel 3-1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 - 2023

No	Jenis Penerimaan	Realisasi (dalam Rupiah)						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH							
1.1.	Hasil Pajak Daerah	73,390,964,885.00	86,974,239,495.00	100,736,135,403.00	119,245,503,318.00	156,917,968,633.00	169,689,458,362.00	169,434,953,282.00
1.2.	Hasil Retribusi Daerah	12,944,962,598.00	17,553,632,004.00	23,419,824,394.00	15,470,158,630.00	15,138,012,060.00	15,504,908,239.00	16,650,117,972.00
1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,195,024,706.00	3,699,552,637.00	4,629,530,836.00	5,231,517,851.00	5,282,756,992.00	6,023,001,558.00	6,383,013,937.00
1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	377,943,585,992.28	241,136,002,737.84	205,937,246,266.84	237,557,224,320.00	207,805,281,535.00	230,331,187,210.00	241,824,649,542.00
2.	PENDAPATAN TRANSFER							
2.1.	TRANSFER PEM. PUSAT - DANA PERIMBANGAN				1,815,924,958,156.00	1,844,377,914,056.00		
2.1.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	68,110,668,969.00	62,448,874,317.00	52,111,132,579.00	141,626,548,903.00	208,165,400,687.00	68,342,267,365.00	84,452,937,252.00
2.1.2.	Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	3,803,297,891.00	2,186,779,805.00	1,655,066,579.00	1,957,551,507,059.00	2,052,543,314,743.00	1,012,653,287,000.00	1,068,836,537,620.00
2.1.3.	Pendapatan Dana Alokasi Umum	1,081,007,407,000.00	1,086,661,291,000.00	1,127,187,626,000.00			138,553,034,962.00	50,208,365,734.00
2.1.4.	Pendapatan Dana Alokasi Khusus	289,569,030,349.00	387,752,105,644.00	492,778,444,868.00	25,850,328,544.00	41,771,463,068.00	406,535,463,481.00	468,093,219,172.00
2.2.	TRANSFER DARI PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				212,031,149,044.00	206,032,533,068.00		
2.2.1.	Dana Otonomi Khusus	0.00	0.00	295,691,704,000.00	2,547,087,060,222.00	2,643,719,867,031.00		
2.2.2.	Dana Penyesuaian	282,021,585,700.00	265,128,424,400.00	295,691,704,000.00			8,666,591,000.00	0.00
3.	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI			132,483,222,235.00	989,336,121,659.00	992,375,160,333.00	324,844,445,000.00	354,640,034,000.00
3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	106,888,588,434.00	105,826,195,842.00	132,483,222,235.00	677,038,051,905.00	806,590,537,922.00		
4.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH			185,185,857,300.00	1,713,250,168,627.50	1,915,912,290,235.00	18,615,743,000.00	30,000,000,000.00
4.1.	Pendapatan Hibah	12,226,000,000.00	165,547,428,929.00	55,000,000,000.00			207,765,089,473.00	203,323,859,404.00
4.2.	Pendapatan Dana Darurat	0.00	0.00	6,501,228.00	312,406,000.00	6,027,811,248.00	2,158,693,587,281.00	2,229,554,953,182.00
4.3.	Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah daerah Lainnya	110,000,000,000.00	78,300,000,000.00	240,192,358,528.00	96,880,982,878.80	55,248,493,450.00		
4.4.	Pendapatan Lainnya	85,000.00	1,217,912,757.00	2,676,822,291,688.84	26,955,577,998.00	27,007,051,046.00	68,770,895,217.00	18,147,038,422.00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	467,474,538,181.28	349,363,426,873.84	334,722,736,899.84	377,504,404,119.00	385,144,019,220.00	421,548,555,369.00	434,292,734,733.00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	1,831,400,578,343.00	1,910,003,671,008.00		5,429,922,053.50	2,769,790,960.00	189,149,346,473.00	173,323,859,404.00
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	122,226,085,000.00	245,065,341,686.00		101,954,018,113.00	187,474,208,785.00	0.00	11,018,000.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN TRANSFER	2,421,101,201,524.28	2,504,432,439,567.84		1,838,384,220.00	6,097,188,218.00	68,770,895,217.00	18,158,056,422.00

No	Uraian	2018			2019		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	PENDAPATAN DAERAH	308,912,592,160.00	349,363,426,873.84	113.09	333,766,548,700.00	334,722,736,899.84	100.29
2	PENDAPATAN TRANSFER	1,950,353,064,366.00	1,910,003,671,008.00	97.93	2,148,147,783,100.00	2,101,907,196,261.00	97.85
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	252,481,703,000.00	245,065,341,686.00	97.06	252,740,720,000.00	240,192,358,528.00	95.04
	Jumlah	2,511,747,359,526.00	2,504,432,439,567.84		2,734,655,051,800.00	2,676,822,291,688.84	

No	Uraian	2020			2021		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	PENDAPATAN DAERAH	338,941,257,475.00	377,504,404,119.00	111.38	359,883,118,451.00	385,144,019,220.00	107.02
2	PENDAPATAN TRANSFER	1,915,075,608,490.00	1,892,551,507,059.00	98.82	2,047,163,238,448.00	2,052,543,314,743.00	100.26
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	246,711,846,000.00	277,031,149,044.00	112.29	235,392,562,208.00	206,032,533,068.00	87.53
	Jumlah	2,500,728,711,965.00	2,547,087,060,222.00		2,642,438,919,107.00	2,643,719,867,031.00	

DRAFT - NOT FOR PHOTOCOPY

No	Uraian	2022			2023		
		Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
1	PENDAPATAN DAERAH	378,978,056,833.00	421,548,555,369.00	111.23	449,781,144,676.00	434,292,734,733.00	96.56
2	PENDAPATAN TRANSFER	2,246,955,735,110.00	2,158,693,587,281.00	96.07	2,250,780,515,680.00	2,229,554,953,182.00	99.06
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	85,260,075,100.00	68,770,895,217.00	80.66	23,100,756,000.00	18,158,056,422.00	78.60
	Jumlah	2,711,193,867,043.00	2,649,013,037,867.00		2,723,662,416,356.00	2,682,005,744,337.00	

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

3.2 Arahan Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah diprioritaskan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional.

Belanja daerah difokuskan pada kegiatan produktif yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah, dengan memperhatikan target pembangunan daerah yang bersinergi dengan prioritas nasional dan Provinsi Banten. Belanja diarahkan untuk mendanai urusan pemerintahan sesuai kemampuan keuangan daerah dan penerapan tatanan normal baru akibat COVID-19, mencakup aspek pemerintahan, kesehatan, sosial, dan ekonomi. Selain itu, belanja daerah digunakan untuk mendanai unsur pendukung, penunjang, pengawas, kewilayahan, pemerintahan umum, dan kekhususan.

Pemerintah Kabupaten Lebak mendorong pengalokasian belanja sesuai prioritas berikut:

1) Kebutuhan anggaran operasional Perangkat Daerah yang wajib dan mengikat, seperti gaji, tunjangan, listrik, air, telepon, dan internet.
2) Anggaran untuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sesuai SPM.
3) *Mandatory spending* yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
4) Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional, bidang, dan daerah, termasuk penanganan COVID-19.
5) Belanja *earmarked* dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, Dana Insentif Daerah, Dana BOS, Bantuan Keuangan Provinsi, maupun hibah pemerintah pusat.

3.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari- hari yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

   Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan ASN yang dianggarkan pada belanja perangkat daerah bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun arah kebijakan perencanaan belanjanya meliputi:

   a) Gaji Pokok dan Tunjangan ASN: Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk CPNS dan P3K, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan gaji pokok dan tunjangan juga memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
   b) Kenaikan Gaji Berkala dan Tunjangan Lainnya: Penganggaran belanja pegawai juga mencakup kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

pegawai. Besaran kenaikan gaji berkala dan tunjangan lainnya tidak boleh melebihi 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

c) Jaminan Kesehatan: Penganggaran untuk penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan, anggota DPRD, serta ASN/PNS daerah mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

d) Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian: Penganggaran untuk penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015.

e) Tambahan Penghasilan: Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan persetujuan DPRD. Besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan ditetapkan dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.

f) Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah: Pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah bagi pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan pajak dan retribusi diperhitungkan sebagai unsur tambahan penghasilan.

g) Honorarium: Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan.

2. Belanja Barang dan Jasa:

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Ini mencakup barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat, pihak ketiga, atau pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai sasaran prioritas daerah.

a) Belanja Barang Pakai Habis: Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Standar kebutuhan ditetapkan oleh Kepala Daerah, dengan memperhitungkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta estimasi sisa persediaan barang tahun sebelumnya.

b) Belanja Jasa/Honorarium/Kompensasi: Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan, dan sub kegiatan. Besaran penganggaran disesuaikan dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan untuk mencapai target kinerja yang dimaksud.

c) Jasa Narasumber/Tenaga Ahli: Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dianggarkan dalam kegiatan dengan besarannya ditetapkan melalui Keputusan Bupati, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Jaminan Kesehatan: Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa, Perangkat desa, serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD. Pedoman mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

e) Integrasi Jaminan Kesehatan: Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Kabupaten Lebak mengintegrasikan Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Tujuannya adalah terselenggaranya jaminan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN.

f) Pengembangan Pelayanan Kesehatan: Penganggaran untuk pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan. Ini termasuk medical check-up bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan, dan Anggota DPRD. Penganggaran dilakukan dalam bentuk program dan kegiatan/sub kegiatan pada Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi, atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
g) Penyediaan Anggaran Pendidikan dan Pelatihan: Penyediaan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan dengan memprioritaskan pelaksanaannya dalam wilayah Provinsi Banten atau secara virtual berbasis teknologi informasi. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan harus selektif, efisien, dan efektif dalam penggunaan anggaran daerah. Aspek yang diperhatikan meliputi urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi, dan manfaat yang akan diperoleh. Protokol pencegahan penularan COVID-19 dan penerapan tatanan normal baru juga tetap diterapkan.
h) Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah: Penganggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah daerah, seperti Diklatpim, diklat teknis dan fungsional, serta uji kompetensi, dianggarkan pada perangkat daerah yang secara fungsional menangani pengembangan sumber daya manusia. Besaran anggaran minimal adalah 0,16% dari total belanja daerah.
i) Penganggaran Pemeliharaan Barang Milik Daerah: Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang, atau kuasa pengguna barang mengacu pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang. Hal ini sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
j) Biaya Sertifikasi atas Barang Milik Daerah (Tanah): Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
k) Pengadaan Belanja Barang/Jasa untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga: Penganggaran untuk pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan/sub kegiatan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat. Seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa juga diperhitungkan.
l) Anggaran untuk Hadiah dan Dampak Sosial Kemasyarakatan: Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional, serta TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

m) Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas: Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, harus dilakukan secara selektif. Frekuensi, jumlah hari, dan jumlah orang harus dibatasi, serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas agar relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri, berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

n) Pertanggungjawaban Anggaran Perjalanan Dinas: Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum. Biaya sewa kendaraan dalam kota (hanya untuk bupati/wakil bupati), biaya transportasi, biaya penginapan, dan biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test) harus dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.

3. Belanja Hibah

Belanja hibah dapat diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia. Hibah bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak diberikan secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Penganggaran belanja hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya adalah pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.

4. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. Bantuan bersifat tidak secara terus menerus dan selektif, bertujuan melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Namun, dalam keadaan tertentu, bantuan dapat berkelanjutan, yaitu diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial. Penganggaran belanja bantuan sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali bila ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang terkait dengan pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan perencanaan belanja modal diarahkan sebagai berikut:

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

1. Alokasi belanja modal diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap yang memenuhi kriteria memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal mencakup harga beli atau biaya pembangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.
3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) yang memperpanjang masa manfaat atau memberikan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dianggarkan dalam belanja modal. Ini termasuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau kinerja. Penyusunan anggaran belanja modal mengacu pada Lampiran I PSAP Nomor 7 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah. Prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, terbuka, persaingan, keadilan, dan akuntabilitas harus diutamakan, dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah mengacu pada standar barang, standar kebutuhan, dan/atau standar harga. Penetapan standar kebutuhan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sesuai dengan Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengadaan barang milik daerah juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.
5. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mengikuti Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari APBD juga menjadi acuan.
6. Alokasi Anggaran untuk Pembangunan/Pemeliharaan Jalan dan Transportasi dengan alokasi anggaran minimal 10% dari pendapatan daerah yang diterima dari Bagi Hasil Pajak

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Kendaraan Bermotor harus dialokasikan untuk pembangunan/pemeliharaan jalan, peningkatan moda transportasi, atau peningkatan sarana transportasi umum.

3.2.3 Belanja Tak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran yang terjadi dalam situasi darurat tertentu, termasuk keperluan mendesak dan pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah dari tahun-tahun sebelumnya. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.

Keadaan darurat yang termasuk meliputi:

a) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa.
b) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
c) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Sedangkan keperluan mendesak meliputi:

d) Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
e) Belanja daerah yang bersifat mengikat dan wajib.
f) Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan.
g) Pengeluaran daerah lainnya yang, jika ditunda, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

3.2.4 Belanja Transfer

Belanja Transfer atau Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, dan/atau memberikan manfaat dari pemberian bantuan keuangan tersebut, sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing daerah. Termasuk dalam Belanja Bantuan Keuangan adalah Belanja Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan kepada pemerintahan desa sebesar 10% dari Dana Perimbangan dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Belanja tersebut ditujukan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Lebak menganggarkan belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% dari pajak daerah dan retribusi daerah, yang disesuaikan dengan indikator terukur serta tetap memperhatikan efektivitas dan kemampuan keuangan daerah. Berdasarkan kebijakan tersebut, proporsi belanja daerah Kabupaten Lebak disajikan pada tabel di bawah ini.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tabel 3-2 **Proporsi Belanja Daerah Kab. Lebak**

No		Total Belanja (dalam Rupiah)						
	Jenis Belanja	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	BELANJA DAERAH			1,042,451,713,368.00	318,143,000.00	0.00	2,649,013,037,867.00	2,682,005,744,337.00
2	BELANJA OPERASI			753,992,220,747.26	228,259,512,209.80	281,854,752,747.00		
a	Belanja Pegawai	976,039,935,747.00	994,598,332,301.00	52,145,974,750.00				
b	Belanja Barang dan Jasa	651,217,727,054.69	668,970,607,259.20	7,404,435,114.00	145,966,332,799.00	24,421,516,341.00	983,500,359,419.00	1,051,185,379,520.00
c	Belanja Bunga	0.00	0.00	1,855,994,343,979.26	145,966,332,799.00	24,421,516,341.00	742,150,882,390.00	776,555,222,501.00
d	Belanja Subsidi	0.00	0.00		2,087,476,013,636.30	2,222,188,559,323.00	111,416,054,584.00	173,631,578,994.00
e	Belanja Hibah	54,833,583,000.00	90,001,716,744.00	3,128,399,000.00			6,693,900,000.00	7,878,985,000.00
f	Belanja Bantuan Sosial	12,090,835,000.00	7,733,417,500.00	73,254,267,346.00	13,846,174,700.00	15,998,934,500.00	1,843,761,196,393.00	2,009,251,166,015.00
g	JUMLAH BELANJA OPERASI	1,694,182,080,801.69	1,761,304,073,804.20	96,663,922,931.00	395,680,771,200.00	405,279,350,618.00		
3	BELANJA MODAL			171,107,470,637.00	409,526,945,900.00	421,278,285,118.00	353,232,800.00	680,667,000.00
a	Tanah	3,726,685,700.00	1,452,201,000.00	5,332,518,250.00	2,497,002,959,536.30	2,643,466,844,441.00	75,937,521,561.00	52,953,751,979.00
b	Peralatan dan mesin	42,274,620,257.00	34,377,059,562.00	34,649,397,201.00	50,084,100,685.70	253,022,590.00	51,445,537,672.00	120,796,480,879.00
c	Gedung dan Bangunan	59,940,216,187.00	63,869,710,769.63	471,207,000.00			184,041,300,510.00	111,582,764,128.00
d	Jalan, irigasi dan jaringan	219,857,565,895.00	174,253,539,258.00	384,607,182,365.00	266,359,743,437.35	296,833,959,123.05	4,089,696,627.00	6,164,013,297.00
e	Aset Tetap lainnya	7,518,063,689.00	5,399,690,300.00		266,359,743,437.35	296,833,959,123.05	315,867,289,170.00	292,177,677,283.00
f	Belanja Modal Dana Bos	40,686,890,844.00	34,422,436,792.00	2,701,286,859.00	0.00	38,563,146,644.00		
g	Belanja Aset Lainnya	-		2,701,286,859.00	0.00	13,098,105,735.00	22,726,824,433.00	35,437,025,460.00
h	JUMLAH BELANJA MODAL	374,004,042,572.00	313,774,637,681.63	2,243,302,813,203.26	0.00	20,870,266,457.00	22,726,824,433.00	35,437,025,460.00
4	BELANJA TIDAK TERDUGA				0.00	220,328,220,162.05	2,182,355,309,996.00	2,336,865,868,758.00
a	Belanja Tidak Terduga	5,509,300,807.00	7,562,974,883.00	9,771,110,062.00	0.00	3,974,220,125.00		
	JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA	5,509,300,807.00	7,562,974,883.00	9,771,110,062.00	266,359,743,437.35	296,833,959,123.05	20,740,040,231.00	21,546,199,390.00
	JUMLAH BELANJA	2,073,695,424,180.69	2,082,641,686,368.83	405,212,211,728.00			432,046,221,942.00	469,433,234,900.00

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

3.3 Analisis Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran yang akan datang. Pembiayaan juga merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Apabila APBD diperkirakan defisit, penggunaannya dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya, transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan apabila APBD diperkirakan surplus, penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi daerah), atau pembentukan dana cadangan.

Kebijakan umum pembiayaan daerah ditujukan untuk keberlangsungan roda pemerintahan daerah tanpa mengganggu likuiditas keuangan pemerintah daerah. Hal ini merupakan upaya preventif untuk menyikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan pelayanan masyarakat cenderung semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi, dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

a) Penerimaan pembiayaan diarahkan pada perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang lebih cermat sehingga tidak terjadi perbedaan besar dengan hasil audit BPK-RI.
b) Pengeluaran pembiayaan diprioritaskan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Kabupaten Lebak kepada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti PDAM Tirta Multatuli untuk meningkatkan cakupan air bersih, serta PD. BPR Lebak Sejahtera dan PT. LKM Rangkasbitung. Penyertaan modal juga dapat diberikan kepada BUMN, BUMD lainnya, atau badan usaha swasta lainnya seperti Bank BJB, sepanjang menguntungkan daerah dan masyarakat serta tidak mengikat dan membebani keuangan daerah.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

BAB 4
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Pemetaan Permasalahan Pembangunan

Pada bagian ini akan dijelaskan masalah-masalah yang dihadapi oleh Kab. Lebak. Masalah tersebut dibagi berdasarkan 4 klaster yaitu sosial budaya, infrastruktur dan lingkungan, pemerintahan, serta ekonomi.

4.1.1 Klaster – Sosial Budaya

Pada klaster sosial budaya, terdapat masalah pokok pada level impact yang menjadi isu stratgis dari klaster ini yaitu:

"Belum optimalnya pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas SDM"

Secara mendetail pokok masalah isu strategis tersebut disebabkan dari beberapa pokok masalah:

1. Rendahnya indeks pendidikan
2. Rendahnya indeks kesehatan
3. Belum optimalnya strategi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana
4. Belum optimalnya peran serta prestasi pemuda di bidang olahraga dan pengembangan ekonomi
5. Belum optimalnya program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan
6. Belum optimalnya penguatan komunitas adat

Masing-masing masalah pokok pada tingkatan outcome tersebut disebabkan oleh rangkaian masalah dan akar masalah. Berikut pembahasan masing-masing masalah pokok tersebut:

- **Rendahnya Indeks Pendidikan**

  Masalah pendidikan di Kabupaten Lebak ditengarai oleh dua hal yakni rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS) masih rendah jika dibandingkan pada rata-rata tingkat provinsi. Sebagian akar permasalahan yang telah diidentifikasi yakni sarana prasarana, sumber daya manusia, dan kualitas pendidikan belum merata. Data pendukung dari akar masalah pada bagian pendidikan dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 4-1 Akar Masalah Terkait Indeks Pendidikan

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Rendahnya motivasi diri untuk mengenyam pendidikan	Kurangnya minat belajar siswa	Wawancara Dinas Pendidikan, 2024
	Tingginya angka pernikahan di bawah umur	Wawancara Dinas Pendidikan, 2024
Sulitnya menjangkau sekolah	Akses ke sekolah (jarak tempuh menuju sekolah)	Wawancara Dinas Pendidikan, 2024
	Aksesibilitas menuju pusat-pusat pendidikan masih rendah	KLHS RPJMD Lebak 2019 - 2023
Banyaknya siswa putus sekolah	Terdapat beberapa siswa yang putus sekolah karena kondisi perekonomian keluarga	Notulensi FGD, 2024
	Terdapat beberapa siswa yang putus sekolah karena kondisi perekonomian keluarga	Notulensi FGD, 2024

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Lemahnya kondisi kesejahteraan ekonomi rumah tangga	Ketidakberdayaan finansial keluarga	KLHS RPJMD Lebak 2019 - 2023
	Kemiskinan	Wawancara Dinas Pendidikan, 2024
Kurangnya lapangan pekerjaan bagi lulusan sekolah	Kurangnya lapangan pekerjaan bagi lulusan sekolah	Wawancara Dinas Pendidikan, 2024
Kurangnya dukungan moral dari keluarga untuk mengenyam pendidikan	Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan	Wawancara Dinas Pendidikan, 2024
Rendahnya partisipasi warga berusia 13 - 15 tahun pada jenjang SMP	Capaian angka partisipasi pada jenjang SMP Kab Lebak tahun 2023: APK = 91,95%; APM = 89,77%	Laporan Evaluasi RPJMD, 2023
Rendahnya dukungan sarana dan prasarana	Masih belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan terutama pendidikan luar sekolah yang belum menyasar wilayah yang jauh dari Sarana Pendidikan SMP dan SMA	Kuesioner FGD, 2024 (Kantor Kecamatan Cibeber)
	Kurangnya fasilitas sekolah	Wawancara Dinas Pendidikan, 2024
Belum meratanya kualitas pendidikan	Kualitas pendidikan belum merata	Wawancara Dinas Pendidikan, 2024
	Capaian persentase sekolah SD berakreditasi A Kabupaten Lebak tahun 2023: 96,44%	Laporan Evaluasi RPJMD, 2023
Kurangnya SDM bidang pendidikan (guru bersetifikat pendidik)	Capaian guru bersetifikat pendidik Kab Lebak 2023: 81,40%	Laporan Evaluasi RPJMD, 2023
	Keterbatasan jumlah tenaga pendidik yang bersertifikat	KLHS RPJMD Lebak 2019 - 2023
Rendahnya tingkat partisipasi pada jenjang pendidikan usia dini	Capaian tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD Kab Lebak tahun 2023: 87,73%	Laporan Evaluasi RPJMD, 2023
	Capaian angka melek huruf Kab Lebak 2023: 98,33%	Laporan Evaluasi RPJMD 2023
Rendahnya budaya literasi	Masih rendahnya budaya literasi	KLHS RPJMD Lebak 2019 - 2023

- **Rendahnya Indeks Kesehatan**

Masalah kesehatan di Kabupaten Lebak ditengarai kualitas pelayanan kesehatan, angka kematian ibu (AKI), desa ODF, pelayanan keluarga sehat serta penanganan penyakit menular dan tidak menular termasuk degeneratif. Sebagian akar permasalahan yang telah diidentifikasi yakni sarana prasarana termasuk aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan, sumber daya manusia yang mempunyai keahlian khusus, dan kualitas pelayanan kesehatan (puskesmas terakreditasi minimal madya rendah) belum merata. Data pendukung dari akar masalah pada bagian kesehatan dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 4-2 Akar Masalah terkait Indeks Kesehatan

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan	Keterbatasan tenaga kesehatan untuk daerah terpencil (tertinggal)	KLHS RPJMD Lebak 2019 - 2023
	Konsentrasi tenaga kesehatan di wilayah perkotaan	Wawancara Dinas Kesehatan, 2024
	Kekurangan tenaga kesehatan di daerah pedesaan dan terpencil	Wawancara Dinas Kesehatan, 2024
Kurangnya tenaga kesehatan yang berkualitas	Keterbatasan jumlah dokter spesialis dan subspesialis di Kabupaten Lebak	Wawancara Dinas Kesehatan, 2024

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
	Kompetensi tenaga kesehatan di beberapa daerah masih perlu ditingkatkan	Wawancara Dinas Kesehatan, 2024
	Kurang tersedianya tenaga kesehatan yang kompeten	Wawancara Dinas Kesehatan, 2024
	Masih belum terpenuhinya ketersediaan sumber daya kesehatan sesuai standar	Kuesioner FGD, 2024 (Dinas Kesehatan)
	Capaian persentase puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar Kab Lebak tahun 2023: 75%	Laporan Evaluasi RPJMD, 2023
	Keterbatasan infrastruktur puskesmas dan rumah sakit	Wawancara Dinas Kesehatan, 2024
Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang fasilitas kesehatan	Masih terbatasnya sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan	Kuesioner FGD, 2024 (Dinas Kesehatan)
	Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	Kuesioner FGD, 2024 (RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak)
	Rendahnya cakupan sarana dan prasarana (alat kesehatan) dalam kondisi baik	Kuesioner FGD, 2024 (RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak)
	Kekurangan peralatan kesehatan yang modern dan canggih	Wawancara Dinas Kesehatan, 2024
	Rendahnya cakupan sarana dan prasarana (alat kesehatan) dalam kondisi baik	Kuesioner FGD, 2024 (RSUD dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak)
	Sistem rujukan pasien dari puskesmas ke rumah sakit masih belum berjalan dengan baik	Wawancara Dinas Kesehatan, 2024
Sulitnya menjangkau sarana kesehatan	Keterbatasan aksesibilitas untuk daerah terpencil (tertinggal)	KLHS RPJMD Lebak 2019 - 2023
	Masyarakat di daerah pedesaan dan terpencil harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan	Wawancara Dinas Kesehatan, 2024
Terbatasnya ketersediaan obat dan BMHP sesuai Formularium Nasional (Formas)	Capaian persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai Formularium Nasional (Fornas) Kab Lebak tahun 2023: 97,92%	Laporan Evaluasi RPJMD, 2023
Rendahnya persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Capaian persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil Kab Lebak tahun 2023: 89,98%	Laporan Evaluasi RPJMD, 2023
Kurangnya edukasi tentang kesehatan ibu hamil	Tingginya jumlah ibu hamil yang tidak memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan	Wawancara Dinas Kesehatan, 2024
Rendahnya ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Capaian persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan Kab Lebak tahun 2023: 90,50%	Laporan Evaluasi RPJMD, 2023
Kurangnya edukasi tentang kesehatan ibu dan anak	Kurangnya pengetahuan tentang pentingnya persalinan di fasilitas kesehatan	Wawancara Dinas Kesehatan, 2024
Kurangnya tenaga kesehatan dengan keahlian khusus, seperti bidan penolong persalinan	Kurangnya tenaga kesehatan dengan keahlian khusus, seperti bidan penolong persalinan	Wawancara Dinas Kesehatan, 2024
Rendahnya akses fasilitas kesehatan bagi ibu dan anak-anak	Masih banyak masyarakat di Kabupaten Lebak yang tidak memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, terutama bagi ibu hamil dan anak-anak	Wawancara Dinas Kesehatan, 2024
	Jarak tempuh yang jauh ke fasilitas kesehatan	Wawancara Dinas Kesehatan, 2024
	Biaya persalinan yang mahal	Wawancara Dinas Kesehatan, 2024
Tingginya angka pernikahan dini	Angka pernikahan dini di Kabupaten Lebak masih tergolong tinggi. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian ibu dan bayi	Wawancara Dinas Kesehatan, 2024
Banyaknya ibu dan anak yang mengalami kekurangan gizi	Masih banyak ibu dan anak di Kabupaten Lebak yang mengalami kekurangan gizi	Wawancara Dinas Kesehatan, 2024

DRAFT TIDAK UNTUK DICOPY

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Rendahnya jumlah puskesmas yang terakreditasi minimal madya	Capaian persentase puskesmas terakreditasi minimal madya Kab Lebak tahun 2023: 57,41%	Laporan Evaluasi RPJMD, 2023
Rendahnya akses layak dan aman	Masih banyak masyarakat yang belum memiliki akses layak (1,83%) 27.060 KK	SSK Kabupaten Lebak 2023
	Akses aman baru mencapai 0,77%	SSK Kabupaten Lebak 2023
Belum optimalnya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana limbah domestik	Kondisi IPLT yang belum berfungsi secara optimal	SSK Kabupaten Lebak 2023
	Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan infrastruktur air limbah domestik yang telah ada	SSK Kabupaten Lebak 2023
Sulitnya akses menuju desa	Medan yang sulit dijangkau	Wawancara Dinas Kesehatan, 2024
Terbatasnya anggaran untuk pengembangan sanitasi penanganan air limbah	Rendahnya pendanaan sanitasi terkait penanganan air limbah domestik	SSK Kabupaten Lebak 2023
	Keterbatasan anggaran	Wawancara Dinas Kesehatan, 2024
Rendahnya kesadaran masyarakat akan perilaku hidup sehat	Masih ada Masyarakat lebak yang melakukan BABS sebanyak 0.1% (437 KK)	SSK Kabupaten Lebak 2023
	Rendahnya kesadaran Masyarakat terkait perilaku hidup sehat	SSK Kabupaten Lebak 2023
Belum adanya regulasi yang mengatur sistem air limbah domestik permukiman	Belum adanya PERDA/PERBUB terkait retribusi air limbah permukiman	SSK Kabupaten Lebak 2023
	Belum adanya regulasi yang mengatur terkait air limbah domestik	SSK Kabupaten Lebak 2023
Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan keluarga sesuai standar	Cakupan persentase pelayanan kesehatan keluarga sesuai standar Kab Lebak tahun 2023: 89,51%	Laporan Evaluasi RPJMD, 2023
Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan	Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan	Wawancara Dinas Kesehatan, 2024
Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata	Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata	Wawancara Dinas Kesehatan, 2024
Letak geografis yang sulit	Letak geografis yang sulit	Wawancara Dinas Kesehatan, 2024
Rendahnya capaian penemuan penyakit menular tuberkulosis	Realisasi capaian penemuan penderita penyakit tuberkulosis tahun 2023: 92%	Wawancara Dinas Kesehatan, 2024
Ancaman penyakit berbasis lingkungan bagi kesehatan masyarakat	Wabah penyakit seperti demam berdarah dan malaria mencadi ancaman bagi kesehatan masyarakat	Wawancara Dinas Kesehatan, 2024
Masih adanya ancaman penyakit tidak menular	Peningkatan penyakit gula dan penderita ODGJ	FGD, 2024 (14/08/24)

- **Belum Optimalnya Strategi Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Masalah pemberdayaan perempuan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Lebak ditengarai oleh indeks pemberdayaan gender dan strategi pengendalian penduduk serta keluarga berencana. Sebagian akar permasalahan yang telah diidentifikasi yakni sarana prasarana serta sumber daya manusia untuk pelayanan pemberdayaan perempuan, partisipasi perempuan dalam iklim pembangunan wilayah di berbagai bidang, serta program KB dan potensi pertambahan penduduk di Kota Maja. Data pendukung dari akar masalah pada bagian perempuan serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat tabel berikut:

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tabel 4-3 Akar Masalah terkait Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Belum optimalnya sarpras pendukung	Masih rendahnya kesetaraan gender di Lebak dalam hal sarpras (perempuan, anak, lansia)	Kuesioner FGD, 2024 (DP3AP2KB)
	Belum memiliki Gedung UPTD PPA mandiri, Rumah Perlindungan mandiri, SDM yang masih minim secara kuantitas dan kualitas	Kuesioner FGD, 2024 (DP3AP2KB)
Kurangnya SDM pelayananan kasus pemberdayaan perempuan	Kurangnya SDM pelayanan penanganan kasus kekerasan, pelecehan, penelantaran, penipuan dan TPPO di UPTD PPA	Kuesioner FGD, 2024 (DP3AP2KB)
Belum optimalnya penyusunan, perencanaan, dan penganggaran yang responsif gender.	Capaian persentase ARG pada belanja langsung APBD Kab Lebak tahun 2023: 90,67%	Laporan Evaluasi RPJMD, 2023
	Belum optimalnya penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.	Wawancara DP3AP2KB, 2024
	Masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik yang berpihak pada perempuan dan anak	Wawancara DP3AP2KB, 2024
	Masih rendahnya kesetaraan gender di Lebak baik kebijakan, intervensi, terkait gender (perempuan, anak, lansia)	Kuesioner FGD, 2024 (DP3AP2KB)
Belum optimalnya implementasi program pengarusutamaan gender	Masih kurangnya koordinasi antara driver PUG dengan OPD lain	Wawancara DP3AP2KB, 2024
	Kurangnya pelaksanaan kegiatan Rapat Pokja PUG sehingga belum optimalnya penguatan Pokja PUG Kab. Lebak	Wawancara DP3AP2KB, 2024
	Sudah adanya Perda PUG, namun belum terimplementasikan secara menyeluruh	Wawancara DP3AP2KB, 2024
Rendahnya partisipasi aktif perempuan di bidang politik dan ekonomi	Keterlibatan perempuan di parlemen Kab Lebak tahun 2023: 8%; Provinsi Banten tahun 2023: 18,82%	BPS, 2024
	Masih kurangnya keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik yang berpihak pada perempuan dan anak	Wawancara DP3AP2KB, 2024
	Keterlibatan perempuan yang bekerja pada kelompok angkatan kerja Kab Lebak tahun 2023: 36,25%	BPS Kab Lebak, 2024
Rendahnya jumlah pusat pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKB, BKR, BKL)	Capaian jumlah pusat pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKB, BKR, BKL) Kab Lebak tahun 2023: 57,76%	Laporan Evaluasi RPJMD, 2023
Rendahnya jumlah pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun	Capaian persentase angka pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun Kab Lebak tahun 2023: 97,58%	Laporan Evaluasi RPJMD, 2023
Rendahnya cakupan anggota bina keluarga berKB	Capaian cakupan anggota bina keluarga berKB Kab Lebak tahun 2023: 24,27%	Laporan Evaluasi RPJMD, 2023
Potensi pertambahan penduduk di Kawasan Perkotaan Maja	Terdapat potensi pertambahan penduduk di Kawasan Perkotaan Maja 2.106.521 jiwa pada tahun 2038	Masterplan Kawasan Kota Baru Maja, 2018

- **Belum Optimalnya Peran Serta Prestasi Pemuda Di Bidang Olahraga Dan Pengembangan Ekonomi**

Masalah pemberdayaan pemuda dan olahraga di Kabupaten Lebak ditengarai oleh partisipasi pemuda di berbagai bidang seperti ekonomi dan olahraga. Sebagian akar permasalahan yang telah diidentifikasi yakni sarana prasarana serta sumber daya manusia yang belum optimal dalam pengembangan atlet di berbagai cabang olahraga, partisipasi pemuda dalam bidang

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

ekonomi mandiri. Data pendukung dari akar masalah pada bagian pemuda dan olahraga dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 4-4 Akar Masalah terkait Kepemudaan dan Olahraga

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Kurangnya dukungan dana dan infrastruktur pengembangan prestasi pemuda dan atlet	Capaian persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik Kab Lebak tahun 2023: 85%	Laporan Evaluasi RPJMD, 2023
	Kurangnya akses terhadap sumber daya dan fasilitas yang mendukung pengembangan prestasi pemuda	Wawancara Dispora, 2024
	Minimnya dukungan dana dan infrastruktur pengembangan atlet	Wawancara Dispora, 2024
	Minimnya dukungan dana dan fasilitas untuk cabang olahraga	Wawancara Dispora, 2024
Belum optimalnya ekosistem kompetisi serta program pembinaan atlet dan pengembangan minat dan bakat pemuda di level kabupaten	Kurangnya optimalnya program pelatihan dan pembinaan atlet	Wawancara Dispora, 2024
	Kurangnya program pengembangan bakat dan minat di kalangan pemuda	Wawancara Dispora, 2024
	Rendahnya tingkat kompetisi di tingkat daerah yang menjadi dasar seleksi atlet berprestasi	Wawancara Dispora, 2024
Belum optimalnya kualitas pelatih dan pembina untuk mendampingi atlet	Rendahnya kualitas pelatih dan pembina yang mendampingi atlet	Wawancara Dispora, 2024
Belum optimalnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Capaian tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (capaian Kab Lebak tahun 2023: 94,44%)	Laporan Evaluasi RPJMD, 2023

- **Belum Optimalnya Program Kesejahteraan Sosial Bagi Kelompok Rentan**

Masalah sosial di Kabupaten Lebak ditengarai oleh pelayanan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan. Sebagian akar permasalahan yang telah diidentifikasi yakni sarana prasarana termasuk aksesibilitas berupa informasasi tindakan atau pelayanan bagi kaum lansia, disabilitas, dan anak terlantar, serta pelayanan jenazah. Data pendukung dari akar masalah pada bagian sosial dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 4-5 Akar Masalah terkait Kesejahteraan Sosial

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Rendahnya jumlah anak terlantar yang memperoleh pendidikan formal/non formal	Capaian jumlah anak terlantar memperoleh pendidikan formal/non formal Kab Lebak tahun 2023: 40%	Laporan Evaluasi RPJMD, 2023
Belum optimalnya sarpras pendukung	Belum memadainya sarana prasarana rumah singgah yang representatif	Wawancara Dinsos, 2024
Rendahnya capaian jumlah jenazah yang diurus	Capaian jumlah jenazah yang diurus Kab Lebak tahun 2023: 22,22%	Laporan Evaluasi RPJMD, 2023
Belum optimalnya sarpras pendukung bagi pelayanan penyandang disabilitas	Kurangnya penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas dan akses pelayanan publik	Wawancara Dinsos, 2024
Belum optimalnya program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas	Belum optimalnya pengembangan potensi dan pemberdayaan orang dengan penyandang disabilitas	Wawancara Dinsos, 2024
Belum optimalnya akses bagi lansia terlantar	Keterbatasan informasi bagi lanjut usia terlantar serta sarana prasarana untuk menampung lanjut usia terlantar	Wawancara Dinsos, 2024
Distribusi penerima manfaat bantuan sosial belum optimal	Distribusi penerima manfaat bantuan sosial belum optimal	KLHS RPJMD Lebak 2019 - 2023

DRAFT TIDAK UNTUK DIFOTOKOPI

- **Belum Optimalnya Penguatan Komunitas Adat**

Masalah yang terjadi pada penguatan komunitas adat ditengarai oleh akses pelayanan dasar pendidikan kesehatan, pemberdayaan komunitas, perlindungan hukum dan agraria, dan pengembangan pariwisata berbasis kebudayaan lokal, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat adat. Data pendukung dari akar masalah pada bagian komunitas adat dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 4-6 Akar Masalah terkait Komunitas Adat

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Belum optimalnya akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masyarakat adat	Belum optimalnya akses pendidikan dan kesehatan yang merata	KLHS RPJMD Lebak 2019 – 2023
	Belum optimalnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik	KLHS RPJMD Lebak 2019 – 2023
Belum optimalnya pemberdayaan komunitas adat	Belum optimalnya penguatan partisipasi masyarakat dan keterlibatan komunitas adat	KLHS RPJMD Lebak 2019 – 2023
	Belum optimalnya pemberdayaan organisasi dan komunitas adat	KLHS RPJMD Lebak 2019 – 2023
Belum optimalnya perlindungan hukum dan agraria terhadap masyarakat adat	Belum optimalnya pengendalian dan pengurangan kerusakan lingkungan adat	KLHS RPJMD Lebak 2019 – 2023
	Belum optimalnya perlindungan terhadap eksploitasi dan diskriminasi masyarakat adat	KLHS RPJMD Lebak 2019 – 2023
	Belum optimalnya pengakuan resmi wilayah adat dan perlindungan hak-hak tradisional	KLHS RPJMD Lebak 2019 – 2023
Belum optimalnya pengembangan pariwisata dan penguatan karakter berbasis kebudayaan lokal	Belum optimalnya pengembangan pariwisata berbasis komunitas (desa wisata budaya)	KLHS RPJMD Lebak 2019 – 2023
	Perlunya pembangunan pusat budaya dan festival Lebak (Badui)	KLHS RPJMD Lebak 2019 – 2023
	Belum optimalnya pelestarian dan penguatan karakter pendidikan dan budaya lokal	KLHS RPJMD Lebak 2019 – 2023
Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi	Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi komunitas adat	KLHS RPJMD Lebak 2019 – 2023

4.1.2 Klaster – Infrastruktur dan Lingkungan

Pada klaster infrastruktur, terdapat masalah pokok pada level dampak yang menjadi isu strategis dari klaster ini yaitu :

"Belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan konektivitas wilayah dalam memenuhi kebutuhan dasar serta kurangnya kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko bencana dan pengelolaan lingkungan"

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Secara mendetail masalah pokok pada level impact strategis tersebut disebabkan dari beberapa pokok masalah outcome :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, serta peningkatan aksesibilitas menuju pusat-pusat kegiatan.
2. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan jaringan informasi/ komunikasi
3. Tingginya kerentanan dalam menghadapi risiko bencana gempa bumi, banjir dan tanah longsor.
4. Belum optimalnya penyediaan sanitasi, terutama di permukiman kumuh.

Masing-masing masalah pokok pada tingkatan *outcome* tersebut disebabkan oleh rangkaian masalah dan akar-akar masalah tertentu. Berikut pembahasan masing-masing masalah pokok tersebut:

- **Belum Optimalnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Serta Peningkatan Aksesibilitas Menuju Pusat-Pusat Kegiatan.**

Belum optimalnya penyelenggaranan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu dalam permasalahan dalam transportasi di Kabupaten Lebak. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya penambahan trayek baru, minimnya akses menuju kota Maja, adanya titik kemacetan, tidak optimalnya terminal tipe C dan belum optimalnya penanganan kasus kecelakaan. Data pendukung dari akar masalah pada bagian trayek angkutan umum dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4-7 Akar Masalah terkait Belum Optimalnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Kurangnya permintaan/potensi pasar	masih belum adanya penambahan trayek kota	Kuesioner Dinas, 2024
Proses perizinan yang rumit		
Kurang menariknya atau menguntungkannya pembukaan trayek untuk pengusaha angkutan umum	Tidak ada feeder antara Stasiun Maja dan Komplek Perumahan Citra Maja Raya	Survey Lapangan, 2024 / FGD, 2024
Banyaknya perlintasan sebidang		FGD, 2024
Penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat yang masih dominan		
Belum optimalnya regulasi dalam mengatur retribusi angkutan	Banyak angkutan yang tidak mau ditagih retribusi sehingga tidak masuk terminal	FGD, 2024
Kurangnya investasi dalam pengembangan infrastruktur dan fasilitas terminal		
Manajemen yang tidak efektif dalam pengaturan operasional terminal	aparat menagih retribusi di persimpangan, sehingga terkesan terminal ini tidak berfungsi	FGD, 2024
Kurang tersedianya perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, traffic cone, marka jalan	persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (95,83%)	FGD, 2024
Masih adanya parkir liar di ruas jalan yang menggunakan badan jalan		
Masih terdapat jaringan jalan yang memilik kondisi rusak		
Masih banyaknya pengendara yang tidkak mematuhi standar keselamatan		

DRAFT UNTUK DICOPY

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Keterbatasan koordinasi dengan satlantas polri		
Kurangnya personil dalam pengawasan lalu lintas		

- **Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan jaringan informasi/ komunikasi**

Rendahnya penetrasi internet dan literasi digital masyarakat dapat menjadi tantangan serius dalam era digital saat ini. Di banyak wilayah, terutama di daerah pedesaan atau perkotaan yang kurang terjangkau oleh infrastruktur teknologi informasi, akses internet yang terbatas membatasi kemampuan penduduk untuk mengakses informasi dan layanan online secara efektif. Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital juga menghambat kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi secara produktif dan aman. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara umum, tetapi juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah tersebut. Upaya untuk meningkatkan akses internet yang lebih luas dan untuk meningkatkan literasi digital perlu menjadi prioritas dalam mengatasi tantangan ini. Data pendukung dari akar masalah pada bagian digitalisasi pada masyarakat dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4-8 **Akar Masalah terkait Penetrasi Internet dan Literasi Digital Masyarakat**

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Tingkat kemiskinan tinggi dan pendidikan yang rendah	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir di Kabupaten Lebak baru mencapai 51,15% pada tahun 2023; terendah di Provinsi Banten	BPS Provinsi Banten, 2023
Kabupaten Lebak mungkin memiliki infrastruktur telekomunikasi yang belum memadai, termasuk jaringan internet dan sinyal telepon selular yang kurang stabil atau tidak mencakup seluruh wilayah	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas yang Memiliki Telepon Selular (HP) dalam 3 Bulan di Kabupaten Lebak baru mencapai 53,35% pada tahun 2023; terendah di Provinsi Banten	BPS Provinsi Banten, 2023
Kabupaten Lebak terletak di wilayah yang memiliki kondisi geografis yang menantang, seperti pegunungan dan hutan, yang membuat pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi lebih sulit dan mahal		

- **Tingginya Kerentanan Dalam Menghadapi Risiko Bencana Gempa Bumi, Banjir Dan Tanah Longsor**

Ancaman Bencana Banjir di Kabupaten Lebak saat ini, sebanyak 27 kecamatan memiliki potensi luasan bahaya yang TINGGI, dimana Kecamatan Wanasalam memiliki luasan paling banyak seluas 1202.94 Ha, dan Kecamatan Warunggunung memiliki luasan bahaya banjir paling rendah, yaitu sebesar 3,42 Ha. Kerentanan Kabupaten Lebak berdasarkan potensi penduduk terpapar oleh Bencana Banjir, 15 kecamatan memiliki kelas TINGGI, 7 Kecamatan masuk ke dalam kelas SEDANG, sedangkan kecamatan lainnya memiliki kelas keterpaparan penduduknya Rendah. Total penduduk yang terpapar

DRAFT UNTUK DICOPY

paling tinggi di Kecamatan Cimarga sebanyak 20.222 ribu jiwa. Rendahnya level kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko banjir merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak komunitas di berbagai wilayah. Ketidaksiapan ini dapat disebabkan oleh kurangnya infrastruktur yang memadai untuk mitigasi risiko banjir, seperti sistem drainase yang efektif dan tanggul yang cukup kuat. Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya banjir serta cara menghadapinya juga menjadi faktor utama. Akibatnya, ketika banjir melanda, dampaknya bisa sangat parah dan sulit untuk dikurangi. Pentingnya peningkatan kesiapsiagaan melalui edukasi, pelatihan, dan pembangunan infrastruktur yang sesuai adalah kunci untuk mengurangi kerentanan terhadap banjir dan melindungi komunitas dari bencana ini.

Berdasarkan hasil kajian untuk luasan wilayah terdampak Kabupaten Lebak juga terdapat resiko longsor, dari 28 Kecamatan, terdapat 5 Kecamatan yang masuk ke dalam kelas **TINGGI**, yaitu Kecamatan Cibeber, Cigemblong, Cilograng, Lebak Gedong dan Sobang, dimana Kecamatan Cibeber merupakan wilayah yang terluas dampak longsornya dengan luasan 15,215.3 Ha. Kerentanan Kabupaten Lebak berdasarkan potensi penduduk terpapar oleh Bencana Longsor memiliki kelas **RENDAH**. Total penduduk yang terpapar paling tinggi di Kecamatan Cilograng sebanyak 254 ribu jiwa. Kerentanan Kabupaten Lebak berdasarkan potensi penduduk terpapar oleh Bencana Longsor memiliki kelas **RENDAH**. Total penduduk yang terpapar paling tinggi di Kecamatan Cilograng sebanyak 254 ribu jiwa.

Ancaman Bencana Gempabumi juga terjadi di Kabupaten Lebak, menurut hasil analisis dengan menggunakan metode yang diambil dari Perka BNPB No.02 tahun 2012, memiliki tingkat risiko bencana **SEDANG**, dengan Kecamatan Cimarga memiliki luasan wilayah yang terpapar paling tinggi, yaitu seluas 18280,53 Ha, dan Kecamatan Cibadak dengan luasan paling sedikit, yaitu seluas 3564,99 Ha. Kabupaten Lebak dengan adanya ancaman gempabumi memiliki Kerentanan berdasarkan potensi penduduk terpapar oleh Bencana Gempabumi, termasuk ke dalam kelas **SEDANG**, dengan total penduduk yang terpapar paling tinggi di Kecamatan Rangkasbitung sebanyak 142.087 ribu jiwa. Sedangkan Kecamatan Bojongmanik memiliki total penduduk yang berpotensi terpapar paling sedikit, yaitu 25.492 Jiwa. Data pendukung dari akar masalah pada bagian resiko bencana pada masyarakat dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4-9 **Akar Masalah terkait Risiko Bencana Gempa Bumi, Banjir dan Tanah Longsor**

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Kabupaten Lebak terletak di wilayah yang memiliki kondisi geografis yang menantang, seperti pegunungan dan hutan, yang membuat pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi lebih sulit dan mahal.		
Sebagian topografi wilayah berada di wilayah rendah.	278 Kecamatan masuk ke dalam kelas TINGGI, dimana Kecamatan Wanasalam merupakan wilayah yang terluas dampak lbanjir dengan	KRB, 2022
Kondisi sungai yang sempit dan dangkal		

DRAFT - TIDAK UNTUK DISCOPY

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
akibat abrasi dan limpasan air hujan	luasan 1,202.94 Ha >> Kerentanan Kabupaten Lebak berdasarkan potensi penduduk terpapar oleh Bencana Banjir, 15 kecamatan memiliki kelas TINGGI >> Kecamatan yang memiliki kerugian fisik paling tinggi adalah Kecamatan Cimarga, yaitu sebesar Rp. 227,871,000,000 >> Kecamatan Banjarsari akan memiliki nilai kerugian ekonomi terbesar apabila terjadi banjir, yaitu sebesar Rp. 2.002.000.000.F13	
Kondisi resapan di bagian hulu mulai kritis akibat terjadinya alih fungsi lahan		
Saluran drainase yang kurang memadai		
Belum optimalnya normalisasi sungai secara berkala dan berkesinambungan		
Kurangnya infrastruktur mitigasi hadapi (contoh: tanggul, oxbow, bendung, dll) untuk mencegah kerusakan akibat terjadinya bencana banjir / banjir bandang		
Kurangnya infrastruktur mitigasi hindari (contoh: Automatic Weather Statsion (AWS), Automatic Water Level Recorder (AWLR) di daerah yang sering terjadinya bencana banjir / banjir bandang		
Minimnya pembangunan bangunan umum yang cukup luas (tempat evakuasi) yang dapat digunakan sebagai tempat evakuasi sementara bagi orang terkena dampak bencana banjir / banjir bandang maupun bencana lainnya		
Belum tersedianya Perda RDTR Kawasan perkotaan yang memiliki risiko banjir / banjir bandang sebagai pedoman dalam Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang		
Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang		
Belum tersusunnya masterplan yang terintegrasi dalam pengendalian di kawasan rawan bencana banjir		
Belum tersedianya dokumen Rencana		

DRAFT TIDAK UNTUK DICOPY

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Penanggulangan Bencana (RPB) dan/atau dokumen kontijensi		
Kurangnya upaya atau sistem adaptasi baru terhadap mitigasi bencana banjir		
Minimnya peraturan daerah terkait tindakan pelanggaran ruang, pelanggaran lingkungan, dan pelanggaran lainnya yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan di sempadan sungai.		
Belum terdata dengan baik peta lokasi kejadian rawan bencana banjir berdasarkan data historis yang berbasis system informasi geografis		
Masih rendahnya penerapan teknologi baru dalam kegiatan mitigasi bencana		
Perilaku masyarakat yang tetap bertahan dan tidak melakukan adaptasi ruang baru agar bisa terhindari dari daerah rawan banjir		
Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah dan membuang sampah dengan skema 3R		
Masih tingginya perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan, terutama di daerah sungai.		
Minimnya sosialisasi peningkatan kapasitas SDM di daerahdaerah yang rawan bencana banjir	Kabupaten Lebak memiliki Level Kesiapsiagaan RENDAH, dengan nilai 0,24, yaitu 3,77%desa berada di tingkat risiko banjir sedang	KRB, 2022
Terbatasnya SDM dalam melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dibidang mitigasi bencana banjir		
Minimnya pemahaman masyarakat secara ilmiah (scientific knowledge)		
Kontur wilayahnya yang berbukit-bukit dengan	"luasan wilayah terdampak Bencana Longsor di	KRB, 2022

DRAFT TIDAK UNTUK DICOPY

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
beda ketinggian dataran memiliki rentang yang cukup lebar	Kabupaten Lebak, dari28 Kecamatan, terdapat 5 Kecamatan yang masuk ke dalam kelas TINGGI, yaitu Kecamatan Cibeber, Cigemlong, Cilograng, Lebak Gedong dan Sobang. >> Potensi kerugian fisik terbesar di Kecamatan masuk kelas TINGGI, seperti Kecamatan Cibeber(Rp. 26.766.000.000), Kecamatan Lebakgedang (Rp. 17.916.000.000), dan Kecamatan Sobang (Rp.100.859.000.000). >> Apabila terjadi bencana tanah longsor, maka yang mengalami kerugian ekonomi paling besar adalah Kecamatan Cibeber dengan jumlah Rp. 369.000.000. Selain Kecamatan Cibeber, kecamatan yang memiliki kelas kerugian tinggi adalah Kecamatan Bayah (Rp. 184.000.000), Kecamatan Cigemblong (Rp. 208.000.000), Kecamatan Cihara (Rp. 146.000.000), Kecamatan Cilograng (Rp. 151.000.000), Kecamatan Leuwidamar (Rp. 139.000.000), Kecamatan Panggarangan (Rp. 168.000.000), dan Kecamatan Sobang (Rp. 179.000.000). >> Kecamatan yang memiliki kerentanan lingkungan tertinggi adalah Kecamatan Cibeber dengan luas lingkungan yang terpapar seluas 106.050 Ha. Kecamatan lain yang memiliki kerentanan lingkungan tinggi adalah Kecamatan Cigemblong (2.173Ha), Kecamatan Cilograng (4.123 Ha), Kecamatan Lebak Gedong (36.116 Ha), Kecamatan Cilograng (4.123 Ha), Kecamatan Panggarangan (6.951 Ha), dan Kecamatan Sobang (18.233 Ha)"	
Sebagian topografi wilayah kabupaten merupakan daerah tinggi/berbukit		
Tingginya curah hujan merupakan salah satu penyebab longsor		
Kurangnya penerapan infrastruktur mitigasi alami pada daerah yang memiliki kelerengan yang curam		
Kurangnya penyediaan infrastruktur mitigasi hadapi dan infrastruktur hindari pada daerah rawan longsor		
Sulitnya pemerataan infrastruktur mitigasi bencana gerakan tanah		
Kurang terjaganya drainese di lereng-lereng yang memiliki tingkat risiko longsor		
Masih banyaknya bangunan yang dibangun di daerah yang rawan gerakan tanah/longsor		
Terjadinya penggundulan hutan (alih fungsi lahan)		
Keberadaan lahan pertanian di lereng gunung		
Belum adanya aturan dan sanksi yang tegas untuk setiap pelanggaran pelanggaran bangunan di daerah yang memiliki risiko longsor		
Penebangan pohon liar di daerah tebing,		
Adanya pembangunan pemukiman di daerah dibawah lereng yang rawan terjadi tanah longsor		
Pengendalian terhadap pencemaran air yang kurang		
Minimnya upaya atau sistem adaptasi baru terhadap mitigasi bencana gerakan tanah / longsor		
Belum tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan		

DRAFT TIDAK UNTUK DICOPY

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Bencana (RPB) dan/atau dokumen kontijensi		
Kurangnya penerapan teknologi (Warning system atau teknologi peringatan bencana longsor) dengan menciptkan alatalat pendeteksi pergerakan tanah yang berisiko akan longsor di daerah-dareh longsor		
Belum terdata dengan baik peta lokasi rawan bencana gerakan bencana berdasarkan data historis yang berbasis system informasi geografis		
Minimnya sosialisasi peningkatan kapasitas SDM di daerahdaerah yang rawan bencana gerakan tanah/longsor		
Terbatasnya SDM dalam melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dibidang mitigasi bencana gerakan tanah/longsor		
Terpapar oleh ancaman bencana gempa dari lempeng megathrust	Luasan wilayah terdampak gempa bumi masuk dalam kelas sedang. KecamatanCibeber akan mengalami kerugian fisik paling besar, yaitu sekitar Rp. 92 Milyar. apabila terjadi bencana gempa bumi yang mengalami kerugian ekonomi paling besar adalah Kecamatan Wanasalam dengan jumlah Rp. 2 Milyar (Rp. 2.493.000.000), diikuti oleh Kecamatan Banjarsari (Rp.1.818.000.000) dan Kecamatan Rangkasbitung (Rp. 1.208.000.000)	KRB, 2022
Kurangnya peduli terhadap penyediaan infrastruktur mitigasi hindari pada bangunan bertingkat		
Kondisi bangunan yang rentan terhadap ancaman bencana gempa bumi		
Kondisi permukiman padat menyulitkan untuk jalur dan tempat evakuasi		
Belum tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan/atau dokumen kontijensi		
Minimnya upaya atau sistem adaptasi baru (bangunan tahan gempa) yang dilakukan oleh masyarakat ekonomi rendah dalam upaya		

DRAFT UNTUK DICOPY

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
mitigasi hindari bencana gempa bumi		
Kondisi permukiman yang cenderung rapat, struktur pembesian yang buruk mengakibatkan bangunan rentan terhadap bencana gempa bumi		
Minimnya sosialisasi peningkatan penanggulangan risiko bencana Gempa melalui simulasi penyelamatan diri	Kabupaten Lebak memiliki Level Kesiapsiagaan RENDAH, dengan nilai 0,24 - 12% Desa berada di tingkat risiko sedang untuk bencana gempa bumi	KRB, 2022
Kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana gempa bumi yang masih kurang		
kesiapsiagaan masyarakat terhadap perubahan iklim yang masih kurang	Sebanyak delapan kecamatan di Kabupaten Lebak, Banten mengalami krisis air bersih karena perubahan iklim el nino yang menyebabkan kemarau Panjang.	https://kepri.antaranews.comhttps://kepri.antaranews.com/berita/163644/delapan-kecamatan-di-lebak-krisis-air-bersih-akibat-el-nino
tidak adanya kebijakan terkait rencana aksi perubahan iklim		

- **Belum Optimalnya Penyediaan Sarana Prasarana Perumahan dan Pemukiman**

Pengelolaan sampah di Kabupaten Lebak untuk layanan pengurangan sampah masih sangat rendah yaitu 0.7% (20.46% Capaian pengurangan berdasarkan data Neraca Sampah Tahun 2023 DLH) dimana angkat tersebut masih sangat jauh dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan layanan penanganan sampah mencapai 10,1% (59.45% capaan akses penanganan berdasarkan data Neraca Sampah Tahun 2023 DLH), hal ini mengingat layanan persampahan hanya di beberapa daerah saja terutama wilayah perkotaan. Terdapat 89,2% sampah yang tidak terkelola (20.10% capaian sampah tidak terkelola berdasarkan data Neraca Sampah Tahun 2023 DLH).

Kondisi sanitasi di Kabupaten Lebak adalah untuk air limbah domestik masih ada masyarakat di Kabupaten Lebak yang melakukan BABs ditempat terbuka baik diperkotaan maupun perdesaan, untuk akses aman masih sangat kecil yakni 0.77% hal ini dikarenakan walaupun truk tinja yang dimiliki oleh Kabupaten Lebak sudah beroperasai akan tetapi IPLT yang ada belum beroperasi secara maksimal. Permasalahan tersebut dipengaruhi minimnya penyediaan sarana prasarana sanitasi, pendanaan dan regulasi.

Berdasarkan hasil instrumen SSK, untuk area berisiko drainase di Kabupaten Lebak terdapat 5 Desa di 4 kecamatan yang memiliki indeks risiko drainase tinggi yaitu di desa Cilangkah dan Kadujajar Kecamatan Malingping, Desa Cidikit Kecamatan Bayah, Desa Cijoro Lebak di Kecamattan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Rangkasbitung, dan Desa Kaduangu Tengah di Kecamatan Cibadak. Data pendukung dari akar masalah pada bagian sarana prasarana pemukiman dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4-10 Akar Masalah terkait Penyediaan Sarana Prasarana Perumahan dan Pemukiman

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Rendahnya kesadaran masyarakat terkait perilaku hidup sehat	Masih banyak Masyarakat melakukan penangan persampahan dengan cara dibakar	SSK Kab. Lebak
Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan	berdasarkan survey ERHA, masyarakat yang di survey sebanyak 51% lulusan SD	ERHA.2023
Lemahnya kesejahteraan ekonomi rumah tangga	sebanyak 22,88% masyarakat memiliki surat keterangan tidak mampu	ERHA.2023
• Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah, misalnya dalam program 3R. • Belum optimalnya intervensi pemerintah dalam penanganan dan pengurangan sampah.	Tingkat capaian persentase pengurangan sampah masih 63,5%	FGD, 2024
	Masih rendahnya pengurangan sampah di wilayah perkotaan dan perdesaan (0,4% dan 1,7%)	SSK Kab. Lebak
	Jumlah sampah yang dikelola masih 97,4%	FGD. 2024
	Tingkat capaian persentase penanganan sampah masih 90,95%	FGD,2024
	Kurangnya Sarana Pengangkut, khususnya Gerobak dan Gerobak Motor	SSK Kab. Lebak
Minimnya sarana prasarana persampahan	Kondisi TPA yang masih open dumping (seharusnya sanitary Lanfill)	SSK Kab. Lebak
Rendahnya kesadaran masyarakat untuk perilaku hidup sehat	Masih ada Masyarakat lebak yang melakukan BABS sebanyak 0,1% (437 KK)	SSK Kab. Lebak
	Rendahnya kesadaran Masyarakat terkait perilaku hidup sehat	SSK Kab. Lebak
kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan	berdasarkan survey ERHA, masyarakat yang di survey sebanyak 51% lulusan SD	ERHA.2023
minim sarana prasarana sanitasi	Persentase akses sanitasi masih 99,5%	SSK Kab. Lebak
	Akses aman baru mencapai 0,77%	SSK Kab. Lebak
	Masih banyak Masyarakat yang belum memiliki akses layak (1,83%) 27.060 KK	SSK Kab. Lebak
IPLT yang belum berfungsi secara optimal	Kondisi IPLT yang belum brfungsi secata optimal	SSK Kab. Lebak
Belum optimalnya intervensi pemerintah dalam penanganan air limbah domestik	Masih ada Masyarakat lebak yang melakukan BABS sebanyak 0,1% (437 KK)	SSK Kab. Lebak
	Rendahnya pendanaan sanitasi terkait penanganan air limbah domestik	SSK Kab. Lebak
Tidak ada regulasi yang mengatur air limbah	Belum adanya regulasi yang mengatur terkait air limbah domestik	SSK Kab. Lebak
	Belum adanya PERDA/PERBUB terkait retribusi air limbah permukiman	SSK Kab. Lebak
Kesadaran masyarakat masih rendah dalam pemeliharaan drainase	Belum terdapat pemisah antara saluran drainase dengan saluran pembanguan air limbah (tercampur)	SSK Kab. Lebak
Belum adanya Dokumen Masterplan Drainase	Belum adanya Dokumen Masterplan Drainase	SSK Kab. Lebak
Tidak ada regulasi yang mengatur drainse	Regulasi mengatur pengelolaan drainase masih belum ada	SSK Kab. Lebak

DRAFT UNTUK DICOPY

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
kurangnya intervensi pemerintah dalam penyediaan saluran drainase	Saluran drainase belum terdapat di seluruh area Kab. Lebak, hanya mencakup area perkotaan saja	SSK Kab. Lebak

4.1.3 Klaster – Pemerintahan

Pada klaster pemerintahan , terdapat 2 masalah pokok pada *level impact* yang merupakan isu strategis dari klaster ini yaitu :

1. **Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah yang menjangkau seluruh wilayah (hingga tingkat desa) Kabupaten Lebak**

Secara lebih mendetail maka isu strategis tersebut disebabkan dari beberapa pokok masalah yaitu:

1) Belum optimalnya pelayanan penjagaan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
2) Belum Optimalnya pelayanan kependudukan, pencatatan sipil, administrasi pemerintahan , dan pelayanan publik berbasis elektronik;
3) Belum Optimalnya tata kelola pemerintahan daerah
4) Belum optimalnya kapasitas aparatur negera dalam memberikan pelayanan
5) Rendahnya kapasitas Fiskal Daerah
6) Rendahnya pengelolaan dan pengembangan pada tingkat Desa

Urusan – urusan dalam klaster pemerintahan ini merupakan aspek yang melakukan tata Kelola pemerintahan saat ini. Dalam beberapa isu pada klister pemerintahan ini maka terdapat beberapa isu yang beririsan dengan klaster lain seperti:

- Belum optimalnya kapasitas aparatur negeri dalam memberikan pelayanan

  Isu ini berkaitan dengan aspek lain dimana hampir seluruh urusan pada pemerintahan daerah Kabupaten Lebak kurang memiliki SDM yang sesuai dengan fungsi nya. Hal tersebut membuat kinerja pelayanan dari pemerintah daerah menjadi sulit untuk ditingkatkan

- Rendahnya kapasitas fiskal daerah
  Kapasitas fiskal daerah menjadi salah satu hal yang utama dalam menjalankan program pada semua urusan di Kab. Lebak. Urusan keuangan menjadi salah satu yang memiliki peran besar dalam isu tersebut. Isu ini berkait dengan semua klaster yang lain terutama untuk menjalankan programnya. Klaster infrastruktur bisa dibilang akan memerlukan dana yang paling besar dibandingkan klaster yang lain karena terkait Pembangunan, sarana dan prasarana wilayah.

Masing-masing masalah pokok pada tingkatan outcome tersebut disebabkan oleh rangkaian masalah dan akar masalah. Berikut pembahasan masing-masing masalah pokok tersebut:

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

- **Belum Optimalnya Pelayanan Penjagaan Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat**

  Pada pokok masalah banyak disebabkan oleh berbagai hal terutama dari urusan ketentraman, ketertiban unum, serta perlindungan masyarakat. Permasalahn tersebut dapat berupa dari sisi organisasi masyrakat ataupun LSM, partai politik, maupun adanya isu terkait paham radikalisme. Secara lebih lengkap permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 4-11 Akar Masalah Terkait Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		
Masih ada ormas yang belum melaporkan keberadaan organisasinya ke Kesbangpol	Masih ada ormas yang belum melaporkan keberadaan organisasinya ke Kesbangpol	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak
Alamat sekretariat yang masih belum tetap	Alamat sekretariat yang masih belum tetap	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak
Masih kurang dalam pengadministrasian/pengelolaan organisasinya	Masih kurang dalam pengadministrasian/pengelolaan organisasinya	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak
Partai Belum berbadan hukum	Partai Belum berbadan hukum	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak
Potensi akan bahaya radikalisme dan terorisme di masyarakat;	Potensi akan bahaya radikalisme dan terorisme di masyarakat;	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak
rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat;	rendahnya tingkat pendidikan politik masyarakat;	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak
Rendahnya penyelenggaraan Sosialisasi dan Edukasi Penguatan Ideologi Pancasila	Rendahnya penyelenggaraan Sosialisasi dan Edukasi Penguatan Ideologi Pancasila	Evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019-2024
Masih rendahnya kerukunan hidup antar umat beragama	Masih rendahnya kerukunan hidup antar umat beragama	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak
Munculnya ajaran / aliran yang dianggap menyimpang dari pokok - pokok ajaran agama yang sudah ada.	Munculnya ajaran / aliran yang dianggap menyimpang dari pokok - pokok ajaran agama yang sudah ada.	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak
Perlunya ada perubahan struktur organisasi dengan adanya penambahan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.	Perlunya ada perubahan struktur organisasi dengan adanya penambahan bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik.	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak
Rendahnya Cakupan Pembinaan terhadap Ormas/LSM	Rendahnya Cakupan Pembinaan terhadap Ormas/LSM (Satuan: %)	Evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019-2024
Rendahnya cakupan Penyelenggaraan Pembinaan P4GN, PAKEM, dan FKUB	Rendahnya cakupan Penyelenggaraan Pembinaan P4GN, PAKEM, dan FKUB	Evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019-2024
Rendahnya Persentase terpenuhinya kebutuhan Koordinasi Jaringan Deteksi Dini, FKDM dan Forum Kominda	Persentase terpenuhinya kebutuhan Koordinasi Jaringan Deteksi Dini, FKDM dan Forum Kominda (Satuan: %)	Evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019-2024
Tidak tercapainya target tingkat Waktu Tanggap (Response time) pengaduan kebakaran (<15 Menit Setelah Pengaduan)	Tidak tercapainya target tingkat Waktu Tanggap (Response time) pengaduan kebakaran (<15 Menit Setelah Pengaduan) (Satuan: %)	Evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019-2024
Rendahnya cakupan pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran	Rendahnya cakupan pencegahan dan penanggulangan serta	Evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019-2024

DRAFT UNTUK DICOPY

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
	penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran	
Rendahnya cakupan penanggulangan bencana	Rendahnya cakupan penanggulangan bencana	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak
Rendahnya kecamatan yang tanggap bencana	Rendahnya kecamatan yang tanggap bencana	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak

- **Belum Optimalnya Pelayanan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Administrasi Pemerintahan, dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik**

  Pokok masalah ini terjadi karena masih adanya permalahan dalam hal pelayanan kependudukan dan catatan sipil di Kab. Lebak hingga ke tingga desa. Sistem berbasis elektronik yang telah digagas pun belum dapat berfungsi optimal untuk membantu hal tersebut. Permalahan-permasalahan tersebut dapat dilihat dengan lebih lengkap pada tabel berikut,

Tabel 4-12 Akar Masalah Terkait Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
kondisi perangkat perekaman KTP-el yang ada di 28 kecamatan sudah banyak yang rusak	kondisi perangkat perekaman KTP-el yang ada di 28 kecamatan sudah banyak yang rusak	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak
honorarium yang diterima oleh tenaga operator di 28 kecamatan masih rendah dan belum pernah ada peningkatan	honorarium yang diterima oleh tenaga operator di 28 kecamatan masih rendah dan belum pernah ada peningkatan	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak
terbatasnya jumlah ribbon untuk pencetakan KTP dan KIA	terbatasnya jumlah ribbon untuk pencetakan KTP dan KIA	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak
Pemanfaatan KTP elektronik belum berbasis IT	Pemanfaatan KTP elektronik masih perlu difoto copy untuk mengurus kokumen kependudukan	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak
Rendahnya penggunaan KTP Digital	untuk memenuhi SPBE, pencapaian IKD daerah minimal harus 4%. sementara untuk mencapai target tersebut rasanya sangat sulit sebab masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa tanpa beralihke KTP Digital pu masih bisa menggunakan fisik KTP-el)	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak
KTP digital yang tersimpan dalam HP android membuat tidak fleksibel saat akan berganti kepemilikan	KTP digital yang tersimpan dalam HP android membuat tidak fleksibel saat akan berganti kepemilikan	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak
Masih banyaknya pencatatan perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai SOP	Masih banyaknya pencatatan perkawinan dan perceraian yang tidak sesuai SOP	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak
Kurangnya sosialisasi terkait prosedud pernikahan dan perceraian hingga tingkat desa	Kurangnya sosialisasi terkait prosedud pernikahan dan perceraian hingga tingkat desa	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak
Infrastruktur pelayanan publik yang belum memadai	Infrastruktur pelayanan publik yang belum memadai	FGD 2 RPJMD Kab. Lebak

DRAFT UNTUK DICOPY

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Proses Perijinan dan Birokrasi yang masih panjang	Proses Perijinan dan Birokrasi yang masih panjang	FGD 2 RPJMD Kab. Lebak

- **Belum Optimalnya Sistem Tata Kelola Pemerintahan**
  Pokok masalah ini terjadi akibat beberapa hal yaitu dari kurang optimalnya sistem tata Kelola seperti nilai SAKIP yang belum mencapai target, dan juga dari sisi administrasi pemerintaan. Selain itu dengan adanya isu Kemungkinan perubahan bentuk badan dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda) menjadi salah satu agenda untuk meningkatkan inovasi daerah di Kabupaten Lebak.

Tabel 4-13 Akar Masalah Terkait Sistem Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Daerah

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
PERENCANAAN		
Kemungkinan perubahan bentuk badan dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperinda)	Adanya ranperda terkait pembentukan dan susunan perangkat daerah yang merubah bappelitbangda menjadi bapperinda.	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak
PENGAWASAN		
Nilai SAKIP yang belum sesuai target	Nilai SAKIP 82.93% kurang dari target	Evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019-2024
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN		
Rendaknya indeks kepuasan pelayanan kepada Anggota DPRD	Indek kepuasan kepada Anggota DPRD yang belum mencapai target (< 86%)	Evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019-2024
Rara-rata waktu fasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat kepada Anggota DPRD melalui Komisi-Komisi	Tidak tercapainya target rara-rata waktu fasilitasi penyampaian aspirasi kepada Anggota DPRD melalui komisi-komis	Evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019-2024
FUNGSI PENUNJANG LAINNYA		
Rendahnya cakupan penyelenggaraan administrasi perkantoran	Rendahnya cakupan penyelenggaraan administrasi perkantoran	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak

- **Belum Optimalnya Pengarsipan Dokumen Pemerintah Dengan Sistem Berbasis Elektronik**
  Saat ini sistem pengarsipan di pemerintahan Kab. Lebak masih dianggap kurang tertata dengan baik. Hal tersebut terlihat dari hasil evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019 – 2024 dimana masih rendahnya ketertiban dalam pengelolaan dokukumen ataupun arsip milik pemerintah. Salah satu langkap yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong sistem berbasis elekronik dimana dengan adanya sistem tersebut diharapkan dapat membatu sistem pengarsipan di lingkungan pemerintah Kab. Lebak.

Tabel 4-14 Akar Masalah Terkait Pengersipan Dokumen Pemerintahan

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Kearsipan		
Rendahnya Jumlah Dokumen Keuangan Setda yang terpelihara	Rendahnya Jumlah Dokumen Keuangan Setda yang terpelihara (Satuan: dokumen)	Evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019-2024
Rendahnya ketertiban Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Daerah	Rendahnya ketertiban Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Daerah (Satuan: %)	Evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019-2024

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

- **Belum Optimalnya Kapasitas Aparatur Negara Dalam Memberikan Pelayanan**
  Kapasitar aparatur negara menjadi salah satu isu klasik yang perlu ditingkatkan untuk dapat mendukung pelayanan pemerintah daerah di Kab. Lebak. Hal tersebut terjadi karena beberapa hal seperti permasalahan teknis berupa kurangnya pelatihan/diklat yang dilakukan oleh aparatur negara untu melakukan tugasnya. Selain dari sisi kapasitas, jumlah dari SDM aparatur negara pun masih dianggap kurang untuk dapat bekerja secata optimal.

Tabel 4-15 Akar Masalah Terkait Kapasitas Aparatur Negara

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Kurangnya kapasitas SDM PMD di kecamatan dan desa menyebabkan kesalahan input data	Kurangnya kapasitas SDM PMD di kecamatan dan desa menyebabkan kesalahan input data	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak
verifikasi keluarga miskin ekstrim terkendala di tingkat desa	verifikasi keluarga miskin ekstrim terkendala di tingkat desa	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak
Perencanaan		
Rendahnya kapasitas Fiskal Pada Bidang Perencanaan	Rendahnya kapassitas Fiskal Pada Bidang Perencanaan	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak
Masih kurangnya Tenaga Fungsional Perencana dan Analis Kebijakan	Masih kurangnya Tenaga Fungsional Perencana dan Analis Kebijakan	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak
Kurangnya jumlah aparatur pemerintahan di lapangan	Kuranganya SDM teknis yang ada di lapangan	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
Rendahnya pegawai yang mengikuti diklat teknis	1.56% pegawai yang mengikuti diklat teknis	Evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019-2024

- **Rendahnya kapasitas Fiskal Daerah**
  Dari sisi kapasitas fiskal maka mayoritas perangkat daerah mengalami kekurangan dana untuk menjalankan program-programnya. Hal tersebut membuat pentingnya usaha dalam mencari alternatif pembiayaan dari perangkat daerah maupun pemerintah Kab. Lebak untuk dapat menjalankan programnya secara optimal.

Tabel 4-16 Akar Masalah Terkait Kapasitas Fiskal Daerah

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Keuangan		
Kurangnya kapasitas SDM dalam melakukan inovasi keuangan daerah	Kurangnya alternatif pembiayaan / keuangan dalam mendukung program pemerintahan	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak
Rendahnya peran pemerintah dalam meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah,	Kurang dari target <7%	KLHS RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2023
Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah	Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah	KLHS RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024
Rendahnya Kapasitas Fiskal Daerah	Ketaatan wajib pajak daerah 66.41%	FGD 1 RPJMD Kab. Lebak

DRAFT TIDAK UNTUK DICOPY

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Belum terdokumentasikannya total aset daerah	Dokumentasi aset daerah baru sekitar 48%	Evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019-2023
Rendahnya cakupan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Rendahnya cakupan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	Evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019-2024

- **Rendahnya Pengelolaan dan Pengembangan Pada Tingkat Desa**

Dari sisi pengelolaan dan pengembangan pada tingkat desa menjadi salah satu isu yang cukup penting. Pemerataan sistem pemerintah yang baik pada semua tingkatan menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Tabel 4-17 Akar Masalah Terkait Pengelolaan dan Pengembagan Pada Tingkat Desa

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
Rendahnya Persentase Terbentuk BUMDes yang Aktif	Rendahnya Persentase Terbentuk BUMDes yang Aktif	Evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019-2024
Rendahnya persentase pembangunan sapras perdesaan yang melibatkan masayarakat	Rendahnya persentase pembangunan sapras perdesaan yang melibatkan masayarakat	Evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019-2024
Rendahnya Persentase LKD yang produktif	Rendahnya Persentase LKD yang produktif	Evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019-2024
Rendahnya Persentase sarana usaha masyarakat yang berkembang	Rendahnya Persentase sarana usaha masyarakat yang berkembang	Evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019-2024
Rendahnya Persentase Keswadyaan Masyarakat dalam Kegiatan pembangunan Desa	Rendahnya Persentase Keswadyaan Masyarakat dalam Kegiatan pembangunan Desa	Evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019-2023
Rendahnya Persentase pemerintahan desa yang telah melakukan kerjasama antar desa	Rendahnya Persentase pemerintahan desa yang telah melakukan kerjasama antar desa	Evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019-2024
Rendahnya Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkinerja baik	Rendahnya Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkinerja baik	Evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019-2024
Rendahnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif	Rendahnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif	Evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019-2024
Rendahnya Persentase Terbentuk BUMDes yang Aktif	Rendahnya Persentase Terbentuk BUMDes yang Aktif	Evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019-2024
Rendahnya persentase pembangunan sapras perdesaan yang melibatkan masayarakat	Rendahnya persentase pembangunan sapras perdesaan yang melibatkan masayarakat	Evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019-2024
Rendahnya Persentase Pemerintahan Desa yang penataan Desanya terkelola dengan baik	Rendahnya Persentase Pemerintahan Desa yang penataan Desanya terkelola dengan baik	Evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019-2024
Rendahnya Persentase pengentasan desa tertinggal	Rendahnya Persentase pengentasan desa tertinggal	Evaluasi RPJMD Kab. Lebak 2019-2024

DRAFT UNTUK DICOPY

4.1.4 Klaster – Ekonomi

Pada klaster permasalahan daya saing ekonomi daerah di Kabupaten Lebak, pada level *impact*, yaitu :
"Belum optimalnya pemanfaatan SDA dan nilai tambah produk unggulan wilayah dalam mendukung daya saing daerah"

Secara mendetail pokok masalah isu strategis tersebut disebabakan dari beberapa pokok masalah :

1) Belum Optimalnya daya saing UMKM dan Koperasi
2) Belum terwujudnya ketahanan pangan daerah
3) Belum mendukungnya iklim penanaman modal
4) Belum Optimalnya Produktivitas Pertanian
5) Belum Optimalnya Produktivitas Peternakan
6) Rendahnya daya saing perikanan
7) Belum optimalnya kontribusi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif
8) Tingginya tingkat pengggangguran
9) Belum optimalnya investasi dan pertumbuhan ekonomi

Belum optimalnya pemanfaatan SDA dan nilai tambah produk unggulan wilayah dalam mendukung daya saing daerah disebabkan oleh masalah pokok level *outcome* dan akar masalah berikut :

- **Belum Optimalnya daya saing UMKM dan Koperasi**

Berdasarkan Kabupaten Lebak dalam angka di KabupatenLebak terdapat 629 unit koperasi, yang terdiri dari 34 unit KUD, 62 unit KPRI, 27 unit KOPKAR, dan 785 unit koperasi lainnya. Namun hanya 9% koperasi yang bekerja dengan baik. Masalah pokok disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan koperasi aktif serta belum optimalnya pengurus dan pengawasan yang kompeten. Data pendukung dari akar masalah pada bagian daya saing UMKM dan koperasi dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4-18 Akar Masalah Terkait Daya Saing UMKM dan Koperasi

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
kurangnya edukasi atau kesadaran yang memadai tentang manfaat koperasi	persentase koperasi aktif sebanyak 9,50% atau setara dengan ketercapaian 55,86% dari target	Kuesioner Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,2024
	Rendahnya jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang memiliki izin, legalitas, dan sertifikasi sehingga sulit menjangkau akses permodalan	Analisis Strategi dan Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lebak, 2022
	UMKM berbasis digitalisasi dengan legalitas yang masih rendah yaitu dibawah 25%	FGD, 2024
kurangnya edukasi atau kesadaran yang memadai tentang manfaat koperasi		
Belum optimalnya intervensi pemerintah dalam melakukan pembinaan koperasi	persentase koperasi berkinerja baik sebanyak 9% atau setara dengan ketercapaian 71,07% dari target	Kuesioner Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,2024
manajemen koperasi yang tidak efektif		

DRAFT TIDAK UNTUK DICOPY

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan SDM minimnya ketersediaan SDM	persentase pengurus dan pengawas koperasi yang kompeten sebanyak 5% atau setara dengan 74,56%	Kuesioner Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,2024
belum tersedianya legalitas untuk UMKM	UMKM berbasis digitalisasi dengan legalitas yang masih rendah yaitu dibawah 25%	FGD, 2024
Rendahnya kualitas manajemen para pengusaha industri kecil dan industri rumah tangga	persentase koperasi berkinerja baik sebanyak 9% atau setara dengan ketercapaian 71,07% dari target	SIDa
rendahnya motivasi dalam berdaya saing	persentase UMK yang berdaya saing sebanyak 5% atau setara dengan ketercapaian 24,46% dari target	Kuesioner Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,2024
Kurang pengetahuan cara pengolahan yang modern dan masih menggunakan teknologi dan peralatan yang tradisional		SIDa
Belum dipergunakannya peralatan teknologi yang dapat membantu menunjang proses produksi dalam UMKM kreatif	anggaran yang terbatas dalam menjalankan UMKM	FGD,2024
Kurangnya akses dalam pemasaran hasil produk UMKM dan Industri Kreatif		Sida

- **Belum Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah**

Isu di Kabupaten Lebak terkait dengan rasio pangan aman, yang dipengaruhi karena penyediaan infratsruktur untuk ketersediaan pangan, serta intervensi dari pemerintah. Data pendukung dari akar masalah pada bagian ketahanan pangan daerah dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4-19 Akar Masalah Terkait Ketahanan Pangan Daerah

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Penguasaan teknologi penggunaan produk pertanian yang masih sangat terbatas, sehingga mengakibatkan produktivitas pertanian menjadi rendah	penguatan cadangan pangan memiliki tingkat capaian 49,9% dari target	Kuesioner Dinas Ketahanan Pangan, 2024
	lumbung pangan yang mendapatkan bantuan hanya 1 dari total yang di rencanakan yaitu 2.	FGD, 2024
Masih rendahnya inovasi pengembangan agroindustri untuk mengolah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi barang jadi	Masih rendahnya inovasi pengembangan agroindustri untuk mengolah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi barang jadi	Analisis Strategi dan Kebijakan Ekonomi, 2022
Penerapan standarisasi internasional berjalan lambat. Pengelolaan HKI belum optimal.	belum adanya sertifikasi pasar yang aman seperti sampel BPOM, kecurangan makanan, pemalsuan makanan	FGD, 2024

DRAFT UNTUK DICOPY

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Kapasitas SDM yang belum memadai	Kapasitas SDM penyuluh yang perlu lebih banyak berkoordinasi	FGD, 2024
rendahnya akurasi data neraca bahan makanan	Kesulitan dalam mendapatkan data ekspor impor dalam menyusun neraca bahan makanan	Kuesioner Dinas Ketahanan Pangan, 2024
Kurangnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat	adanya perbedaan menghitung indeks ketahanan pangan kabupaten dengan pemerintah pusat	Kuesioner Dinas Ketahanan Pangan, 2024
klaster agroindustri daerah belum dikembangkan dan di bina secara optimal		SIDA

- **Belum Optimalnya Produktivitas Pertanian**

Tahun 2023, 3 jenis produksi sayuran terbesar adalah Kacang panjang 13.311 kwintal, terung 12.134 kwintal dan kangkung 9.504 kwintal. Pada tahun tersebut komoditas palawija yang hanya mencapai 63,23% dari target. Permasalahan tersebut dipengaruh karena masih terbatasany benih, edukasi dalam bertani serta terbatasanya infrastruktur. Data pendukung dari akar masalah pada bagian produktivitas pertanian dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4-20 Akar Masalah Terkait Produktivitas Pertanian

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Rendahnya kompetensi dalam berusaha tani	jumlah kelompok petani pemula masih 83,25% dari target	Dinas Pertanian dan Perkebunan, 2024
	jumlah kelompok petani madya masih 75% dari target	Dinas Pertanian dan Perkebunan, 2024
pengendalian dan penanggulangan bencana masih terbatas	kendala terhadap faktor eksternal seperti cuaca dan iklim yang memperngaruhi hasil pertanian serta adanya bencana pertanian seperti serangan opt maupun bencana seperti Kekeringan	FGD, 2024
Terbatasnya produksi benih dan bibit yang berkualitas	komoditas palawija yang hanya mencapai 63,23% dari target	Dinas Pertanian dan Perkebunan, 2024
Rendahnya efektifiras dan efisiensi proses panen, penanganan pasca panen dan pemasaran	peningkatan nilai tambah produksi pertanian masih belum berjalan	FGD, 2024
rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pertanian	SDM minim dalam mengelola hasil pertanian	FGD, 2024
Rendahnya ketertarikan masyarakat kepada sektor pertanian, sehingga tidak ada regenerasi	Rendahnya ketertarikan masyarakat kepada sektor pertanian, sehingga tidak ada regenerasi	Analisis Strategi dan Kebijakan Ekonomi, 2022
Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian	rendahnya pertumbuhan nilai produksi yang terjual	Analisis Strategi dan Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lebak, 2022
Rendahnya pengembangan sentra kawasan komoditas unggulan dan		FGD, 2024

DRAFT UNTUK DICOPY

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
komoditas potensial pertanian dan perkebunan		
Belum optimalnya intervensi pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana	ada beberapa komunitas komunitas yang memang dirasa agak belum ada intervensi dari pemerintah Lebak untuk dapat ditingkatkan. Selain itu memang ada juga kita kendala terhadap faktor eksternal yaitu lingkungan.	FGD, 2024
	Kondisi infrastruktur pertanian masih minim, irigasi belum optimal, sumber air terbatas, irigasi eksisting belum mendukung peningkatan produksi	FGD, 2024

- **Belum Mendukungnya Iklim Penanaman Modal**

Pertumbuhan inverstasi saat ini targetnya 1,4 T namun realisasi dalam penanaman modal hanya 300jt (Dinas Penanaman Modal, 2024). Untuk membantu meningkatkan perekonomian dalam daerah, dibutuhkan aliran investasi yang cukup. Akan tetapi, Kabupaten Lebak masih memiliki nilai PMA dan PMDN yang cukup rendah. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh belum adanya informasi dalam penanaman modal dan belum optimalnya promosi. Data pendukung dari akar masalah pada bagian penaman modal dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4-21 Akar Masalah Terkait Iklim Penanaman Modal

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
kapasitas SDM yang belum memadai	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan penanaman modal sebanyak 83,75 atau setara dengan 97,38 poin dari target	Kuesioner Dinas Penanaman Modal, 2024
Sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar pelayanan	Hampir 90% jumlah UMKM belum terdata, yang bisa masuk ke dalam APBD hanya industri menengah besar	FGD, 2024
Belum optimalnya penggunaan media dan konten kreatif UMKM	Promosi terhadap UMKM yang masih rendah	FGD, 2024

- **Belum Optimalnya Produktivitas Peternakan**

Penurunan populasi populasi ternak tertera secara kuantitas maupun kualitas ternak. Kondisi tersebut berdampak pada penyediaan penyediaan daging maupun untuk ketahanan pangan (Dinas Peternakan, 2024). Permasalahan tersebut dipengaruhi karena keterbatasan SDM, keterbatasan anggaran, keterbatasan infrastruktur hingga benih. Data pendukung dari akar masalah pada bagian produktivitas pertanian dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4-22 Akar Masalah Terkait Produktivitas Peternakan

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
	keterbatasan SDM dalam pengelolaan dan pengawaan pertanian, hanya terdapat 4	FGD 2024

DRAFT - BAN UNTUK DICOPY

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Keterbatasan pengetahuan SDM dalam pengelolaan dan pengawasan pertanian	orang pertugas dilapangan yang melayani 28 kecamatan serta 340 desa.	
	keterbatasan SDM dalam melakukan rekayasan genetik	FGD 2024
Kontrol Kesehatan hewan ternal belum optimal (terutama PMK)	pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang tidak bisa diukur	Dinas Peternakan, 2024
Nutrisi pakan ternak masih mengandalkan sediaan dari alam		SIDA
Teknologi pembibitan ternak masih rendah	Pembibitan kerbau yang masih rendah	FGD 2024
Belum optimalnya intervensi pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana.	Anggaran dari APBN sudah tidak dicairkan ke Kabupaten, sehingga mempengaruhi rekayasa genetik	FGD 2024

- **Rendahnya daya saing perikanan**

Kabupaten Lebak memiliki daerah selatan yang berbatasan dengan lautan. Hal ini membuat Kabupaten Lebak menjadi kaya tidak hanya dengan sumber daya alam pada sektor pertanian dan perkebunan, namun juga dengan perikanannya. Dalam sektor perikanan, Kabupaten Lebak memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya. Akan tetapi terdapat beberapa permasalahan dalam pengembangannya, salah satunya adalah pembudidaya dan nelayan yang mulai berguguran dikarenakan biaya produksi yang tidak sebanding dengan marginnya. Dalam bidang perikanan juga terdapat permasalahn seperti rendahnya permodalan dalam usaha perikanan, masih terbatasanya pada usaha yang belum komersial serta terbatasanya pengelolaan perikanan. Data pendukung dari akar masalah pada bagian produktivitas perikanan dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4-23 Akar Masalah Terkait Produktivitas Perikanan

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
rendahnya jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	usaha perikanan budidaya masih terbatas pada usaha yang sifatnya belum komersial atau menggunakan lahan yang tidak terpakai	FGD 2024
Rendahnya minat dan jumlah SDM di bidang perikanan yang berkualitas dan terampil		SIDA
Kurangnya pembinaan dan pelatihan serta pendampingan terhadap masayarakat pembudidaya ikan		SIDA
Teknologi pemanfaatan lahan periaran untuk usaha perikanan		SIDA
Sarana dan prasaran budidaya dan sarana alat dan armada (perikanan laut) masih rendah		SIDA
Suplai benih yang sebagian besar masih dari luar	rendahnya permodalan dalam usaha perikanan	FGD 2024
Tingginya harga pakan ikan		SIDA
belum optimalnya pendapatan nelayan	kesenjangan pendapatan antara pemilik kapal dan nelayan	FGD 2024
Teknologi budidaya dan teknologi pakan kurang berkembang	pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan yang masih rendah	

DRAFT UNTUK DICOPY

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
investasi pada bidang usaha pengolahan dan pemasaran dengan keunggulan jenis dan kualitas produk		SIDA
Belum optimalnya inovasi dalam pengolahan hasil perikanan		FGD 2024

- **Belum optimalnya kontribusi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif**

Pariwisata merupakan sektor yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Hal ini dibuktikan dengan visi RPJMD Kabupaten Lebak pada Peraturan Daerah No 1 Tahun 2022, yaitu "Lebak sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal". Akan tetapi, sektor pariwisata Kabupaten Lebak dalam pengembangannya masih terdapat hambatan. Antara lain masih rendahnya daya tarik Lebak sebagai salah satu destinasi kunjungan wisata, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk mempromosikan pariwisata lokal. Permasalahan lainnya yang masih ada dalam pariwisata yaitu kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB hatga berlaku masih 83,64%, selain itu juga perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Lebak masih 95,36%. Data pendukung dari akar masalah pada bagian kontribusi pariwisata dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4-24 Akar Masalah Terkait Kontribusi Pariwisata

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Atraksi di destinasi buatan masih terbatas	Persentase budaya/tradisi lokal yang mendapat pengakuan nasional atau internasional masih 96,5%	FGD 2024
Aksesibilitas ke tempat destinasi wisata dan cagar budaya masih belum optimal		
Rendahnya Management Pengelolaan Potensi Obyek Daya Tarik Wisaa		
Amenitas di Cagar Budaya dan Destinasi wisata kurang optimal		
terbatasnya perjalanan wisatawan nusantara ke Kabupaten Lebak	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Lebak masih 95,36%	FGD 2024
Banyak jasa usaha pariwisata yang belum berijin;		Analisis Strategi dan Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lebak, 2022
Pengetahuan dan pemahaman para pengelola asset/nilai-nilai budaya terhadap upaya pengembangan yang masih kurang	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan museum masih 92,28%	FGD 2024
Belum terakomodirnya kebutuhan regulasi di bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif yang memadai sehingga menyebabkan kurangnya jaminan kepastian hukum bagi pengembangan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif	persentase kelembagaan di 23 ODTW masih 78,26%	FGD 2024
kurangnya investasi dalam teknologi dan inovasi	produktivitas sektor industri 98,05%	FGD, 2024

DRAFT TIDAK UNTUK DICOPY

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
kurangnya SDM yang terampil		
belum optimalnya pelatihan yang memadai bagi tenaga kerja		
kurangnya infrastruktur yang mendukung pertumbuhan industri		

- **Tingginya Tingkat Pengganggguran**

Pada tahun 2023, angkatan kerja di Kabupaten Lebak sebanyak 722.854 orang. Tingkat pengganggguran terbuka di Kabupaten Lebak mencapai 115,59%. Data pendukung dari akar masalah pada bagian tingkat pengganggguran dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4-25 Akar Masalah Terkait Tingkat Pengganggguran

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
Masih kurangnya program pelatihan tenaga kerja di tingkat daerah	Kurangnya sumber daya manusia yang bisa memberikan pelatihan bagi tenaga kerja di tingkat daerah	Analisis Strategi dan Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lebak, 2022
Ketidakcocokan antara lapangan pekerjaan yang tersedia dengan kualifikasi tenaga kerja		

- **Belum optimalnya investasi dan pertumbuhan ekonomi**

Di Kabupaten Lebak, Banten, belum optimalnya investasi dan pertumbuhan ekonomi merupakan tantangan yang signifikan bagi perkembangan daerah tersebut. Meskipun Lebak memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah serta keindahan alam yang dapat menjadi daya tarik wisata, realisasi investasi masih terhambat oleh berbagai faktor. Infrastruktur yang belum memadai, keterbatasan akses transportasi, serta masalah administratif sering kali menjadi penghalang utama. Selain itu, kurangnya fasilitas pendukung dan pelatihan bagi tenaga kerja lokal juga berdampak pada rendahnya daya saing.

Tabel 4-26 Akar Masalah Terkait Belum Optimalnya Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Akar Masalah	Data Pendukung	Sumber
kurangnya inovasi dan teknologi dalam mendukung perdagangan	Masih terbatasnya sarana prasarana pasar/perdagangan	FGD, 2024
Kurang berkembangnya pasar sebagai sarana pedagang untuk bertransaksi		
belum optimalnya pelatihan SDM yang memadai pada ekonomi kreatif		
kurangnya sarana prasarana yang mendukung pertumbuhan industri ekonomi		

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

kurangnya pelayanan perizinan perindustrian	Hanya 23.769 pelaku usaha yang memiliki legalitas usaha, sedangkan 93.500 pelaku usaha belum memiliki legalitas.	Analisis Strategi dan Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lebak, 2022

4.2 Pemetaan Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah ini merupakan hasil pemetaan atau pentrukturan masalah pada bagian pemetaan permasalahan pembangunan. Pada bagian ini akan dijelaskan pemetaan isu strategis dari ke-empat klaster yang kemudian akan dihasilkan isu strategis yang merupakan gabungan dari ke-empat klaster tersebut.

4.2.1 Klaster – Sosial Budaya

Berdasarkan akar-akar masalah pada setiap pokok masalah maka kemudian dapat dilakukan pemetaan masalah untuk melihat kaitan antar masalah tersebut. Pemetaan masalah pokok, masalah, dan akar masalah pembangunan di Kabupaten Lebak pada klaster sosial budaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4-27 Pohon Masalah Klaster – Sosial Budaya

	Masalah Pokok (impact)		Masalah Pokok (Outcome)		Masalah		Akar Masalah	Urusan Pemerintah Terkait
1	Belum optimalnya pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas SDM	1.1	Rendahnya Indeks Pendidikan (capaian tahun 2023: 98,41%)	1.1.1	Rata-rata lama sekolah tingkat kabupaten masih rendah dibandingkan tingkat provinsi (RLS kabupaten tahun 2022: 6,59; RLS provinsi tahun 2022: 9,13 berdasarkan Perda No 1 tahun 2024 tentang RPD Kabupaten Lebak 2025 - 2026)	1.1.1.1	Rendahnya motivasi diri untuk mengenyam pendidikan	Pendidikan
							Kurangnya dukungan moral dari keluarga untuk mengenyam pendidikan	Pendidikan
						1.1.1.2	Sulitnya menjangkau sekolah	Pendidikan
						1.1.1.3	Banyaknya siswa putus sekolah	Pendidikan
							Lemahnya kondisi kesejahteraan ekonomi rumah tangga	Pendidikan
						1.1.1.4	Kurangnya lapangan pekerjaan bagi lulusan sekolah	Pendidikan
						1.1.1.5	Rendahnya partisipasi warga berusia 13 - 15 tahun pada jenjang SMP	Pendidikan

DRAFT TEKNOKRATIK

Masalah Pokok (impact)		Masalah Pokok (Outcome)		Masalah		Akar Masalah	Urusan Pemerintah Terkait
			1.1.2	Rendahnya harapan lama sekolah (terendah di Provinsi Banten ->HLS kabupaten tahun 2023: 12,10 tahun; HLS provinsi tahun 2023: 13,09 tahun berdasarkan BPS Prov Banten, 2023)	1.1.2.1	Rendahnya dukungan sarana dan prasarana	Pendidikan
					1.1.2.2	Belum meratanya kualitas pendidikan	Pendidikan
					1.1.2.3	Kurangnya SDM bidang pendidikan (guru bersetifikat pendidik)	Pendidikan
					1.1.2.4	Rendahnya tingkat partisipasi pada jenjang pendidikan usia dini	Pendidikan
					1.1.2.5	Rendahnya budaya literasi	Pendidikan
		1.2	Rendahnya Indeks Kesehatan (capaian Kab Lebak tahun 2023: 95,18%)	1.2.1	Belum optimalnya kualitas layanan kesehatan (capaian IKM RSUD tahun 2023: 93,70% berdasarkan Laporan Evaluasi RPJMD tahun 2023)	1.2.1.1	Tidak meratanya distribusi tenaga kesehatan	Kesehatan
							Kurangnya tenaga kesehatan yang berkualitas	Kesehatan
						1.2.1.2	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang fasilitas kesehatan	Kesehatan
						1.2.1.3	Sulitnya menjangkau sarana kesehatan	Kesehatan
						1.2.1.4	Terbatasnya ketersediaan obat dan BMHP sesuai Formularium Nasional (Formas)	Kesehatan
				1.2.2	Tingginya jumlah angka kematian ibu (AKI) -> Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 143,48 kematian per 100.000	1.2.2.1	Rendahnya persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Kesehatan

DRAFT

Masalah Pokok (impact)		Masalah Pokok (Outcome)		Masalah		Akar Masalah	Urusan Pemerintah Terkait
				kelahiran hidup masih tinggi berdasarkan Dokumen GDPK Kab Lebak Tahun 2021 - 2046, 2021		Kurangnya edukasi tentang kesehatan ibu hamil	Kesehatan
					1.2.2.2	Rendahnya ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Kesehatan
					1.2.2.3	Kurangnya edukasi tentang kesehatan ibu dan anak	Kesehatan
					1.2.2.4	Kurangnya tenaga kesehatan dengan keahlian khusus, seperti bidan penolong persalinan	Kesehatan
					1.2.2.5	Rendahnya akses fasilitas kesehatan bagi ibu dan anak-anak	Kesehatan
					1.2.2.6	Tingginya angka pernikahan dini	Kesehatan
					1.2.2.7	Banyaknya ibu dan anak yang mengalami kekurangan gizi	Kesehatan
					1.2.2.8	Rendahnya jumlah puskesmas yang terakreditasi minimal madya	Kesehatan
			1.2.3	Rendahnya capaian persentase desa ODF (capaian Kab Lebak tahun 2023: 46,91% berdasarkan Laporan	1.2.3.1	Rendahnya akses layak dan aman	Kesehatan

Masalah Pokok (impact)		Masalah Pokok (Outcome)		Masalah		Akar Masalah	Urusan Pemerintah Terkait
				Evaluasi RPJMD tahun 2023)		Belum optimalnya operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana limbah domestik	Kesehatan
						Sulitnya akses menuju desa	Kesehatan
						Terbatasnya anggaran untuk pengembangan sanitasi penanganan air limbah	Kesehatan
						Belum adanya regulasi yang mengatur sistem air limbah domestik permukiman	Kesehatan
					1.2.3.2	Rendahnya kesadaran masyarakat akan perilaku hidup sehat	Kesehatan
				1.2.4 Rendahnya jumlah keluarga sehat (capaian Kab Lebak tahun 2023: 99,8% berdasarkan Laporan Evaluasi RPJMD, 2023)	1.2.4.1	Rendahnya cakupan pelayanan kesehatan keluarga sesuai standar	Kesehatan
						Keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan	Kesehatan
						Distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata	Kesehatan
						Letak geografis yang sulit	Kesehatan
				1.2.5 Rendahnya cakupan penemuan dan penanganan penderita	1.2.5.1	Rendahnya capaian penemuan penyakit menular tuberkulosis	Kesehatan

Masalah Pokok (impact)		Masalah Pokok (Outcome)		Masalah		Akar Masalah	Urusan Pemerintah Terkait
				penyakit menular (capaian Kab Lebak tahun 2023: 78,50 berdasarkan Laporan Evaluasi RPJMD, 2023) dan tidak menular termasuk penyakit degeneratif	1.2.5.2	Ancaman penyakit berbasis lingkungan bagi kesehatan masyarakat	Kesehatan
					1.2.5.3	Masih adanya ancaman penyakit tidak menular	Kesehatan
		1.3	Belum optimalnya strategi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1.3.1	Rendahnya indeks pemberdayaan gender (capaian IPG kabupaten tahun 2023: 60,08 poin; IPG provinsi tahun 2023: 69,87 poin berdasarkan BPS Prov Banten, 2024)	1.3.1.1	Belum optimalnya sarpras pendukung	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana
						1.3.1.2	Kurangnya SDM pelayananan kasus pemberdayaan perempuan	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana
						1.3.1.3	Belum optimalnya penyusunan, perencanaan, dan penganggaran yang responsif gender.	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana
						1.3.14	Belum optimalnya implementasi program pengarusutamaan gender	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana
						1.3.15	Rendahnya partisipasi aktif perempuan di bidang politik dan ekonomi	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana
				1.3.2	Belum optimalnya program pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1.3.2.1	Rendahnya jumlah pusat pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKB, BKR, BKL)	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana
						1.3.22	Rendahnya jumlah pemakaian kontrasepsi (CPR) bagi perempuan	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana

DRAFT COPY

Masalah Pokok (impact)	Masalah Pokok (Outcome)		Masalah		Akar Masalah	Urusan Pemerintah Terkait
					menikah usia 15 - 49 tahun	
				1.3.2.3	Rendahnya cakupan anggota bina keluarga berKB	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana
				1.3.2.4	Pertambahan penduduk di Kawasan Perkotaan Maja	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Keluarga Berencana
	1.4	Belum optimalnya peran serta prestasi pemuda di bidang olahraga dan pengembangan ekonomi	1.4.1	Belum optimalnya prestasi pemuda di tk provinsi dan nasional serta atlet dan cabang olahraga di bidang olahraga-> 1. capaian persentase atlet yang berprestasi (capaian Kab Lebak tahun 2023: 87,18%) 2. capaian jumlah pemuda yang berprestasi di Tk. Provinsi dan nasional (capaian Kab Lebak tahun 2023: 86,67%) 3. capaian persentase cabor yang berprestasi (capaian Kab Lebak tahun 2023: 93,33%)	1.4.1.1	Kurangnya dukungan dana dan infrastruktur pengembangan prestasi pemuda dan atlet	Pemuda Dan Olahraga
					1.4.1.2	Belum optimalnya ekosistem kompetisi serta program pembinaan atlet dan pengembangan minat dan bakat pemuda di level kabupaten	Pemuda Dan Olahraga
					1.4.1.3	Belum optimalnya kualitas pelatih dan pembina untuk mendampingi atlet	Pemuda Dan Olahraga
			1.4.2	Belum optimalnya tingkat partisipasi pemuda dalam	1.4.2.1	Belum optimalnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan	Pemuda Dan Olahraga

Masalah Pokok (impact)	Masalah Pokok (Outcome)		Masalah		Akar Masalah	Urusan Pemerintah Terkait
			kegiatan ekonomi mandiri		ekonomi mandiri (capaian Kab Lebak tahun 2023: 94,44%)	
	1.5	Belum optimalnya program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan	1.5.1	Belum optimalnya program penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1.5.1.1	Rendahnya jumlah anak terlantar yang memperoleh pendidikan formal/non formal	Sosial
					1.5.1.2	Belum optimalnya sarana prasarana pendukung berupa rumah singgah representatif	Sosial
					1.5.1.3	Rendahnya capaian jumlah jenazah yang diurus	Sosial
					1.5.1.4	Belum optimalnya akses sarana prasarana pendukung bagi pelayanan penyandang disabilitas dan akses bagi lansia terlantar	Sosial
			1.5.2	Belum optimalnya distribusi penerima manfaat bantuan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan	1.5.2.1	Distribusi penerima manfaat bantuan sosial belum optimal	Sosial
	1.6	Belum optimalnya penguatan komunitas adat	1.6.1	Belum optimalnya akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masyarakat adat	1.6.1.1	Belum optimalnya akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masyarakat adat	Pendidikan Kesehatan
			1.6.2	Belum optimalnya pemberdayaan organisasi	1.6.2.1	Belum optimalnya pemberdayaan komunitas adat	Sosial

DRAFT COPY

Masalah Pokok (impact)		Masalah Pokok (Outcome)		Masalah		Akar Masalah	Urusan Pemerintah Terkait
				serta perlindungan hukum dan agraria terhadap masyarakat adat	1.6.2.2	Belum optimalnya perlindungan hukum dan agraria terhadap masyarakat adat	Kehutanan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				1.6.3 Belum optimalnya peningkatan ekonomi komunitas adat melalui sektor pariwisata berbasis budaya	1.6.3.1	Belum optimalnya pengembangan pariwisata dan penguatan karakter berbasis kebudayaan lokal	Pariwisata
					1.6.3.2	Belum optimalnya pemberdayaan ekonomi	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

DRAFT - TIDAK UNTUK DIPY

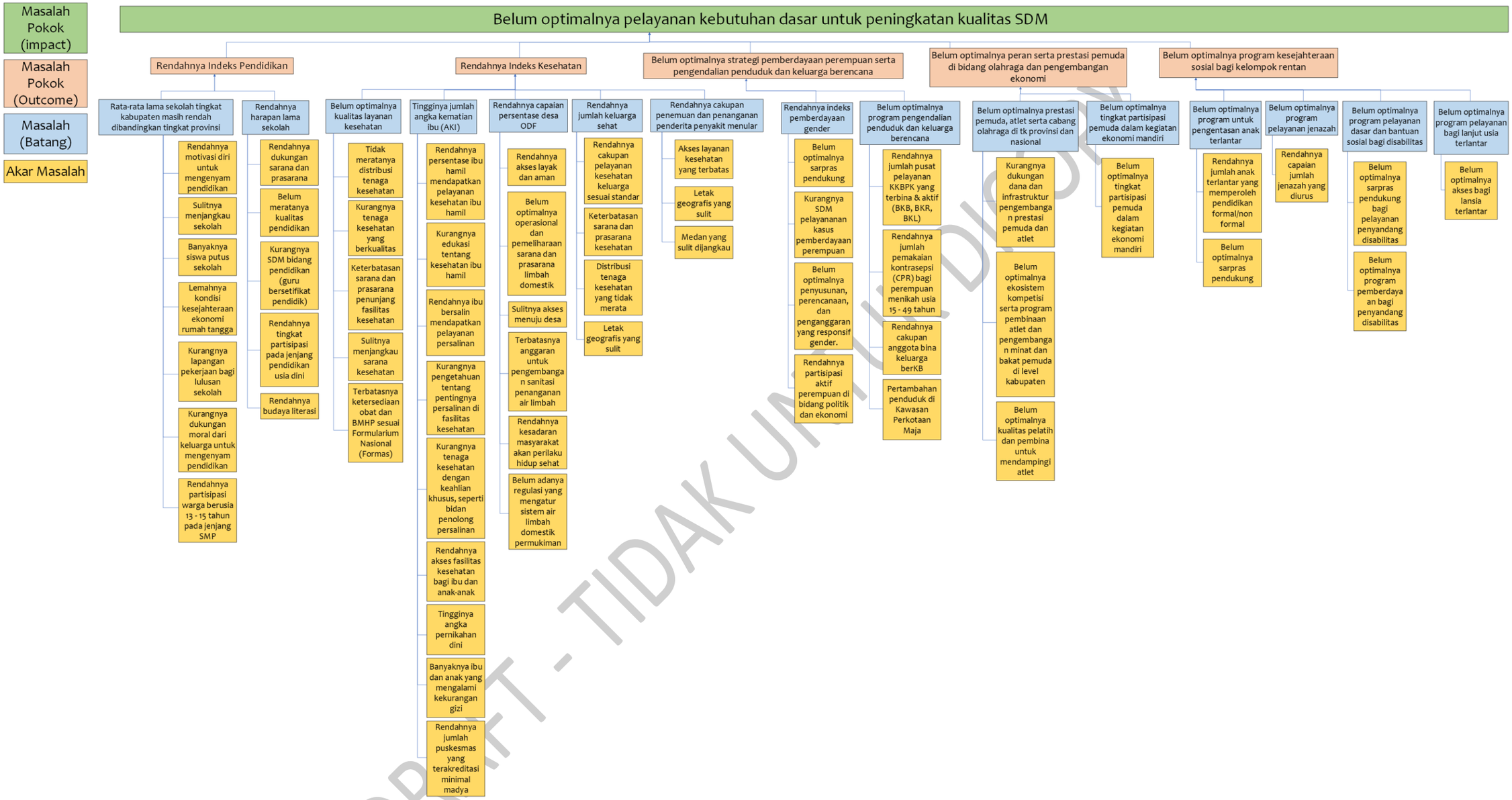

Gambar 4-1 Pohon Masalah Klaster Sosial Budaya

DRAFT - TIDAK UNTUK DISEBAR

4.2.2 Klaster - Infrastruktur dan Lingkungan

Berdasarkan akar – akar masalah pada setiap pokok masalah maka kemudian dapat dilakukan pemetaan masalah untuk melihat kaitan antar masalah tersebut. Pemetaan masalah pokok, masalah, dan akar masalah pembangunan di Kabupaten Lebak pada klaster infrastruktur dan lingkungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4-28 Pohon Masalah Klaster – Infrastruktur dan Lingkungan

	Masalah Pokok (impact)		Masalah Pokok (Outcome)		Masalah		Akar Masalah	Urusan Pemerintah Terkait
2	Belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan konektivitas wilayah dalam memenuhi kebutuhan dasar serta kurangnya kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko bencana serta pengelolaan lingkungan	2.1	Belum optimalnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, serta peningkatan aksesibilitas menuju pusat-pusat kegiatan	2.1.1	Tidak adanya trayek baru untuk mendukung aksesibilitas ke pusat Kota dan kawasan wisata	2.1.1.1	Kurangnya permintaan/potensi pasar	Perhubungan
						2.1.1.2	proses perizinan yang rumit	Perhubungan
				2.1.2	Minimnya aksesibilitas dan konektivitas yang mendukung pengembangan Kota Maja	2.1.2.1	Kurang menariknya atau menguntungkannya pembukaan trayek untuk pengusaha angkutan umum	Perhubungan
				2.1.3	Masih terdapat titik - titik kemacetan	2.1.3.1	Banyaknya perlintasan sebidang	Perhubungan
						2.1.3.2	penggunaan kendaraan pribadi oleh masyarakat yang masih dominan	Perhubungan
				2.1.4	Tidak optimalnya layanan Terminal Tipe C	2.1.4.1	Belum optimalnya regulasi dalam mengatur retribusi angkutan	Perhubungan
						2.1.4.2	Kurangnya investasi dalam pengembangan infrastruktur dan fasilitas terminal	Perhubungan
						2.1.4.3	Manajemen yang tidak efektif dalam pengaturan operasional terminal	Perhubungan
				2.1.5	Belum optimalnya penanganan kasus kecelakaan lalu lintas	2.1.5.1	Kurang tersedianya perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, traffic cone, marka jalan	Perhubungan
						2.1.5.2	Masih adanya parkir liar di ruas jalan yang menggunakan badan jalan	Perhubungan

Masalah Pokok (impact)		Masalah Pokok (Outcome)		Masalah			Akar Masalah	Urusan Pemerintah Terkait
						2.1.5.3	Masih terdapat jaringan jalan yang memilik kondisi rusak	Perhubungan
						2.1.5.4	Masih banyaknya pengendara yang tidkak mematuhi standar keselamatan	Perhubungan
						2.1.5.5	Keterbatasan koordinasi dengan satlantas polri	Perhubungan
						2.1.5.6	Kurangnya personil dalam pengawasan lalu lintas	Perhubungan
		2.2	Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan jaringan informasi/komunikasi	2.2.1	Rendahnya penetrasi internet dan literasi digital masyarakat	2.2.1.1	Tingkat kemiskinan tinggi dan pendidikan yang rendah	Komunikasi Dan Informatika
						2.2.1.2	Kabupaten Lebak mungkin memiliki infrastruktur telekomunikasi yang belum memadai, termasuk jaringan internet dan sinyal telepon selular yang kurang stabil atau tidak mencakup seluruh wilayah	Komunikasi Dan Informatika
						2.2.1.3	Kabupaten Lebak terletak di wilayah yang memiliki kondisi geografis yang menantang, seperti pegunungan dan hutan, yang membuat pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi lebih sulit dan mahal.	Komunikasi Dan Informatika
		2.3	Tingginya kerentanan dalam menghadapi risiko bencana gempa bumi, banjir, dan longsor	2.3.1	Tingginya resiko banjir yaitu mencapai 278 Kecamatan	2.3.1.1	Sebagian topografi wilayah berada di wilayah rendah.	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
							Kondisi sungai yang sempit dan dangkal akibat abrasi dan limpasan air hujan	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
							Kondisi resapan di bagian hulu mulai kritis akibat terjadinya alih fungsi lahan	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						2.3.1.2	Saluran drainase yang kurang memadai	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Masalah Pokok (impact)		Masalah Pokok (Outcome)		Masalah		Akar Masalah	Urusan Pemerintah Terkait
					2.3.1.3	Belum optimalnya normalisasi sungai secara berkala dan berkesinambungan	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					2.3.1.4	Kurangnya infrastruktur mitigasi (contoh: tanggul, oxbow, bendung, dll) untuk mencegah kerusakan akibat terjadinya bencana banjir / banjir bandang	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					2.3.1.5	Kurangnya infrastruktur mitigasi hindari (cth: Automatic Weather Statsion (AWS), Automatic Water Level Recorder (AWLR) di daerah yang sering terjadinya bencana banjir / banjir bandang	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					2.3.1.6	Minimnya pembangunan bangunan umum yang cukup luas (tempat evakuasi) yang dapat digunakan sebagai tempat evakuasi sementara bagi orang terkena dampak bencana banjir / banjir bandang maupun bencana lainnya	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					2.3.1.7	Belum tersedianya Perda RDTR Kawasan perkotaan yang memiliki risiko banjir / banjir bandang sebagai pedoman dalam Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					2.3.1.8	Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					2.3.1.9	Belum tersusunnya masterplan yang terintegrasi dalam pengendalian di kawasan rawan bencana banjir	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					2.3.1.10	Belum tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan/atau dokumen kontijensi	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Masalah Pokok (impact)		Masalah Pokok (Outcome)		Masalah			Akar Masalah	Urusan Pemerintah Terkait
						2.3.1.11	Kurangnya upaya atau sistem adaptasi baru terhadap mitigasi bencana banjir	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						2.3.1.12	Belum terdata dengan baik peta lokasi kejadian rawan bencana banjir berdasarkan data historis yang berbasis system informasi geografis	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						2.3.1.13	Masih rendahnya penerapan teknologi baru dalam kegiatan mitigasi bencana	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						2.3.1.14	Perilaku masyarakat yang tetap bertahan dan tidak melakukan adaptasi ruang baru agar bisa terhindari dari daerah rawan banjir	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						2.3.1.15	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah dan membuang sampah dengan skema 3R	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						2.3.1.16	Masih tingginya perilaku masyarakat membuang sampah sembarangan, terutama di daerah sungai.	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				2.3.2	Rendahnya level kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko banjir	2.3.2.1	Minimnya sosialisasi peningkatan kapasitas SDM di daerahdaerah yang rawan bencana banjir	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
							Terbatasnya SDM dalam melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat dibidang mitigasi bencana banjir	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
							Minimnya pemahaman masyarakat secara ilmiah (scientific knowledge)	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				2.3.3	Cukup banyak daerah yang berisiko bencana longsor	2.3.3.1	Kontur wilayahnya yang berbukit-bukit dengan beda ketinggian dataran memiliki rentang yang cukup lebar	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Masalah Pokok (impact)	Masalah Pokok (Outcome)		Masalah		Akar Masalah	Urusan Pemerintah Terkait
					Sebagian topografi wilayah kabupaten merupakan daerah tinggi/berbukit	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Tingginya curah hujan merupakan salah satu penyebab longsor	
					Kurangnya penerapan infrastruktur mitigasi alami pada daerah yang memiliki kelerengan yang curam	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Kurangnya penyediaan infrastruktur mitigasi pada daerah rawan longsor	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Sulitnya pemerataan infrastruktur mitigasi bencana gerakan tanah	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				2.3.3.2	Kurang terjaganya drainese di lereng-lereng yang memiliki tingkat risiko longsor	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				2.3.3.3	Masih banyaknya bangunan yang dibangun di daerah yang rawan gerakan tanah/longsor	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				2.3.3.4	Terjadinya penggundulan hutan (alih fungsi lahan)	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				2.3.3.5	Keberadaan lahan pertanian di lereng gunung	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Belum adanya aturan dan sanksi yang tegas untuk setiap pelanggaran pelanggaran bangunan di daerah yang memiliki risiko longsor	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
					Penebangan pohon liar di daerah tebing,	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				2.3.3.6	Adanya pembangunan pemukiman di daerah dibawah lereng yang rawan terjadi tanah longsor	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				2.3.3.7	Pengendalian terhadap pencemaran air yang kurang	Lingkungan Hidup
			2.3.4 Rendahnya level kesiapsiagaan dalam	2.3.4.1	Minimnya upaya atau sistem adaptasi baru terhadap mitigasi bencana gerakan tanah / longsor	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Masalah Pokok (impact)		Masalah Pokok (Outcome)		Masalah			Akar Masalah	Urusan Pemerintah Terkait
					menghadapi risiko longsor		Belum tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan/atau dokumen kontijensi	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
						2.3.4.2	Kurangnya penerapan teknologi (Warning system atau teknologi peringatan bencana longsor) dengan menciptkan alatalat pendeteksi pergerakan tanah yang berisiko akan longsor di daerah-dareh longsor	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
						2.3.4.3	Belum terdata dengan baik peta lokasi rawan bencana gerakan bencana berdasarkan data historis yang berbasis system informasi geografis	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
						2.3.4.4	Minimnya sosialisasi peningkatan kapasitas SDM di daerahdaerah yang rawan bencana gerakan tanah/longsor	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
						2.3.4.5	Terbatasnya SDM dalam melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas masyarakat di bidang mitigasi bencana gerakan tanah/longsor	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
				2.3.5	Tingginya risiko daerah yang terpapar gempa bumi	2.3.5.1	Terpapar oleh ancaman bencana gempa dari lempeng megathrust	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
							Kurangnya peduli terhadap penyediaan infrastruktur mitigasi hindari pada bangunan bertingkat	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
							Kondisi bangunan yang rentan terhadap ancaman bencana gempa bumi	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						2.3.5.2	Kondisi permukiman padat menyulitkan untuk jalur dan tempat evakuasi	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						2.3.5.3	Belum tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dan/atau dokumen kontijensi	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Masalah Pokok (impact)		Masalah Pokok (Outcome)		Masalah		Akar Masalah		Urusan Pemerintah Terkait
						2.3.5.4	Minimnya upaya atau sistem adaptasi baru (bangunan tahan gempa) yang dilakukan oleh masyarakat ekonomi rendah dalam upaya mitigasi hindari bencana gempa bumi	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
							Kondisi permukiman yang cenderung rapat, struktur pembesian yang buruk mengakibatkan bangunan rentan terhadap bencana gempa bumi	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				2.3.6	Rendahnya level kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko gempa	2.3.6.1	Minimnya sosialisasi peningkatan penanggulangan risiko bencana Gempa melalui simulasi penyelamatan diri	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
							Kesiapsiagaan masyarakat terhadap ancaman bencana gempa bumi yang masih kurang	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				2.3.7	Rendahnya level kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan iklim	2.3.7.1	kesiapsiagaan masyarakat terhadap perubahan iklim yang masih kurang	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						2.3.7.2	tidak adanya kebijakan terkait rencana aksi perubahan iklim	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
		2.4	Belum optimalnya penyediaan sanitasi, terutama di permukiman kumuh	2.4.1	Belum optimalnya pengurangan dan penanganan persampahan	2.4.1.1	Rendahnya kesadaran masyarakat terkait perilaku hidup sehat	Lingkungan Hidup
						2.3.4.2	Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan	Lingkungan Hidup
						2.4.1.3	Lemahnya kesejahteraan ekonomi rumah tangga	Lingkungan Hidup
						2.4.1.4	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah, misalnya dalam program 3R	Lingkungan Hidup
								Lingkungan Hidup
						2.4.1.5	Belum optimalnya intervensi pemerintah dalam penanganan dan pengurangan sampah.	Lingkungan Hidup
						2.4.1.6	Minimnya sarana prasarana persampahan	Lingkungan Hidup

Masalah Pokok (impact)		Masalah Pokok (Outcome)		Masalah			Akar Masalah	Urusan Pemerintah Terkait
				2.4.2	Belum optimalnya akses sanitasi yang aman dan layak (air limbah), serta kualitas lingkungan	2.4.2.1	Rendahnya kesadaran masyarakat untuk perilaku hidup sehat	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						2.4.2.2	Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						2.4.2.3	Minim sarana prasarana sanitasi	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
							IPLT yang belum berfungsi secara optimal	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
							Belum optimalnya intervensi pemerintah dalam penanganan air limbah domestikrendahnya pendanaan dalam penyediaan air limbah domestik	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
							Tidak adanya regulasi yang mengatur air limbah	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
				2.4.3	Belum optimalnya kinerja jaringan drainase	2.4.3.1	Kesadaran masyarakat masih rendah dalam pemeliharaan drainase	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
						2.4.3.2	Belum adanya Dokumen Masterplan Drainase	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
							Belum optimalnya regulasi yang mengatur drainse	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
							Sumber pendanaan serta alokasi Pendanaan yang masih minim dan belum optimal	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Berdasarkan akar – akar masalah pada setiap pokok masalah maka kemudian dapat dilakukan pemetaan masalah untuk melihat kaitan antar masalah tersebut. Pemetaan masalah pokok, masalah, dan akar masalah pembangunan di Kabupaten Lebak pada klaster infrastruktur dan lingkungan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

DRAFT

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

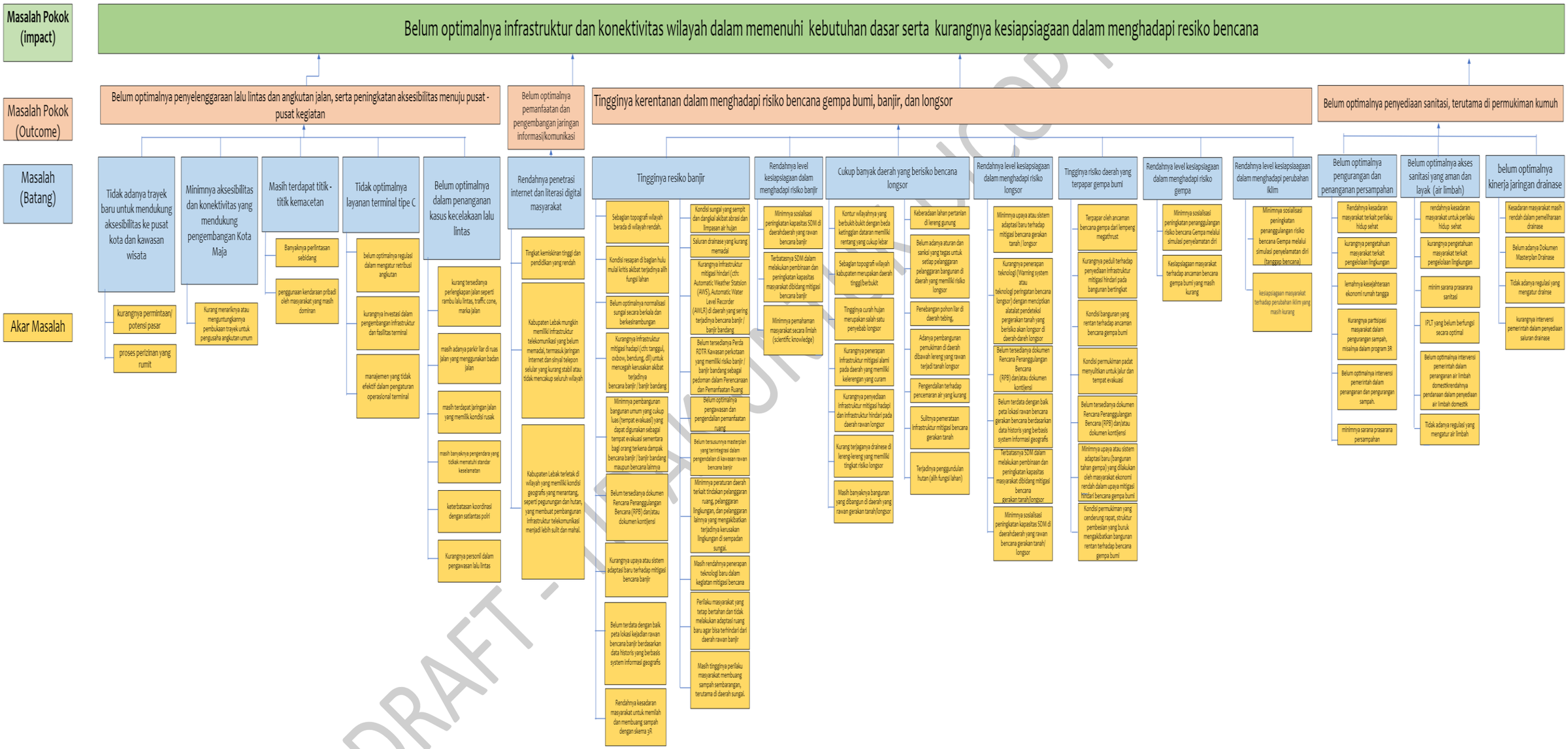

Gambar 4-2 Pohon Masalah Klaster Infrastruktur

DRAFT - VERSI KONSULTASI PUBLIK

4.2.3 Klaster - Pemerintahan

Berdasarkan akar – akar masalah pada setiap pokok masalah maka kemudian dapat dilakukan pemetaan masalah untuk melihat kaitan antar masalah tersebut. Pemetaan masalah pokok, masalah, dan akar masalah pembangunan di Kabupaten Lebak pada klaster pemerintahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4-29 Pohon Masalah Klaster – Pemerintahan

Masalah Pokok (Impact) Klaster		Masalah Pokok (Outcome)		Masalah (Batang)		Akar Masalah		Urusan Pemerintahan
3	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Untuk Meningkatkan Kinerja Pembangunan Daerah Yang Menjangkau Seluruh Wilayah (Hingga Tingkat Desa) Kabupaten Lebak	3.1	Belum Optimaslnya Pelayanan Penjagaan Ketentraman Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	3.1.1	Tidak Tercapainya Target Persentase Parpol Yang Terbina	3.1.1.1	Masih Ada Ormas Yang Belum Melaporkan Keberadaan Organisasinya Ke Kesbangpol	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
						3.1.1.2	Alamat Sekretariat Yang Masih Belum Tetap	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
						3.1.1.3	Partai Belum Berbadan Hukum	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
				3.1.2	Rendahnya Pemahaman Idiologi Dan Wawasan Kebangsaan Yang Berpotensi Mengganggu Ketertiban Umum	3.1.2.1	Potensi Akan Bahaya Radikalisme Dan Terorisme Di Masyarakat;	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
						3.1.2.2	Rendahnya Tingkat Pendidikan Politik Masyarakat;	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
						3.1.2.3	Rendahnya Penyelenggaraan Sosialisasi Dan Edukasi Penguatan Ideologi Pancasila (Satuan: %)	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
				3.1.3	Rendahnya Kinerja Organisasi Kemasyarakatan	3.1.3.1	Rendahnya Cakupan Pembinaan Terhadap Ormas/Lsm (Satuan: %)	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
						3.1.3.2	Rendahnya Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan P4gn, Pakem, Dan Fkub	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
						3.1.3.3	Rendahnya Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Koordinasi Jaringan Deteksi Dini, Fkdm Dan Forum Kominda	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
				3.1.4	Rendahnya Tingkat Ketahanan Bencana kebakaran	3.1.4.1	Tidak Tercapainya Target Tingkat Waktu Tanggap (Response Time) Pengaduan Kebakaran (<15 Menit Setelah Pengaduan)	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
						3.1.4.2	Rendahnya Cakupan Pencegahan Dan Penanggulangan Serta	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan

DRAFT COPY

Masalah Pokok (Impact) Klaster		Masalah Pokok (Outcome)		Masalah (Batang)		Akar Masalah		Urusan Pemerintahan
							Penyelamatan Terhadap Bahaya Kebakaran	Perlindungan Masyarakat
						3.1.4.3	Rendahnya Pengetahuan Masyarakat Terhadapa Sistem Mitigasi Bencana Kebakaran	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
				3.1.5	Masih Kurangnya Kenyamanan Lingkungan Bagi Masyararakat	3.1.5.1	Masih Adanya Pelanggaran Dan Perizinan Usaha	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
								Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
		3.2	Belum Optimalnya Pelayanan Kependudukan, Pencatatan Sipil, Administrasi Pemerintahan , Dan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik	3.2.1	Keterbatasan Kecamatan Untuk Melayani Masyarakat Dalam Melayani Pendataan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Berbasis Elektronik	3.2.1.1	Kondisi Perangkat Perekaman Ktp-El Yang Ada Di 28 Kecamatan Sudah Banyak Yang Rusak	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						3.2.1.2	Honorarium Yang Diterima Oleh Tenaga Operator Di 28 Kecamatan Masih Rendah Dan Belum Pernah Ada Peningkatan	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						3.2.1.3	Terbatasnya Jumlah Ribbon Untuk Pencetakan Ktp Dan Kia	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						3.2.1.4	Rendahnya Penggunaan Ktp Digital	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						3.2.1.5	Masih Banyaknya Pencatatan Perkawinan Dan Perceraian Yang Tidak Sesuai Sop	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						3.2.1.6	Kurangnya Kapasitas SDM PMD Di Kecamatan Dan Desa Menyebabkan Kesalahan Input Data	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
				3.2.2	Sistem Administrasi Pemerintahan Dan Pelayanan	3.2.2.1	Infrastruktur Pelayanan Publik Yang Belum Memadai	Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu

Masalah Pokok (Impact) Klaster		Masalah Pokok (Outcome)		Masalah (Batang)		Akar Masalah		Urusan Pemerintahan
					Publik Yang Belum Terintegrasi	3.2.2.2	Proses Perijinan Dan Birokrasi Yang Masih Panjang	Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu
		3.3	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah	3.3.1	Belum Tercapainya Target Kepuasan Masyarakat Pada Dpr	3.3.1.1	Rara-Rata Waktu Fasilitasi Penyampaian Aspirasi Masyarakat Kepada Anggota Dprd Melalui Komisi-Komisi (Satuan: %)	Administrasi Pemerintahan
				3.3.2	Belum Optimalnya Sistem Administrasi Dan Penelolaan Arsip Pemerintahan Daerah	3.3.2.1	Rendahnya Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran	Administrasi Pemerintahan
						3.3.2.2	Rendahnya Jumlah Dokumen Keuangan Setda Yang Terpelihara (Satuan: Dokumen)	Kearsipan
						3.3.2.3	Rendahnya Ketertiban Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Daerah (Satuan: %)	Kearsipan
		3.4	Belum Optimalnya Kapasitas Aparatur Negera Dalam Memberikan Pelayanan	3.4.1	Kurangnya Jumlah Sdm Aparatur Negara Dengan Kapasitas Yang Dibutuhkan	3.4.1.1	Masih Kurangnya Tenaga Fungsional Perencana Dan Analis Kebijakan	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan
								Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan
						3.4.1.2	Kurangnya Jumlah Aparatur Pemerintahan Di Lapangan	Kepegawaian Serta Pendidikan Dan Pelatihan
		3.5	Rendahnya Kapasitas Fiskal Daerah	3.5.1	Terbatasnya Sumber Kuangan Daerah	3.5.1.1	Rendahnya Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan Ekstensifikasi Dan Intensifikasi Pajak Dan Retribusi Daerah,	Keuangan
				3.5.2	Rendahnya Pertumbuhan Pajak Daerah	3.5.2.1	Masih Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah	Keuangan
						3.5.2.2	Belum Terdokumentasikannya Total Aset Daerah	Keuangan
						3.5.2.3	Rendahnya Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik	Keuangan
		3.6	Rendahnya Pengelolaan Dan Pengembangan Pada Tingkat Desa	3.6.1	Rendahnya Pengelolaan Lembaga Pada Tingkat Desa	3.6.1.1	Rendahnya Persentase Terbentuk Bumdes Yang Aktif	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
						3.6.1.2	Rendahnya Persentase Pembangunan Sapras Perdesaan Yang Melibatkan Masayarakat	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
						3.6.1.3	Rendahnya Persentase Lkd Yang Produktif	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Masalah Pokok (Impact) Klaster		Masalah Pokok (Outcome)		Masalah (Batang)		Akar Masalah		Urusan Pemerintahan
						3.6.1.4	Rendahnya Persentase Sarana Usaha Masyarakat Yang Berkembang	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
						3.6.1.5	Rendahnya Persentase Keswadyaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pembangunan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
						3.6.1.6	Rendahnya Persentase Pemerintahan Desa Yang Telah Melakukan Kerjasama Antar Desa	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
						3.6.1.7	Rendahnya Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Berkinerja Baik	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
						3.6.1.8	Rendahnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat Yang Aktif	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
				3.6.2	Rendahnya Pembangunan Pada Tingkat Desa	3.6.2.1	Rendahnya Persentase Pemerintahan Desa Yang Penataan Desanya Terkelola Dengan Baik	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
						3.6.2.2	Rendahnya Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

DRAFT - TIDAK

Gambar 4-3 Pohon Masalah Klaster Pemerintahan

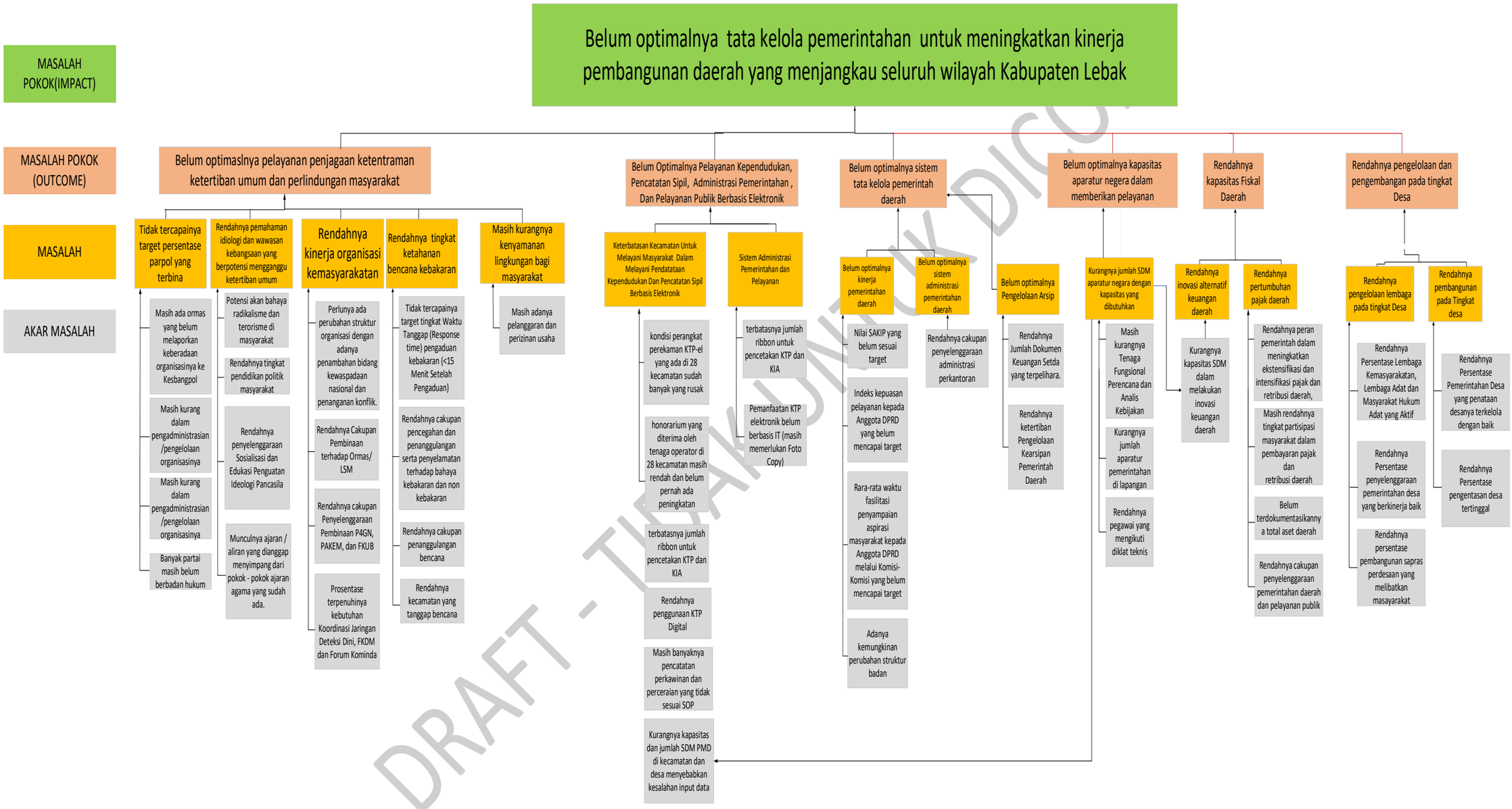

DRAFT - TIDAK UNTUK DICETAK

4.2.4 Klaster – Ekonomi

Berdasarkan akar – akar masalah pada setiap pokok masalah maka kemudian dapat dilakukan pemetaan masalah untuk melihat kaitan antar masalah tersebut. Pemetaan masalah pokok, masalah, dan akar masalah pembangunan di Kabupaten Lebak pada klaster ekonmi dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4-30 Pohon Masalah Klaster – Ekonomi

	Masalah Pokok (impact) (Daun)		Masalah Pokok (Outcome) (Ranting)		Masalah (Batang)		Akar Masalah	Urusan Pemerintah Terkait
4	Belum optimalnya pemanfaataan SDA dan nilai tambah produk unggulan	4.1	Belum Optimalnya daya saing UMKM dan Koperasi	4.1.1	belum optimalnya pelaksanaan koperasi aktif	4.1.1.1	kurangnya edukasi atau kesadaran yang memadai tentang manfaat koperasi	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
								Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
								Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
						4.1.1.2	kurangnya kerjasama di antara anggota koperasi atau dengan pihak eksternal	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
				4.1.2	rendahnya koperasi berkinerja baik	4.1.2.1	Belum optimalnya intervensi pemerintah dalam melakukan pembinaan koperasi	
						4.1.2.2	manajemen koperasi yang tidak efektif	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
				4.1.3	belum optimalnya ketersediaan dan kemampuan SDM yang kompeten	4.1.3.1	Belum optimalnya pelaksanaan pelatihan SDM	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
						4.1.3.2	minimnya ketersediaan SDM	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
				4.1.4	Belum optimalnya peran UMKM untuk berdaya saing dan berperan dalam menggerakan ekonomi lokal	4.1.4.1	belum tersedianya legalitas untuk UMKM	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
						4.1.4.2	Rendahnya kualitas manajemen para pengusaha industri kecil dan industri rumah tangga	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
						4.1.4.3	rendahnya motivasi dalam berdaya saing	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Masalah Pokok (impact) (Daun)		Masalah Pokok (Outcome) (Ranting)		Masalah (Batang)		Akar Masalah	Urusan Pemerintah Terkait
					4.1.4.4	Kurang pengetahuan cara pengolahan yang modern serta masih menggunakan teknologi dan peralatan yang tradisional	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
					4.1.4.5	Belum adanya teknologi yang dapat membantu menunjang proses produksi dalam UMKM kreatif	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
					4.1.4.6	Kurangnya akses dalam pemasaran hasil produk UMKM dan Industri Kreatif	Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
		4.2	Belum terwujudnya ketahanan pangan daerah	4.2.1	belum optimalnya inovasi dan pengembagan agroindustri	4.2.1.1	Masih rendahnya inovasi pengembangan agroindustri untuk mengolah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi barang jadi	Ketahanan Pangan
						4.2.1.2	Penguasaan teknologi penggunaan produk pertanian yang masih sangat terbatas, sehingga mengakibatkan produktivitas pertanian menjadi rendah	Ketahanan Pangan
						4.2.1.3	Penerapan standarisasi internasional berjalan lambat.	Ketahanan Pangan
						4.2.1.4	Pengelolaan HKI belum optimal.	Ketahanan Pangan
						4.2.1.5	Kapasitas SDM yang belum memadai	Ketahanan Pangan
						4.2.1.6	rendahnya akurasi data neraca bahan makanan	Ketahanan Pangan
				4.2.2	Belum optimalnya koordinasi antara pemangku kepentingan dalam penyediaan cadangan pangan	4.2.2.1	Kurangnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat	Ketahanan Pangan
						4.2.2.2	klaster agroindustri daerah belum dikembangkan dan di bina secara optimal	Ketahanan Pangan

Masalah Pokok (impact) (Daun)		Masalah Pokok (Outcome) (Ranting)		Masalah (Batang)		Akar Masalah	Urusan Pemerintah Terkait
		4.3	Belum mendukungnya iklim penanaman modal	4.3.1	Belum optimalnya pembinaan SDM dan penggunaan media dalam memberikan informasi/pelayanan penanaman modal	4.3.1.1	kapasitas SDM yang belum memadai	Penanaman Modal
						4.3.1.2	Sarana dan prasarana yang belum memenuhi standar pelayanan	Penanaman Modal
						4.3.1.3	belum optimalnya media promosi, konten kreatif UMKM	
								Penanaman Modal
		4.4	Belum Optimalnya Produktivitas Pertanian	4.4.1	Belum optimalnya bibit dan faktor produksi pertanian	4.4.1.1	Rendahnya kompetensi dalam berusaha tani	Pertanian
						4.4.1.2	pengendalian dan penanggulangan bencana masih terbatas	Pertanian
						4.4.1.3	Terbatasnya produksi benih dan bibit yang berkualitas	Pertanian
				4.4.2	Belum optimalnya SDM dalam mengelola nilai tambah komoditas pertanian	4.4.2.1	Rendahnya efektifitas dan efisiensi proses panen, penanganan pasca panen dan pemasaran	Pertanian
						4.4.2.2	rendahnya kualitas dan kuantitas SDM pertanian	Pertanian
						4.4.2.3	Rendahnya ketertarikan masyarakat kepada sektor pertanian, sehingga tidak ada regenerasi	Pertanian
						4.4.2.4	Meningkatnya alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian	Pertanian
						4.4.2.5	Rendahnya pengembangan sentra kawasan komoditas unggulan dan komoditas potensial pertanian dan perkebunan	Pertanian
				4.4.3	Belum optimalnya sarana prasarana pendukung pertanian	4.4.3.1	Belum optimalnya intervensi pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana	Pertanian

Masalah Pokok (impact) (Daun)		Masalah Pokok (Outcome) (Ranting)		Masalah (Batang)			Akar Masalah	Urusan Pemerintah Terkait
		4.5	Belum Optimalnya Produktivitas Peternakan	4.5.1	Belum optimalnya pembibitan dan rekayasa genetika peternakan	4.5.1.1	Keterbatasan pengetahuan SDM dalam pengelolaan dan pengawasan peternakan	Pertanian
						4.5.1.2	Kontrol Kesehatan hewan ternal belum optimal (terutama PMK)	Pertanian
						4.5.1.3	Nutrisi pakan ternak masih mengandalkan sediaan dari alam	Pertanian
						4.5.1.4	Teknologi pembibitan ternak masih rendah	Pertanian
				4.5.2	Belum optimalnya sarana prasarana pendukung peternakan	4.5.2.1	Belum optimalnya intervensi pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana	Pertanian
		4.6	Rendahnya daya saing perikanan	4.6.1	Belum optimalnya produksi perikanan	4.6.1.1	Rendahnya jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Kelautan Dan Perikanan
						4.6.1.2	Rendahnya minat dan jumlah SDM di bidang perikanan yang berkualitas dan terampil	Kelautan Dan Perikanan
						4.6.1.3	Kurangnya pembinaan dan pelatihan serta pendampingan terhadap masayarakat pembudidaya ikan	Kelautan Dan Perikanan
						4.6.1.4	Teknologi pemanfaatan lahan perairan untuk usaha perikanan	Kelautan Dan Perikanan
						4.6.1.5	Sarana dan prasaran budidaya dan sarana alat dan armada (perikanan laut) masih rendah	Kelautan Dan Perikanan
						4.6.1.6	Suplai benih yang sebagian besar masih dari luar	Kelautan Dan Perikanan
						4.6.1.7	Tingginya harga pakan ikan	Kelautan Dan Perikanan
						4.6.1.8	Rendahnya pendapatan nelayan	Kelautan Dan Perikanan

Masalah Pokok (impact) (Daun)		Masalah Pokok (Outcome) (Ranting)		Masalah (Batang)		Akar Masalah		Urusan Pemerintah Terkait
				4.6.2	Nilai tambah komoditas perikanan masih rendah	4.6.2.1	Teknologi budidaya dan teknologi pakan kurang berkembang	Kelautan Dan Perikanan
						4.6.2.2	investasi pada bidang usaha pengolahan dan pemasaran dengan keunggulan jenis dan kualitas produk	Kelautan Dan Perikanan
						4.6.2.3	Belum optimalnya inovasi dalam pengolahan hasil perikanan	KELAUTAN DAN PERIKANAN
		4.7	belum optimalnya kontribusi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif	4.7.1	belum optimalnya budaya/tradisi lokal yang mendapat pengakuan nasional atau internasional	4.7.1.1	Atraksi di destinasi buatan masih terbatas	KEBUDAYAAN
						4.7.1.2	Aksesibilitas ke tempat destinasi wisata dan cagar budaya masih belum optimal	KEBUDAYAAN
						4.7.1.3	Rendahnya Management Pengelolaan Potensi Obyek Daya Tarik Wisaa	KEBUDAYAAN
						4.7.1.4	Amenitas di Cagar Budaya dan Destinasi wisata kurang optimal	KEBUDAYAAN
				4.7.2	belum optimalnya peningkatan rata - rata lama tinggal wisatawan	4.7.2.1	terbatasnya perjalanan wisatawan nusantara ke Kabupaten Lebak	PARIWISATA
						4.7.2.2	Banyak jasa usaha pariwisata yang belum berijin;	PARIWISATA
				4.7.3	Ketersediaan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kinerja tinggi di bidang kebudayaan dan pariwisata serta ekonomi kreatif masih belum optimal	4.7.3.1	Pengetahuan dan pemahaman para pengelola asset/nilai-nilai budaya terhadap upaya pengembangan yang masih kurang	PARIWISATA

Masalah Pokok (impact) (Daun)		Masalah Pokok (Outcome) (Ranting)		Masalah (Batang)			Akar Masalah	Urusan Pemerintah Terkait
						4.7.3.2	Belum terakomodirnya kebutuhan regulasi di bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif yang memadai sehingga menyebabkan kurangnya jaminan kepastian hukum bagi pengembangan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif	PARIWISATA
				4.7.4	belum optimalnya keberadaan ekonomi kreatif	4.7.4.1	kurangnya investasi dalam teknologi dan inovasi	PARIWISATA
						4.7.4.2	kurangnya SDM yang terampil	
						4.7.4.3	belum optimalnya pelatihan yang memadai bagi tenaga kerja	
						4.7.4.4	kurangnya infrastruktur yang mendukung pertumbuhan industri	
		4.8	Tingginya tingkat pengganggguran	4.8.1	rendahnya produktivitas tenaga kerja	4.8.1.1	Masih kurangnya program pelatihan tenaga kerja di tingkat daerah	TENAGA KERJA
				4.8.2	Masih terbatasnya lapangan pekerjaan	4.8.2.1	Ketidakcocokan antara lapangan pekerjaan yang tersedia dengan kualifikasi tenaga kerja	TENAGA KERJA
						4.8.2.2	Masih kurangnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja	TENAGA KERJA
		4.9	Belum optimalnya intervensi dan pertumbuhan ekonomi	4.9.1	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas perdagangan	4.9.1.1	kurangnya inovasi dan teknologi dalam mendukung perdagangan	PERDAGANGAN
							Kurang berkembangnya pasar sebagai sarana pedagang untuk bertransaksi	PERDAGANGAN
				4.9.2	Belum optimalnya SDM dalam pelayanan perindustrian	4.9.2.1	belum optimalnya pelatihan SDM yang memadai pada ekonomi kreatif	PERINDUSTRIAN

Masalah Pokok (impact) (Daun)			Masalah Pokok (Outcome) (Ranting)		Masalah (Batang)		Akar Masalah	Urusan Pemerintah Terkait
				4.9.3	Belum optimalnya sarana prasarana pendukung perindustrian	4.9.3.1	kurangnya sarana prasarana yang mendukung pertumbuhan industri ekonomi	PERINDUSTRIAN
						4.9.3.2	kurangnya pelayanan perizinan perindustrian	PERINDUSTRIAN

Dari tabel diatas kemudian dapat dibutat pohon masalah yang dapat memperlihat hubungan antar masalah yang dihadapi oleh Kab. Lebak. Pohon masalah pada klister ekonomi dapat dilihat pada gambar berikut,

DRAFT - TIDAK UNTUK DIC

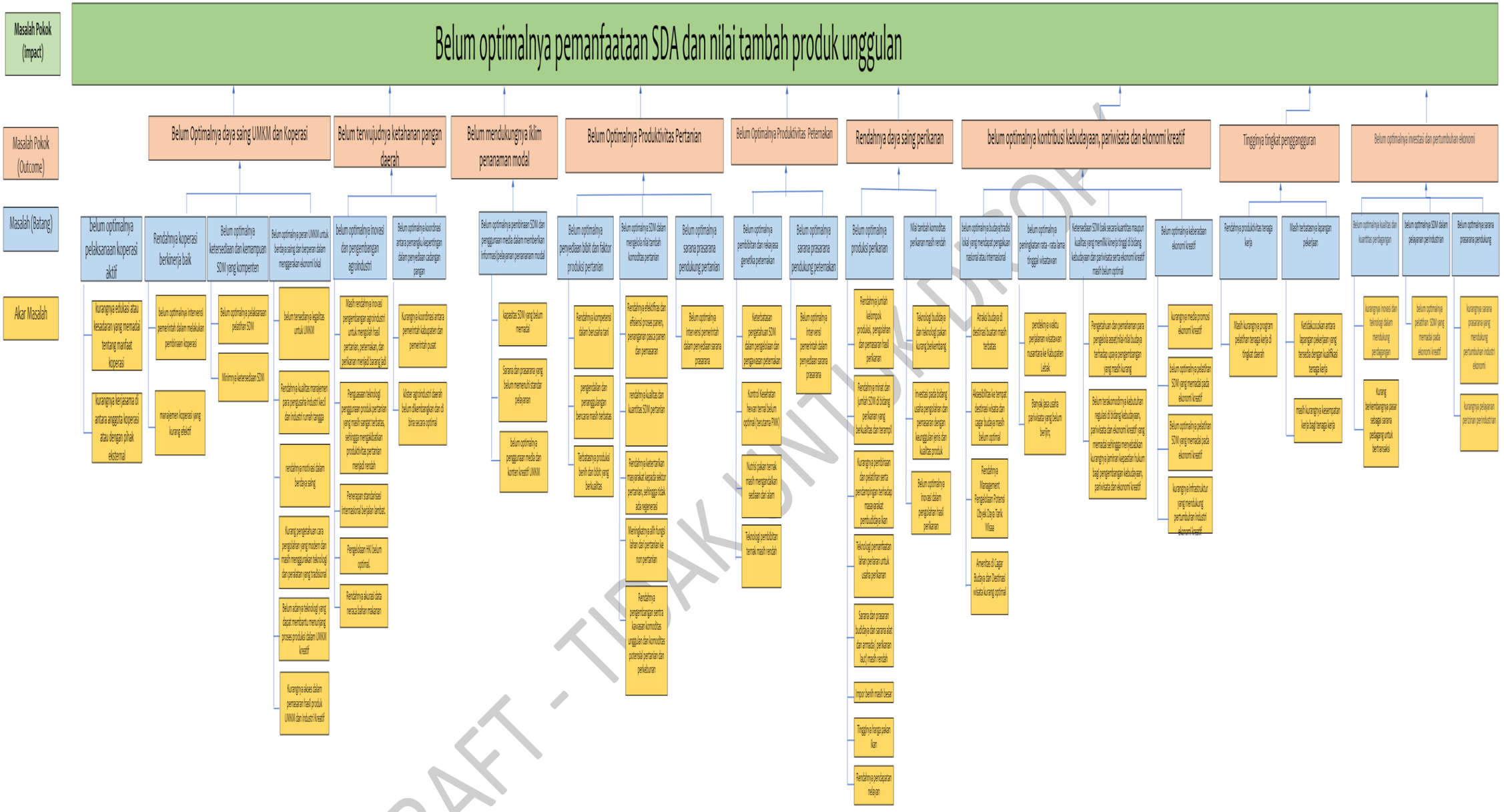

Gambar 4-4 Pohon Masalah Klaster Ekonomi

DRAFT - TIDAK UNTUK DISEBARKAN

4.3 Identifikasi Isu Global, Nasional, dan Regional

4.3.1 Isu Global

Isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing. Isu strategis internasional sebagian besar mengusung perihal degradasi kualitas lingkungan hidup hingga ancaman menipisnya sumber daya tak terbaharui yang merupakan bahan bakar untuk energi. Isu internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan di masa mendatang bagi Kab. Lebak ialah: pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), kondisi perekonomian global yang berpengaruh ke perekonomian nasional dan daerah, mitigasi perubahan iklim global (global warning/climate change), serta Revolusi Industri 4.0 (kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi).

1) Sustainable Development Goals (SDG's)

Pada tanggal 25 September 2015, negara-negara anggota PBB mengangkat rangkaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 dengan menyertakan 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, atau Sustainable Development Goals (SDGs) dalam bahasa Inggris. SDGs disusun berdasarkan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) yang telah diupayakan dari tahun 2000 sampai 2015, dan akan memandu pencapaian tujuan global yakni pembangunan berkelanjutan 2030 nanti.

Konsep SDGs dirumuskan sebagai suatu konsep yang bersifat lintas sektor dan lintas pemangku kebijakan. Tujuan yang ingin dihasilkan dalam pertemuan tersebut adalah memperoleh kesepakatan untuk menjadi tujuan bersama yang universal. Tujuan bersama tersebut merupakan arah untuk memelihara keseinbagan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan: lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Dalam menjaga tiga dimensi tersebut SDGs memiliki 5 pondasi utama yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berupa SGDs. Tujuan global dari SDGs sebagai berikut:

1. Menghapus kemiskinan
2. Mengakhiri kelaparan
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan
4. Pendidikan bermutu
5. Kesetaraan Gender
6. Akses air bersih dan sanitasi
7. Energi bersih dan terjangkau
8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi
9. Infrastruktur, industri dan inovasi
10. Mengurangi ketimpangan
11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan
12. Konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

13. Penanganan perubahan iklim
14. Menjaga ekosistem laut
15. Menjaga Ekosistem darat
16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Gambar 4-5 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Sumber: United Nations, 2015

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dirumuskan sebuah kebutuhan untuk menyelaraskan antara komitmen pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Menengah Nasional. Penyelarasan ini bertujuan untuk menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Perpres ini memberikan arahan agar penyelarasan tersebut diwujudkan juga dalam Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Rencana-rencana tersebut dijadikan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta dijadikan acuan bagi Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang akan menyusun perencanaan , pelaksanaan, dan pemantauan serta evaluasi TPB.

2) Ancaman Krisis Ekonomi Global

Saat ini ada berbagai resiko yang membuat perkeonomian global salah satunya konflik geopolitik saat ini seperti perang di Timur Tengah serta Rusia dengan Ukraina. Yang akan

DRAFT - TIDAK UNTUK DIFOTOKOPY

mengganggu harga-harga komoditas serta biaya logistik. Selain itu risiko konflik China-Taiwa masih dapat mengganggu perekonomian global ke depan.

Saat ini pemulu Amerika Serikat (AS) dapat mempengaruhi tekanan ekonomi global kedepan. Presiden terpilih AS memiliki peran yang penting dalam menentukan kondisi ekonomi global kedepan. Perang dagang yang terjadi antara AS dan China dapat mempengaruhi harga komoditas dan gangguan rantai pasok global.

3) Antisipasi Perubahan Iklim Global (Global Warming/Climate Change)

Perkembangan lingkungan pada era globalisasi pembangunan sekarang ini menunjukkan penurunan. Hal ini disebabkan pembangunan yang mengesampingkan faktor kelestarian lingkungan hidup sehingga menyebabkan kelestarian hidup yang buruk dengan akibat ancaman *global warming*. *Global warming* merupakan efek atau dampak dari rusaknya kelestarian ekosistem alam yang dapat mengakibatkan kekeringan, kelangkaan bahan pangan, hingga banjir dan bahkan mampu menjadi penyebab utama dalam adanya bencana alam.

Perlu adanya antisipasi dari pemerintah dan masyarakat dunia dalam menyikapi *global warming*. Segala bentuk perencanaan pembangunan harus mempunyai strategi dalam menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dilakukan agar kelestarian alam dapat terjaga dan efek *global warming* dapat diminimalisir atau dapat dihindari namun tetapterlaksana pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Kabupaten Lebak merupakan kabupaten yang memiliki wilayah pesisir yang menjadi potensi pariwisata ataupun kegiatan ekonomi, sehingga isu kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim global dapat berpengaruh terhadap pengembangan wilayah pesisir di Kab. Lebak.

4) Revolusi Industri 4.0

Sejak tahun 2000 hingga saat ini terjadi era penerapan teknologi modern, antara lain teknologi fiber (*fiber technology*) dan sistem jaringan terintegrasi (*integrated network*), yang bekerja di setiap aktivitas ekonomi, dari produksi hingga konsumsi. The World Economic Forum (WEF) menyatakan bahwa revolusi industri 4.0 ditandai oleh pembauran (*fusion*) teknologi yang mampu menghapus batas-batas penggerak aktivitas ekonomi, baik dari perspektif fisik, digital, maupun biologi. Pembauran teknologi dianggap mampu mengintegrasikan faktor sumberdaya manusia, instrumen produksi, serta metode operasional, dalam mencapai tujuan.

Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti advanced *robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality, additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri. Adapun pengertian dari istilah-istilah tersebut adalah:

a. *Advanced Robotics*
   Instrumen ini merupakan peralatan yang digunakan secara mandiri, yang mampu berinteraksi secara langsung dengan manusia, serta menyesuaikan perilaku berdasarkan sensor data

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

yang diberikan. Fungsi utamanya adalah untuk memperpendek waktu tunggu dan waktu layanan, sehingga menghasilkan efisiensi.

b. *Artificial Intelligence* (AI)
   AI adalah sistem mesin berteknologi komputer yang mampu mengadopsi kemampuan manusia. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas, sekaligus meminimalisir risiko kesalahan yang bisa dilakukan oleh tenaga kerja manusia.
c. *Internet of Things (IoT)*
   IoT merupakan teknologi yang memungkinan setiap instrumen terkoneksi satu sama lain secara virtual, sehingga mampu mendukung kinerja operasioanal usaha, pengawasan terhadap perfoma manajemen, serta peningkatan nilai guna output.
b. *Virtual and Augmented Reality*
   Virtual Reality merupakan simulasi yang dilakukan oleh komputer dalam membentuk sebuah realitas rekaan. Teknologi ini mampu memanipulasi penglihatan manusia sehingga seolah-olah berada di tempat atau lingkungan yang berbeda dari kenyataan sesungguhnya. Sementara *Augmented Reality* adalah teknologi yang mampu menghasilkan informasi dari kondisi lingkungan sebenarnya, lalu diproses secara digital dan digunakan untuk tujuan tertentu.
c. *Additive Manufacturing*
   Teknologi ini merupakan otomatisasi proses produksi melalui teknologi 3D (*three dimensional*). Hal ini memberi pengaruh positif pada kecepatan pengolahan dan transportasi produk.
d. *Distributed Manufacturing*
   Merupakan konsep penempatan lokasi produksi dan pengintegrasian proses produksi, sehingga bisa berada sedekat mungkin dengan konsumen untuk menjawab kebutuhan riil mereka. Tujuannya adalah untuk mencapai economies of scale, sekaligus mengurangi beban biaya (*cost efficiency*).

Melalui penerapan teknologi modern, sektor industri tidak lagi semata-mata berfokus pada pengembangan usaha dan peningkatan laba, melainkan juga pada pendayagunaan dan optimalisasi setiap aktivitas, mulai dari pengadaan modal, proses produksi, hingga layanan kepada konsumen[1]. The United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) menekankan agar kehadiran industri 4.0 bisa meningkatkan perekonomian negara-negara miskin dan berkembang, sekaligus mendorong terwujudnya agenda-agenda pembangunan seperti yang tertuang dalam the Sustainable Development Goals (SDGs). UNIDO menegaskan beberapa poin penting terkait perkembangan industri 4.0, yakni:

a. Industri 4.0 diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan manusia, lingkungan, dan kesejahteraan bersama
b. Industri 4.0 diharapkan mampu mendorong pengembangan kapasitas manusia , sehingga menjadi semakin terdidik dan terampil
c. akses terhadap teknologi diharapkan terjangkau dengan mudah, sehingga bisa diterapkan di semua negara
d. Kemajuan teknologi diharapkan mampu menghasilkan keterbukaan informasi
e. Kemajuan teknologi diharapkan bisa menggeser paradigma lama, dari persaingan (*competition*) menjadi koneksi (*connection*) dan kerjasama (*collaboration*)

[1] [1](World economic Forum. Impact of the Fourth Industrial Revolution on Supply Chains, October, 2017)

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

f. penerapan teknologi diharapkan mampu menjawab tantangan perubahan iklim dan upaya pelestarian lingkungan.

Sementara itu, upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menjawab tantangan di era revolusi industri 4.0, antara lain:

a. mengidentifikasi area strategis dalam rangka meningkatkan kecepatan, fleksibilitas, produktivitas, dan kualitas output.
b. menganalisa dampak pemanfaatan teknologi dalam jangka panjang, terutama terhadap serapan tenaga kerja dan lingkugan hidup.
c. mempersiapkan infrastruktur, serta program pendidikan dan keterampilan, sehingga mampu meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi

Kementerian Perindustrian Indonesia telah membuat roadmap sebagai tanggapan terjadinya revolusi industri 4.0 dengan menyusun “Making Indonesia 4.0”. Terdapat 10 prioritas nasional yang ditetapkan, yaitu :

1. Perbaikan alur aliran material, dengan memperkuat produksi material sektor hulu
2. Mendesain ulang zona industry, dengan membangun peta jalan zona industri nasional dan mengatasi permasalahan yang dihadapi di beberapa zona industri
3. Akomodasi standar sustainability, melalui pemanfaatan kesempatan daya saing melalui tren *sustainability* global
4. Pemberdayaan UMKM, dengan memberdayakan 3,7 juta UMKM (termasuk usaha mikro) melalui teknologi
5. Membangun infrastruktur digital nasional, melalui pembangunan jaringan dan platform digital
6. Menarik investasi asing, dengan menargetkan perusahaan manufaktur terkemuka global melalui penawaran yang menarik dan insentif untuk percepatan transfer teknologi
7. Peningkatan kualitas SDM, dengan perancangan ulang kurikulum pendidikan menyesuaikan era Industri 4.0 dan program *talent mobility* untuk profesional
8. Pembentukan ekosistem inovasi, dengan pengembangan sentra *Research, Development, and Design* oleh pemerintah, swasta, publik, maupun universitas
9. Menerapkan insentif investasi teknologi, dengan memperkenalkan *tax exemption*/subsidi untuk adopsi teknologi dan dukungan pendanaan
10. Harmonisasi aturan dan kebijakan, dengan melakukan harmonisasi kebijakan dan peraturan lintas kementerian

4.3.2 Isu/Kebijakan Nasional

4.3.2.1 Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional

Visi pembangunan jangka panjang Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah “terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia dan masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

DRAFT – TIDAK UNTUK DICOPY

diselenggarakan dengan demokrasi (yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila) sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum."

Untuk mewujudkan visi tersebut, pembangunan Indonesia dijabarkan dalam 9 aspek pembangunan :

- Pembangunan Politik, dengan visi "Terwujudnya demokrasi, melalui konsolidasi demokrasi yang bertahap pada berbagai aspek kehidupan politik, sehingga demokrasi konstitusional dapat diterima sebagai konsensus dan pedoman politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."
- Pembangunan Pertahanan dan Keamanan, dengan visi "Terwujudnya kemampuan pertahanan dan keamanan yang mampu menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari segala ancaman serta menciptakan kondisi aman, damai, tertib dan tentram masyarakat."
- Pembangunan Hukum dan Penyelanggaraan Negara, dengan visi hukum "Tegaknya supremasi hukum dengan didukung oleh sistem hukum nasional yang mantap dan mencerminkan kebenaran dan keadilan, serta memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakat luas." Dan visi Penyelenggaraan Negara, dengan visi "Terwujudnya Aparatur Negara yang amanah dan mampu mendukung pembangunan nasional serta menjawab kebutuhan dinamika bangsa sesuai Pancasila dan UUD '45."
- Pembangunan sosial budaya, dengan visi "terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, dan bermoralitas tinggi melalui pembangunan kebudayaan nasional yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas- inovatif, etos kerja tinggi, berbudi luhur, toleran, bergotong-royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi kepada ilmu pengetahuan dan teknologi"
- Pembangunan Sumber Daya Manusia, dengan visi "Terwujudnya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif dan berakhlak mulia"
- Pembangunan Ekonomi, dengan visi "Terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip- prinsip ekonomi yang menjunjung persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa."
- Pembangunan Daerah, dengan visi "terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat (*quality of life*) di seluruh wilayah, berkurangnya kesenjangan antar wilayah, dan peningkatan keserasian pemanfaatan ruang dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia."
- Pembangunan Infrastruktur, dengan visi "Terwujudnya infrastruktur yang memberi manfaat bagi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung pembangunan di berbagai bidang, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan hubungan antar bangsa.

DRAFT-TIDAK UNTUK DICOPY

4.3.2.2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

RPJPN tahap pembangunan ke-4 dijabarkan lebih lanjut pada RPJMN 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024. Berdasarkan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Adapun empat pilar dari RPJMN 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005- 2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir yaitu :

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap.
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat.
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh.
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Tema pembangunan RPJMN 2020-2024 yaitu "*Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan"* yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan, meliputi :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas

Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui:

- Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan.
- Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah.
- Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang.
- Peningkatan daya saing wilayah yang inklusif.
- Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah.
- Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter melalui:

- Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan.
- Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta.
- Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas.
- Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda.
- Pengentasan kemiskinan.
- Peningkatan produktivitas dan daya saing.

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada :

- Revolusi mental dalam sistem pendidikan.
- Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan.
- Revolusi mental dalam sistem sosial (diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas).

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar

Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui :

- Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah.
- Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan.
- Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK.
- Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien.
- Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim

Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :

- Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.
- Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim.
- Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui :

- Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas.
- Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil.
- Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber.
- Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
- Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Adapun beberapa isu strategis nasional pada RPJMN Tahun 2020- 2024, dapat diidentifikasi pada 5 (lima) arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi. Kelima arahan utama inilah yang dielaborasi menjadi 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024, yaitu sebagai berikut:

1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2) dan berkeadilan.
3) Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
4) pemerataan.
5) Peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
6) Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah.
7) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
8) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi
9) dan pelayanan dasar.
10) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan
11) perubahan iklim
12) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, serta
13) Transformasi pelayanan publik.

4.3.2.3 Isu strategis berdasarkan Rancangan Akhir RPJPN

Isu nasional:

a. Pertumbuhan pendapatan per kapita yang meningkat pesat karena perekonomian yang stabil dan mampu menjawab tantangan global, termasuk mampu bertahan dan stabil selama masa COVID-19, termasuk nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi. Struktur ekonomi masih bergantung pada sektor bernilai tambah rendah dan memiliki produktivas rendah (pertanian dan jasa).
b. Turunnya ketimpangan dan kemiskinan dengan menurunnya tingkat pengangguran dan meningkatnya jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, menurunnya kesenjangan antar wilayah, meningkatnya konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur.

4.3.3 Isu/Kebijakan Regional

4.3.3.1 RPJPD Provinsi Banten 2005-2025

Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Banten 2005-2025, isu strategis Provinsi Banten yakni :

- Isu Ketahanan Pangan, Kemiskinan, Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial.
- Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berorientasi Pasar Global.
- Pengembangan Pelayanan Kepelabuhanan Skala Nasional dan Internasional serta Peningkatan Prasarana dan Sarana Wilayah.
- Penataan Ruang, Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup.
- Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Dalam merespon isu tersebut, dirumuskan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Banten dalam RPJPD Provinsi Banten 2005-2025, yaitu “Banten mandiri, maju, sejahtera berlandaskan iman dan taqwa” dengan misi, yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas dengan arah kebijakan :
    a. Terpelihara dan terimplementasinya norma agama dan tata nilai sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat;
    b. Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat;
    c. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
    d. Meningkatnya fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial dan menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial;
    e. Meningkatnya kesempatan kerja, menurunnya tingkat pengangguran, meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja, serta meningkatnya perlindungan tenaga kerja;
    f. Meningkatnya kesejahteraan hidup dan terbangunnya kemandirian transmigran;
    g. Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa;
    h. Terkendalinya pertumbuhan penduduk;
    i. Meningkatnya kualitas dan peran kepemudaan dalam pembangunan dan meningkatnya pemasyarakatan dan prestasi olah raga.
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing, dengan arah kebijakan:
    a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat, meningkatnya investasi daerah;
    b. Meningkatnya produktivitas, kualitas dan daya saing produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan;
    c. Meningkatnya produktivitas, kualitas dan daya saing produk industri;
    d. Meningkatnya produktivitas kualitas dan daya saing produk perdagangan;
    e. Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan jasa pariwisata;
    f. Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan jasa keuangan;
    g. Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat;
    h. Meningkatnya pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional;
    i. Meningkatnyapelayanan sistem transportasi;
    j. Meningkatnya pengelolaan sumber daya air;
    k. Meningkatnya pelayanan drainase dan menurunnya jumlah lokasi rawan banjir;
    l. Meningkatnya pelayanan air bersih;
    m. Meningkatnya pelayanan persampahan dan air limbah;
    n. Meningkatknya pelayanan energi dan listrik;
    o. Meningkatknya pelayanan telekomunikasi dan informatika;
    p. Meningkatnya ketersediaan rumah yang layak huni dan terjangkau;
    q. Berkurangnya kawasan kumuh.
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari, dengan arah kebijakan :
    a. Meningkatnya kualitas penataan ruang;
    b. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam;

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

c. Terjaganya daya dukung lingkungan hidup dan menurunnya tingkat pencemaran;
d. Berkurangnya kerugian moril dan materil akibat bencana alam.

4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa, dengan arah kebijakan :
   a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dan kelembagaan IPTEK;
   b. Meningkatnya kualitas data, perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
   c. Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan publik;
   d. Meningkatnya pendapatan daerah, meningkatnya tertib administasi pengelolaan keuangan daerah dan meningkatnya efektivitas alokasi belanja daerah;
   e. Meningkatnya kontribusi pembiayaan pembangunan daerah dari masyarakat dan swasta;
   f. Meningkatnya pelayanan publik;
   g. Meningkatnya kesadaran, kepatuhan dan supremasi hukum;
   h. Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi masyarakat;
   i. Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

4.3.3.2 RPJMD Provinsi Banten 2017-2022

Isu strategis pembangunan Provinsi Banten yang tercantum pada RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 menunjukan bahwa terdapat empat isu strategis Provinsi Banten yang meliputi :

1. Isu strategis kesenjangan wilayah : ketimpangan aksesibilitas pendidikan, ketimpangan aksesibilitas kesehatan, ketimpangan daya beli masyarakat, kurangnya infrastruktur ekonomi masyarakat, ketimpangan kemandirian fiskal antar daerah dan wilayah serta kurangnya konektivitas infrastruktur kewilayahan dan antar wilayah.
2. Isu strategis daya saing daerah (Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia) : ketimpangan pemanfaatan SDA akibat lemahnya kualitas SDM, ketimpangan investasi antar wilayah, serta kurangnya daya dukung infrastruktur dalam meningkatkan investasi.
3. Isu strategis kemiskinan dan pengangguran : tingginya desa tertinggal di Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Serang.
4. Isu strategis tata kelola pemerintahan : tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta perbaikan capaian kinerja, kualitas birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Dalam rangka menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan, maka dirumuskan visi pembangunan Provinsi Banten 2017-2022 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten No. 7 Tahun 2017 yaitu *"Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlaqul Karimah."* Adapun penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

- Maju berarti terdapat perubahan dan kondisi semula ke arah yang lebih baik dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.
- Mandiri ditunjukan pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan atau subsidi pemerintah pusat.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

- Berdaya Saing ditunjukan pada kemampuan daerah mengelola dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta menghilangkan berbagai hambatan sehingga berhasil menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan daerah lainnya.
- Sejahtera ditunjukan pada kemampuan daerah dalam mengelola aspek manusia yang diukur dengan pencapian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- Akhlakul Karimah yaitu harapan daerah dalam menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai agama seperti kerukunan umat beragama pada masyarakat serta perilaku aparatur pemerintahan daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, dan penurunan indeks persepsi korupsi di Provinsi Banten.

Terdapat lima misi pembangunan Provinsi Banten tahun 2017-2022 dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Provinsi Banten. Adapun misi dan tujuan pembangunan Provinsi Banten 2017-2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 4-31 Misi dan Tujuan Pembangunan Provinsi Banten 2017-2022

Misi	Tujuan
Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan daerah yang berakhlakul karimah dengan efektif, efisien, transparan, akuntabel dan sumber daya aparatur berintegritas, berkompetensi serta melayani masyarakat.
Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur	Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas dalam mendukung kelancaran arus barang, orang dan jasa yang berorientasi pada peningkatan pembangunan wilayah dan perekonomian daerah.
Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas	Terwujudnya akses dan kualitas pendidikan menuju kualitas sumber daya manusia yang berakhlakul karimah dan berdaya saing.
Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas	Terwujudnya peningkatan kualitas akses dan pemerataan pelayanan kesehatan.
Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi	Meningkatnya perekonomian Banten melalui kualitas pengelolaan keuangan, kecukupan pangan dan energi, pengembangan sumber daya alam yang memberikan solusi terhadap pengangguran dan kemiskinan.

Sumber: RPJMD Provinsi Banten 2017-2022

Fokus dari kelima misi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance),
dengan fokus pada:
   a. Penerapan E-Planning, E-monev, dan E-Bugdeting;
   b. Reformasi Birokrasi;
   c. Penerapan Manajemen Kinerja (Peningkatan Predikat LAKIP dengan predikat BB);
   d. Reformasi Tata Kelola Keuangan (predikat WTP dalam pengelolaan keuangan daerah);

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

e. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik;
f. Perbaikan Angka Indeks Persepsi Korupsi;
g. Perbaikan Hubungan Kerja Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota melalui keselaran pembangunan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Pemerintah Kab/Kota.

2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur, yang diimplementasikan melalui:
a. Pembangunan ruas jalan Provinsi yang rusak;
b. Pembangunan Jalan Kolektor Baru untuk membuka jalur isolasi dan membuka interkoneksi antar wilayah;
c. Pembangunan dan perbaikan jembatan pada seluruh jalan Provinsi;
d. Pembangunan Jembatan Penyeberangan untuk mempermudah akses penduduk terhadap pelayanan publik dan kegiatan ekonomi;
e. Normalisasi Sungai dari seluruh sungai yang ada di Banten;
f. Normalisasi Situ untuk pengembalian fungsi Situ;
g. Pembangunan Terminal Tipe B dan Pengembangan Sistem Transportasi Massal Skala Provinsi;
h. Pembangunan Infrastruktur yang menunjang Sistem Transportasi Laut dan Aktivitas Ekonomi Sektor Maritim;
i. Revitalisasi Kawasan Banten Lama dalam rangka PengembanganSektor Pariwisata Pelestarian Cagar Budaya serta kearifan lokal;
j. Penataan Kawasan Kumuh Kampung Nelayan, Perdesaan/Perkotaan;
k. Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah Skala Provinsi untuk mempertahankan daya dukung lingkungan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
l. Evaluasi Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Tata Ruang Wilayah Provinsi;
m. Pembangunan dan Revitalisasi Infrastruktur Pertanian (Bendungan dan Irigasi).

3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas, melalui:
a. Pembangunan Ruang Kelas Baru dan Unit Sekolah Baru (USB) untukjenjang SMA SMK untuk meningkatkan APK;
b. Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pendidikan Strata 1 SMA, SMK;
c. Peningkatan Kompetensi Guru melalui Pendidikan Strata 2 Guru SMA, SMK;
d. Peningkatan Kesejahteraan Guru melalui pemberian insentif bagi Guru SMA dan SMK;
e. Peningkatan Prestasi Siswa Berbakat bagi siswa SMA dan Sekolah Berkebutuhan Khusus;
f. Peningkatan Fungsi Sekolah dalam Menanamkan nilai-nilai Agama serta membentuk karakter yang Berakhlaqul Karimah.

4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas, yang dilaksanakan melalui sejumlah program antara lain:
a. Pengembangan Rumah Sakit Umum Provinsi menjadi Rumah Sakit Rujukan Regional;
b. Penyediaan Dokter pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Khususnya untuk wilayah Terpencil dengan Pemberian Insentif bagi Dokter Umum/Gigi dan Petugas Kesehatan Masyarakat;
c. Peningkatan Kapasitas Regulasi di bidang Pelayanan Kesehatan;
d. Peningkatan Penyediaan Air Bersih kepada masyarakat melalui Pembangunan Sumber Air Baku di 8 Kabupaten/Kota.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, yang diimplementasi melalui:

a. Penciptaan Iklim Investasi melalui Perbaikan Perizinan, Infrastruktur, Regulasi Tenaga Kerja, Fasilitasi Sumber Energi dan Menciptakan Keamanan dan Ketertiban untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah;
b. Pengendalian Inflasi Daerah;
c. Pemberdayaan Ekonomi bagi Masyarakat Miskin Khususnya Petani dan Nelayan;
d. Pengembangan Kawasan Ekonomi yang Berbasis Ekonomi Kreatif dan Pariwisata;
e. Peningkatan Tata Kelola APBD untuk Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah dalamrangka Mendukung Pembangunan Daerah serta Fungsi APBD dalam Hal Distribusi dan Alokasi.

4.4 Identifikasi Isu-Isu Pembangunan Kabupaten Lebak

4.4.1 Isu dalam Dokumen Kebijakanan Pembangunan dan Penataan Ruang Kab. Lebak.

Dalam pembanguanan di Kab. Lebak terdapat beberapa isu lain yang perlu dipertimbangkan dari berbagai rencana yang telah disusun.

4.4.1.1 Isu dalam RTRW Kab. Lebak 2023 – 2043

Dalam RTRW Kab. Lebak 2023-2043 terdapat beberapa isu spasial yang menjadi tantangan kedepan. Visi penataan ruang Kabupaten Lebak dalam RTRW Kabupaten Lebak 2023 -2043 adalah: mewujudkan ruang wilayah Lebak yang aman, nyaman, produkstif, berkelanjutan, berdaya saing tinggi berbasis parawisata dan potensi local. Selanjutnya terdapat 8 isu pengembangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak tahun 2023-2043.

a. Pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI)

   Di 13 kecamatan, dengan area terbesar di Kecamatan Cileles dan Cimarga (di bagian utara kabupaten lebak)

b. Pengembangan Kota Baru Maja

   Di Kecamatan Maja dan Curugbitung (> 60% dihuni oleh penduduk Jakarta)

c. Pengembangan sektor pariwisata

   Penetapan 26 ODTW unggulan dan pengembangan Geopark Bayah Dome (di bagian selatan kabupaten Lebak)

d. Pengembangan sektor pertanian dan perikanan, pengembangan sentra industri mikro, kecil dan menengah berbasis sumber daya lokal

   Tersebar di seluruh kecamatan, khusus perikanan di selatan Kabupaten Lebak)

e. Pemindahan pasar dari pasar rangkasbitung

   Pemidangan pasar Rangkasbitung ke daerah Kandang Sapi

f. Rencana pembangunan ruas jalan tol Serang-Panimbang dengan tiga titik simpang susun di Kabupaten Lebak

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

g. Pengembangan TPA Dengung sebagai TPA regional di Kecamatan Maja

h. Mobilisasi menuju dan/atau dari kawasan industri pertambangan di Selatan Kabupaten Lebak

4.4.1.2 RPJPD Kabupaten Lebak Tahun 2005-2025

RPJPD Kabupaten Lebak Tahun 2005 – 2025 mengusung visi " Menjadi Daerah Maju dan Religius Berbasis Pedesaan". Visi Pembangunan Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Lebak tersebut diterjemahkan dalam lima misi operasional guna mewujudkan visi tersebut, yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Kabupaten Lebak yang Beriman, Bertakwa, dan Berbudaya; yang ditempuh denganmemantapkan kelembagaan pendidikan keagamaan, memperkuat peran serta tokoh masyarakat dan para alim ulama dalam penanaman nilai–nilai kearifan lokal dan nilai–nilai religius, penguatan hubungan yang harmonis antar umat beragama dan intern umat beragama serta pelestarian budaya daerah.
2. Mewujudkan Daya Saing Investasi Berbasis Sumber Daya, yang diwujudkan dengan cara memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, industri pengolahan, dan pelayanan masyarakat; mengedepankan pembangunan SDM berkualitas dan berdaya saing; meningkatkan penguasaan, pemanfaatan dan penciptaan iptek; pembangunan infrastruktur yang maju; reformasi birokrasi, serta mewujudkan Lebak sebagai daerah yang maju dalam berinvestasi.
3. Memajukan Tingkat Kemakmuran dan Produktivitas Masyarakat Secara Merata, yang ditempuh dengan cara meningkatkan pembangunan daerah,mengurangi kesenjangan sosial ekonomi secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat dan kecamatan/desa tertinggal, menanggulanggi kemiskinan secara berkesinambungan, menyediakan akses bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi.
4. Mewujudkan Lebak Sebagai Daerah Konservasi Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Alam Dengan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup, dengan cara memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan,keberlanjutan keberadaan dan kegunaan SDA dan Lingkungan Hidup, dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial, ekonomi dan upaya konservasi; pemanfaatan ekonomi SDA yang berkesinambungan; pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup untuk mendukung kualitas kehidupan; serta keberadaan Taman Nasional Gunung Halimun sebagai modal dasar pembangunan dalam pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati.
5. Mengembangkan potensi sumberdaya daerah untuk mengurangi disparitas, yang dilakukan melalui upaya pengembangan daerah sesuai dinamika ekonomi, sosial, politik dan orbitasi dengan memperhatikan potensi sumberdaya yang ada dalam rangka

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

memperpendek rentang kendali dan mendekatkan pelayanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan titik berat pelaksanaan pembangunan terkonsentrasi dan bermula dari wilayah pedesaan.

4.4.1.3 Isu Rancangan Akhir RPJPD Kab. Lebak 2025- 2045

Dalam RPJPD terdapat beberapa isu utama yang diangkat yaitu:

a. Kualitas sumber daya manusia masih rendah
b. Pendidikan berkualitas yang belum merata
c. Derajat kesehatan masih rendah
d. Keaktifan kehidupan sosial belum optimal
e. Pembangunan ekonomi belum optimal
f. Belum meratanya pertumbuhan ekonomi
g. Pengembangan sektor unggulan dan potensial belum optimal

Berdasarkan permasalahan tersebut dan untuk mencapai Visu Indonesia dalam RPJPN 2025-2045 berupa “Terwujudnya Indonesia sebagai Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan “ maka visi RPJPD dalam Rancangan Akhir RPJPD Kab. Lebal 2025-2045 adalah:

“Terwujudnya Provinsi Banten yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan berlandaskan Iman dan Taqwa serta untuk mewujudkan Lebak Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal”

Untuk mecapai visi RPJPD Kab. Lebak 2025-245 terdapat 5 sasaran utama yaitu:

1) Peningkatan Pendapatan per Kapita
2) Penurunan Kemiskin an dan Ketimpan gan berkurang
3) Kepemim pinan Daerah yang Transfor matif sebagai sarana penggera k pertumb uhan ekonomi sektor pariwisat a dan ekonomi kreatif
4) Peningkatan Daya Saing dan Kualitas Sumber Daya Manusia
5) Peningkatan Kualitas Lingkung an Hidup

4.4.1.4 RPJMD Kabupaten Lebak

Visi RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024 adalah “Lebak sebagai Destinasi Wisata Unggulan Nasional Berbasis Potensi Lokal”. Upaya mewujudkan visi di atas akan ditempuh melalui 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pembangunan manusia;
2. Mengoptimalkan pemulihan ekonomi daerah;
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah;
4. Memelihara kualitas lingkungan hidup; dan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam RPJMD Kab. Lebak 2019-2024 terdapat permasalahan dan 13 isu strategis pembangunan daerah dengan formulasi visi yang akan diwujudkan melalui 5 misi dengan 5 tujuan dan 6 indikator tujuan, dan 18 sasaran pembangunan daerah dengan 25 indikator sasaran,

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

4.4.2 Identifikasi Isu Strategis Hasil Penstrukturan Permasalahan Pembangunan

4.4.2.1 Isu Strategis Klaster

Berdasarkan hasil penstrukturan Permasalahan di Kabupaten Lebak yang telah dilakukan. Maka Isu strategis yang didapatkan terdiri atas 4 hal yaitu:

1) Belum optimalnya pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas SDM
   Isu strategis terdiri dari beberapa hal yaitu:

   a. Rendahnya indeks pendidikan
   b. Rendahnya indeks kesehatan
   c. Belum optimalnya strategi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana
   d. Belum optimalnya peran serta prestasi pemuda di bidang olahraga dan pengembangan ekonomi
   e. Belum optimalnya program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan
   f. Belum optimalnya penguatan komunitas adat

2) Belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan konektivitas wilayah dalam memenuhi kebutuhan dasar serta kurangnya kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko bencana
   a. Belum optimalnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, serta peningkatan aksesibilitas menuju pusat-pusat kegiatan.
   b. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan jaringan informasi/ komunikasi
   c. Tingginya kerentanan dalam menghadapi risiko bencana gempa bumi, banjir dan tanah longsor
   d. Belum optimalnya penyediaan sarana prasarana perumahan dan pemukiman

3) Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah yang menjangkau seluruh wilayah (hingga tingkat desa) Kabupaten Lebak
   a. Belum optimalnya pelayanan penjagaan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
   b. Belum Optimalnya pelayanan kependudukan, pencatatan sipil, administrasi pemerintahan , dan pelayanan publik berbasis elektronik.
   c. Belum optimalnya sistem tata kelola pemerintahan daerah.
   d. Belum optimalnya kapasitas aparatur negara dalam memberikan pelayanan
   Rendahnya pengelolaan dan pengembangan pada tingkat Desa.

4) Belum optimalnya pemanfaataan SDA dan nilai tambah produk unggulan
   a. Belum optimalnya daya saing UMKM dan koperasi
   b. Belum terwujudnya ketahanan pangan daerah
   c. Belum mendukungnya iklim penanaman modal
   d. Belum optimalnya produktivitas pertanian
   e. Belum optimalnya produktivitas peternakan
   f. Rendahnya daya saing perikanan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

g. Belum optimalnya kontribusi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif
h. Tingginya tingkat pengganggguran
i. Belum optimalnya hilirisasi riset dan komersialiasi produk unggulan
j. Belum adanya tata Kelola riset dan inovasi yang memadai
k. Kurangnya kemitraan dengan sektor industri

4.4.2.2 Isu Strategis Daerah

Berdasarkan hasil perumusan pada setiap klaster diatan kemudian dapat didapatkan isu strategis daerah utama di Kab. Lebak. Isu strategis daerah tersebut adalah :

"Rendahnya kesejahteraan masyarakat dikarenakan belum optimalnya layanan infrastruktur terintegrasi yang disertai dengan belum efektifnya tata kelola pemerintahan."

Gambar 4-6 Isu Strategis Daerah

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

BAB 5
REKOMENDASI

5.1 Tujuan dan Sasaran

5.1.1 Arahan dalam Visi RPJPD

Adapun visi Kabupaten Lebak Tahun 2025 – 2045 adalah: LEBAK MAJU, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN BERBASIS POTENSI LOKAL.

Beberapa kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan **Kabupaten Lebak yang Maju, Sejahtera, Berkelanjutan**. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. **Maju**. Artinya bahwa Pelaksanaan pembangunan daerah selalu didasarkan pada keinginan bersama untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, baik secara fisik maupun non-fisik, dengan dukungan sumber daya manusia yang unggul dan memiliki daya saing tinggi, beradab, profesional, serta memiliki pandangan ke depan yang luas. Pembangunan juga diarahkan untuk membentuk daerah yang mandiri dengan memanfaatkan seluruh potensinya, namun tetap menekankan pentingnya kolaborasi antara para pemangku kepentingan. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tercapainya kondisi maju ini adalah daya saing perekonomian yang kompetitif berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan manusia berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan, dan pelayanan yang merata sehingga mengurangi kesenjangan antar wilayah, termasuk pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah dan sumber keuangan lainnya untuk kepentingan pembangunan; serta meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung oleh situasi daerah yang kondusif.
2. **Sejahtera**. Konsep kesejahteraan mencerminkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, di mana kebutuhan ekonomi (materiil) dan sosial (spiritual) masyarakat terpenuhi. Dengan kata lain, kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara menyeluruh, baik secara fisik maupun mental, secara adil dan merata. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tercapainya kondisi sejahtera ini antara lain pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, yang meningkatkan pendapatan per kapita ke tingkat yang tinggi, penurunan tingkat pengangguran, dan pengurangan jumlah penduduk miskin; terbentuknya struktur ekonomi yang kuat berdasarkan keunggulan kompetitif; peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan terpenuhinya hak sosial masyarakat termasuk akses terhadap pelayanan dasar, yang pada gilirannya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, keluarga kecil berkualitas, pemuda dan olahraga, serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan; tersedianya infrastruktur yang memadai; dan meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab dalam mendukung pembangunan daerah.

3. **Berkelanjutan**. Konsep keberlanjutan menggambarkan kondisi kelestarian dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Visi ini menegaskan komitmen Kabupaten Lebak untuk menerapkan prinsip pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang selaras dengan pembangunan sosial, keberlanjutan sumber daya alam, kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tercapainya kondisi keberlanjutan ini mencakup kualitas hidup yang baik, kesejahteraan yang merata, kesehatan dan pendidikan yang unggul, serta lingkungan yang bersih dan lestari, lingkungan pemukiman yang layak dan nyaman, bebas dari polusi udara, air, dan sampah, serta terjaganya kondisi hutan, sungai, dan danau beserta ekosistemnya.

   Kalimat “berbasis potensi lokal” mengandung makna bahwa pembangunan di berbagai sektor seperti pertanian, pariwisata, peternakan, kehutanan, perkebunan, industri, dan lainnya yang merupakan kekuatan Kabupaten Lebak adalah sarana untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengintegrasikan sektor pertanian, yang masih menjadi sumber mata pencaharian utama dan basis ekonomi daerah, dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga keduanya dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Tantangan serupa juga muncul dalam upaya menghubungkan sektor pertanian dengan industri, khususnya industri pengolahan yang dapat mengolah hasil pertanian menjadi produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi, sehingga dapat berkontribusi lebih besar terhadap produktivitas ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Integrasi antara kedua sektor ini diyakini dapat menjadi solusi dalam mewujudkan Lebak yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan berbasis potensi lokal.

5.1.2 Arahan dalam Misi RPJPD

Misi merupakan hal yang penting untuk dirumuskan untuk membantu menggambarkan visi secara lebih jelas yang ingin dicapai dan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai visi. Perumusan misi pembangunan Kabupaten Lebak mengacu pada permasalahan pokok yang dirumuskan pada bab permasalahan sebelumnya dan evaluasi (rekomendasi) dari RPJPD Kabupaten Lebak, serta yang tidak kalah pentingnya mempertimbangkan ketercapain visi Provinsi Banten dan pewujudan Indonesia Emas 2045. Misi dalam RPJPD harus mampu menaungi berbagai tema pembangunan dalam 4 tahap selama 20 tahun ke depan. Perumusan misi merupakan suatu upaya menyusun sistematika berupa pola perjalanan pemerintahan daerah dalam rangka mengembangkan program-program prioritas untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan pelayanan masyarakat lebih efektif, efisien dan terukur. Dalam menyusun misi pembangunan jangka panjang daerah, harus mengacu pada permasalahan pokok. Pada tahap lima tahun pertama, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Lebak difokuskan pada percepatan peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang.

DRAFT – TIDAK UNTUK DICOPY

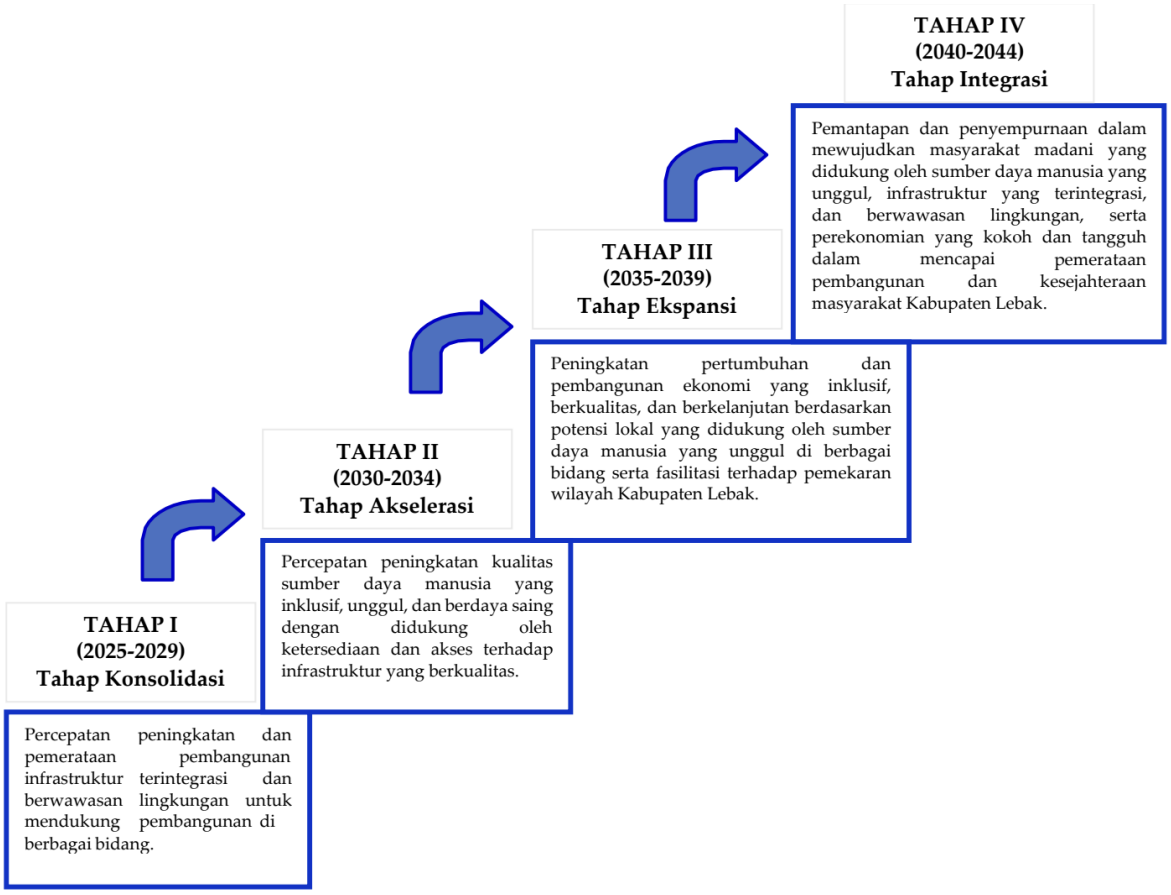

Gambar 5-1 Tahapan dan Tema RPJPD Kabupaten Lebak Tahun 2025 - 2045.

5.1.3 Tujuan

Tujuan pembangunan daerah pada rancangan teknokratik RPJMD 2024 – 2029 adalah **Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur terintegrasi yang didukung dengan tata kelola pemerintahan yang efektif dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Lebak.**

RPJMD 2024 – 2029 dibagi menjadi 4 klaster dengan tujuan setiap klaster dijabarkan sebagai berikut :

1. **Klaster Sosial**
   Optimalisasi pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas SDM.
2. **Klaster Ekonomi**
   Optimalisasi pemanfaataan SDA dan nilai tambah produk unggulan.
3. **Klaster Infrastruktur**
   Optimalisasi pengembangan infrastruktur dan konektivitas wilayah dalam memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko bencana.
4. **Klaster Pemerintah**
   Optimalisasi sistem tata kelola pemerintah dalam memberikan pelayanan yang menjangkau seluruh wilayah di Kab. Lebak.

DRAFT - TIDAK UNTUK DIPERJUALBELIKAN

5.1.4 Sasaran

Untuk mencapai tujuan di atas maka pada setiap kluster terdapat sasaran yang perlu dicapai.

1. Sasaran Klaster Sosial
   - Meningkatnya Indeks Pendidikan
   - Meningkatnya Indeks Kesehatan
   - Optimalnya strategi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana
   - Meningkatnya peran serta prestasi pemuda di bidang olahraga dan pengembangan ekonomi
   - Optimalnya program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan
   - Kuat dan berdayanya komunitas adat

2. Sasaran Klaster Ekonomi
   - Meningkatnya daya saing UMKM dan koperasi
   - Terwujudnya ketahanan pangan daerah
   - Terwujudnya iklim penanaman modal
   - Meningkatnya produktivitas pertanian
   - Meningkatnya produktivitas peternakan
   - Meningkatnya daya saing perikanan
   - Meningkatnya kontribusi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif
   - Berkurangnya tingkat pengggangguran
   - Meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi

2. Sasaran Klaster Infrastruktur
   - Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, serta meningkatnya aksesibilitas menuju pusat-pusat kegiatan
   - Meningkatnya pemanfaatan dan pengembangan jaringan informasi/komunikasi
   - Terwujudnya mitigasi dalam menghadapi risiko bencana gempa bumi, banjir , longsor dan perubahan iklim
   - Meningkatnya penyediaan sarana prasarana perumahan dan pemukiman serta kualitas lingkungan

3. Sasaran Klaster Pemerintah
   - Meningkatnya pelayanan penjagaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
   - Optimalisasi pelayanan sistem kependudukan , pencatatan sipil dan admintrasi pemerintahan berbasis elektronik di seluruh wilayah
   - Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan daerah
   - Meningkatnya kapasitas aparatur negara dalam memberikan pelayanan
   - Meningkatnya kapasitas fiskal daerah
   - Meningkatnya pengelolaan dan pengembangan desa

5.1.5 Arah Kebijakan RPJPD Tahap 1

Seperti yang ditampilkan pada Gambar 5.1, dalam arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lebak 2025-2045 ditetapkan empat tahap pembangunan yang mencerminkan urgensi permasalahan dan isu

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

strategis yang akan diselesaikan dalam setiap periode lima tahun. Tahap pertama sejalan dengan RPJMD 2025-2029, di mana fokus kebijakan pembangunan Kabupaten Lebak diarahkan pada percepatan peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan untuk mendukung berbagai bidang pembangunan. Tahap ini disebut sebagai Tahap Konsolidasi karena difokuskan pada penguatan fondasi pembangunan, yaitu pembangunan infrastruktur daerah yang mendukung perkembangan di berbagai sektor lainnya. Pada tahap ini, struktur perekonomian yang didukung oleh sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, perindustrian, dan perdagangan diharapkan mulai tumbuh karena didorong oleh ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung.

Pelestarian lingkungan mulai dijalankan melalui penetapan regulasi untuk mengurangi dampak lingkungan. Hal ini juga didukung oleh sistem pencegahan dan penanggulangan bencana yang terintegrasi, sehingga diharapkan risiko bencana mulai berkurang. Dalam aspek sumber daya manusia, terjadi peningkatan akses pendidikan formal dan nonformal bagi masyarakat, terutama di kawasan perdesaan, sehingga kesadaran masyarakat untuk menempuh pendidikan semakin tinggi. Peningkatan kualitas tenaga kerja ditandai dengan lulusan minimal pendidikan menengah ke atas. Pembangunan manusia juga didukung oleh peningkatan akses dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Pembangunan perdesaan difokuskan pada penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, terutama akses ke pelayanan publik. Dalam hal transportasi dan perhubungan, pembangunan jalan dan jembatan mulai terpenuhi untuk mempermudah konektivitas antarwilayah. Dalam pengelolaan sampah, mulai dibangunnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan air limbah mulai dibangun. Pada tahap ini juga dilakukan peningkatan penyediaan infrastruktur yang ramah bagi disabilitas dan lansia. Dengan demikian, pada tahap pertama ini diharapkan kebutuhan pangan pokok mulai terpenuhi, akses terhadap layanan dasar meningkat, dan kualitas udara juga membaik.

Berdasarkan penjelasan mengenai arah kebijakan RPJPD Tahap 1 Kabupaten Lebak tersebut, terdapat beberapa rekomendasi kinerja, yaitu:

- Terpenuhinya pelayanan dasar dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
- Optimalnya pemanfaatan sumber daya melalui pengolahan lanjutan, riset dan inovasi.
- Efektifnya kelembagaan, kualitas ASN, regulasi, dan digitalisasi layanan publik.
- Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum serta stabilitas daerah sebagai dasar transformasi pembangunan yang berkelanjutan.
- Terwujudnya ketahanan sosial, budaya, dan ekologi sebagai pondasi dan modal utama dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Arah kebijakan dan kinerja tersebut diturunkan dalam tujuan dan sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lebak 2025-2029. Gambar berikut menampilkan keterkaitan antara arah kebijakan dan rekomendasi kinerja dalam RPJPD Tahap 1 dan indikasi intervensi yang tertuang dalam RPJMD 2025-2029.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

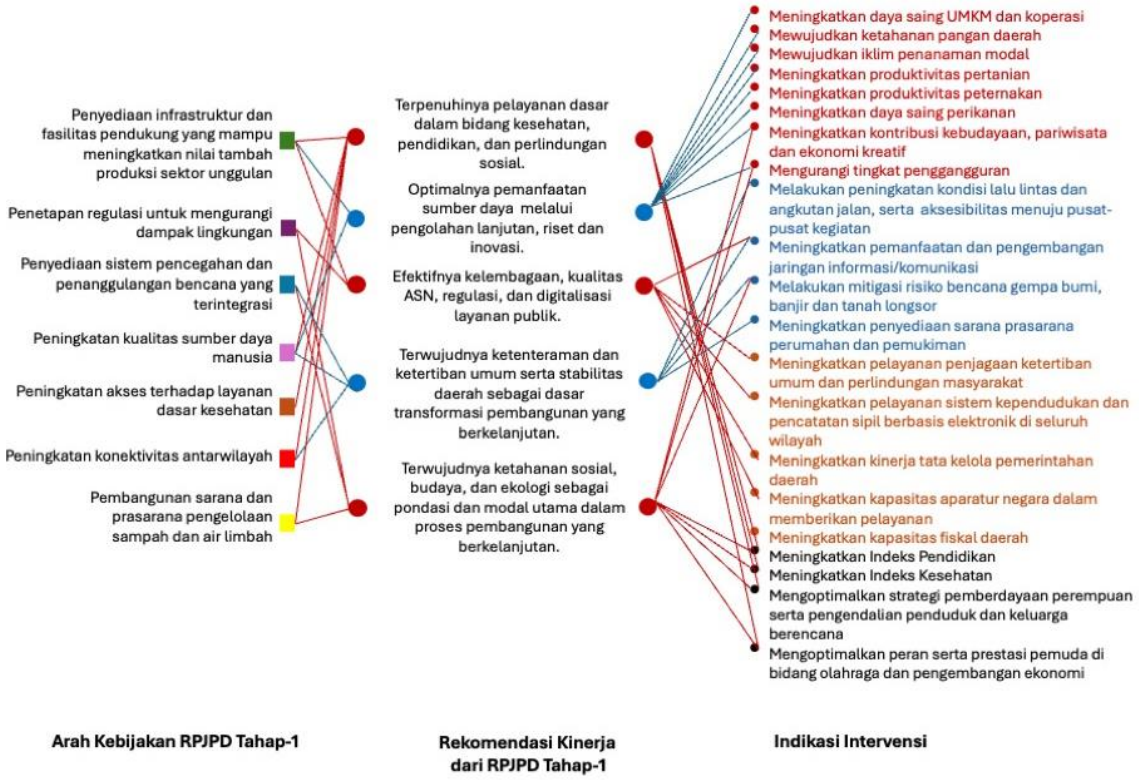

Gambar 5-2 Keterkaitan antara Arah Kebijakan dan Rekomendasi Kinerja RPJPD Tahap-1 dan Indikasi Intervensi dalam RPJMD

5.1.6 Rencana Strategis Daerah

Lokasi kabupaten lebak tahun 2025-2029 :

1. Penetapan Geopark Bayah Dome sebagai Geopark Nasional
2. Pembangunan Rumah Sakit di Kecamatan Maja
3. Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu di Kecamatan Sajira
4. Pengembangan Industri hijau dan hilirisasi Agroindustri di Kecamatan Cileles
5. Penambahan unit mobil Damkar di wilayah Selatan (Kec. Bayah) beserta sarana penunjang

Rencana Strategis daerah Kabupaten Lebak dalam RPJMD 2025 – 2029 berdasarkan urusan pemerintah adalah sebagai berikut :

a. Urusan Pariwisata

1. Agrowisata Cikapek, Kecamatan Cimarga
2. Ekowisata Sekitar Bendungan Karian: Tahun 2025 BBWSC3 akan melakukan studi penataan kawasan waduk, kajian sempadan waduk, dan penetapan Sempadan waduk, di mana hasilnya akan menghasilkan arahan zonasi pemanfaatan untuk ekowisata. Lokasi di Kecamatan Sajira
3. Penyangga Adat Baduy, Kecamatan Leuwidamar:(lokus geopark)
4. Wewengkon Adat Kasepuhan Citorek, Kecamatan Cibeber:(lokus geopark) .
5. KEK Sawarna, Kecamatan Bayah: PT. Legon Pari Mustika sebagai pemrakarsa telah menyelesaikan pembuatan masterplan tahap 1 dan sedang berproses dalam sidang amdal di KLHK

DRAFT - TIDAK UNTUK DIPY

b. Urusan Kebudayaan
1. Penataan Kota Lama Rangkasbitung, Kecamatan Rangkasbitung

c. Urusan Perindustrian dan Perdagangan
1. Kawasan Industri Hijau Cileles, Kecamatan Cileles
2. Pasar Kandangsapi, Kecamatan Rangkasbitung
3. Penataan Pasar Ikan Wanasalam, Kecamatan Wanasalam

d. Urusan Pertanian

Pengembangan komoditas unggulan sepertibambu, aren, atau kopi.

5.2 Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Kebijakan dan strategi pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Lebak 2025-2029 tertuang dalam empat tujuan klaster, sebagaimana dijabarkan dalam Subbab 5.1.3. Masing-masing tujuan klaster akan dicapai melalui beberapa sasaran dan strategi pada tabel berikut.

Tabel 5-1 Kebijakan dan Strategi Pembangunan

Tujuan Klaster		Sasaran		Strategi	
1	Optimalisasi pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas SDM	1.1	Meningkatnya Indeks Pendidikan	1.1.1	Meningkatkan rata-rata lama sekolah tingkat kabupaten
				1.1.2	Meningkatkan harapan lama sekolah
		1.2	Meningkatnya Indeks Kesehatan	1.2.1	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan
				1.2.2	Menurunkan jumlah angka kematian ibu (AKI)
				1.2.3	Meningkatkan capaian persentase desa ODF
				1.2.4	Meningkatkan jumlah keluarga sehat
				1.2.5	Meningkatkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular
		1.3	Optimalnya strategi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1.3.1	Meningkatkan indeks pembangunan gender

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Klaster		Sasaran		Strategi	
				1.3.2	Mengoptimalisasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana
		1.4	Meningkatnya peran serta prestasi pemuda di bidang olahraga dan pengembangan ekonomi	1.4.1	Meningkatkan prestasi pemuda di tk provinsi dan nasional serta atlet dan cabang olahraga di bidang olahraga
				1.4.2	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
		1.5	Optimalnya program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan	1.5.1	Mengoptimalkan program penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
				1.5.2	Menurunkan tingkat kemiskinan
2.	Optimalisasi pengembangan infrastruktur dan konektivitas wilayah dalam memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko bencana	2.1	Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, serta meningkatnya aksesibilitas menuju pusat-pusat kegiatan	2.1.1	Penyediaan trayek baru untuk mendukung aksesibilitas ke pusat Kota dan kawasan wisata
				2.1.2	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas yang mendukung pengembangan Kota Maja
				2.1.3	Mengurangi titik kemacetan
				2.1.4	Meningkatkan layanan terminal tipe C
				2.1.5	Meningkatkan penangan kasus kecelakaan lalu lintas
		2.2	Meningkatnya pemanfaatan dan pengembangan jaringan informasi/komunikasi	2.2.1	Meningkatkan penetrasi internet dan literasi digital masyarakat
		2.3	Terwujudnya mitigasi dalam menghadapi risiko bencana gempa bumi, banjir dan tanah longsor dan perubahan iklim	2.3.1	Meningkatkan mitigasi bencana banjir
				2.3.2	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi resiko banjir
				2.3.3	Meningkatkan mitigasi bencana longsor

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Klaster		Sasaran		Strategi	
				2.3.4	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi resiko longsor
				2.3.5	Meningkatkan mitigasi bencana gempa bumi
				2.3.6	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi resiko gempa bumi
				2.3.7	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan iklim
		2.4	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana perumahan dan pemukiman serta kualitas lingkungan	2.4.1	Melakukan pengurangan dan penanganan sampah
				2.4.2	Mengembangkan akses sanitasi yang aman dan layak serta meningkatkan pengelolaan lingkungan
				2.4.3	Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan jaringan drainase
3	Optimalisasi sistem tata kelola pemerintah dalam memberikan pelayanan yang menjangkau seluruh wilayah di Kab. Lebak	3.1	Meningkatnya pelayanan penjagaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	3.1.1	Meningkatkan Presentase Ormas yang terbina di Kab. Lebak
				3.1.2	Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan masyarakat kabupaten lebak
				3.1.3	Meningkatkan kinerja organisasi kemasyarakatan / LSM di Kab. Lebak
				3.1.4	Meningkatkan ketahan/resiliensi Kab. Lebak terhadap bencana kebakaran
				3.1.5	Malakukan Pembinaan, Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
		3.2	Optimalisasi pelayanan sistem	3.2.1	Peningkatan kapasitas pelayanan masyarakan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Klaster		Sasaran		Strategi	
			kependudukan , pencatatan sipil dan admintrasi pemerintahan berbasis elektronik di seluruh wilayah		dalam melayani pendatataan kependudukan dan pencatatan sipil berbasis elektronik
				3.2.2	Integrasi sistem adminstrasi pemerintahan untuk menunjang pelayanan publik
		3.3	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan daerah	3.3.1	Meningkatkan sistem pelayanan pemerintah kepada masyrakat
				3.3.2	Meningkatkan kinerja sistem administrasi dan pengelolaan arsip daerah pemerintahan daerah
		3.4	Meningkatnya kapasitas aparatur negara dalam memberikan pelayanan	3.4.1	Meningkatkan kompetensi SDM aparatur negara
				3.4.2	Meningkatkan jumlah SDM di lapangan
		3.5	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	3.5.1	Meningkatkan alternatif sumber keuangan daerah
					Meningkatkan pertumbuhan pajak daerah
		3.6	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Desa	3.6.1	Meningkatkan pengelolaan pemerintahan desa
				3.6.2	Meningkatkan pembangunan pada Tingkat desa
4	Optimalisasi pemanfaataan SDA dan nilai tambah produk unggulan	4.1	Meningkatnya daya saing UMKM dan koperasi	4.1.1	Meningkatkan pelaksanaan koperasi aktif
				4.1.2	Meningkatkan koperasi yang berkinerja baik
				4.1.3	Melakukan pembinaan untuk SDM yang kompeten
				4.1.4	Mengembangkan peran UMKM untuk berdaya saing dan berperan dalam menggerakan ekonomi lokal

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Klaster		Sasaran		Strategi	
		4.2	Terwujudnya ketahanan pangan daerah	4.2.1	Meningkatkan inovasi dan pengembangan agroindustri
				4.2.2	Melakukan koordinasi antara pemangku kepentingan dalam penyediaan cadangan pangan
		4.3	Terwujudnya iklim penanaman modal	4.3.1	Meningkatkan kemudahan informasi/pelayanan dalam penanaman modal
		4.4	Meningkatnya produktivitas pertanian	4.4.1	Meningkatkan penyediaan bibit dan faktor produksi pertanian
				4.4.2	Meningkatkan kualitas SDM guna mengolah nilai tambah komoditas pertanian
				4.4.3	Mengembangkan sarana prasarana pendukung pertanian
		4.5	Meningkatnya produktivitas peternakan	4.5.1	Meningkatkan pembibitan dan rekayasa genetik
				4.5.2	Mengembangkan sarana prasarana pendukung peternakan
		4.6	Meningkatnya daya saing perikanan	4.6.1	Meningkatkan produksi perikanan
				4.6.2	Meningkatkan nilai tambah perikanan
		4.7	Meningkatnya kontribusi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif	4.7.1	Meningkatkan budaya/tradisi lokal yang mendapat pengakuan nasional atau internasional
				4.7.2	Meningkatkan rata - rata lama tinggal wisatawan
				4.7.3	Meningkatkan ketersediaan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kinerja tinggi di bidang kebudayaan dan pariwisata serta ekonomi kreatif

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Klaster		Sasaran		Strategi	
				4.7.4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas ekonomi kreatif
		4.8	Berkurangnya tingkat pengganggguran	4.8.1	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja
				4.8.2	Meningkatkan lapangan pekerjaan
		4.9	Meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi	4.9.1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas perdagangan
				4.9.2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM
				4.9.3	Meningkatkan sarana prasaran pendukung perindustrian

5.3 Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

5.3.1 Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

5.3.1.1 Proyeksi Pendapatan Tahun 2025 – 2029

Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Dalam melakukan proyeksi pendapatan daerah harus didapat nilai perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Dalam melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu dilakukan analisis mengenai pendapatan daerah yang dilakukan dengan kerangka pemikiran sebagaimana disajikan pada gambar berikut.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Sumber: *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

Gambar 5-3 Kerangka Analisis Proteyeksi Pendapatan Daerah

Melihat performa pendapatan daerah pada tahun 2018-2024, diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat lebih tinggi di masa mendatang. Untuk mencapai hal tersebut, berbagai upaya akan dilakukan. Kebijakan pendapatan daerah akan diarahkan pada peningkatan pendapatan di sektor pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan lain-lain yang sah, serta peningkatan dana perimbangan. Kebijakan ini akan mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Memperkuat kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.
3. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat guna meningkatkan kesadaran mereka dalam membayar pajak dan retribusi.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait di tingkat kota dan provinsi dalam upaya peningkatan pendapatan daerah.
5. Menyusun strategi optimalisasi pengelolaan piutang pajak daerah melalui inventarisasi piutang. Piutang yang disebabkan oleh kesalahan administrasi akan dikoreksi secara akuntansi, piutang yang memenuhi syarat untuk dihapus akan dihapus, dan piutang yang wajib pajaknya dapat ditelusuri akan dilakukan penagihan.
6. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan penyesuaian tarif secara penuh terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
7. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, kepercayaan, serta partisipasi aktif masyarakat dan lembaga dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi.
8. Mengembangkan aset pemerintah daerah secara profesional.
9. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan yang lebih intensif antara pusat dan daerah dalam pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non-perimbangan.

DRAFT - TIDAK UNTUK DIPY

Proyeksi pendapatan untuk periode 2025 sampai dengan tahun 2029, sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tabel 5-2 Proyeksi Pendapatan Kabupaten Lebak Tahun 2025 – 2029

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
1	PENDAPATAN	2,883,326,767,737.54	3,278,153,472,290.73	3,753,394,273,803.19	4,328,729,492,157.40	5,028,970,264,567.40
1.1	Pendapatan Asli Daerah	516,144,573,213.85	571,291,689,247.10	633,134,937,546.42	702,568,147,450.51	780,611,729,467.18
1.1.1	Pajak Daerah	224,652,642,578.70	258,681,752,012.27	297,865,398,136.57	342,984,360,964.31	394,937,688,640.69
1.1.2	Retribusi Daerah	277,187,876,744.84	297,661,281,000.10	319,646,873,619.16	343,256,346,513.10	368,609,641,281.53
1.1.3	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipisahkan	6,902,260,846.47	7,177,515,771.77	7,463,747,574.88	7,761,394,002.17	8,070,910,256.89
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	7,401,793,043.84	7,771,140,462.96	8,158,918,215.81	8,566,045,970.93	8,993,489,288.07
1.2	Dana Perimbangan	2,118,400,799,480.69	2,435,133,750,034.38	2,821,817,409,354.87	3,296,315,338,380.45	3,881,230,596,068.32
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak	82,612,158,639.13	102,086,742,491.89	126,152,168,933.51	155,890,660,610.45	192,639,558,011.64
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1,199,335,106,078.34	1,270,442,967,572.02	1,345,766,771,666.38	1,425,556,479,077.98	1,510,076,870,544.84
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	836,453,534,763.22	1,062,604,039,970.47	1,349,898,468,754.98	1,714,868,198,692.03	2,178,514,167,511.83
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	248,781,395,043.01	271,728,033,009.26	298,441,926,901.91	329,846,006,326.44	367,127,939,031.90
1.3.1	Hibah	30,817,955,721.15	40,160,846,750.36	52,336,164,874.12	68,202,599,680.17	88,879,164,423.34
1.3.2	Dana Darurat	-	-	-	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	197,963,439,321.86	211,567,186,258.90	226,105,762,027.79	241,643,406,646.26	258,248,774,608.56
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemertintah Daerah Lainnya	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-

Sumber: Hasil Analisis, 2024

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

5.3.1.2 Proyeksi Pembiayaan Tahun 2025-2029

Analisis mengenai belanja daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian yang digambarkan melalui serangkaian asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan pemerintah, serta mempertimbangkan kebijakan pembiayaan daerah, yang kemudian diformulasikan sehingga diperoleh angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib, dan mengikat, serta prioritas utama. Dari rata-rata tersebut, akan diperoleh tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, yang digunakan sebagai gambaran dasar untuk mempehitungkan bagian dari belanja daerah yang harus dipenuhi di masa yang akan datang, sebagaimana gambar berikut.

Sumber: *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

Gambar 5-4 Kerangka Analisis Proyeksi Belanja Daerah

Proyeksi belanja daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan belanja langsung dan tidak langsung daerah. Metode yang digunakan untuk menentukan proyeksi belanja berbeda-beda tergantung pada jenis belanja, sebagai berikut:

1. **Belanja Pegawai:** Diproyeksikan berdasarkan pertumbuhan sebesar 6.88% dengan merujuk pada realisasi tahun 2023, sambil mempertimbangkan kebijakan pusat yang berlaku pada tahun berjalan.
2. **Belanja Hibah:** Diproyeksikan berdasarkan rata-rata realisasi selama lima tahun terakhir (2019-2023).
3. **Belanja Bantuan Keuangan:**
    - Untuk bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 mengenai Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

- Selain itu, juga mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017.

4. **Belanja Tidak Terduga:** Diproyeksikan berdasarkan rata-rata anggaran selama lima tahun terakhir (2019-2023).

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat wajib mengikat, belanja prioritas dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah, serta belanja pendukung lainnya dengan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Mengupayakan penggunaan sumber daya daerah secara lebih efisien, efektif, dan optimal untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Lebak.
2. Memprioritaskan anggaran belanja langsung untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat.
3. Mengarahkan belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan serta memenuhi kewajiban daerah.
4. Mengefisienkan pengeluaran belanja umum dalam kegiatan pada masing-masing perangkat daerah.
5. Melakukan analisis untuk memastikan kesesuaian program dan kegiatan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta mempertimbangkan manfaat yang akan diperoleh bagi masyarakat.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tabel 5-3 Proyeksi Pembiayaan Kabupaten Lebak Tahun 2025 – 2029

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
2	BELANJA	2,511,289,314,329.15	2,576,527,396,431.11	2,641,765,478,533.06	2,707,003,560,635.01	2,772,241,642,736.97
2.1	Belanja Tidak Langsung	2,239,566,845,330.90	2,311,787,306,465.49	2,384,007,767,600.08	2,456,228,228,734.66	2,528,448,689,869.25
2.1.1	Belanja Pegawai	1,207,447,190,303.57	1,245,160,461,461.93	1,282,873,732,620.29	1,320,587,003,778.64	1,358,300,274,937.00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	776,251,452,411.33	786,329,264,417.40	796,407,076,423.47	806,484,888,429.54	816,562,700,435.60
2.1.3	Belanja Hibah	211,568,628,898.86	236,009,902,554.21	260,451,176,209.57	284,892,449,864.93	309,333,723,520.29
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	10,206,296,549.43	10,917,133,164.38	11,627,969,779.32	12,338,806,394.27	13,049,643,009.21
2.1.5	Belanja Tidak Terduga	34,093,277,167.71	33,370,544,867.57	32,647,812,567.43	31,925,080,267.29	31,202,347,967.14
2.2	Belanja Langsung	271,722,468,998.25	264,740,089,965.62	257,757,710,932.99	250,775,331,900.35	243,792,952,867.72

Sumber: Hasil Analisis, 2024

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Dalam menganalisis pembiayaan daerah, dilakukan berdasarkan kondisi perekonomian yang saat ini berlangsung, yang ditunjukkan melalui asumsi indikator makroekonomi, serta mengacu pada kebijakan penyelesaian kewajiban daerah. Selain itu, perlu memperhatikan kebijakan efisiensi belanja daerah dan peningkatan pendapatan daerah, yang merupakan komponen penting dalam perhitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Dari analisis ini, akan diperoleh angka rata-rata pertumbuhan kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan, serta kegiatan lanjutan yang perlu diselesaikan. Hal ini juga akan memberikan gambaran mengenai besaran kewajiban yang harus diselesaikan di masa depan. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk:

1. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah.
2. Meningkatkan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.

5.3.1.3 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas keuangan daerah yang riil, yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Langkah pertama adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah, sebagaimana telah dihitung pada bagian sebelumnya, serta menentukan pos-pos alokasi untuk sumber penerimaan tersebut. Proyeksi pembiayaan daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang riil. Hasil analisis ini kemudian dapat digunakan untuk menghitung kapasitas penerimaan pembiayaan daerah untuk lima tahun ke depan. Sebagaimana yang tergambarkan dalam gambar berikut.

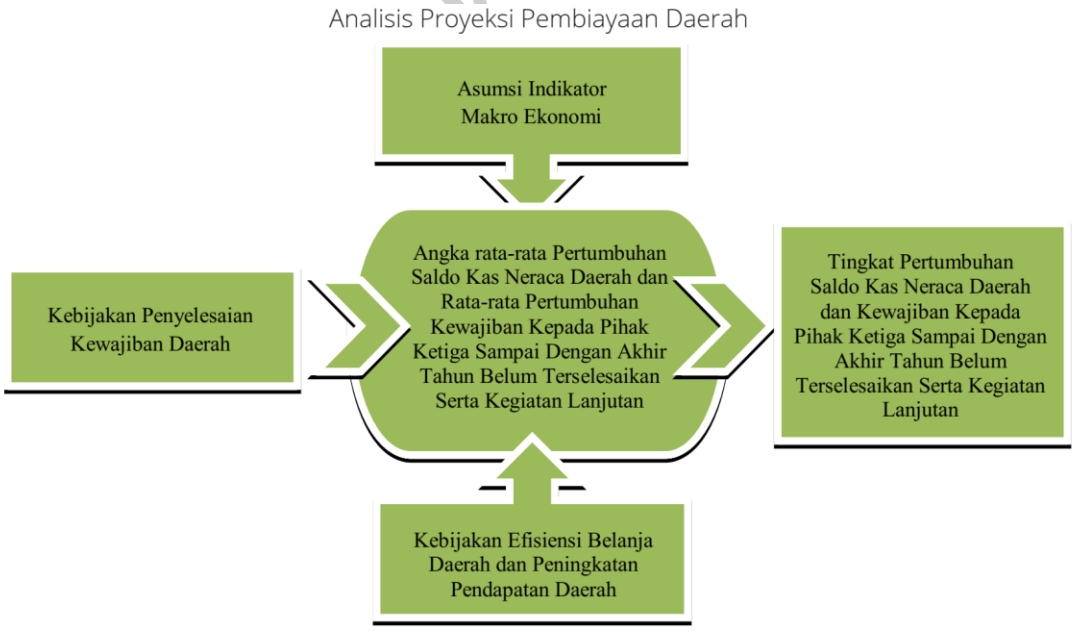

Sumber: *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017*

Gambar 5-5 Kerangka Analisis Proteksi Pembiayaan Daerah

DP UNTUK DICOPY

Tabel 5-4 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kabupaten Lebak

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
3	PEMBIAYAAN	204,615,842,677.30	197,666,257,629.32	190,716,672,581.33	183,767,087,533.35	176,817,502,485.37
3.1	Penerimaan Pembiayaan	232,301,463,243.01	225,063,348,622.89	217,825,234,002.76	210,587,119,382.64	203,349,004,762.51
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	27,685,620,565.71	27,397,090,993.57	27,108,561,421.43	26,820,031,849.29	26,531,502,277.14

Sumber: Hasil Analisis, 2024

DRAFT - TIDAK UNTUK DIFOPY

5.3.2 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi pendapatan, sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), belanja tidak langsung, dan pengeluaran pembiayaan, dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan Kabupaten Lebak pada tahun 2019-2023. Proyeksi ini memberikan gambaran mengenai kapasitas keuangan daerah Kabupaten Lebak untuk periode tersebut. Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Lebak untuk tahun 2025 – 2029 disajikan dalam tabel berikut.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tabel 5-5 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 – 2029

No	Uraian	2025	2026	2027	2028	2029
1	Pendapatan	2,883,326,767,737.54	3,278,153,472,290.73	3,753,394,273,803.19	4,328,729,492,157.40	5,028,970,264,567.40
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)					
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	218,634,833,183.85	190,402,311,882.90	162,169,790,581.95	133,937,269,281.00	105,704,747,980.05
	TOTAL PENERIMAAN	3,101,961,600,921.39	3,468,555,784,173.63	3,915,564,064,385.14	4,462,666,761,438.40	5,134,675,012,547.45
	Dikurangi:					
4	Belanja Tidak Langsung	2,239,566,845,330.90	2,311,787,306,465.49	2,384,007,767,600.08	2,456,228,228,734.66	2,528,448,689,869.25
5	Pengeluaran Pembiayaan	27,685,620,565.71	27,397,090,993.57	27,108,561,421.43	26,820,031,849.29	26,531,502,277.14
	KAPASITAS RILL KEMAMPUAN KEUANGAN	**834,709,135,024.78**	**1,129,371,386,714.57**	**1,504,447,735,363.63**	**1,979,618,500,854.46**	**2,579,694,820,401.06**

Sumber: Hasil Analisis, 2024

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

5.3.3 Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran adalah serangkaian kebijakan yang ditetapkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia, dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat serta pencapaian efektivitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, alokasi dilakukan berdasarkan prioritas (money follow program) dan kebutuhan. Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. **Prioritas I:** Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung yang bersifat wajib dan mengikat.
2. **Prioritas II:** Dialokasikan untuk membiayai belanja yang mendukung pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah serta program prioritas.
3. **Prioritas III:** Dialokasikan untuk membiayai belanja non-urusan yang tidak bersifat mengikat.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

5.4 Kinerja Pemerintahan

5.4.1 Program Pembangunan Daerah

Tabel 5-6 Program Pembangunan Daerah

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
1.1.1	Meningkatkan rata-rata lama sekolah tingkat kabupaten	1.1.1.1		Program Pengelolaan Pendidikan	Pembangunan Unit Sekolah Baru	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1.1.1.2	Program BOS	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1.1.1.3		Program Pengelolaan Pendidikan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha di Kabupaten/Kota	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Program Pengelolaan Pendidikan	Bimbingan Teknis, Pelatihan,dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1.1.1.4	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Pendidikan	Dinas Pendidikan
1.1.2	Meningkatkan harapan lama sekolah	1.1.2.1		Program Pengelolaan Pendidikan	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1.1.2.2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
					Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1.1.2.3	Program Pendidikan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1.1.2.4	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Program Pengelolaan Pendidikan	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Pendidikan	Dinas Pendidikan
		1.1.2.5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
			Program Pembinaan Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
1.2.1	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan	1.2.1.1	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		1.2.1.2	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengembangan Puskesmas	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Pengadaan, Peningkatan Sarana	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Pengembangan Rumah Sakit	Kesehatan	Dinas Kesehatan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
			dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
			Program Bantuan Operasional Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Manajemen Puskesmas	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan dan Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		1.2.1.3		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Pembangunan Puskesmas	Kesehatan	Dinas Kesehatan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
				Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat			
		1.2.1.4	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan, Farmasi serta Pengawasan Obat dan Makanan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
1.2.2	Menurunkan jumlah angka kematian ibu (AKI)	1.2.2.1	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		1.2.2.2	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		1.2.2.3	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		1.2.2.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan	Dinas Kesehatan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
		1.2.2.5		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		1.2.2.6		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		1.2.2.7	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		1.2.2.8	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota	Kesehatan	Dinas Kesehatan
1.2.3	Meningkatkan capaian Persentase desa ODF	1.2.3.1	Program Pengembangan Kesehatan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		1.2.3.2	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
1.2.4	Meningkatkan jumlah keluarga sehat	1.2.4.1	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Kesehatan	Dinas Kesehatan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
			Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
1.2.5	Meningkatkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular dan tidak menular termasuk penyakit degeneratif	1.2.5.1	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		1.2.5.2	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kesehatan	Dinas Kesehatan
		1.2.5.3		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Kesehatan	Dinas Kesehatan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penanggulangan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten/kota	Kesehatan	Dinas Kesehatan
1.3.1	Meningkatkan indeks pembangunan gender	1.3.1.1		Program Perlindungan Perempuan	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3AP2KB

DRAFT - TIDAK UNTUK DISEBARKAN

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
		1.3.1.2	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3AP2KB
		1.3.1.3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3AP2KB
			Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3AP2KB
		1.3.1.4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3AP2KB
			Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3AP2KB
		1.3.1.5	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DP3AP2KB
1.3.2	Mengoptimalisasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1.3.2.1	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP3AP2KB

DRAFT TIDAK UNTUK DIFOTOKOPI

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
					Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		
		1.3.2.2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP3AP2KB
		1.3.2.3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP3AP2KB
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP3AP2KB
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP3AP2KB
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP3AP2KB

DRAFT - TIDAK UNTUK DIJUAL

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
		1.3.2.4	Program Pengendalian Penduduk	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP3AP2KB
1.4.1	Meningkatkan prestasi pemuda di tk provinsi dan nasional serta atlet dan cabang olahraga di bidang olahraga	1.4.1.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		1.4.1.2		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		1.4.1.3	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Standardisasi Organisasi Keolahragaan	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.4.2	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1.4.2.1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Kepemudaan dan Olahraga	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.5.1	Mengoptimalkan program penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1.5.1.1	Program Pembinaan Anak Terlantar	Program Rehabilitasi Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Sosial	Dinas Sosial
		1.5.1.2	Program Pembinaan Anak Terlantar	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Sosial	Dinas Sosial

DRAFT TIDAK UNTUK DICOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
		1.5.1.3	Program Pengelolaan Areal Pemakaman			Sosial	Dinas Sosial
		1.5.1.4	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Sosial	Dinas Sosial
1.5.2	Menurunkan tingkat kemiskinan	1.5.2.1		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Sosial	Dinas Sosial
1.6.1	Mengoptimalkan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masyarakat adat	1.6.1.1		Program Pengelolaan Pendidikan	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Pendidikan	Dinas Pendidikan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kesehatan	Dinas Kesehatan
1.6.2	Mengoptimalkan pemberdayaan organisasi serta perlindungan hukum dan agraria	1.6.2.1		Program Pemberdayaan Sosial	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT (Komunitas Adat Terpencil)	Sosial	Dinas Sosial

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
	terhadap masyarakat adat						
		1.6.2.2		Program Pengelolaan Hutan Adat	Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	Kehutanan	
				Program Penataan Desa	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1.6.3	Mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan ekonomi komunitas adat melalui sektor pariwisata berbasis budaya	1.6.3.1		Program Pengembangan Kebudayaan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		1.6.3.2		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2.1.1	Penyediaan trayek baru untuk mendukung aksesibilitas ke	2.1.1.1	Program peningkatan pelayanan angkutan jalan untuk menarik potensi pasar	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perhubungan	Dinas Pehubungan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
	pusat Kota dan kawasan wisata						
		2.1.1.2	Program peningkatan pelayanan perizinan		Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Perhubungan	Dinas Pehubungan
2.1.2	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas yang mendukung pengembangan Kota Maja	2.1.2.1	Program penyediaan angkutan umum berbasis skema pembiayaan kerjasama pemerintah swasta		Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kot	Perhubungan	Dinas Pehubungan
2.1.3	Mengurangi titik kemacetan	2.1.3.1	Program penyediaan persimpangan non sebidang	Program penyelenggaraan jalan	Pembangunan persimpangan non sebidang	Perhubungan	Dinas Pehubungan
		2.1.3.2	Program pembatasan kendaraan pribadi	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Perhubungan	Dinas Pehubungan
2.1.4	Meningkatkan layanan terminal tipe C	2.1.4.1	Program penyediaan regulasi dalam mengatur retribusi angkutan		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis mengatur retribusi Angkutan	Perhubungan	Dinas Pehubungan
		2.1.4.2	Program peningkatan investasi dalam pengembangan infrastruktur dan fasilitas terminal		Revitalisasi Terminal (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Perhubungan	Dinas Pehubungan
		2.1.4.3	Program peningkatan manajemen yang lebih efektif dalam pengaturan operasional terminal		Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang	Perhubungan	Dinas Pehubungan

DRAFT TIDAK UNTUK DICOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
2.1.5	Meningkatkan penangan kasus kecelakaan lalu lintas	2.1.5.1	Program peningkatan penyediaan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, traffic cone, marka jalan		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Perhubungan	Dinas Pehubungan
		2.1.5.2	Program pengendalian parkir liar		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Perhubungan	Dinas Pehubungan
		2.1.5.3	Program perbaikan jaringan jalan yang memiliki kondisi rusak		Pemeliharaan Berkala Jalan	Perhubungan	Dinas Pehubungan
		2.1.5.4	Program pengawasan pengendara sesuai dengan standar keselamatan		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Perhubungan	Dinas Pehubungan
		2.1.5.5	Program peningkatan koordinasi dengan satlantas polri		Koordinasi dan Sinkronisasi	Perhubungan	Dinas Pehubungan
		2.1.5.6	Program peningkatan personil dalam pengawasan lalu lintas		Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam pengawasan lalu lintas	Perhubungan	Dinas Pehubungan
2.2.1	Meningkatkan penetrasi internet dan literasi digital masyarakat	2.2.1.1	Program sosialisasi penggunaan internet		Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	Komunikasi dan Informatika	Diskominfo
		2.2.1.2	Program penyediaan telekomunikasi yang memadai, termasuk internet dan sinyal yang			Komunikasi dan Informatika	Diskominfo

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
			lebih stabil dan mencakup seluruh wilayah				
2.3.1	Meningkatkan mitigasi bencana banjir	2.3.1.1	Program pengendalian alih fungsi lahan	Program penyelenggaraan penataan ruang	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.3.1.2	Program perbaikan saluran drainase	Program pengelolaan dan pengembangan drainase	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.3.1.3	Program normalisasi sungai secara berkala dan berkesinambungan	Perogram pengelolaan sumber daya air (SDA)	Normalisasi/Restorasi Sungai	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.3.1.4	Program peningkatan infrastruktur (contoh tanggul, bendung, dll)		Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.3.1.5	Program penyediaan infrastruktur Automatic Weather Statsion (AWS), Automatic Water Level Recorder (AWLR) di daerah yang sering terjadinya bencana banjir / banjir bandang		Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.3.1.6	Program penyediaan tempat evakuasi		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
		2.3.1.7	Program penyediaan regulasi RDTR sebagai pedoman dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang	Program penyelenggaraan penaraan ruang	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.3.1.8	Program peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang		Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.3.1.9	Program penyediaan masterplan yang terintegrasi dalam pengendalian di kawasan rawan bencana banjir	Program penanggulangan bencana	Penyusunan Masterplan pengendalian rawan bencana banjir	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.3.1.10	Program penyediaan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.3.1.11	Program sosialisai daerah rawan banjir		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.3.1.12	Program pendataan peta lokasi rawan banjirr berdasarkan data historis		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.3.1.13	Program penerapan teknologi baru dalam kegiatan mitigasi bencana		Penerapan teknologi mitigasi bencana	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

DRAFT TIDAK UNTUK DIC

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
		2.3.1.14	Program peningkatan memilah dan membuang sampah dengan skema 3R	Program pengembangan sistem pengelolaan persampahan regional	Peningkatan TPS-3R/TPS di Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.3.1.15	Program sosialisasi kepada masyarakat terkait adaptasi agar terhindari dari daerah rawan banjir	Program penanggulangan bencana	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.3.1.16	Program sosialisasi terkait perilaku membuang sampah	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.3.2	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi resiko banjir	2.3.2.1	Program peningkatan kapasitas masyarakat dibidang mitigasi bencana banjir	Program penanggulangan bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.3.3	Meningkatkan mitigasi bencana longsor	2.3.3.1	Program peningkatan infrastruktur mitigasi pada daerah yang memiliki kelerengan curam		penyediaan infrastruktur mitigasi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.3.3.2	Program pemeliharaan drainase di lereng yang memiliki tingkat resiko longsor	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.3.3.3	Program pengendalian bangunan pada wilayah rawan longsor	Program penyelenggaraanpenataan ruang	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
							Bencana Daerah
		2.3.3.4	Program pengendalian pengundulan hutan		Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.3.3.5	Program pengawasan alih fungsi lahan		Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.3.3.6	Program pemberian sanksi pada pelanggaran pembangunan diwilayah rawan longsor		Pengenaan Sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.3.3.7	Program pengendalian pencemaran air		Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.3.4	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko longsor	2.3.4.1	Program penyediaan dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB)	Program penanggulanggan bencana	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.3.4.2	Program penerapan teknologi (Warning system teknologi bencana longsor)		Pembangunan Warning system atau teknologi bencana longsor	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.3.4.3	Program pendataan peta lokasi rawan		Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan

DRAFT TIDAK UNTUK DICOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
			longsor berdasarkan data historis				Bencana Daerah
		2.3.4.4	Program sosialisai daerah rawan longsor		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.3.4.5	Program peningkatan kapasitas SDM dalam mitigasi bencana longsor		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.3.5	Meningkatkan mitigasi bencana gempa bumi	2.3.5.1	Program peningkatan infrastruktur mitigasi pada daerah yang memiliki kelerengan curam		penyediaan infrastruktur mitigasi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.3.5.2	Program penyediaan jalur dan tempat evakuasi		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.3.5.3	Program penyediaan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)		Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.3.5.4	Program pengendalian dan pengawasan pembangunan pemukiman pada wilayah rawan gempa		Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pembangunan pemukiman di wilayah rawan gempa	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.3.6	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi resiko gempa bumi	2.3.6.1	Program peningkatan kapasitas sdm dalam mitigasi bencana gempa bumi		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

DRAFT TIDAK UNTUK DICOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
2.3.7	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan iklim	2.3.7.1	Program sosialisasi peningkatan kesadaran kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		2.3.7.2	Program penyediaan kebijakan dan rencana aksi terkait perubahan iklim				
2.4.1	Optimalisasi pengurangan dan penanganan sampah	2.4.1.1	Program sosialisasi terhadap masyarakat terkait perilaku hidup sehat	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2.4.1.2	Program sosialisasi masyarakat terkait pengelolaan lingkungan	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.4.1.3	Program peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga	Progra pengembangan pemukiman	Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dam utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		24.1.4	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

DRAFT - TIDAK UNTUK

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
		2.4.1.5	Program peningkatan intervensi pemerintah dalam penanganan dan pengurangan sampah		Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.4.1.6	Program peningkatan prasarana persampahan		Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2.4.2	Optimalisasi akses sanitasi yang aman dan layak	2.4.2.1	Program peningakatan kesadaran masyarakat untuk perilaku hidup sehat	Program pemberdayaan Masyarakat dalam bidang Kesehatan	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam perilaku hidup sehat	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.4.2.2	Program peningkatan pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
				Program pengendalian pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.4.2.3	Program peningkatan sarana prasarana sanitasi	Program pengembnagan permukiman	penyediaan sarana prasarana sanitasi	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2.4.3	Optimalisasi jairngan drainase	2.4.3.1	Program sosialisasi masyarakat terkait pengelolaan lingkungan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase perkotaan	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		2.4.3.2	Program penyediaan masterplan drainase		Penyusunan Masterplan drainase	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

DRAFT - TIDAK UNTUK DIC OPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
3.1.1	Meningkatkan Presentase Ormas yang terbina di Kab. Lebak	3.1.1.1	Program pendataan ormas di Kab. Lebak	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		3.1.1.2	Program pengelolaan organisasi masyarakat	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		3.1.1.3	Program peningkatan partai berbadan hukum	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.1.2	Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan masyarakat kabupaten lebak	3.1.2.1	Program edukasi potensi radikalisme/terorisme	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		3.1.2.2	Program edukasi politik masyarakat	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
				pengembangan etika serta budaya politik	Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		
		3.1.2.3	Program sosialiasi / edukasi potensi penguatan ideologi pancasila	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.1.3	Meningkatkan kinerja organisasi kemasyarakatan / LSM di Kab. Lebak	3.1.3.1	Program pembinaan ormas/LSM	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		3.1.3.2	Program peningkatan cakupan Penyelenggaraan Pembinaan P4GN, PAKEM, dan FKUB	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		3.1.3.3	Program pemenuhan kebutuhan Koordinasi Jaringan Deteksi Dini, FKDM dan Forum Kominda	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.1.4	Meningkatkan ketahan/resiliensi Kab. Lebak terhadap bencana kebakaran	3.1.4.1	Program Peningkatan Waktu Tanggap Kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran,	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

DRAFT - TIDAK UNTUK DIC

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
				dan penyelamatan non kebakaran			
		3.1.4.2	Program peningakatan cakupan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		3.1.4.3	Program Edukasi masyarakat dalam menghadapi bencana	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3.1.5	Malakukan Pembinaan, Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	3.1.5.1	Program Penertiban usaha izin lokasi	Program Peningkatan Ketenteraman dan Penertiban Umum	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini danCegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
3.2.1	Peningkatan kapasitas pelayanan masyarakan dalam melayani pendatataan kependudukan dan pencatatan sipil berbasis elektronik	3.2.1.1	Program peningkatan sarana perekaman E-KTP	Program Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3.2.1.2	Program peningkatan honor tenaga operator administrasi kependudukan dan catatan sipil	Program Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3.2.1.3	Program peningkatan pencetakan E- KTP dan KIA	Program Pencatatan Sipil	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Administrasi Kependudukan	Dinas Administrasi Kependudukan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
						Dan Pencatatan Sipil	dan Pencatatan Sipil
		3.2.1.4	Program sosialisasi penggunaan KTP Digital	Program Pencatatan Sipil	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3.2.1.5	Program sosialiasi prosedur pernikahan dan perceraian pada tingkat desa	Program Pencatatan Sipil	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		3.2.1.6	Program pelatihan SDM dalam pencatatan data	Program Pendaftaran Penduduk	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.2.2	Integrasi sistem adminstrasi pemerintahan untuk menunjang pelayanan publik	3.2.2.1	Program pembentukan data base yang terintegrasi	Program Pengelolaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		3.2.2.2	Program penyederhanaan birokrasi melalui integrasi sistem pelayanan terpadu satu pintu	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.3.1	Meningkatkan sistem pelayanan pemerintah kepada masyrakat	4.3.1.1	Program peningkatan sistem penyerapan aspirasi masyarakat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah

DRAFT, TIDAK UNTUK DICOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
3.3.2	Meningkatkan kinerja sistem administrasi dan pengelolaan arsip daerah pemerintahan daerah	4.3.2.1	Program peningkatan cakupan penyelenggaraan administrasi perkantoran	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah
		4.3.2.2	Program pemeliharaan dokumen keuangan Setda	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		4.3.2.3	Program pengarsipan dokumen pemerintah daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
3.3.1	Meningkatkan sistem pelayanan pemerintah kepada masyrakat	4.3.1.1	Program peningkatan sistem penyerapan aspirasi masyarakat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3.4.1	Meningkatkan kompetensi SDM aparatur negara Meningkatkan jumlah SDM di lapangan	3.4.1.1	Program Penyelenggaraan Diklat bagi sumberdaya manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
		3.4.1.2	Penyusunan rencana kenutuhan SDM perangkat daerah	Program Kepegawaian Daerah	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		3.4.1.3	Program peningkatan jumlah SDM perangkat daerah	Program Kepegawaian Daerah	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah
3.5.1	Meningkatkan alternatif sumber keuangan daerah	3.5.1.1	Program peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan analisis keuangan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	"Pembinaan dan Pengawasan	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah
3.5.2	Meningkatkan pertumbuhan pajak daerah	3.5.2.1	Program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengelolaan Pajak Daerah dan	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah
		3.5.2.2	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Retribusi Daerah"	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah
		3.5.2.3	Program pendataan/dokumentasi aset daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.6.1	Meningkatkan pengelolaan pemerintahan desa	3.6.1.1	Program pembentukan BUMDes	Program Pemnberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		3.6.1.2	Program pembangunan sapras perdesaan yang melibatkan masayarakat	Program Pemnberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
		3.6.1.3	Program pengembangan LKD yang produktif	Program Pemnberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		3.6.1.4	Program pengembangan sarana usaha masyarakat	Program Pemnberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		3.6.1.5	Program Pengemabangan Keswadyaan Masyarakat dalam Kegiatan pembangunan Desa	Program Pemnberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		3.6.1.6	Program peningkatan kerjasama antar desa	Program Pemnberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		3.6.1.7	Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkinerja baik.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		3.6.1.8	Program peningkatan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3.6.2	Meningkatkan pembangunan pada Tingkat desa	3.6.2.1	Program penataan Desa	Program Penataan Desa	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

DRAFT TIDAK UNTUK DICOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
		3.6.2.2	Program pengentasan desa tertinggal	Program Penataan Desa	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.1.1	Meningkatkan pelaksanaan koperasi aktif	4.1.1.1	Program peningkatan edukasi tentang manfaat koperasi	Program Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		4.1.1.2	Program peningkatan kerjasama diantara anggota koperasi atau dengan pihak eksternal	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
4.1.2	Meningkatkan koperasi yang berkinerja baik	4.1.2.1	Program peningkatan intervensi pemerintah dalam melakukan pembinaan koperasi	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		4.1.2.2	Program peningkatan manajemen koperasi		Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
4.1.3	Melakukan pembinaan untuk meningkatka SDM yang kompeten	4.1.3.1	Program pelaksanaan pelatihan SDM		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		4.1.3.2	Program peningkatan penyediaan SDM			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
4.1.4	Mengembangkan peran UMKM untuk berdaya saing dan	4.1.4.1	Progran penyediaan legalitas untuk UMKM		Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
	berperan dalam menggerakan ekonomi lokal						
		4.1.4.2	Program peningkatan kualitas manajemen para pengusaha industri kecil dan industri rumah tangga		Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		4.1.4.3	Program peningkatan motivasi dalam berdaya saing		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		4.1.4.4	Program peningkatan pengetahuan cara pengolahan yang modern dan penggunaan teknologi		Peningkatan Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi produksi dan pengolahan, pemasaran	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		4.1.4.5	Program penyediaan teknologi yang dapat membantu menunjang proses produksi dalam UMKM kreatif		Penyediaan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi produksi dan pengolahan, pemarasaran	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		2.1.4.6	Program penyediaan akses dalam pemasaran hasil produk UMKM dan Industri Kreatif		Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
4.2.1	Mengoptimalkan inovasi dan	4.2.1.1	Program peningkatan inovasi pengembangan agroindustri untuk	Program peningkatan diverssifikasi dan	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
	pengembangan agroindustri		mengolah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi barang jadi	ketahanan pangan Masyarakat			
		4.2.1.2	Program peningkatan pengetahuan penggunaan teknologi untuk produk pertanian		Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		4.2.1.3	Program penerapan standarisasi internasional		Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		4.2.1.4	Program pendaftaraan Haki		Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		4.2.1.5	Program peningkatan kapasitas SDM		Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		4.2.1.6	Program peningkatan akurasi data neraca bahan makanan		Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
4.2.2	Mengoptimalkan koordinasi antara pemangku kepentingan dalam penyediaan cadangan pangan	4.2.2.1	Program pengoptimalan koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		4.2.2.2	Program pengembangan dan pembinaan klaster agroinudstri daerah		Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Ketahanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
4.3.1	Tersedianya kemudahan informasi/pelayanan dalam penanaman modal	4.3.1.1	Program peningkatan kapasitas SDM	Program pelayanan penanaman modal	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal
		4.3.1.2	Program penyediaan standar pelayanan Sarana dan prasarana	Program pengendalian iklim penanaman modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal
		4.3.1.3	Program peningkatan media promosi, konten kreatif UMKM	Program promosi penanaman modal	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal
4.4.1	Mengoptimalkan penyediaan bibit dan faktor produksi pertanian	4.4.1.1	Program peningkatan kompetensi dalam berusaha tani, pengendalian dan penanggulangan bencana	Program penyediaan dan pengembangan praarana pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Pertanian	Dinas Pertanian
		4.4.1.2	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Pertanian	Dinas Pertanian
		4.4.1.3	Program peningkatan produksi benih dan bibit yang berkualitas	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Pertanian	Dinas Pertanian
4.4.2	Meningkatkan kualitas SDM guna mengolah nilai tambah komoditas pertanian	4.4.2.1	Program peningkatan efektifitas dan efisiensi proses panen, penanganan pasca panen dan pemasaran		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian

DRAFT - TIDAK UNTUK DIFOTOKOPI

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
		4.4.2.2	Program peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pertanian		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Pertanian	Dinas Pertanian
		4.4.2.3	Program peningkatan ketertarikan masyarakat kepada sektor pertanian	Program penyuluhan pertanian	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
		4.4.2.4	Program pengendalian alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
		4.2.2.5	Program pengembangan sentra Kawasan komoditas unggulan dan komo		Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Pertanian	Dinas Pertanian
4.4.3	Mengoptimalkan sarana prasarana pendukung pertanian	4.4.3.1	Program peningkatan intervensi pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana		Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pertanian	Dinas Pertanian
4.5.1	Mengoptimalkan pembibitan dan rekayasa genetik	4.5.1.1	Program peningkatan pengetahuan SDM dalam pengelolaan dan pengawasan peternakan	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		4.5.1.2	Program peningkatan Kontrol Kesehatan hewan ternak (terutama PMK)		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

DRAFT TIDAK UNTUK DICOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
		4.5.1.3	Program peningkatan nutrisi makan ternak	Program penyediaan dan pengembangan	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		4.5.1.4	Program penyediaan Teknologi pembibitan ternak		Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan	Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4.5.2	Meningkatkan sarana prasarana pendukung peternakan	4.5.2.1	Program peningkatan intervensi pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana		Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Pertanian	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4.6.1	Mengoptimalkan produksi perikanan	4.6.1.1	Program peningkatan jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Program pengolahan dan pemarasan hasil perikanan	Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
		4.6.1.2	Program peningkatan minat dan jumlah SDM di bidang perikanan yang berkualitas dan terampil		Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
		4.6.1.3	Program pembinaan dan pelatihan serta pendampingan terhadap masayarakat pembudidaya ikan		Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
		4.6.1.4	Program penyediaan Teknologi pemanfaatan lahan perairan untuk usaha perikanan		Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
					kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil		
		4.6.1.5	Program peningkatan ketersediaan sarana prasarana budidaya dan sarana alat dan armada (perikanan laut)		Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
		4.6.1.6	Program penyediaan suplai benih		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
		4.6.1.7	Program penstabilan harga pakan ikan		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
		4.6.1.8	Program peningkatan pendapatan nelayan		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Keci	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
4.6.2	Meningkatkan nilai tambah perikanan	4.6.2.1	Program penyediaan teknologi budidaya dan tenologi pakan		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
		4.6.2.2	Program peningkatan investasi pada bidang usaha pengolahan dan pemasaran dengan		Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
			keunggulan jenis dan kualitas produk				
		4.6.2.3	Program peningkatan inovasi dalam pengolahan hasil perikanan		Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Kelautan dan Perikanan	Dinas Perikanan
4.7.1	Meningkatkan budaya/tradisi lokal yang mendapat pengakuan nasional atau internasional	4.7.1.1	Program peningkatan atraksi di destinasi buatan		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		4.7.1.2	Program peningkatan aksesibilitas ke tempat destinasi wisata dan cagar budaya	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		4.7.1.3	Program peningkatan Management Pengelolaan Potensi Obyek Daya Tarik Wisaa		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		4.7.1.4	Program peningkatan amenitas di Cagar Budaya dan Destinasi wisata		Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kebudayaan	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4.7.2	Meningkatkan rata - rata lama tinggal wisatawan	4.7.2.1	Program peningkatan perjalanan wisatawan nusantara ke Kabupaten Lebak	Program pemasaran pariwisata	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		4.7.2.2	Program peningkatan ijin untuk jasa usaha pariwisata	Program pemasaran pariwisata	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
4.7.3	Meningkatkan ketersediaan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kinerja tinggi di bidang kebudayaan dan pariwisata serta ekonomi kreatif	4.7.3.1	Program peningkatan pengetahuan dan pemahaman para pengelola asset/nilai-nilai budaya terhadap upaya pengembangan		Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		4.7.3.2	Program penyediaan regulasi di bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif yang memadai sehingga menyebabkan kurangnya jaminan kepastian hukum bagi pengembangan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif		Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
4.7.4	Meningkatkan kualitas dna kuantitas ekonomi kreatif	4.7.4.1	Program peningkatan media promosi ekonomi kreatif	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		4.7.4.2	Program pelatihan bagi tenaga kerja		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
		4.7.4.3	Program peningkatan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan industri		Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Pariwisata	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

DRAFT - TIDAK UNTUK DISCOPY

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
4.8.1	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	4.8.1.1	Program pelatihan tenaga kerja di tingkat daerah	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja Program penempatan tenaga kerja	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja
4.8.2	Meningkatkan lapangan pekerjaan	4.8.2.1	Program peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kualifikasi tenaga kerja		Perluasan Kesempatan Kerja	Tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja
		4.8.2.2	Program perluasan kesempatan kerja		Perluasan Kesempatan Kerja	Tenaga kerja	Dinas Tenaga Kerja
4.9.1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas perdagangan	4.9.1.1	Program peningkatan investasi dalam teknologi dan inovasi	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Perdagangan	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4.9.2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM	4.9.2.2	Program peningkatan SDM yang terampil	Program perencanaan dan pembangunan industri	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		4.9.2.2	Program pelatihan bagi tenaga kerja		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4.9.3	Meningkatkan sarana prasarana	4.9.3.1	Program peningkatan sarana prasarana yang	Program pengendalian izin usaha industri	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan		

DRAFT - TIDAK UNTUK DIKOPI

Strategi		Program berdasarkan pohon masalah		Program (Nomenklatur)	Sub kegiatan Program (Nomenklatur)	Urusan	Perangkat Daerah Penaggung Jawab
	pendukung perindustrian		mendukung pertumbuhan industry		usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)		
		4.9.3.2	Program peningkatan perizinan Perindustrian dan perdagangan	Program pengendalian izin usaha industrsi		Perindustrian	Dinas Perdagangan dan Perindustrian

5.4.2 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, dan Target Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan daerah pada rancangan teknokratik RPJMD 2024 – 2029 adalah:

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur terintegrasi yang didukung dengan tata kelola pemerintahan yang efektif dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Lebak.

Untuk mencapai tujuan pembangunan daerah tersebut maka terdapat beberapa tujuan dari setiap klaster yang perlu dituju yang dapat dilihat pada tabel berikut,

5.4.2.1 Klaster Sosial

Tabel 5-7 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program dan Target Pembangunan Klaster Sosial

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Optimalisasi pelayan	1.1	Meningkatnya Indeks	Indeks Pendidikan	1.1.1	Meningkatkan rata-rata lama	1.1.1.1		Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Sekolah Baru yang Telah	Sekolah Baru yang Terbangun	N/A		Kabupaten Lebak	PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan

DRAFT - TIDAK UNTUK COPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	an kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas SDM		Pendidikan	(Satuan: Poin)		sekolah tingkat kabupaten				Dibangun (Satuan: Unit)						
							1.1.1.2	Program BOS	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Putus sekolah SD (Satuan:%)		0,05	0	Kabupaten Lebak	PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
										Angka Melanjutkan SD ke SMP (Satuan:%)		99,56	100		PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
									Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Putus sekolah SMP (Satuan:%)		0,92	0,75	Kabupaten Lebak	PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
										Angka melanjutkan SMP ke SMA (Satuan:%)		N/A			PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
							1.1.1.3		Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha (Satuan: Satuan Pendidikan)	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	N/A		Kabupaten Lebak	PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
									Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan	N/A		Kabupaten Lebak	PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan (Satuan: orang)	Kapasitas Bidang Pendidikan					
							1.1.1.4	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP (Satuan:%)		91,19	99,47	Kabupaten Lebak	PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
										Angka Partisipasi Murni (APM) SMP (Satuan:%)		77,38	86,5		PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
										Angka Partisipasi Murni (APM) SD (Satuan:%)		99,43	100		PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
					1.1.2	Meningkatkan harapan lama sekolah	1.1.2.1		Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat (Satuan: unit)		N/A		Kabupaten Lebak	PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
							1.1.2.2	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase sekolah SD berakreditasi A (Satuan:%)		7,85	8,19	Kabupaten Lebak	PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
										Persentase sekolah SMP berakreditasi A (Satuan:%)		12,11	12,36		PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							1.1.2.3	Program Pendidikan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase guru bersertifikat pendidik (Satuan:%)		63,74	78,9	Kabupaten Lebak	PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
										Angka Kelulusan SD (Satuan:%)		99,95	100		PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
										Angka Kelulusan SMP (Satuan:%)		98,87	100		PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
							1.1.2.4	Program Pendidikan Anak Usia Dini		Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (Satuan:%)		50,35	52,85	Kabupaten Lebak	PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan
							1.1.2.5	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		Jumlah pengunjung perpustakaan (Satuan: Orang)		52628	188502	Kabupaten Lebak	PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
										Jumlah Perpustakaan yang dibina (Satuan: Unit)		0	465	Kabupaten Lebak	PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
										Cakupan TBM yang sesuai standar (Satuan: Lembaga)		N/A		Kabupaten Lebak	PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
										Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Satuan: %)		62,85	62,95	Kabupaten Lebak	PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (Satuan: %)		3,48	3,54	Kabupaten Lebak	PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
								Program Pembinaan Perpustakaan		Persentase Minat Baca Masyarakat (PMBM)		53	82	Kabupaten Lebak	PERPUSTAKAAN	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		1.2	Meningkatnya Indeks Kesehatan	Indeks Kesehatan (Satuan: Poin)	1.2.1	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan	1.2.1.1	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Ketersediaan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar minimal ketenagaan di setiap puskesmas (Satuan:%)	Jumlah SDMK sesuai standar / Jumlah SDMK di puskesmas x 100	N/A	80	Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan
							1.2.1.2	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik (Satuan:%)	Jumlah sarpras yang dibangun tahun n / Jumlah destinasi prioritas x 100	85	100	Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan
								Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	Persentase terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (Satuan: %)	Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang terpenuhi / Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	77,54	96	Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan	Program berdasarkan Pohon Masalah	Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Kesehatan Masyarakat		yang seharusnya terpenuhi x 100					
				Program Bantuan Operasional Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang melaksanakan manajemen sesuai standar (Satuan: %)	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan manajemen sesuai standar / Jumlah Puskesmas di daerah x 100	100	100	Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan
				Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas Terpenuhi Kebutuhan Obat Secara Tepat dan Rasional (Satuan: %)	Puskesmas yang terpenuhi Obat Secara Tepat dan Rasional / Kebutuhan Obat Secara di Puskesmas x 100	81	100	Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan dan Pengembangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan RSUD (Satuan: %)	Data dan informasi tentang tingkat kepuasan Masyarakat yang diperoleh dari hasil Pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat Masyarakat dalam memperoleh Pelayanan. Total dari Nilai Persepsi Per	82,46	98	Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											Unsur/ Total unsur yang terisi x 25 (Nilai Penimbang)					
									Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Rujukan kasus Non Spesialitik (RRNS dari Puskesmas ke Rumah Sakit (Satuan: %)	Jumlah kasus rujukan non spesialistik / jumlah seluruh kasus rujukan Puskesmas ke RS	0,95	4,65	Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan
								Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase tingkat capaian SPM (Satuan : %)	Rata-rata Capaian SPM Bidang Kesehatan / Target yang ditetapkan x 100%	91,23	100	Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan
							1.2.1.3		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 (Satuan: unit)	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	N/A	1	Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan
									Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	N/A		Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Kesehatan Masyarakat							
							1.2.1.4	Program Peningkatan Sumber Daya Kesehatan, Farmasi serta Pengawasan Obat dan Makanan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai Formularium Nasional (Fornas (Satuan:%)	Persentase ketersediaan obat dan BMHP sesuai Formularium Nasional (Fornas) / Jumlah total item obat dan BMHP sesuai Fornas yang ada x 100%	94	100	Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan
					1.2.2	Menurunkan jumlah angka kematian ibu (AKI)	1.2.2.1	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (Satuan : %)	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran ibu hamil di wilayah kerja kabupaten/kottersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama X 100	89,7	99,75	Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan
							1.2.2.2	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	89,5	99,74	Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	persalinan (Satuan : %)	sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah sasaran ibu bersalin diwilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama x 100					
							1.2.2.3	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (Satuan : %)	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi dengan Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kotat ersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama di Kali 100	95,02	98,38	Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar (Satuan : %)	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat Pelayanan Kesehatan sesuai Standar 1 + Jumlah Balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + Balita usia 36-59 bulan mendapakan pelayanan sesuai standar 3 dibagi dengan Jumlah Balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja Kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama di Kali 100	102,1	95,88	Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan
								Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (Satuan : %)	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	98,11	81,97	Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Penguku ran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
											dibagi dengan Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama. di kali 100					
							1.2.2.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase legalitas tenaga kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar (Satuan: %)	Jumlah tenaga kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan / Jumlah tenaga kesehatan x 100	100	100	Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan
							1.2.2.5		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak (Satuan: Dokumen)	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	N/A		Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan
							1.2.2.6		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	N/A		Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									Kesehatan Masyarakat	Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas						
							1.2.2.7	Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan keluarga sesuai standar (Satuan:%)	Jumlah pelayanan kesehatan keluarga/ Jumlah keluarga di daerah x 100	N/A	70	Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan
										Persentase balita kurang Gizi mendapat perawatan (Satuan: %)	Jumlah balita kurang Gizi mendapat perawatan dibagi dengan jumlah balita kurang Gizi dikali 100	100	100		KESEHATAN	Dinas Kesehatan
							1.2.2.8	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan	Persentase puskesmas terakreditasi minimal madya (Satuan: %)	Jumlah puskesmas dengan terakreditasi minimal madya dibagi jumlah puskesmas dikali 100	41	100	Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan
					1.2.3	Meningkatkan capaian Persentase desa ODF	1.2.3.1	Program Pengembangan Kesehatan Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa ODF (Satuan: %)	Jumlah Desa ODF dibagi Jumlah Desa x 100	33,04	80	Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan
							1.2.3.2	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan pembinaan PHBS di tatanan kesehatan (Satuan: %)		94,17	100	Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					1.2.4	Meningkatkan jumlah keluarga sehat	1.2.4.1	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Keluarga Sehat (Satuan: poin)		0,23	0,29	Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan
								Program Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan keluarga sesuai standar (Satuan: %)		89,51	100	Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan
									Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase keluarga sehat (Satuan: %)		48,9	59	Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan
										Prevalensi Stunting (Satuan:%)		3,69	2		KESEHATAN	Dinas Kesehatan
					1.2.5	Meningkatkan cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular dan tidak menular termasuk penyakit degeneratif	1.2.5.1	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit menular (Satuan: %)		91	100	Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan

DRAFT TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							1.2.5.2	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit sesuai standar (Satuan: %)		93,27	100	Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan
							1.2.5.3		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar (Satuan: orang)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	N/A		Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan
									Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan (Satuan: orang)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	N/A		Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan
									Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten/kota (Satuan: Dokumen)	Terlaksananya Penanggulangan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten/kota	N/A		Kabupaten Lebak	KESEHATAN	Dinas Kesehatan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		1.3	Optimalnya strategi pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Indeks Pembangunan Gender (Satuan: Poin)	1.3.1	Meningkatkan indeks pembangunan gender	1.3.1.1		Program Perlindungan Perempuan	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (Satuan: Layanan)	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi	N/A		Kabupaten Lebak	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DP3AP2KB
							1.3.1.2	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (Satuan: %)	Jumlah kasus yang terjadi pada perempuan dan anak yang melapor dibagi Jumlah kasus yang terjadi pada perempuan dan anak yang tertangani dikali 100%	100	100	Kabupaten Lebak	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DP3AP2KB
							1.3.1.3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Stakeholder yang mampu menyusun perencanaan & penganggaran yang responsif gender (Satuan: %)	Jumlah Stakeholder yang menyusun PPRG dibagi Jumlah seluruh Stakeholder yang ada di Kabupaten Lebak dikali 100%	100	100	Kabupaten Lebak	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DP3AP2KB

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase lembaga masyarakat yang aktif dalam lembaga perlidungan dan pemenuhan hak anak (Satuan: %)	Jumlah Lembaga yang aktif dibagi Jumlah Seluruh Lembaga yang sudah terbentuk dikali 100%	100	100	Kabupaten Lebak	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DP3AP2KB
										Persentase ARG pada belanja langsung APBD (Satuan: %)	Jumlah Anggaran Responsif Gender dibagi Total APBD Lebak dikali 100%	46	46		PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DP3AP2KB
							1.3.1.4	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase penanganan kasus kekerasan anak (Satuan: %)	Jumlah kasus yang terjadi pada anak yang melapor dibagi Jumlah kasus yang terjadi pada anak yang tertangani dikali 100%	100	100	Kabupaten Lebak	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DP3AP2KB
								Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Kasus TPPO pada Perempuan dibagi Jumlah Penduduk Perempuan dikali 100%	0	5,87	Kabupaten Lebak	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	DP3AP2KB
							1.3.1.5	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdaya	Proporsi perempuan dalam bidang pembangunan (Satuan: %)	Jumlah Perempuan dalam Bidang Pembangunan dibagi Total	79	79,77	Kabupaten Lebak	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDU	DP3AP2KB

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									an Perempuan		Perempuan dan Laki-laki dalam Bidang Pembangunan dikali 100%				NGAN ANAK	
				Laju Pertumbuhan Penduduk (Satuan: %)	1.3.2	Mengoptimalisasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana	1.3.2.1	Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKB) (Satuan: Kelompok)		N/A		Kabupaten Lebak	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DP3AP2KB
										Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKR) (Satuan: Kelompok)		N/A		Kabupaten Lebak	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DP3AP2KB
										Jumlah Pusat Pelayanan KKBPK yang terbina & aktif (BKL) (Satuan: Kelompok)		N/A		Kabupaten Lebak	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DP3AP2KB
							1.3.2.2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Angka Pemakaian Kontrasepsi (CPR) bagi perempuan menikah usia 15 - 49 tahun (Satuan: %)	Jumlah Peserta KB Aktif dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur dikali 100%	78,16	80,1	Kabupaten Lebak	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DP3AP2KB

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							1.3.2.3	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan Anggota Bina Keluarga berKB (Satuan: Orang)		12436	55000	Kabupaten Lebak	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DP3AP2KB
										Persentase pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (Satuan: %)	Jumlah Peserta MKJP dibagi Jumlah Pasangan Usia Subut dikali 100%	78,16		Kabupaten Lebak	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DP3AP2KB
										Ratio Akseptor KB (Satuan: %)		N/A		Kabupaten Lebak	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DP3AP2KB
									Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/ Mahasiswa (Satuan: %)	Jumlah remaja yang terbina dibagi Jumlah seluruh Remaja dalam PIK-R dikali 100%	1,8	2,55	Kabupaten Lebak	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DP3AP2KB
									Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Jumlah PKB/PLKB yang terbina dibagi Jumlah seluruh PKB/PLKB dikali 100%	N/A	100	Kabupaten Lebak	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DP3AP2KB

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										daerah di bidang pengendalian penduduk (Satuan: %)						
								Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	mCPR (Modern Contraceptive Prevalancy Rate)	Jumlah Peserta KB Aktif dibagi Jumlah Pasangan Usia Subur dikali 100%	67,9	79	Kabupaten Lebak	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DP3AP2KB
							1.3.2.4	Program Pengendalian Penduduk	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	TFR (Total Fertility Rate)		N/A		Kabupaten Lebak	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DP3AP2KB
										Persentase tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate)	TFR = 5 ∑ASFRi (jumlah kelahiran dari usia ibu (19 – 49) x 5 dibagi 1000 kelahiran x 100%)	2,65	2,35	Kabupaten Lebak	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	DP3AP2KB
		1.4	Meningkatnya peran serta prestasi pemuda di bidang olahraga dan pengembangan ekonomi	jumlah pemuda yang berprestasi di Tk. Provinsi dan nasional (Satuan: Orang)	1.4.1	Meningkatkan prestasi pemuda di tk provinsi dan nasional serta atlet dan cabang olahraga di bidang olahraga	1.4.1.1	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik (Satuan: %)		85	100	Kabupaten Lebak	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							1.4.1.2		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Satuan: Dokumen)	Terselenggaranya Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	N/A		Kabupaten Lebak	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
							1.4.1.3	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase pembina dan pelatih yang bersertifikat (Satuan: %)		100	100	Kabupaten Lebak	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
				Persentase wirausaha muda baru yang memperoleh akses modal (Satuan: %)	1.4.2	Meningkatkan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1.4.2.1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (Satuan: %)		18	21	Kabupaten Lebak	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		1.5	Optimalnya program kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan	Persentase Penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) (Satuan: %)	1.5.1	Mengoptimalkan program penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	1.5.1.1	Program Pembinaan Anak Terlantar	Program Rehabilitasi Sosial	Jumlah anak terlantar memperoleh pendidikan formal/non formal (Satuan: Orang)		N/A		Kabupaten Lebak	SOSIAL	Dinas Sosial

DRAFT TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							1.5.1.2	Program Pembinaan Anak Terlantar	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Satuan: Orang)		N/A		Kabupaten Lebak	SOSIAL	Dinas Sosial
							1.5.1.3	Program Pengelolaan Areal Pemakaman		Jumlah Jenazah yang diurus (Satuan: orang Non PNS)		N/A		Kabupaten Lebak	SOSIAL	Dinas Sosial
							1.5.1.4	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) (Satuan: %)		92,89	95	Kabupaten Lebak	SOSIAL	Dinas Sosial
				Tingkat Kemiskinan (Satuan: %)	1.5.2	Menurunkan tingkat kemiskinan	1.5.2.1		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kot		N/A		Kabupaten Lebak	SOSIAL	Dinas Sosial

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										a (Satuan: Keluarga)						
		1.6	Kuat dan berdayanya komunitas adat		1.6.1	Mengoptimalkan akses pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan masyarakat adat	1.6.1.1		Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama (Satuan:	Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	N/A		Wewengkon Adat Kasepuhan Citorek: Kec. Cibeber Penyangga Adat Baduy: Kec Leuwidamar	PENDIDIKAN	Dinas Pendidikan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Satuan Pendidikan)						
									Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat (Satuan: Dokumen)	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	N/A		Wewengkon Adat Kasepuhan Citorek: Kec. Cibeber Penyangga Adat Baduy: Kec Leuwidamar	KESEHATAN	Dinas Kesehatan
					1.6.2	Mengoptimalkan pemberdayaan organisasi serta perlindungan hukum dan agraria terhadap masyarakat adat	1.6.2.1		Program Pemberdayaan Sosial	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Satuan: Keluarga)	Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A		Wewengkon Adat Kasepuhan Citorek, Kec. Cibeber	SOSIAL	Dinas Sosial
							1.6.2.2		Program Pengelolaan Hutan Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau	Terlaksananya Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait	N/A		Wewengkon Adat Kasepuhan Citorek, Kec. Cibeber	KEHUTANAN	

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota (Satuan: Dokumen)	dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota			Penyangga Adat Baduy: Kec Leuwidamar		
									Program Penataan Desa	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota (Satuan: Laporan)	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	N/A		Wewengkon Adat Kasepuhan Citorek, Kec. Cibeber Penyangga Adat Baduy: Kec Leuwidamar	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
					1.6.3	Mengoptimalkan peningkatan kesejahteraan ekonomi komunitas adat melalui sektor pariwisata berbasis budaya	1.6.3.1		Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi (Satuan: Unit)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	N/A		Wewengkon Adat Kasepuhan Citorek, Kec. Cibeber Penyangga Adat Baduy: Kec	PARIWISATA	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

DRAFT TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														Leuwidamar		
							1.6.3.2		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Satuan: Dokumen)	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	N/A		Wewengkon Adat Kasepuhan Citorek, Kec. Cibeber Penyangga Adat Baduy: Kec Leuwidamar	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

5.4.2.2 Klaster Infrastruktur

Tabel 5-8 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program dan Target Pembangunan Klaster Infrastruktur

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
2	Optimalisasi pengembangan infrastruktur dan konektivitas wilayah dalam memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi risiko bencana dan pengelolaan lingkungan	2.1	Terwujudnya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, serta meningkatnya aksesibilitas menuju pusat-pusat kegiatan	Persentase peningkatan aksesibilitas (%)	2.1.1	Mengembangkan penyediaan trayek baru untuk mendukung aksesibilitas ke pusat kota dan kawasan wisata	2.1.1.1	Program peningkatan pelayanan angkutan jalan untuk menarik potensi pasar	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Persentase penyediaan trayek baru (%)	Jumlah trayek baru yang terbangun/ jumlah trayek baru yang direncanakan (x) 100	N/a	100,00	Kec. Maja, kec. Rangkasbitung, kec. Warunggunung, kec. Cikulur, kec. Cipanas, kec. Muncang, kec. Cilograng, kec.bayah, kec. Wanasalam, kec. Malingping	Perhubungan	Dinas pehubungan
							2.1.1.2	Program peningkatan pelayanan perizinan		Persentase pelayanan perizinan trayek angkutan umum (%)	Jumlah prasarana yang diberi izin (/) dibagi jumlah total trayek (x) dikali 100%	N/a	100,00	Kec. Maja, kec. Rangkasbitung, kec. Warunggunung, kec. Cikulur, kec. Cipanas,	Perhubungan	Dinas pehubungan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
														kec. Muncang, kec. Cilograng, kec.bayah, kec. Wanasalam, kec. Malingping		
					2.1.2	Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas yang mendukung pengembangan kota maja	2.1.2.1	Program penyediaan angkutan umum berbasis skema pembiayaan kerjasama pemerintah swasta		Persentase penyediaan aksesibilitas dan konektivitas menuju kota maja (%)	Jumlah aksesibilitas dan konektivitas yang disedikan/ jumlah aksesibilitas dan konektivitas yang direncanakan (x) 100	N/a	100,00	Kec. Warunggunung, kec. Cibadak, kec. Kalangayar, kec. Rangkasbitung, kec. Maja	Perhubungan	Dinas pehubungan
					2.1.3	Menguranggi titik kemacetan	2.1.3.1	Program penyediaan persimpangan non sebidang	Program penyelenggaraan jalan	Presentasi jalan terbangun (%)	Jumlah jalan terbangun (/) dibagi jumlah kebutuhan jalan (x) dikali 100%	N/a	100,00	8 lokasi: daerah bojong pandan; jl. Kp. Sengkol; jl. R. Denda kusumah; jl. Moch harun;	Perhubungan	Dinas pehubungan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
														jl. Sunan kalijaga; jl. Tirtayasa; jl. Ir. Djuanda;jl. Jendral sudirman.		
							2.1.3.2	Program pembatasan kendaraan pribadi	Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (llaj)	Persentase pembatasan penggunaan kendaraan pribadi(%)	Jumlah pembatasan yang diterapkan/ jumlah kebijakan pengurangan kendaraan yang direncanakan (x) 100	N/a	100,00	Kec. Maja, kec. Rangkasbitung, kec. Warunggunung, kec. Cikulur, kec. Cipanas, kec. Muncang, kec. Cilograng, kec.bayah, kec. Wanasalam, kec. Malingping	Perhubungan	Dinas pehubungan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
					2.1.4	Meningkatkan layanan terminal tipe c	2.1.4.1	Program penyediaan regulasi dalam mengatur retribusi angkutan		Persentase pelayanan terminal (%)	Jumlah terminal tipe-c yang dikelola (/) dibagi jumlah terminal tipe-c (x) dikali 100%	100,00	100,00	Kec. Rangkasbitung, kec. Kalanganyar, kec. Cipanas, kec. Malingping, kec bayah	Perhubungan	Dinas pehubungan
							2.1.4.2	Program peningkatan investasi dalam pengembangan infrastruktur dan fasilitas terminal		Persentase pembangunan prasarana perhubungan (%)	Jumlah prasarana perhubungan terbangun (/) dibagi jumlah kebutuhan prasarana (x) dikali 100%	100,00	100,00	Kec. Rangkasbitung, kec. Kalanganyar, kec. Cipanas, kec. Malingping, kec bayah	Perhubungan	Dinas pehubungan
							2.1.4.3	Program peningkatan manajemen yang lebih efektif dalam pengaturan operasional terminal		Persentase pelayanan terminal (%)	Jumlah terminal tipe-c yang dikelola (/) dibagi jumlah terminal tipe-c (x) dikali 100%	100,00	100,00	Kec. Rangkasbitung, kec. Kalanganyar, kec. Cipanas, kec. Malingping, kec bayah	Perhubungan	Dinas pehubungan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
					2.1.5	Meningkatkan penanganan kasus kecelakaan lalu lintas	2.1.5.1	Program peningkatan penyediaan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas, traffic cone, marka jalan		Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas (satuan: %)	Jumlah pengendalian dan pengawasan lalin yang telah dilaksanakan (/) dibagi jumlah pengendalian dan pengawasan lalin yang harus dilaksanakan (x) dikali 100%	100,00	100,00	**Kabupaten Lebak**	Perhubungan	Dinas pehubungan
							2.1.5.2	Program pengendalian parkir liar		Persentase penguranganan lokasi parkir liar (%)	Jumlah parkir liar yang dikelola/jumlah total parkir liar (x) 100	N/a	100,00	Kec. Maja, kec. Rangkasbitung, kec. Warunggunung, kec. Cikulur, kec. Cipanas, kec. Muncang, kec. Cilograng, kec.bayah, kec. Wanasalam, kec.	Perhubungan	Dinas pehubungan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi pembangunan	Program berdasarkan pohon masalah	Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
										Malingping		
				2.1.5.3 Program perbaikan jaringan jalan yang memiliki kondisi rusak		Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota (%)	Jumlah jalan yang memenuhi standar kemantapan/ jumlah jalan yang dinilai (x) 100	72,32	79,00	**Kabupaten Lebak**	Perhubungan	Dinas pehubungan
				2.1.5.4 Program pengawasan pengendara sesuai dengan standar keselamatan		Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas (%)	Jumlah kecelakaan lalin tahun sebelumnya (n-1) dikurangi jumlah kecelakaan lalin tahun 2023 (n) dibagi umlah kecelakaan lalin tahun sebelumnya (n-1) (x) dikali 100%	4,35	6,00	**Kabupaten Lebak**	Perhubungan	Dinas pehubungan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
							2.1.5.5	Program peningkatan koordinasi dengan satlantas polri		Persentase peningkatan koordinasi antar stakeholder (%)	(jumlah target koordinasi dan sinkronisasi / jumlah terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi) x 100%	100,00	100,00	**Kabupaten Lebak**	Perhubungan	Dinas pehubungan
							2.1.5.6	Program peningkatan personil dalam pengawasan lalu lintas		Persentase pengendalian dan pengamanan lalu lintas (%)	Jumlah pengendalian dan pengawasan lalin yang telah dilaksanakan (/) dibagi jumlah pengendalian dan pengawasan lalin yang harus dilaksanakan (x) dikali 100%	100,00	100,00	**Kabupaten Lebak**	Perhubungan	Dinas pehubungan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
		2.3	Meningkatnya pemanfaatan dan pengembangan jaringan informasi/komunikasi	Persentase peningkatan penggunaan jaringan informasi/komunikasi (%)	2.2.1	Meningkatkan penetrasi internet dan literasi digital masyarakat	2.2.1.1	Program sosialisasi penggunaan internet		Presentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota (satuan :%)	(jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/ jumlah perangkat daerah) x 100 %	100,00	100,00	**Kabupaten Lebak**	Komunikasi dan informatika	Dinas komunikasi, informasi, statistik dan persandian
							2.2.1.2	Program penyediaan telekomunikasi yang memadai, termasuk internet dan sinyal yang lebih stabil dan		Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegra	(jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi/jumlah perangkat	100,00	100,00	**Kabupaten Lebak**	Komunikasi dan informatika	Dinas komunikasi, informasi, statistik dan persandian

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi pembangunan	Program berdasarkan pohon masalah	Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
				mencakup seluruh wilayah		si (satuan: %)	daerah) x 100 %					
						Persentase organisasi perangkat daerah (opd) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	(jumlah perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah/jumlah perangkat daerah)x 100 %	100,00	100,00	**Kabupaten Lebak**	Statistika	Dinas komunikasi, informasi, statistik dan persandian
						Persentase	Jangkauan layanan	N/a	100,00	**Kabupaten Lebak**	Komunikasi dan	Dinas komunika

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
										penduduk yang terlayani mobile broadband (satuan: %)	broadband x 100%			**Kabupaten Lebak**	informatika	si, informasi, statistik dan persandian
		2.3	Terwujudnya mitigasi dalam menghadapi risiko bencana gempa bumi, banjir , longsor dan perubahan iklim	Persentase pengendalian dan pengawasan pada wilayah resiko bencana (%)	2.3.1	Meningkatkan mitigasi bencana banjir	2.3.1.1	Program pengendalian alih fungsi lahan	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase pengendalian alih fungsi lahan (%)	Jumlah area lahan yang diawasi /jumlah total pemanfaatan ruang (x)100	N/a	100,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
							2.3.1.2	Program perbaikan saluran drainase	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Persentase saluran drainase perkotaan dalam kondisi baik (satuan: %)	Jumlah saluran drainase dalam kondisi baik/jumlah total drainase (x) 100	68,66	74,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
							2.3.1.3	Program normalisasi sungai secara berkala dan berkesinambungan	Program pengelolaan sumber daya air (sda)	Persentase normalisasi sungai (%)	Jumlah saluran drainase dalam kondisi baik/jumlah total drainase (x) 100	68,66	74,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
							2.3.1.4	Program peningkatan infrastruktur (contoh tanggul, bendung, dll)		Pembangunan infratsruktur pengendali banjir (%)	Jumlah teknologi yang dikembangkan/jumlah teknologi yang direncanakan (x) 100	N/a	75,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Badan penanggulangan bencana daerah
							2.3.1.5	Program penyediaan infrastruktur automatic weather statsion (aws), automatic water level recorder (awlr) di daerah yang sering terjadinya bencana banjir / banjir bandang						**Kabupaten Lebak**		

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
							2.3.1.6	Program penyediaan tempat evakuasi		Penyediaan tempat evakuasi (%)	Jumlah jalur dan tempat evakuasi yang disediakan/jumlah jalur dan tempat evakuasi yang direncanakan (x) 100	N/a	100,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Badan penanggulangan bencana daerah
							2.3.1.7	Program penyediaan regulasi rdtr sebagai pedoman dalam perencanaan dan pemanfaatan ruang	Program penyelenggaraan penataan ruang	Penyediaan dokumen rencana tata ruang di susun (%)	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang tersusun/jumlah total dokumen yang direncanakan (x) 100	50,00	75,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
							2.3.1.8	Program peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang		Persentase kesesuaian tata ruang (satuan: %)	Jumlah lokasi yang sesuai dengan peraturan /jumlah total pemanfaatan ruang (x)100	75,00	80,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
							2.3.1.9	Program penyediaan masterplan yang terintegrasi dalam pengendalian di kawasan rawan bencana banjir	Program penanggulangan bencana	Penyediaan masterplan kawasan rawan bencana banjir (%)	Jumlah dokumen masterplan banjir yang tersusun/ jumlah total dokumen masterplan yang direncanakan (x) 100	N/a	100,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
							2.3.1.10	Program penyediaan dokumen rencana penanggulangan bencana		Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal (satuan: %)	Jumlah dokumen krb, renkon yang di sahkan	100,00	100,00	**Kabupaten Lebak** **Kabupaten Lebak**	Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Badan penanggulangan bencana daerah
							2.3.1.11	Program sosialisai daerah rawan banjir		Persentase sosialisasi daerah rawan banjir(%)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan /jumlah kegiatan yang	N/a	100,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Badan penanggulangan bencana daerah

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi pembangunan	Program berdasarkan pohon masalah	Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
							dilaksanakan (x)100					
				2.3.1.12 Program pendataan peta lokasi rawan banjirr berdasarkan data historis		Presentase lokasi rawan banjir yang terdata (%)	Jumlah lokasi rawan longsor yang terdata/jumlah total lokasi rawan banjir (x) 100	N/a	100,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Badan penanggulangan bencana daerah
						Persentase berkurangnya kawasan yang terkena dampak banjir (satuan: %)		85,70	100,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Badan penanggulangan bencana daerah
				2.3.1.13 Program penerapan teknologi baru dalam kegiatan mitigasi bencana		Pengembangan teknologi mitigasi bencana (%)	Jumlah teknologi yang dikembangkan/jumlah teknologi yang direncanakan (x) 100	N/a	100,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Badan penanggulangan bencana daerah

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
							2.3.1.14	Program peningkatan memilah dan membuang sampah dengan skema 3r	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regiona	Persentase pengolahan sampah skema 3r (%)	Jumlah sampah yang dikelola dengan skema 3r/jumlah sampah yang dikelola (x) 100	N/a	100,00	**Kabupaten Lebak**	Lingkungan hidup	Dinas lingkungan hidup
							2.3.1.15	Program sosialisasi kepada masyarakat terkait adaptasi agar terhindari dari daerah rawan banjir	Program penanggulangan bencana	Persentase sosialisasi terkait adaptasi banjir (%)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan /jumlah kegiatan yang dilaksanakan (x)100	100,00	100,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Badan penanggulangan bencana daerah
							2.3.1.16	Program sosialisasi terkait perilaku membuang sampah	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regiona	Persentase sosialisasi perilaku membuang sampah (%)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan /jumlah kegiatan yang dilaksanakan (x)100	N/a	100,00	**Kabupaten Lebak**	Lingkungan hidup	Dinas lingkungan hidup

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
					2.3.2	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi resiko banjir	2.3.2.1	Program peningkatan kapasitas masyarakat dibidang mitigasi bencana banjir	Program penanggulangan bencana	Persentase masyarakat yang mendapatkan sosialisasi mitigasi bencana banjir (%)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan /jumlah kegiatan yang dilaksanakan (x)100	N/a	100,00	**Kabupaten Lebak** **Kabupaten Lebak** **Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Badan penanggulangan bencana daerah
					2.3.3	Meningkatkan mitigasi bencana longsor	2.3.3.1	Program peningkatan infrastruktur mitigasi pada daerah yang memiliki kelerengan curam		Persentase penyediaan infrastruktur mitigasi longsor (%)	Jumlah infrastruktur yang disediakan/jumlah yang direncanakan (x) 100	N/a	100,00	**Kabupaten Lebak** **Kabupaten Lebak** **Kabupaten Lebak** **Kabupaten Lebak** **Kabupaten Lebak** **Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
							2.3.3.2	Program pemeliharaan drainase di lereng yang memiliki	Program pengelolaan dan pengembangan	Persentase jalan dalam kota kabupaten yang	Jumlah saluran drainase dalam kondisi baik/jumlah	25,00	50,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi pembangunan	Program berdasarkan pohon masalah	Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
				tingkat resiko longsor	sistem drainase	memiliki trotoar dan drainase/ saluran (satuan: %)	total drainase (x) 100					
				2.3.3.3 Program pengendalian bangunan pada wilayah rawan longsor	Program penyelenggaraan penataan ruang	Persentase pengendalian bangunan pada wilayah rawan longsor (%)	Jumlah bangunan yang dikenakan pengendalian /jumlah bangunan di wilayah longsor (x)100	N/a	100,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
				2.3.3.4 Program pengendalian pengunduan hutan		Persentase pengendalian pengunduan hutan (%)	Jumlah kasus pengundulan yang dikenakan pengendalian/ jumalah kasus penggundulan hutan (x)100	N/a	100,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas lingkungan hidup
				2.3.3.5 Program pengawasan alih fungsi lahan		Persentase ketaatan terhadap izin lingkunga	Jumlah area lahan yang diawasi /jumlah total pemanfaatan ruang (x)100	20,00	50,00	**Kabupaten Lebak** **Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas lingkungan hidup

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
										n (satuan: %)						
										Persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah (satuan: %)	(jumlah target koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penatagunaan tanah/ jumlah terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penatagunaan tanah) x 100%	100,00	100,00	**Kabupaten Lebak**	Pertanahan	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan
							2.3.3.6	Program pemberian sanksi pada pelanggaran pembangunan diwilayah rawan longsor		Persentase pemberian sanksi pada pelanggaran tata ruang (%)	Jumlah pelanggaran yang dikenakan sanksi/ jumlah total pelanggaran pemanfaaan ruang	N/a	100,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas pekerjaan umum dan penataa ruang

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
							2.3.3.7	Program pengendalian pencemaran air		Peningkatan indeks kualitas air (satuan: poin)	Jumlah lokasi yang sesuai dengan peraturan /jumlah total pemanfaatan ruang (x)100	57,00	65,00	**Kabupaten Lebak**	Lingkungan hiduo	Dinas lingkungan hidup
					2.3.4	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi resiko longsor	2.3.4.1	Program penyediaan dokumen rencana penanggulangan bencana (rpb)	Program penanggulangan bencana	Presentase dokumen rencana penanggulangan bencana di susun (satuan : %)	Jumlah dokumen kajian resiko bencanayang tersusun /jumlah total dokumen yang direncanakan	N/a	100,00	**Kabupaten Lebak** **Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Badan penanggulangan bencana daerah
							2.3.4.2	Program penerapan teknologi (warning system atay teknologi bencana longsor)		Persentase penyediaan dan penerapan teknologi mitigasi bencana longsor (%)	Jumlah teknologi yang dikembangkan/jumlah teknologi yang direncanakan (x) 100	N/a	100,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Badan penanggulangan bencana daerah
							2.3.4.3	Program pendataan peta lokasi rawan longsor		Presentase lokasi rawan longsor yang	Jumlah lokasi rawan longsor yang terdata/jumlah total	N/a	100,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Badan penanggulangan bencana daerah

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
								berdasarkan data historis		terdata (%)	lokasi rawan longsro (x) 100					
							2.3.4.4	Program sosialisai daerah rawan longsor		Persentase sosialisasi daerah rawan longsor (%)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan /jumlah kegiatan yang dilaksanakan (x)100	N/a	100,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Badan penanggulangan bencana daerah
							2.3.4.5	Program peningkatan kapasitas sdm dalam mitigasi bencana longsor		Persentase masyarakat yang mendapatkan mitigasi bencana longsor (%)	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan /jumlah kegiatan yang dilaksanakan (x)100	N/a	100,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Badan penanggulangan bencana daerah
					2.3.5	Meningkatkan mitigasi bencana gempa bumi	2.3.5.1	Program peningkatan infrastruktur mitigasi pada daerah yang memiliki kelerengan curam		Persentase penyediaan infrastruktur mitigasi gempa (%)	Jumlah infrastruktur yang disediakan/jumlah yang direncanakan (x) 100	N/a	100	**Kabupaten Lebak** **Kabupaten Lebak** **Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Badan penanggulangan bencana daerah

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi pembangunan	Program berdasarkan pohon masalah	Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
				2.3.5.2 Program penyediaan jalur dan tempat evakuasi		Persentase penyediaan jalur dan tempat evakuasi (%)	Jumlah jalur dan tempat evakuasi yang disediakan/jumlah jalur dan tempat evakuasi yang direncanakan (x) 100	N/a	75,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Badan penanggulangan bencana daerah
				2.3.5.3 Program penyediaan dokumen rencana penanggulangan bencana (rpb)		Presentase dokumen rencana penanggulangan bencana di susun (satuan : %)	Jumlah dokumen kajian resiko bencanayang tersusun /jumlah total dokumen yang direncanakan	N/a	75,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Badan penanggulangan bencana daerah
				2.3.5.4 Program pengendalian dan pengawasan pembangunan pemukiman pada wilayah rawan gempa		Persentase penataan bangunan dan lingkungan (%)	Jumlah lokasi yang sesuai dengan peraturan /jumlah total pemanfaatan ruang (x)100	3,30	4,50	**Kabupaten Lebak** **Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
					2.3.6	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi resiko gempa bumi	2.3.6.1	Program peningkatan kapasitas sdm dalam mitigasi bencana gempa bumi		Persentase masyarakat yang mendapatkan mitigasi bencana gempa	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan /jumlah kegiatan yang dilaksanakan (x)100	N/a	100,00	**Kabupaten Lebak** **Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Badan penanggulangan bencana daerah
					2.3.7	Meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi perubahan iklim	2.3.7.1	Program sosialisasi peningkatan kesadaran kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim		Persentase sosialisai terkait perubahan iklim (%)		N/a	100,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Badan penanggulangan bencana daerah
							2.3.7.2	Program penyediaan kebijakan dan rencana aksi terkait perubahan iklim		Penerapan energi terbarukan (%)		N/a	100,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas pekerjaan umum dan penataa ruang
		2.4	Meningkatnya penyediaan sarana prasarana perumahan	Persentase peningkatan penyediaan sarana dan prasarana perumahan	2.4.1	Melakukan penguran gan dan penangan	2.4.1.1	Program sosialisasi terhadap masyarakat terkait	Program pengembangan sistem dan pengelola	Indeks infrastruktur dasar (%)	(persentase akses air minum + persentase akses sanitasi +	72,85	79,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas pekerjaan umum dan penataa ruang

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi pembangunan	Program berdasarkan pohon masalah	Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
	dan pemukiman serta kualitas lingkungan	dan pemukiman (%)	an sampah	perilaku hidup sehat	an persampahan regiona		persentase masyarakat yang menghuni rumah layak huni) dibagi 3					
					Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui spam jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota (satuan: %)		74,30	80,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi pembangunan	Program berdasarkan pohon masalah	Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
				2.4.1.2 Program sosialisasi masyarakat terkait pengelolaan lingkungan	Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regiona	Presentase jumlah sampah yang terkelola (%)	Jumlah sampah yang dikelola/timbulan sampah	42,68	58,00	**Kabupaten Lebak**	Lingkungan hidup	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan
				2.4.1.3 Program peningkatan kesejahteraan ekonomi rumah tangga	Program pengembangan permukiman	Berkurangnya jumlah unit rtlh (rumah tidak layak huni) (satuan: %)	(jumlah rumah tidak layak huni/ jumlah rumah di kab. Lebak) x 100%	12,85	14,00	**Kabupaten Lebak**	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan
						Persentase masyarakat yang menghuni rumah layak huni (satuan: %)	(jumlah masyarakat yang menghuni rumah layak huni/ jumlah penduduk kab. Lebak) x 100%	85,73	100,00	**Kabupaten Lebak**	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman	Dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan
				2.4.1.4 Program peningkatan partisipasi	Program pengembangan sistem	Presentase penguranggan	Jumlah sampah yang dapat dikurangi/pro	25,40	40,00	**Kabupaten Lebak**	Lingkungan hidup	Dinas lingkungan hidup

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi pembangunan	Program berdasarkan pohon masalah	Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
				masyarakat dalam pengurangan sampah	dan pengelolaan persampahan regiona	sampah (%)	duksi sampah					
						Persentase timbulan sampah yang didaur ulang	(jumlah sampah yang didaur ulang / produksi sampah) x 100%	N/a	100,00	**Kabupaten Lebak**	Lingkungan hidup	Dinas lingkungan hidup
				2.4.1.5 Program peningkatan intervensi pemerintah dalam penanganan dan pengurangan sampah		Presentase penanganan sampah (%)	Jumlah sampah yang dikelola/timbulan sampah	17,28	23,00	**Kabupaten Lebak**	Lingkungan hidup	Dinas lingkungan hidup
				2.4.1.6 Program peningkatan prasarana persampahan		Presentase jumlah penyediaan prasarana persampahan (%)	Jumlah prasarana yang disediakan (/) dibagi jumlah prasarana yang direncanakan (x) dikali 100%	N/a	25,00	**Kabupaten Lebak**	Lingkungan hidup	Dinas lingkungan hidup

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
					2.4.2	Mengembangkan akses sanitasi yang aman dan layak serta meningkatkan pengelolaan lingkungan	2.4.2.1	Program peningakatan kesadaran masyarakat untuk perilaku hidup sehat	Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase akses sanitasi (air limbah) (satuan: %)	Jumlah individu/rumah tangga yang mendapatkan akses/jumlah total populasi yang ditargetkan (x) 100	73,45	77,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
										Persentase cakupan air minum (satuan: %)		74,30	80,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
										Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik		73,45	80,00	**Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi pembangunan	Program berdasarkan pohon masalah	Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
				2.4.2.2 Program peningkatan pengetahuan masyarakat terkait pengelolaan lingkungan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Indeks kualitas lingkungan hidup (iklh) (satuan: indeks)	(nilai indeks periode saat ini−nilai indeks periode sebelumnya) /nilai indeks periode sebelumnya (x)100	61,03	70,00	**Kabupaten Lebak**	Lingkungan hidup	Dinas lingkungan hidup
					Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pengaduan lingkungan yang tertangani (satuan: %)		273,00	300,00	**Kabupaten Lebak**	Lingkungan hidup	Dinas lingkungan hidup
						Peningkatan indeks kualitas udara (satuan: poin)		75,48	80,00	**Kabupaten Lebak**	Lingkungan hidup	Dinas lingkungan hidup
						Peningkatan indeks kualitas tutupan lahan (satuan: poin)		39,83	46,44	**Kabupaten Lebak**	Lingkungan hidup	Dinas lingkungan hidup

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program beradasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
							2.4.2.3	Program peningkatan sarana prasarana sanitasi	Program pengembangan permukiman	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan (%)	Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi layak dan berkelanjutan/jumlah rumah tangga yang ditargetkan (x) 100	N/a	25,00	**Kabupaten Lebak** **Kabupaten Lebak** **Kabupaten Lebak** **Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
					2.4.3	Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan jaringan drinase	2.4.3.1	Program sosialisasi masyarakat terkait pengelolaan lingkungan	Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	Presentase jumlah drainase yang terpelihara (%)	Jumlah drainase yang dikelola/timbulan sampah	N/a	25,00	**Kabupaten Lebak**	Lingkungan hidup	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
							2.4.3.2	Program penyediaan masterplan drainase		Penyediaan masterplan drainase (%)	Jumlah dokumen masterplan yang tersusun/ jumlah total dokumen masterplan yang direncanakan (x) 100	N/a	100,00	**Kabupaten Lebak** **Kabupaten Lebak** **Kabupaten Lebak**	Pekerjaan umum dan penataan ruang	

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

5.4.2.3 Klaster Pemerintah

Tabel 5-9 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program dan Target Pembangunan Klaster Pemerintah

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
3	Optimalisasi sistem tata kelola pemerintah dalam memberikan pelayanan yang menjangkau	3.1	Meningkatnya pelayanan penjagaan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	IKM terhadap pelayanan publik Indeks Reformasi Birokrasi	3.1.1	Meningkatkan Presentase Ormas yang terbina di Kab. Lebak	3.1.1.1	Program pendataan ormas di Kab. Lebak	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Presentase jumlah ormas yang terdaftar	(Jumlah Ormas yang terdata/ jumlah seluruh Ormas) X 100%	NA	100	Kabupaten Lebak	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	seluruh wilayah di Kab. Lebak						3.1.1.2	Program pengelolaan organisasi masyarakat	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Pembinaan terhadap Ormas/LSM (Satuan: %)	(Jumlah ORMAS yg mengikuti pembinaan / jumlah Ormas yg terdaftar di Badan Kesbangpol) X 100%	28	60	**Kabupaten Lebak**	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							3.1.1.3	Program peningkatan partai berbadan hukum	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	Presentase Jumlah parpol uang berbadan hukum (Satuan: %)	(Jumlah parpol berbadan hukum/ parpol yang terdaftar) X 100%	NA	100	**Kabupaten Lebak**	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					3.1.2	Meningkatkan pemahaman ideologi dan wawasan kebangsaan masyarakat kabupaten lebak	3.1.2.1	Program edukasi potensi radikalisme/terorisme	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Prosentase Terlaksananya Peningkatan toleransi dan pembinaan keagamaan (Satuan: %)	(Jumlah mayarakat yg mengikuti kegiatan pembinaan umat beragama / Jumlah masyarakat yang di undang dalam kegiatan pembinaan umat beragama) X 100%	70	100	**Kabupaten Lebak**	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							3.1.2.2	Program edukasi politik masyarakat	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik	jumlah kegiatan edukasi politik	Adanya kegiatan edukasi politik masyarakat (satuan : kegiatan)	NA	5	Kabupaten Lebak	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							3.1.2.3	Program sosialiasi / edukasi potensi penguatan ideologi pancasila	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan penyelenggaraan Sosialisasi dan Edukasi Penguatan Ideologi Pancasila	(Jumlah penyelenggaraan Sosialisasi dan Edukasi Penguatan Ideologi Pancasila yang	64	100	Kabupaten Lebak	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										(Satuan: %)	terlaksana / Jumlah kebutuhan penyelenggaraan Sosialisasi dan Edukasi penguatan Ideologi) X 100 %					
					3.1.3	Meningkatkan kinerja organisasi kemasyarakatan / LSM di Kab. Lebak	3.1.3.1	Program pembinaan ormas/LSM	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas/LSM yang terbina (Satuan: %)	(Jumlah ormas/LSM yang terdata di Badan Kesbangpol) / (Jumlah ormas/LSM yang dibina) x 100 %	75.00	100	**Kabupaten Lebak**	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							3.1.3.2	Program peningkatan cakupan Penyelenggaraan Pembinaan P4GN, PAKEM, dan FKUB	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan P4GN, PAKEM, dan FKUB (Satuan: %)	(Jumlah penyelenggaraan pembinaan P4GN, PAKEM, dan FKUB yang terlaksana / jumlah kebutuhan penyelenggaraan pembinaan P4GN, PAKEM, dan FKUB) X 100 %	61.00	100	**Kabupaten Lebak**	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							3.1.3.3	Program pemenuhan kebutuhan Koordinasi Jaringan Deteksi Dini, FKDM dan Forum Kominda	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Prosentase terpenuhinya kebutuhan Koordinasi Jaringan Deteksi Dini,	(Jumlah pelaksanaan koordinasi Jaringan Deteksi Dini, FKDM dan Forum Kominda / Jumlah Kebutuhan	70	100	**Kabupaten Lebak**	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										FKDM dan Forum Kominda (Satuan: %)	Koordinasi Jaringan Deteksi Dini, FKDM dan Forum Kominda) X 100 %					
					3.1.4	Meningkatkan ketahan/resiliensi Kab. Lebak terhadap bencana kebakaran	3.1.4.1	Program Peningkatan Waktu Tanggap Kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response time) pengaduan kebakaran (<15 Menit Setelah Pengaduan) (Satuan: %)	Jumlah penanggulangan kebakaran dalam response time dibagi Jumlah kejadian kebakaran dalam jangkauan response time dikali 100	91.14	100	Kabupaten Lebak	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							3.1.4.2	Program peningakatan cakupan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatan terhadap bahaya kebakaran (Satuan: %)	Jumlah penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dibagi Jumlah kejadian kebakaran dikali 100	89.06	100	**Kabupaten Lebak**	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
							3.1.4.3	Program Edukasi masyarakat dalam menghadapi bencana	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran, dan penyelamatan non kebakaran	Presentase Jumlah warga yang memperoleh layanan informasi mitigasi bencana kebakaran	Jumlah warga yang mendapatkan informasi mitigasi bencana kebakaran	NA	100	**Kabupaten Lebak**	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
					3.1.5	Malakukan Pembinaan, Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	3.1.5.1	Program Penertiban usaha izin lokasi	Program Peningkatan Ketenteraman dan Penertiban Umum	Cakupan pelaksanaan koordinasi pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan		NA	100	Kabupaten Lebak	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
										Persentase penegakan Perda	Jumlah pelanggaran perda yg ditindaklanjuti dibagi Jumlah pelanggaran perda yg diadukan/ditemukan dikali 100	100	100	Kabupaten Lebak	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3.2	Optimalisasi pelayanan sistem kependudukan , pencatatan sipil dan admintrasi pemerintahan berbasis elektronik di seluruh wilayah	Indeks SPBE	3.2.1	Peningkatan kapasitas pelayanan masyarakan dalam melayani pendataan kependudukan dan pencatatan sipil berbasis elektronik	3.2.1.1	Program peningkatan sarana perekaman E-KTP	Program Pencatatan Sipil	Alat perekaman E-KTP	Tersedianya alat perekaman E-KTP	NA	Alat perekaman cukup sesuai kebutuhan	Kabupaten Lebak	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							3.2.1.2	Program peningkatan honor tenaga operator administrasi kependudukan dan catatan sipil	Program Pencatatan Sipil	Presentase tenaga operator yang mendapat honor sesuai dengan peraturan	Jumlah tenaga operator yang mendapat honor seesuai dengan peraturan dibagi total tenaga operator dikali 100	NA	100	Kabupaten Lebak	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							3.2.1.3	Program peningkatan pencetakan E- KTP dan KIA	Program Pencatatan Sipil	Prosentase Kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dibagi jumlah	NA	100	Kabupaten Lebak	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										(Satuan: %)	penduduk kabupaten lebak dikali 100					
							3.2.1.4	Program sosialisasi penggunaan KTP Digital	Program Pencatatan Sipil	jumlah kegiatan sosialisasi KTP Digital	jumlah kegiatan sosialisasi KTP Digital	NA	1 kegiatan / tahun	**Kabupaten Lebak**	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							3.2.1.5	Program sosialiasi prosedur pernikahan dan perceraian pada tingkat desa	Program Pencatatan Sipil	Prosentase Penduduk yang mendapatkan layanan Akte Perkawinan dan Akte Perceraian sesuai	Jumlah pendududk yang mendapatkan layanna akte perkawinan dan akte perceraian dibagi jumlah pendududk yang	NA	100	**Kabupaten Lebak**	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										SOP (Satuan: %)	mengajukan layanan dikali 100%					
							3.2.1.6	Program pelatihan SDM dalam pencatatan data	Program Pendaftaran Penduduk	Presentase jumlah SDM PMD yang mendapat pelatihan	Jumlah SDM yang mendapat pelatihan dibagi jumlah SDM dikali 100	NA	100	**Kabupaten Lebak**	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					3.2.2	Integrasi sistem adminstrasi pemerintahan untuk menunjang	3.2.2.1	Program pembentukan data base yang terintegrasi	Program Pengelolaan dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	NA	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berba	**Kabupaten Lebak**	Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						pelayanan publik				Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan		sis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi			Satu Pintu
							3.2.2.2	Program penyederhanaan birokrasi melalui integrasi sistem pelayanan terpadu satu pintu	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	NA	Tersedianya Pelayanan Perizinan secara elektronik	**Kabupaten Lebak**	Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Elektronik						
		3.3	Meningkatnya kinerja tata kelola pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	3.3.1	Meningkatkan sistem pelayanan pemerintah kepada masyrakat	4.3.1.1	Program peningkatan sistem penyerapan aspirasi masyarakat	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100	100	Kabupaten Lebak	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah
				Maturitas SPIP	3.3.2	Meningkatkan kinerja sistem administrasi dan pengelola	4.3.2.1	Program peningkatan cakupan penyelenggaraan administrasi perkantoran	Program penunjang urusan pemerintahan daerah			100	100	Kabupaten Lebak	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	Sekretariat Daerah

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						an arsip daerah pemerintahan daerah			kabupaten/kota							
							4.3.2.2	Program pemeliharaan dokumen keuangan Setda	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Keuangan Setda yang terpelihara (Satuan: dokumen)	Jumlah Dokumen Keuangan Setda yang terpelihara (Satuan: dokumen)	10	11	**Kabupaten Lebak**	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
							4.3.2.3	Program pengarsipan dokumen pemerintah daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Presentase Tertibnya Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Daerah (Satuan: %)	Jumlah Arsip yang dikelola / jumlah seluruh dokumen arsip dikali 100	NA	100	**Kabupaten Lebak**	Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		3.4	Meningkatnya kapasitas aparatur negara dalam memberikan pelayanan	Sistem Merit	3.4.1	Meningkatkan kompetensi SDM aparatur negara	3.4.1.1	Program Penyelenggaraan Diklat bagi sumberdaya manusia	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat manajerial (Satuan: %)	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat dibagi jumlah total pejabat struktural	73.90	100	Kabupaten Lebak	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
										Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis (Satuan: %)	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat teknis dibagi total ASN	19,49	100	Kabupaten Lebak	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
						Meningkatkan jumlah SDM di lapangan	3.4.1.2	Penyusunan rencana kenutuhan SDM perangkat daerah	Program Kepegawaian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan	NA	1 Dokumen	Kabupaten Lebak	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN					
							3.4.1.3	Program peningkatan jumlah SDM perangkat daerah	Program Kepegawaian Daerah	Jumlah SDM perangkat daerah	Jumlah SDM yang sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	NA	Jumlah SDM yang sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah	**Kabupaten Lebak**	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		3.5	Meningkatnya kapasitas fiskal daerah	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah	3.5.1	Meningkatkan alternatif sumber keuangan daerah	3.5.1.1	Program peningkatan kapasitas SDM dalam melakukan analisis keuangan daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah SDM perangkat daerah pada bidang keuangan yang melaluka		NA		**Kabupaten Lebak**	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										n pelatihan						
				Opini BPK	3.5.2	Meningkatkan pertumbuhan pajak daerah	3.5.2.1	Program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			NA		Kabupaten Lebak	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah
							3.5.2.2	Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase ketaatan wajib pajak daerah (Satuan: %)	Wajib Pajak Yang Sudah Bayar / Wajib Pajak Yang Terdaftar x 100%	66.41	100	Kabupaten Lebak	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah
							3.5.2.3	Program pendataan/dokumentasi aset daerah	Program Pengelolaan Pendapat	Prosentase Jumlah Aset Yang	(Jumlah Aset Yang Sesuai / Jumlah Seluruh	48	100	Kabupaten Lebak	Keuangan	Badan Pendapatan Daerah

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									an Daerah	terinventarisasi, terindentifikasi dan terdokumentasi Dengan Total Seluruh Aset Yang Dimiliki Pemerintah Kabupaten Lebak (Satuan: %)	Aset Yang Dimilki) X 100 %					
		3.6	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Desa	Persentase peningkatan status desa mandir	3.6.1	Meningkatkan pengelolaan pemerintahan desa	3.6.1.1	Program pembentukan BUMDes	Program Pemnberdayaan Masyarakat Desa dan Keluraha n	Persentase Terbentuk BUMDes yang Aktif (Satuan: persen)	Jumlah BumDes yang aktif dibagi jumlah bumdes yang ada dikali 100%	25.00	100	**Kabupaten Lebak**	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				i (Satuan: %)			3.6.1.2	Program pembangunan sapras perdesaan yang melibatkan masayarakat	Program Pemnberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	persentase pembangunan sapras perdesaan yang melibatkan masayarakat (Satuan: persen)	Jumlah desa yang pembangunan sarpras perdesaan yang melibatkan masyarakat dikali jumlah desa yang ada dikali 100%	70.00	100	**Kabupaten Lebak**	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							3.6.1.3	Program pengembangan LKD yang produktif	Program Pemnberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase LKD yang produktif (Satuan: persen)	Jumlah LKD yang produktif dibagi jumlah LKD yang ada dikali 100%	20.00	100	**Kabupaten Lebak**	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							3.6.1.4	Program pengembangan sarana usaha masyarakat	Program Pemnberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase sarana usaha masyarakat yang berkembang	Jumlah Bumdes yang berkembang dibagi jumlah bumdes	25.00	100	**Kabupaten Lebak**	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										(Satuan: persen)	yang aktif dikali 100%					
							3.6.1.5	Program Pengemabangan Keswadyaan Masyarakat dalam Kegiatan pembangunan Desa	Program Pemnberdayaan Masyarakat Desa dan Keluraha n	Persentase Keswadyaan Masyarakat dalam Kegiatan pembangunan Desa (Satuan: persen)	Jumlah Keswadayaan masyarakat yang ada dibagi jumlah desa yang ada dikali 100%	70.00	100	Kabupaten Lebak	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							3.6.1.6	Program peningkatan kerjasama antar desa	Program Pemnberdayaan Masyarakat Desa dan Keluraha n	Persentase pemerintahan desa yang telah melakukan kerjasama antar desa	Jumlah Desa yang terbina dibagi jumlah desa yang ada dikali 100%	24.00	100	Kabupaten Lebak	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										(Satuan: %)						
							3.6.1.7	Program peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkinerja baik.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berkinerja baik (Satuan: %)	Jumlah pemerintah desa yang berkinerja baik dibagi jumlah pemerintahan desa yang ada dikali 100%	24.00	100	**Kabupaten Lebak**	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							3.6.1.8	Program peningkatan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat yang Aktif	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum	Jumlah lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang aktif dibagi	10.00	100	**Kabupaten Lebak**	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Adat yang Aktif (Satuan: %)	jumlah lembaga kemasyarakat, lembaga adat dan masyarakat hukum adat yang ada dikali 100%					
					3.6.2	Meningkatkan pembangunan pada Tingkat desa	3.6.2.1	Program penataan Desa	Program Penataan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang penataan Desanya terkelola dengan baik (Satuan: %)	Jumlah pemerintahan desa yang penataan desanya terkelola dengan baik dibagi jumlah desa yang ada dikali 100%	24.00	100	**Kabupaten Lebak**	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
							3.6.2.2	Program pengentasan desa tertinggal	Program Penataan Desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa berkembang dibagi jumlah desa	45.00	100	**Kabupaten Lebak**	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

DRAFT TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan Pembangunan Klaster		Sasaran		Indikator Sasaran	Strategi Pembangunan		Program berdasarkan Pohon Masalah		Program berdasarkan Nomenklatur	Indikator Program	Definisi/Pengukuran	Kondisi Baseline (2023)	Target Capaian (2029)	Lokasi	Urusan Pemerintahan	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										(Satuan: %)	teringgal n-1 dikali 100%					

5.4.2.4 Klaster Ekonomi

Tabel 5-10 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program dan Target Pembangunan Klaster Ekonomi

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
4	Optimalisasi pemanfaataan sda dan nilai tambah produk	4.1	Meningkatnya daya saing umkm dan koperasi	Persentase peningkatan daya saing umkm dan	4.1.1	Meningkatkan pelaksanaan koperasi aktif	4.1.1.1	Program peningkatan edukasi tentang manfaat koperasi	Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Persentase sdm terkait koperasi (%)	Jumlah anggota koperasi yang mendapatkan pelatihan/jumlah total (x) 100	N/a	10,00	Kabupaten Lebak	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Dinas koperasi usaha kecil dan menengah

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
	unggulan			koperasi (%)			4.1.1.2	Program peningkatan kerjasama diantara anggota koperasi atau dengan pihak eksternal	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi aktif (satuan: %)	Jumlah koperasi yang melaksanakan rat di tahun (n) dibagi dengan jumlah koperasi di tahun (n-1) x 100	9,50	41,12	Kabupaten Lebak	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Dinas koperasi usaha kecil dan menengah
					4.1.2	Meningkatkan koperasi yang berkinerja baik	4.1.2.1	Program peningkatan intervensi pemerintah dalam melakukan pembinaan koperasi		Persentase koperasi berkinerja baik (%)	Jumalah koeprasi yang melaksanakan rat di tahun (n) dibagi dengan jumlah koperasi di tahun (n-1) x 100	9,95	18,00	Kabupaten Lebak	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Dinas koperasi usaha kecil dan menengah
							4.1.2.2	Program peningkatan manajemen koperasi	Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase koperasi sehat (%)	Jumalh koperasi sehat di tahun (n) di bagi dengan jumlah koperasi di tahun (n-1) x 100	3,32	4,97	Kabupaten Lebak	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Dinas koperasi usaha kecil dan menengah

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
					4.1.3	Melakukan pembinaan untuk sdm yang kompeten	4.1.3.1	Program pelaksanaan pelatihan sdm	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	Persentase pengurus dan pengawai yang kompeten (%)	Jumalh pengurus dan pengawas yang memiliki sertifikasi keahlian perkoperasian di bagi dengan jumlah pengurus dan pengawas koperasi x 100	5,89	10,00	Kabupaten Lebak	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Dinas koperasi usaha kecil dan menengah
							4.1.3.2	Program peningkatan penyediaan sdm						Kabupaten Lebak		
					4.1.4	Mengembangkan peran umkm untuk berdaya saing dan berperan dalam menggerakan ekonomi lokal	4.1.4.1	Progran penyediaan legalitas untuk umkm		Persentase usaha mikro ke usaha kecil (satuan: %)	Jumlah usaha kecil tahun (n) di bagi dengan jumlah usaha mikro tahun (n) x 100	0,014	0,018	Kabupaten Lebak	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Dinas koperasi usaha kecil dan menengah
							4.1.4.2	Program peningkatan kualitas manajemen para pengusaha industri		Rasio kewirausahaan (%)	Jumalh usaha mikro yang menetap tahun (n) dibagi dengan jumlah penduduk	0,050	0,34	Kabupaten Lebak	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Dinas koperasi usaha kecil dan menengah

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
								kecil dan industri rumah tangga								
							4.1.4.3	Program peningkatan motivasi dalam berdaya saing		Persentase umk yang berdaya saing (%)	Jumlah umkm yang terakses kelayanan keuangan dibagi dengan jumlah koperasi umkm x 100	5,09	20,81	Kabupaten Lebak	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Dinas koperasi usaha kecil dan menengah
							4.1.4.4	Program peningkatan pengetahuan cara pengolahan yang modern dan penggunaan teknologi		produktivitas umkm(%)	(pdrb sektor industri pengolahan dibagi jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan) x 100	N/a	10,00	Kabupaten Lebak	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Dinas koperasi usaha kecil dan menengah

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
							4.1.4.5	Program penyediaan teknologi yang dapat membantu menunjang proses produksi dalam umkm kreatif	Program pengembangan umkm	presentase umkm yang memiliki standar mutu (satuan: %)	Jumlah industri kecil dan menengah yang mmeiliki standar mutu/ jumlah total industri kecil dan menengah	N/a	10,00	Kabupaten Lebak	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Dinas koperasi usaha kecil dan menengah
							4.1.4.6	Program penyediaan akses dalam pemasaran hasil produk umkm dan industri kreatif	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm)	pertumbuhan umkm		N/a	10,00	Kabupaten Lebak	Koperasi, usaha kecil dan menengah	Dinas koperasi usaha kecil dan menengah
		4.2	Terwujudnya ketahanan pangan daerah	Persentase peningkatan ketahanan pangan	4.2.1	Meningkatkan inovasi dan mengembangkan agroindustri	4.2.1.1	Program peningkatan inovasi pengembangan agroindustri untuk	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan	Penguatan cadangan pangan (jumlah lokasi/jumlah cadangan	Jumlah pengadaan cadangan beras pemerintah kabupaten (kg)	9.998	20.000,00	Kabupaten Lebak	Ketahanan pangan	Dinas ketahanan pangan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
				daerah (%)				mengolah hasil pertanian, peternakan, dan perikanan menjadi barang jadi	masyarakat	pangan) (kg)						
							4.2.1.2	Program peningkatan pengetahuan penggunaan teknologi untuk produk pertanian		Pencapaian skor pola pangan harapan (pph)	Σ (% ake x bobot kelompok pangan)	93,30	96,60	Kabupaten Lebak	Ketahanan pangan	Dinas ketahanan pangan
							4.2.1.3	Program penerapan standarisasi internasional		persentase pangan aman (satuan: %)	(jumlah pangan aman/jumlah total pangan yang diuji)*100%	98,60	100,00	Kabupaten Lebak	Ketahanan pangan	Dinas ketahanan pangan
							4.2.1.4	Program pendaftaran haki		Jumlah produk hasil pencatatan atas hak	jumlah pendaftaran yang disetujui / jumlah	N/a	100,00	Kabupaten Lebak	Ketahanan pangan	Dinas ketahanan pangan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
										cipta dan hak terkait (%)	permohonan yang diterima *100					
							4.2.1.5	Program peningkatan kapasitas sdm		Persentase sdm yang berkompeten		N/a	100,00	Kabupaten Lebak	Ketahanan pangan	Dinas ketahanan pangan
							4.2.1.6	Program peningkatan akurasi data neraca bahan makanan		persentase penurunan jumlah desa rawan pangan (satuan: %)	(jumlah desa rawan pangan tahun n-1 - jumlah desa rawan pangan tahun n-1 yang masih menjadi prioritas di tahun n) / jumlah desa rawan pangan tahun n-1) * 100%	53,66	75,00	Kabupaten Lebak	Ketahanan pangan	Dinas ketahanan pangan
					4.2.2	Melakukan koordinasi antara pemangku kepentingan dalam penyediaan	4.2.2.1	Program pengoptimalan koordinasi antara pemerintah kabupate		Penanganan daerah rawan pangan/persentase desa rawan pangan	(jumlah target koordinasi dan sinkronisasi / jumlah terlaksananya	53,66	75,00	Kabupaten Lebak	Ketahanan pangan	Dinas ketahanan pangan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
						cadangan pangan		n dan pemerintah pusat		yang tertangani (satuan:%)	koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penatagunaan tanah) x 100%					
							4.2.2.2	Program pengembangan dan pembinaan klaster agroindustri daerah		Angka kecukupan gizi	Jumlah individu yang memenuhi akg/ jumlah individu yang diuji (x) 100	90	100,00	Kabupaten Lebak	Ketahanan pangan	Dinas ketahanan pangan
		4.3	Terwujudnya iklim penanaman modal	Persentase peningkatan investasi daerah (%)	4.3.1	Meningkatkan kemudahan informasi/pelayanan dalam penanaman modal	4.3.1.1	Program peningkatan kapasitas sdm	Program pelayanan penanaman moda	Indeks kepuasan masyarakat pelayanan perizinan penanaman modal (satuan: point)		83,75	92,00	Kabupaten Lebak	Penanaman modal	Dinas penanaman modal
							4.3.1.2	Program penyediaan standar pelayanan sarana	Program pengembangan iklim penanaman modal	Persentase pemanfaatan informasi penanama	Jumlah informasi yang digunakan/jumlah total	100,00	100,00	Kabupaten Lebak	Penanaman modal	Dinas penanaman modal

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
								dan prasarana		n modal (satuan: %)	informasi (x) 100					
							4.3.1.3	Program peningkatan media promosi, konten kreatif umkm	Program promosi penanaman modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten /kota (satuan: %)	nilai investasi periode sekarang−nilai investasi periode sebelumnya /nilai investasi periode sebelumnya (x) 100	0,07	7,00	Kabupaten Lebak	Penanaman modal	Dinas penanaman modal
		4.4	Meningkatnya produktivitas pertanian	Persentase peningkatan produktivitas pertanian (%)	4.4.1	Meningkatkan penyediaan bibit dan faktor produksi pertanian	4.4.1.1	Program peningkatan kompetensi dalam berusahatani, pengendalian dan penanggulangan bencana	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	pertumbuhan nilai produksi (satuan: %)	Nilai produksi periode sekarang−nilai produksi periode sebelumnya / nilai produksi periode sebelumnya (x) 100	100,00	100,00	Kabupaten Lebak	Pertanian	Dinas pertanian

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
							4.4.1.2	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Jumlah luas serangan organisme penggangu tumbuhan (opt) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan yang dikendalikan (%)	Jumlah lahan pertanian yang dapat dikendaliakan/ jumlah total lahan pertanian x 100	N/a	100,00	Kabupaten Lebak	Pertanian	Dinas pertanian
										Persentase penurunan luas lahan terdampak bencana alam dan non-alam (satuan: %)	Jumlah luas lahan yang tertangani (apbn, apbd provinsi, apbd kab, swadaya masyarakat) di bagi jumlah total lahan yang mengalami bencana alam dan non alam	53,76	100,00	Kabupaten Lebak	Pertanian	Dinas pertanian

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
							4.4.1.3	Program peningkatan produksi benih dan bibit yang berkualitas	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase meningkatnya jumlah bibit ber sklb sesuai sni (satuan: %)	Jumlah bibit bersertifikat sni periode sekarang–jumlah bibit bersertifikat sni periode sebelumnya / jumlah bibit bersertifikat sni periode sekarang (x) 100	2,00	5,00	Kabupaten Lebak	Pertanian	Dinas pertanian
					4.4.2	Meningkatkan kualitas sdm guna mengolah nilai tambah komoditas pertanian	4.4.2.1	Program peningkatan efektifitas dan efisiensi proses panen, penanganan pasca panen dan pemasaran		Pertumbuhan nilai produksi yang terjual (satuan: %)	Nilai produksi periode sekarang–nilai produksi periode sebelumnya / nilai produksi periode sebelumnya (x) 100	2,00	5,00	Kabupaten Lebak	Pertanian	Dinas pertanian
							4.4.2.2	Program peningkatan kualitas dan		Jumlah kelompok tani yang terbina	Jumlah kelompok tani terbina/ jumlah total	N/a	100,00	Kabupaten Lebak	Pertanian	Dinas pertanian

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
								kuantitas sdm pertanian			kelompok tani (x) 100					
							4.4.2.3	Program peningkatan ketertarikan masyarakat kepada sektor pertanian	Program penyuluhan pertanian	Jumlah peningkatan kelas kelompok : pemula (satuan: kelompok)	Jumlah kelompok tani yang naik kelas kelompok	1,277	1,535	Kabupaten Lebak	Pertanian	Dinas pertanian
							4.4.2.4	Program pengendalian alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Persentase usaha pertanian yang berizin (satuan: %)	Jumlah usaha pertanian yang memiliki ijin tahun 2019-2023 dibagi jumlah total usaha pertanian yang ada tahun 2019-2023 yang ada di kabupaten lebak	38,67	48,46	Kabupaten Lebak	Pertanian	Dinas pertanian

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
							4.4.2.5	Program pengembangan sentra kawasan komoditas unggulan dan komoditas potensial pertanian dan perkebunan		Jumlah produksi pertanian (satuan: ton)	Jumlah produksi pertanian (padi, palawija, hortikultura dan perkebunan)	963.424,39	1.112.649,91	Kabupaten Lebak	Pertanian	Dinas pertanian
					4.4.3	Mengembangkan sarana prasarana pendukung pertanian	4.4.3.1	Program peningkatan intervensi pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana		persentase prasarana pertanian dan perkebunan dalam kondisi baik (satuan: %)	Jumlah prasarana pertanian tahun 2019-2023 dalam kondisi baik di bagi jumlah total prasarana pertanian tahun 2019-2023 yang di bangun/rehab	87,30	100,00	Kabupaten Lebak	Pertanian	Dinas pertanian

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
										Persentase ketersediaan air untuk irigasi (satuan: %)	Σ ketersediaan air irigasi (lt/det) pada setiap musim tanam / σ kebutuhan air irigasi (lt/det) berdasarkan rencana tata tanam x 100%	71,83	75,00	Kabupaten Lebak	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
										Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik (satuan: %)		71,83	75,00	Kabupaten Lebak	Pekerjaan umum dan penataan ruang	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
		4.5	Meningkatnya produktivitas peternakan	Persentase peningkatan produktivitas peternakan (%)	4.5.1	Meningkatkan kualitas pembibitan dan rekayasa genetik	4.5.1.1	Program peningkatan pengetahuan sdm dalam pengelolaan dan pengawasan peternakan	Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase kelompok ternak yang dibina	Jumlah target kelompok ternak dan usaha peternakan yang dibina selama satu tahun rumusnya adalah u1/u2 x100% ui= kelompok ternak dan usaha peternakan yg akan dibina selama satu tahun u2= jumlahkelompok ternak dan usaha peternakan yang dibina selama satu tahun,	100,00	100,00	Kabupaten Lebak	Pertanian	Dinas peternakan dan kesehatan hewan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
							4.5.1.2	Program peningkatan kontrol kesehatan hewan ternak (terutama pmk)		persentase peningkatan pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (satuan: %)	Jumlah peningkatan angka pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang diatrgetkan naik sebesar 1 (2%) persen pertahun yang dihitung berdasarkan hasil dari rata2 jumlah pelayanan keswan (satuan ekor), pangan asuh (100%) dan penanganan penyakit hewan menular strategis (100%)	100,00	100,00	Kabupaten Lebak	Pertanian	Dinas peternakan dan kesehatan hewan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
											rumusnya adalah : (n1)-(n-1) / (n1) x 100% n1= target tahun ini n-1= target tahun lalu					
							4.5.1.3	Program peningkatan nutrisi makan ternak	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase pelayanan kesehatan hewan (%)	Jumlah peningkatan angka pelayanan kesehatan hewan yang diatrgetkan naik sebesar 1 (2%) persen pertahun yang dihitung berdasarkan hasil dari rata2 jumlah	100,00	100,00	Kabupaten Lebak	Pertanian	Dinas peternakan dan kesehatan hewan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
											pelayanan keswan (satuan ekor), pangan asuh (100%) dan penanganan penyakit hewan menular strategis (100%) rumusnya adalah : (n1)-(n-1) / (n1) x 100% n1= target tahun ini n-1= target tahun lalu					
							4.5.1.4	Program penyediaan teknologi pembibitan ternak		Jumlah produksi daging (ton)	Jumlah ternak yang dipotong diwilayah kabupaten lebak selama 1 tahun	15.281,89	17.195,00	Kabupaten Lebak	Pertanian	Dinas peternakan dan kesehatan hewan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
					4.5.2	Mengembangkan sarana prasarana pendukung peternakan	4.5.2.1	Program peningkatan intervensi pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana		persentase prasarana dalam kondisi baik (%)	Jumlah prasarana dalam kondisi baik/total prasarana (x) 100	100,00	100,00	Kabupaten Lebak	Pertanian	Dinas peternakan dan kesehatan hewan
		4.6	Meningkatnya daya saing perikanan	Persentase peningkatan produktivitas perikanan (%)	4.6.1	Meningkatkan produksi perikanan	4.6.1.1	Program peningkatan jumlah kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Persentase ketaatan usaha perikanan (satuan: %)	Jumlah unit usaha perikanan berizin mematuhi perturan yang berlaku dibagi jumlah seluruh unit usaha perikanan yang memiliki siup dikali seratus persen	100,00	100,00	Kabupaten Lebak	Kelautan dan perikanan	Dinas perikanan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
							4.6.1.2	Program peningkatan minat dan jumlah sdm di bidang perikanan yang berkualitas dan terampil		Persentase peningkatan kelas kelompok perikanan	Jumlah kelompok perikanan yang mengalami peningkatan kelas dibagi jumlah kelompok perikanan dikali seratus persen	5,15	6,00	Kabupaten Lebak	Kelautan dan perikanan	Dinas perikanan
							4.6.1.3	Program pembinaan dan pelatihan serta pendampingan terhadap masayarakat pembudidaya ikan		Persentase peningkatan produksi ikan budidaya (%)	Kenaikan atau penurunan jumlah produksi ikan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dikali seratus persen	1,02	2,00	Kabupaten Lebak	Kelautan dan perikanan	Dinas perikanan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
							4.6.1.4	Program penyediaan teknologi pemanfaatan lahan perairan untuk usaha perikanan		Produktivitas sub sektor perikanan (satuan: rupiah)	Nilai produksi perikanan dibagi jumlah tenaga kerja sub sektor perikanan	25.187.696	26.686.004	Kabupaten Lebak	Kelautan dan perikanan	Dinas perikanan
							4.6.1.5	Program peningkatan ketersediaan sarana prasarana budidaya dan sarana alat dan armada (perikanan laut)		persentase peningkatan produksi ikan tangkap(%)	Kenaikan atau penurunan jumlah produksi ikan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dikali seratus persen	2,25	**3,00**	Kabupaten Lebak	Kelautan dan perikanan	Dinas perikanan
							4.6.1.6	Program penyediaan suplai benih		Produksi ikan budidaya (ton)	Jumlah produksi perikanan budidaya yang tersedia	3.900,29	4.000,00	Kabupaten Lebak	Kelautan dan perikanan	Dinas perikanan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
							4.6.1.7			Produksi ikan tangkap (ton)	Jumlah produksi perikanan tangkap yang tersedia	6.670,53	**6.700,76**	Kabupaten Lebak		Dinas perikanan
							4.6.1.8	Program penstabilan harga pakan ikan		Daya beli (satuan : rupiah)	Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	9.017.000	914,000,00	Kabupaten Lebak	Kelautan dan perikanan	Dinas perikanan
							4.6.1.9	Program peningkatan pendapatan nelayan		persentase ketaatan usaha perikanan (satuan: %)	Jumlah unit usaha perikanan berizin mematuhi perturan yang berlaku dibagi jumlah seluruh unit usaha perikanan yang memiliki siup dikali seratus persen	100,00	100,00	Kabupaten Lebak	Kelautan dan perikanan	Dinas perikanan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
					4.6.2	Meningkatkan nilai tambah perikanan	4.6.2.1	Program penyediaan teknologi budidaya dan tenologi pakan		Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) (ton) kabupatten/kota	Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya	10.570,82	10.700,00	Kabupaten Lebak	Kelautan dan perikanan	Dinas perikanan
							4.6.2.2	Program peningkatan investasi pada bidang usaha pengolahan dan pemasaran dengan keunggulan jenis dan kualitas produk		Persentase peningkatan pemasaran perikanan (%)		100,00	100,00	Kabupaten Lebak	Kelautan dan perikanan	Dinas perikanan
							4.6.2.3	Program peningkatan inovasi		Persentase peningkatan perikanan		100,00	100,00	Kabupaten Lebak	Kelautan dan perikanan	Dinas perikanan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
								dalam pengolahan hasil perikanan		yang telah diolah						
		4.7	Meningkatnya kontribusi kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif	Kontribusi sector pariwisata terhadap pad (satuan: %)	4.7.1	Mengembangkan budaya/tradisi lokal yang mendapat pengakuan nasional atau internasional	4.7.1.1	Program peningkatan atraksi di destinasi buatan	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase pelestarian adat budaya daerah (satuan : %)	Jumlah komunitas adat yang difasilitasi ---------- x 100% jumlah komunitaas adat yang ada	76,92	85,00	Kabupaten Lebak	Kebudayaan	dinas kebudayaan dan pariwisata
										Persentase terpenuhinya kebutuhan event seni dan budaya daerah (satuan: %)	Jumlah event seni dan budaya yang difasilitasi ---------- x 100% jumlah kebutuhan event seni dan budaya daerah	100,00	100,00	Kabupaten Lebak	Kebudayaan	Dinas kebudayaan dan pariwisata

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
							4.7.1.2	Program peningkatan aksesibilitas ke tempat destinasi wisata dan cagar budaya		Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanger a (satuan : orang)	Jumlah kunjungan periode sebelum - jumlah kunjungan periode setelah/jumlah kunjungan periode sebelum (x) 100	868	**1000**	Kabupaten Lebak	Kebudayaan	dinas kebudayaan dan pariwisata
							4.7.1.3	Program peningkatan management pengelolaan potensi obyek daya tarik wisaa		Persentase kelembagaan di 23 odtw (satuan: %)	Jumlah kelembagaan yang ada di destinasi prioritas ---------- ---------- ---------- ----- x 100%- 23 odtw	78,26	100,00	Kabupaten Lebak	Kebudayaan	dinas kebudayaan dan pariwisata
							4.7.1.4	Program peningkatan amenitas di cagar budaya dan destinasi wisata		Cakupan peningkatan sarana prasarana objek wisata dalam kondisi	"jumlah sarpras yang dibangun tahun n ---------- ---------- ---------- -------- x	83,00	85,00	- Geopark Bayah Dome - agrowisata cikapek (kecamat	Kebudayaan	dinas kebudayaan dan pariwisata

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
										baik (satuan: %)	100% jumlah destinasi prioritas"			an cimarga) - ekowisata sekitar bendungan karian (Kecamatan Sajira) - KEK Sawarna (Kecamatan Bayah) - Kota Lama Rangkasbitung (Kecamatan Rangkasbitung)		
					4.7.2	Meningkatkan rata - rata lama tinggal wisatawan	4.7.2.1	Program peningkatan perjalanan wisatawan nusantara ke kabupaten lebak	Program pemasaran pariwisat	jumlah kunjungan wisatawan nusantara (satuan: orang)	Laporan sidaku	1.012.230,00	2.000.000,00	Kabupaten Lebak	Pariwisata	dinas kebudayaan dan pariwisata

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
							4.7.2.2	Program peningkatan ijin untuk jasa usaha pariwisata	Program pemasaran pariwisata	Persentase pertumbuhan jasa usaha pariwisata (satuan: %)	"jumlah tdup tahun n ---------- x 100% total tdup s.d tahun n-1"	10,00	15,00	Kabupaten Lebak	Pariwisata	dinas kebudayaan dan pariwisata
					4.7.3	meningkatkan ketersediaan sdm baik secara kuantitas maupun kualitas yang memiliki kinerja tinggi di bidang kebudayaan dan pariwisata	4.7.3.1	Program peningkatan pengetahuan dan pemahaman para pengelola asset/nilai-nilai budaya terhadap upaya pengembangan		Presentase budaya/tradisi lokal yang mendapat pengakuan nasional atau internasional	"budaya/tradisi lokal yang diakui nasional ---------- x 100% jumlah budaya/tradisi lokal daerah"	28,95	35,00	Kabupaten Lebak	Pariwisata	dinas kebudayaan dan pariwisata

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
						serta ekonomi kreatif	4.7.3.2	Program penyediaan regulasi di bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif yang memadai sehingga menyebabkan kurangnya jaminan kepastian hukum bagi pengembangan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif		Kontribusi sektor pariwisata terhadap pdrb harga berlaku (satuan: %)	Jumlah konstribusi sektor pariwisata ---------- ---------- ---------- --- x 100% jumlah pdrb	4,60	5,70	Kabupaten Lebak	Pariwisata	dinas kebudayaan dan pariwisata
					4.7.4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas	4.7.4.1	Program peningkatan media	Program pengembangan sumber	Persentase sektor ekonomi kreatif	(pdrb sektor perdagangan dibagi jumlah	76,47	80,77	Kabupaten Lebak	Pariwisata	dinas kebudayaan dan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
						ekonomi kreatif		promosi ekonomi kreatif	daya pariwisata dan ekonomi kreatif	yang berkembang (satuan: %)	tenaga kerja sektor perdagangan) x 100					pariwisata
							4.7.4.2	Program pelatihan bagi tenaga kerja		Perentase sumber daya manusia pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif yang tersertifikasi (satuan: %)	Jumlah sdm pariwisata yang tersertifikasi ---------- x 100% jumlah sdm pariwisata yang telah dibina	20,00	35,00	Kabupaten Lebak	Pariwisata	dinas kebudayaan dan pariwisata
							2.7.4.3	Program peningkatan infrastruktur yang mendukung ekonomi kreati		Peningkatan sarana prasarana pendukung industri ekonomi kreatif (%)		N/a	25,00	Kabupaten Lebak	Pariwisata	dinas kebudayaan dan pariwisata
		2.8	Berkurangnya tingkat penggangguran	Presentase penurunan tingkat pengangguran (%)	4.8.1	Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	4.8.1.1	Program pelatihan tenaga kerja di tingkat daerah	Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi (satuan: %)	"jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi ----------	51,55	60,00	Kabupaten Lebak	Tenaga kerja	Dinas tenaga kerja

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
											- x 100% jumlah tenaga kerja keseluruhan "					
					4.8.2	Meningkatkan lapangan pekerjaan	4.8.2.1	Program peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan dengan kualifikasi tenaga kerja	Program penempatan tenaga kerja	Rasio daya serap tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap/ jumlah tenaga kerja yang tersedia (x) 100	N/a	10,00	Kabupaten Lebak	Tenaga kerja	Dinas tenaga kerja
							4.8.2.2	Program perluasan kesempatan kerja		Tingkat penganggguran terbuka (satuan: %)		7,57	8,50	Kabupaten Lebak	Tenaga kerja	Dinas tenaga kerja
		4.9	Meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi	Kontribusi sector perdagangan dan perindustrian	4.9.1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas perdagangan	4.9.1.1	Program peningkatan investasi dalam teknologi dan inovasi	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan	produktivitas sektor perdagangan (satuan: juta rupiah)	(pdrb sektor perdagangan dibagi jumlah tenaga kerja sektor perdagangan) x 100	43,00	49,00	Kabupaten Lebak	Perdagangan	Dinas perindustrian dan perdagangan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster	Sasaran	Indikator sasaran	Strategi pembangunan	Program berdasarkan pohon masalah	Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
		terhadap pad (satuan: %)			barang penting	Persentase pertumbuhan sektor perdagangan (satuan: %)	(pdrb adhb sektor perdagangan n-1) – (pdrb adhb sektor perdagangan n) dibagi pdrb adhb sektor perdagangan n-1 x 100	6	6,30	- Pasar kendang hijau (kecamatan Rangkasbitung) - Seluruh kecamatan di kabupaten lebak	Perdagangan	Dinas perindustrian dan perdagangan
						Persentase terjaganya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok (satuan: %)	Koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok : standar deviasi barang kebutuhan pokok dibagi rata-rata komoditi per bulan per tahun. Dihitung dengan memperbandingkan target stabilitas	92,00	98,00	- Pasar Ikan, Kecamatan Wanasalam - Seluruh kecamatan di kabupaten lebak	Perdagangan	Dinas perindustrian dan perdagangan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
											harga barang kebutuhan pokok dengan koefisien variasi harga kebutuhan pokok.					
									Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase proporsi produk dalam negeri yang diperdagangkan di pasar domestic (satuan: %)		90,00	100,00	Kabupaten Lebak	Perdagangan	Dinas perindustrian dan perdagangan
					4.9.2	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sdm	4.9.2.1	Program peningkatan sdm yang terampil	Program perencanaan dan pembangunan industri	produktivitas sektor industri	(pdrb sektor industri pengolahan dibagi jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan) x 100	60,00	75,00	Kabupaten Lebak	Perindustrian	Dinas perindustrian dan perdagangan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
							4.9.2.2	Program pelatihan bagi tenaga kerja		Persentase industri kecil dan menengah yang memiliki standar mutu /jumlah total ikm (satuan: %)	Jumlah ikm yang memiliki standar mutu /jumlah total ikm	75,00	90,00	Kabupaten Lebak	Perindustrian	Dinas perindustrian dan perdagangan
					4.9.3	Meningkatkan sarana prasarana pendukung perindustrian	4.9.3.1	Program peningkatan sarana prasarana yang mendukung pertumbuhan industri		pertumbuhan industri (%)	Nilai produksi periode sekarang−nilai produksi periode sebelumnya / nilai produkdi periode sekarang (x) 100	3,00	5,00	Kecamatan Cileles	Perindustrian	Dinas perindustrian dan perdagangan
										Peningkatan sarana prasarana pendukung industri ekonomi kreatif (%)		N/a	25,00	Kabupaten Lebak	Perindustrian	Dinas perindustrian dan perdagangan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

Tujuan pembangunan klaster		Sasaran		Indikator sasaran	Strategi pembangunan		Program berdasarkan pohon masalah		Program berdasarkan nomenklatur	Indikator program	Definisi/pengukuran	Kondisi baseline (2023)	Target capaian (2029)	Lokasi	Urusan pemerintahan	Perangkat daerah penanggung jawab
							4.9.3.2	Program peningkatan perizinan perindustrian dan perdagangan	Program pengendalian izin usaha industri	Persentase perusahaan berijin (satuan: %)	(jumlah industri memenuhi persyaratan perizinan : jumlah industri dalam kabupaten) x 100	99,00	100,00	Kabupaten Lebak	Perindustrian	Dinas perindustrian dan perdagangan

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

BAB 6
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 merupakan pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lebak, yang disusun sebagai upaya membangun sinergi dan keterpaduan dengan rencana pembangunan nasional maupun provinsi.

Sebagai salah satu tahap dalam penyusunan RPJMD Kab. Lebak 2025 -2029 maka kajian teknokratik perlu dilakukan. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017, Kabupaten Lebak perlu melakukan penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Lebak Tahun 2025-2029 sebagai salah satu tahapan dalam persiapan penyusunan RPJMD. Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah Daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

Kajian teknokratik ini menjadi salah satu hal yg penting dilakukan agar menjadi landasan awal sebelum adanya tahapan politis yang akan dilakukan Dengan demikian diharapkan terjalin satu keterpaduan dalam perencanaan pembangunan daerah maupun implementasinya sehingga pencapaian visi RPJMD tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien.

DRAFT - TIDAK UNTUK DICOPY

SAPPK